



RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(J P P I)
DALAM BERITA 2016-2019



RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam Berita 2016-2019

Editor:
Ari Hardianto
Budi

Desain sampul dan tata letak:
Poti & Lukman

Cetakan pertama, Oktober 2019.

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Jl. H. Ramli Selatan No. 23, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta.

RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(JPPI) DALAM BERITA 2016-2019

Hukuman Pelajar #ReformasiDikorupsi: Diskors, Dijemur, Dipukul



Massa mahasiswa, buruh dan pelajar Lampung yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) berunjuk rasa di Tugu Adi Pura Bandar Lampung, Lampung, Senin (30/9/2019). ANTARA FOTO/ Ardiansyah/ama.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 15 Oktober 2019

Ada sekolah yang memberi sanksi kepada siswa yang ikut demonstrasi #ReforasiDikorupsi. Sekolah-sekolah ini melanggar hak atas pendidikan.

tirto.id - Beberapa sekolah ternyata menghukum peserta didik yang ketahuan mengikuti demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Demikian yang ditemukan AMAR Law Firm and Public Interest Law Office setelah mereka membuka Posko Hak Atas Pendidikan sejak 29 September 2019.

Advokat AMAR Maraden Sadar mengatakan ada 72 laporan yang masuk melalui pesan elektronik, telepon, dan Google Form. Hampir setengahnya, 34 laporan, termasuk dalam kategori pelanggaran hak atas pendidikan.

Pelanggaran ini terjadi di 32 sekolah yang tersebar di 15 provinsi: Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

“Sebagian besar sekolah sudah diverifikasi,” ujar Maraden kepada reporter Tirto, Selasa (15/10/2019).

Ada tiga jenis pelanggaran hak atas pendidikan yang ditemukan: sekolah mengeluarkan surat

imbuhan untuk tidak mendukung aksi pelajar; pemberian sanksi akademis dengan ancaman dikeluarkan, menandatangani surat pengunduran diri, diberi surat peringatan, menskors, pemanggilan orangtua, dicabut dari jabatan OSIS, dilarang berpartisipasi dalam program sekolah, dan diwajibkan ikut bimbingan konseling.

Sekolah juga menerapkan sanksi hukuman fisik seperti menjemur, memukul, menendang, dan menoyor siswa.

Sayangnya tidak semua pengadu mau kasusnya ditindaklanjuti. Mereka khawatir “akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat seperti dikeluarkan dari sekolah,” kata Maraden.

Maraden, juga AMAR, mendukung para siswa. Mereka merasa siswa berhak bebas berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

“Konvensi Hak Anak mengatur kebebasan anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Pembatasan hanya melalui undang-undang bukan dengan surat edaran, ancaman, atau sanksi,” ujarnya.

Diskusi, Bukan Sanksi

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji juga tidak sepakat jika para pelajar yang turun aksi diganjar sanksi. Sekolah seharusnya jadi tempat memerdekakan pikiran, bukan sebaliknya.

Ia juga meminta penyelenggara sekolah mengajak murid-murid “untuk berdiskusi dan adu argumen” jika menganggap para siswa tidak semestinya turun aksi.

“Kesadaran di level sekolah bukan dibangun atas dasar ketakutan atas sanksi. Tapi harus dilandasi kesadaran dialogis dan dibangun dari nalar kritis,” kata Ubaid kepada reporter Tirto, Selasa (15/10/2019). “Inilah hal penting yang mesti ada di sekolah, tapi sekarang hilang.”

Kritik juga disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiyarti. “Sekolah seharusnya melakukan pembinaan terlebih dulu, bukan mengeluarkan anak,” ujar Retno kepada reporter Tirto, Selasa.

“Pembinaan pun seharusnya tidak menggunakan hukuman fisik,” katanya, karena itu sudah termasuk kekerasan kepada anak. Sekolah seharusnya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan.

“Hal ini jelas melanggar UU Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 9 ayat 1a, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain,” Retno menegaskan.

Begitu pula dengan penetapan sanksi drop out untuk murid. Menurutnya itu memperbesar potensi anak kehilangan kesempatan bersekolah. “Karena sekolah lain mungkin juga menolak menerima anak-anak tersebut.”

Ia merujuk pada undang-undang Perlindungan Anak Pasal 49 yang menyebutkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Retno mengatakan, “Pasal 31 UUD ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga. Itu dapat diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak konstitusional.”

Apabila ada pelajar atau anak yang berhadapan dengan hukum lantaran yang bersangkutan melakukan kekerasan ke aparat, katakanlah pelemparan batu, hak-hak mereka harus tetap dilindungi.

Terkait 32 sekolah yang masuk dalam daftar pengaduan AMAR, Retno mengaku sedang menunggu data resmi agar bisa segera menyambangi sekolah tersebut. “Nanti ditindaklanjuti KPAI.”

Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R Luddin mengaku “belum ada informasi soal itu” dan “belum ada laporannya ke kami” saat dikonfirmasi reporter Tirto, Selasa. Tapi dia menegaskan sanksi terhadap pelajar yang ikut demo tidak diperbolehkan. “Tidak ada sanksi.”

“Coba lihat surat edaran yang dikeluarkan Kemendikbud,” katanya.

Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan. Di sana tertulis Mendikbud Muhadjir Effendy meminta kepala daerah beserta jajarannya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak unjuk rasa.

“Pendidikan tidak main sanksi, kalau pemberian sanksi namanya bukan pendidikan,” pungkas Muchlis.

Para pelajar berhak menyampaikan ekspresinya, termasuk berdemonstrasi

Sumber : <https://tirto.id/hukuman-pelajar-reformasidikorupsi-diskors-dijemur-dipukul-ejMM>

Pemprov DKI Tak Punya Alasan Cabut Hak KJP Pelajar karena Ikut Demo



Petugas gabungan kepolisian dan TNI mengamankan ribuan pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa ke Gedung DPR di Mapolres Metropolitan Tangerang, Tangerang, Banten, Senin (30/9/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/ama.

Oleh: Haris Prabowo - 4 Oktober 2019

Pencabutan KJP bagi para pelajar yang diwacanakan Pemprov DKI bagi siswa yang ikut demo dinilai melanggar hak atas pendidikan.

tirto.id - Sejumlah pelajar terlibat dalam aksi 'Reformasi Dikorupsi' yang digelar di DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI kemudian mengancam tidak akan lagi memberi Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa yang terbukti melakukan tindak kriminal saat ikut demonstrasi.

"Kalau dia kriminal, bisa pemberhentian KJP-nya. Tapi kalau sifatnya ikut-ikutan, kena sanksi dari kepolisian, kami nasihati dan KJP-nya tetap jalan," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Ratiyono di Jakarta, Selasa (1/10/2019), sebagaimana dilansir Antara.

Menurutnya, Pemprov DKI terlibat aktif mendata pelajar yang ikut demo. Pemprov terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

"Pasti kami utus pejabat kami, merapat ke Ditkrimum minta data. Nanti kami cek dari SMA atau SMK mana," kata Ratiyono.

Ribuan orang ditangkap di Polda Metro. Data terakhir, Rabu kemarin (3/9/2019), jumlahnya lebih dari 1.300 orang, termasuk pelajar. Yang sudah jadi tersangka 380 orang, 179 di antaranya sudah ditahan.

Dari yang sudah ditahan itu, empat di antaranya pelajar dan mahasiswa--meski tidak dijelaskan berasal dari sekolah/kampus mana. Bahkan dua orang dari mereka membawa senjata tajam.

Ratnyono juga sempat menyinggung status sosial si pelajar.

"[Kami] tetap ingatkan [para pelajar]: 'kamu sudah miskin, jangan ikut-ikutan [demonstrasi];'" kata dia.

Siapa pun boleh demonstrasi, sebenarnya, termasuk orang miskin dan pelajar. Ini ditegaskan Komnas HAM dan Unicef.

KJP Tak Boleh Dicabut

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina mempertanyakan pernyataan Ratnyono.

Menurutnya KPAI sudah bertemu Dinas Pendidikan DKI tanggal 26 September atau beberapa hari sebelum Ratnyono menyampaikan soal KJP. Dan dalam pertemuan itu, ditegaskan tak bakal ada sanksi apa pun terhadap pelajar.

"Memastikan bahwa anak-anak yang ikut aksi tak akan dikeluarkan dan diberi sanksi berupa pencabutan KJP, misalnya.

Mereka bilang begitu. Saya enggak tahu kelanjutannya bagaimana," kata Putu saat konferensi pers di kantornya, Rabu (2/10/2019).

Sikap dari KPAI jelas: jangan sampai ada pencabutan hak KJP bagi pelajar yang ikut demo.

"KJP sendiri untuk anak tidak mampu. Sekarang kena masalah, masak dicabut? Lalu bagaimana nasib mereka? Kami berharap anak-anak diberi kesempatan memperbaiki diri," kata dia.

Hal senada diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk para pelajar.

"Cara-cara melarang bahkan mengancam itu tidak mencerminkan sikap sebagai pendidik. Apalagi mencabut kartu pelajar, ngawur itu," kata Ubaid kepada reporter Tirto, Kamis (3/10/2019).

Menurut Ubaid, anak-anak itu sebaiknya diajak diskusi, bahkan untuk hal-hal berbau politik sekalipun.

"Bukan larang ini, itu. Tidak mendidik dan jauh dari nilai-nilai pendidikan karakter."

Ubaid lantas menegaskan: pencabutan KJP melanggar hak pendidikan anak.

"Akses ke sekolah juga hak semua anak Indonesia. Right to education is for all and no discrimination," tegas Ubaid.

Dibantah Anies

Satu hari setelah Ratnyono bicara, Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan sebaliknya. Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan Pemprov DKI tidak akan mencabut KJP

pelajar, bahkan untuk mereka yang terbukti kriminal sekalipun.

“Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orangtua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi,” kata Anies di Jakarta Barat, Rabu (2/10/2019).

Anies menegaskan, KJP adalah hak tiap anak yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah. Karena itu, pemerintah punya tanggung jawab penuh memberikan mereka bantuan.

“Justru tanggung jawab pemerintah kalau ada anak bermasalah, harus dididik lebih banyak. Jangan sampai putus sekolah karena KJP-nya dicabut,” kata Anies. Jika ada anak yang terbukti melakukan tindakan kriminal, mereka memang harus diproses sesuai hukum yang berlaku, kata Anies.

Meski demikian, sekolah tidak boleh mengeluarkannya.

“Dipindah sekolah boleh, tapi bukan diberhentikan haknya atas pendidikan,” tegas Anies.

Anies membantah pernyataan anak buahnya soal Pemprov DKI akan cabut KJP pelajar yang ikut demo

Sumber: <https://tirto.id/pemprov-dki-tak-punya-alasan-cabut-hak-kjp-pelajar-karena-ikut-demo-ejaB>

JPPI: Bumikan Pancasila Jadi Karakter Bangsa Indonesia Sejak Dini

Kamis, 3 Oktober 12:20 2019 WIB



Dokumen - Petugas membersihkan pelataran Monumen Pancasila Sakti, di Jakarta Timur, Senin (26/9/2016). ANTARA/Risky Andrianto

“Kasus kekerasan di sekolah, politisasi sentimen agama, korupsi, dan ketidakadilan sosial, bahkan demokrasi dikebiri, setidaknya memberikan gambaran pada kita kalau kita jauh dari nilai-nilai Pancasila”

Jakarta (ANTARA)-Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong untuk membumikan dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan satu kesatuan untuk menjadi karakter bangsa Indonesia yang sejati sejak dini.

“Nilai-nilai Pancasila itu harus dibumikan kepada anak-anak Indonesia sejak dini, supaya mereka kelak besar tidak menodainya dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Antara, Jakarta, Kamis.

JPPI mendorong agar Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai simbol, tapi masyarakat Indonesia harus sampai menjiwai, memahami, dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ubaid menuturkan pendidikan harus semakin mewujudkan penguatan karakter yang bersumber

dari nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter jangan hanya menjadi wacana tapi harus terimplementasi dengan baik di lapangan.

“Kasus kekerasan di sekolah, politisasi sentimen agama, korupsi, dan ketidakadilan sosial, bahkan demokrasi dikebiri, setidaknya memberikan gambaran pada kita kalau kita jauh dari nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, penting bagi masyarakat Indonesia untuk tidak saja menjunjung tinggi Pancasila sebagai simbol, tapi juga harus mampu menanamkannya dalam karakter bangsa Indonesia dan menuju cita-cita bersama Indonesia yang adil dan makmur serta rakyat sejahtera.

Pendidikan penguatan karakter bangsa merupakan tugas yang harus diemban bersama. Dalam konteks pendidikan di sekolah, para guru dan juga masyarakat harus memahami dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam arti sempit kepada anak-anak Indonesia.

Dipahami dalam arti sempit bermakna sila pertama Pancasila hanya dipahami sebagai keharusan beragama atau berkeyakinan. Namun dalam pemahaman secara luas, sila pertama itu terkait erat dengan empat sila lain. Jadi, ketika orang beragama maka dia harus melakukan kebaikan-kebaikan yaitu kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Jika lima sila Pancasila tidak diamalkan secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka sejatinya tindakan-tindakan itu menjauh dari prinsip-prinsip beragama dan berkeyakinan.

Pewartanya: Martha Herlinawati S

Editor: Heru Dwi Suryatmojo

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1094464/jppi-bumikan-pancasila-jadi-karakter-bangsa-indonesia-sejak-dini>

JPPI Imbau Pelajar dan Mahasiswa Hentikan Demonstrasi

Rabu, 25 September 21:56 2019 WIB



Sejumlah pelajar yang diamankan Polres Metro Jakarta Barat karena membawa senjata tajam celurit saat aksi demo pelajar di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (25/9/2019). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat/aa.

“Peserta demo sore ini adalah anak-anak SMA/SMK yang digiring oleh orang yang lebih dewasa”

Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengimbau para pelajar dan mahasiswa kembali ke sekolah dan kampus masing-masing serta meninggalkan aksi demonstrasi.

“Saya mengimbau kepada para pelajar dan juga mahasiswa untuk kembali ke sekolah dan kampus, karena tuntutan sudah dipenuhi DPR,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan unjuk rasa adalah hak konstitusi bagi warga negara, akan tetapi harus dilakukan secara tertib dan tidak melanggar kepentingan umum.

Menurut Ubaid, aksi demonstrasi itu dapat ditumpangi penumpang gelap yang anarkis dan kontra demokrasi dengan maksud, tujuan, dan kepentingan sendiri.

Pengamat pendidikan Andreas Tambah menuturkan tidak semua demo mahasiswa adalah mahasiswa.

“Peserta demo sore ini adalah anak-anak SMA/SMK yang digiring oleh orang yang lebih dewasa,

tiap rombongan yang datang dari beberapa penjurur paling tidak 2-3 orang dewasa, seperti mahasiswa,” ujarnya.

Dia berharap, situasi di sejumlah daerah yang terjadi demonstrasi kembali kondusif dan tidak ada demonstrasi yang anarkis.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam tiga hari terakhir, yakni Senin (23/9), Selasa (24/9), dan Rabu ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK.

Akibat demonstrasi di Jakarta pada Rabu siang hingga malam yang berujung ricuh, ruas jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat, yakni Palmerah, terganggu.

Pewartu: Martha Herlinawati S

Editor: M. Hari Atmoko

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/1081748/jppi-imbau-pelajar-dan-mahasiswa-hentikan-demonstrasi>

Pengamat: Pemerintah Harus Fokus ke Kualitas Guru

Gatra.com | 02 Sep 2019 23:25



Ilustrasi pendidikan di kota Kupang. (ANTARAnews/ar)

Jakarta, Gatra.com - Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengatakan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan salah satu kunci dalam penyelarasan materi sekolah dengan kebutuhan zaman di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Menurutnya, fokus pemerintah harus dialihkan kepada peningkatan dan pemerataan kualitas guru. Program seperti rotasi guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) haruslah meningkatkan kualitas guru.

“Kalau tujuan itu [peningkatan kualitas guru] belum tercapai, maka harus ada evaluasi. Mengapa program tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kualitas guru, di mana titik lemahnya, jadi memang harus ada evaluasi demi terciptanya pemerataan kualitas guru,” kata Ubaid saat dihubungi Gatra.com, Senin (2/9).

Selain itu, Ubaid juga menatakan bahwa pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi dan memberi perhatian lebih dalam permasalahan kualitas guru yang dinilainya belum merata. Mengingat fokus utama di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 5 tahun ke depan adalah pembangunan SDM, sudah menjadi hal penting adanya keberpihakan dari segi peningkatan kualitas guru.

“Solusi jangka pendeknya harus ada evaluasi, terutama ini kan presiden fokus pada pengembangan

SDM. Jadi harua ada keberpihakan anggaran ke arah peningkatan kualitas guru, karena selama ini anggarannya minim sekali,” ujar Ubaid.

Selain itu, untuk solusi jangka panjang, Ubaid menyarankan agar ada dan terciptanya suatu integrasi mulai dari birokrasi, implementasi di kabupaten atau kota dan provinsi, sampai dengan terciptanya pemerataan kuantitas dan kualitas guru.

“Satu lagi, harus ada kesamaan fokus antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini kurang terkoordinir dan masih jalan sendiri-sendiri sesuai dengan selera pemda. Ini enggak boleh lagi terjadi,” ujarnya.

Reporter: Ucha Julistian

Editor: Iwan Sutiawan

Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/441852/mileial/pengamat-pemerintah-harus-fokus-ke-kualitas-guru>

Revolusi Industri 4.0, Kualitas Guru Perlu Ditingkatkan

Gatra.com | 02 Sep 2019 15:25



Ilustrasi (Shutterstock/ft)

Jakarta, Gatra.com - Menyongsong revolusi industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menyelesaikan targetnya. Pengamat Pendidikan, Ubaid Matraji menuturkan, seharusnya pemerintah mengalihkan fokusnya. Bukan hanya persoalan kurikulum, tetapi juga menyoroti persoalan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

“Yang pertama harus diperbaiki selain kurikulum, paling krusial adalah guru. Pemerintah harus mengevaluasi dan memetakan kualitas guru secara baik. Karena sebegus apapun kurikulumnya, jika SDM gurunya rendah maka tidak akan berkerja dengan baik,” ucap Ubaid saat dihubungi Gatra.com, Senin (2/9).

Menurut Ubaid, perlu adanya pemetaan dan penggalian potensi guru yang dilihat dari peningkatan kualitas. Hal ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Sarana dan prasarana sekolah harus mendukung dan dimanfaatkan oleh tenaga kependidikan.

“Sekarang ini saja, banyak sekolah yang gurunya masih gaptek [gagap teknologi] serta sekolahnya belum didukung dengan perangkat teknologi. Jadi masih banyak PR yang harus dibenahi dalam

menyongsong revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Ubaid berharap, ada program atau metode pengembangan kualitas guru yang sinkron dengan era 4.0. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menjembatani materi dari tujuan 4.0 kepada anak didiknya.

“Ke depannya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru dan pemerataannya. Mungkin bisa dilakukan pelatihan atau saat penyaringan harus memunculkan kemampuan yang sesuai dengan era Industri 4.0 ini. Tapi ke depan, ini yang harus dilakukan,” katanya.

Reporter: Ucha Julistian

Editor: Annisa Setya Hutami

Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/441699/millennials/revolusi-industri-40-kualitas-guru-perlu-ditingkatkan>

Jual Beli Buku di SMA Disebut Masuk Ranah Tipikor

By **Redaksi** 1 September, 2019



Sejumlah pengamat dan aktifis anti korupsi menyoroti maraknya praktek jual beli buku nonteks yang terjadi di hampir seluruh SMA di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Mereka menilai, praktek jual buku pelajaran yang harganya mencapai jutaan rupiah dan memberatkan para orang tua siswa ini sudah masuk kedalam kategori Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Salah satunya, dari koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang mengungkapkan bahwa persoalan ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

“Ya sekolah ga boleh lepas tangan, terkesan menyalahkan penerbit, padahal pasti dua belah pihak yang terlibat. Ini sudah bisa disebut, tindak pidana penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri, apa mungkin dia bisa melakukan itu kalau dia bukan pihak yang punya wewenang?. Sudah masuk tindak pidana korupsi, lalu di institusi pendidikan pula,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan Aplikasi WhatsApp, Sabtu (31/8/2019).

Ubaid juga mengatakan, seharusnya aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, tanpa harus menunggu adanya laporan pengaduan. Dia memperingatkan pula, jika tidak ada proses terkait hal ini, pihaknya akan bertindak untuk melaporkan perkara ini, ke instansi terkait.

Selain Ubaid, Direktur Akademi Anti Korupsi, Ade Irawan juga menyikapi terkait persoalan terkait. Dia menegaskan, bahwa pada dasarnya segala hambatan yang membuat masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan harusnya dihilangkan.

“Karenanya jual paksa buku pelajaran mestinya tidak ada lagi, apalagi sekolah juga bukan toko buku. Mesti ditelusuri ini faktor yang membuat terjadi jual paksa buku, kadang masalahnya bukan di sekolah. Sekolah hanya jadi korban tekanan institusi di atasnya yang sudah kerjasama dengan penerbit,” tukasnya, lewat pesan Aplikasi WhatsApp, Minggu (1/9/2019).

Sebelumnya, terungkap dugaan praktek jual buku nonteks (tidak wajib) di sejumlah SMA di Kota Tangsel. Dugaan praktek jual beli buku seperti terjadi di SMA 6 Tangsel, yang diketahui bahwa agen penyalur buku memberikan fee sebesar 15 persen dari hasil penjualan buku, yang juga diakui oleh pihak koperasi sekolah.

Praktek serupa juga diduga terjadi di sekolah-sekolah lain, seperti di SMA 9, SMA 12, dan beberapa sekolah lainnya. (Ed)

Sumber: <https://tangerangonline.id/2019/09/01/jual-beli-buku-di-sma-disebut-masuk-ranah-tipikor/>

Rektor Asing tak Dibebani Target *Ranking*

Jumat 30 Aug 2019 08:35 WIB

Red: Budi Raharjo



Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (tengah) berfoto dengan Rektor asing asal Korea Selatan, Jang Youn Cho (kanan) disela-sela acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) 2019 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (26/8/2019).

Impor rektor adalah keinginan instan yang tidak relevan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah memutuskan mendatangkan rektor asing untuk memimpin Universitas Siber Asia. Pada kepemimpinan rektor asing pertama di Indonesia itu, Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan, tidak mematok target khusus terkait *ranking*.

“Kalau yang perguruan tinggi ini saya mengenalkan dulu, tidak memasang target. Tapi, kalau yang sudah ada perguruan tingginya, saya akan pasang targetnya,” kata Nasir di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis (29/8).

Nasir mengatakan, menjadikan perguruan tinggi baru untuk masuk dalam peringkat 100 besar dunia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia mengaku, hanya mematok target untuk universitas negeri yang kini masuk peringkat 500 besar di dunia. Namun, regulasi mengimpor rektor untuk universitas negeri tidak memungkinkan dan akan dirombak.

Universitas Siber Asia akan diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Hankuk University for Foreign Studies. Universitas yang akan dipimpin Jang Youn Cho hasil ‘impor’ dari Korea Selatan itu kini belum berwujud dan baru ditargetkan bisa beroperasi

pada 2020. Universitas ini berada di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) yang juga menaungi Unas.

Nasir mengatakan, pembentukan universitas ini akan difokuskan pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia yang masih rendah. Di sisi lain, kata dia, Kemenristekdikti akan mengawasi kampus-kampus yang berbasis daring atau *online*, salah satunya Universitas Siber Asia.

Pihak yang melakukan pengawasan, yakni Indonesia Cyber Education Institute (ICE Institute) yang memang bertugas mengawasi universitas berbasis daring. "Itu adalah modul, sistem pembelajaran yang ada di dalam siber atau *online*, ini harus kita lihat apakah memenuhi standar atau tidak," kata Nasir.

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo mengatakan, Kemenristekdikti juga akan membuat tim untuk mengawasi perguruan tinggi dengan rektor asing. Kendati demikian, dia tak menyebut secara detail tim apa yang akan dibuat karena saat ini perguruan tinggi terkait masih belum mulai beroperasi. "Agar mutunya bagus," kata Patdono.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, keinginan Kemenristekdikti dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan mendatangkan rektor asing adalah hal yang tak relevan. Sebab, universitas yang didatangi rektor asing adalah kampus baru dan bahkan belum beroperasi.

Selain itu, kata Ubaid, rektor asing tersebut tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Dia juga mempertanyakan dosen yang nantinya akan mengajar di universitas itu, apakah mumpuni atau tidak. "Ini keinginan instan yang sangat tidak relevan dengan kondisi perguruan tinggi di Indonesia," kata Ubaid.

Perbaikan Kualitas Dosen

Menurut Ubaid, sebenarnya ada hal-hal yang lebih penting diperhatikan pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Apabila pemerintah ingin menaikkan *ranking* perguruan tinggi Indonesia di dunia, kualitas dosen harus ditingkatkan. "Soal *ranking* itu sangat terkait dengan *output* para dosen," kata Ubaid.

Apabilapara dosen tidak pernah melakukan riset dan publikasi internasional maka *ranking* perguruan tinggi tentunya tidak akan meningkat di level dunia. Reputasi perguruan tinggi juga tidak akan semakin baik apabila riset dan publikasi internasional tidak didorong.

Selain itu, Ubaid berpendapat, perguruan tinggi di Indonesia aksesnya masih terbatas terkait jurnal internasional. Pemerataan pendidikan tinggi seharusnya dilakukan, sehingga seluruh daerah bisa mengakses jurnal internasional.

"Hanya kampus-kampus besar di kota-kota besar yang bisa akses. (Yang di daerah) tidak bisa karena memang tidak punya jaringan, tidak punya sarana, atau SDM dosennya yang tidak mengerti," kata Ubaid.

Dia menambahkan, hal yang sangat penting, tapi sering dilupakan, yakni kaitan kampus dengan masyarakat. Hubungan kampus dan masyarakat merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi, yakni salah satunya pengabdian masyarakat.

"Apa kontribusi kampus terhadap problem di masyarakat? Nol besar. Tidak banyak yang bisa

dilakukan. Kampus sibuk dengan riset, tapi ternyata tidak membawa perubahan apa-apa bagi masyarakat,” kata Ubaid.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah menilai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi rektor asing tersebut. Rektor asing, kata dia, tidak boleh memiliki tujuan lain saat bertugas di Indonesia. Yang bersangkutan juga harus lulus dari penelitian khusus BIN, TNI, dan Polri terkait integritas dan latar belakangnya.

n inas widyanuratikah/nawir arsyad akbar ed: mas alamil huda

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/19/08/30/px10f5415-rektor-asing-tak-dibebani-target-ranking>

3,29 Juta Penduduk Masih Buta Aksara



Kornas JPPI Ubaid Matraji/rmolbanten

Edisi 30-08-2019/Sindonews.com

JAKARTA—Sebanyak 3,29 juta penduduk Indonesia tercatat masih buta aksara. Pemerintah pun terus menggalakkan berbagai program agar jumlah buta aksara bisa diberantas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, pada 1945 jumlah penduduk buta aksara mencapai 95%. Kemudian pada 2015 jumlah penduduk buta aksara telah berkurang 3,4% atau menjadi sebanyak 5,6 juta orang.

Selanjutnya pada 2017 jumlahnya kembali berkurang menjadi 3,4 juta orang. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang atau hanya 1,93% dari total populasi penduduk. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan, Kemendikbud menjalankan beragam program dan kegiatan untuk menuntaskan buta aksara.

Di antaranya memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan, dan bahasa. Kemendikbud juga melaksanakan program pasca-buta aksara. Program tersebut antara lain pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan.

”Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” ujar Harris dalam jumpa pers persiapan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Ke-54 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Selain itu ada program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/ khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan.

Program dengan sistem blok atau kluster juga diterapkan di daerah padat buta aksara seperti di Papua (22,88%), Sulawesi Selatan (4,63%), Sulawesi Barat (4,64%), NTB (7,51%), NTT (5,24%), dan Kalimantan Barat (4,21%). Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara

pun memperoleh penghargaan dari UNESCO pada 2012, yakni King Sejong Literacy Prize.

Selain itu, sejak akhir 2018, Pemerintah Indonesia dipilih sebagai Komite Pengarah Aliansi Global Literasi (Global Alliance for Literacy) UNESCO atas keberhasilan memberantas buta aksara. Peringatan HAI tahun ini akan diselenggarakan di Makassar pada 5-8 September.

Tema yang diusung UNESCO adalah "Literacy and Multilingualism". Mengacu pada tema tersebut, Kemendikbud menetapkan tema nasional peringatan HAI tahun ini adalah "Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat".

Selain kegiatan tersebut, pada puncak peringatan HAI juga akan diberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bidang keaksaraan. Di antara yang menerima penghargaan adalah 6 kabupaten dan 1 kota yang akan mendapat anugerah aksara, yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bone, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Pemerintah daerah tersebut dinilai berkomitmen tinggi dalam upaya penuntasan buta aksara. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat, ada dua pekerjaan besar di dalam masalah ini, yakni yang pertama soal pem berantasan buta aksara itu sendiri dan yang kedua adalah menumbuhkembangkan tradisi literasi di tengah masyarakat.

Menurut Ubaid, pemerintah seharusnya bisa menyinergikan dua pekerjaan besar itu dalam satu program penuntasan. "Dan ini dua pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dalam satu kesatuan. Bukan satu per satu yang terpisah. Sebab saat ini minat baca Indonesia masih sangat rendah," tandasnya.

Ubaid mengatakan, yang terjadi di lapangan adalah penduduk sudah melek huruf, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami apa yang telah dibaca. Masalah lain juga muncul karena mereka juga tidak punya minat baca.

Karena itu, dia berpendapat, seharusnya program pemerintah tidak hanya mengajari mereka membaca, tetapi juga bagaimana menjadikan mereka keranjingan membaca.

neneng zubaidah

Sumber: http://koran-sindo.com/page/news/2019-08-30/0/3/3_29_Juta_Penduduk_Masih_Buta_Aksara

Prestasi “Biasa Saja” Rektor Asing Pertama Indonesia

Mutiul Alim | Selasa, 27/08/2019 19:01 WIB



Jang Youn Cho (Foto: Cybereduinkor)

Jakarta, Jurnas.com – Nama **Jang Youn Cho** tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan Tanah Air, setelah diperkenalkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, sebagai rektor asing pertama yang akan memimpin Universitas Siber Asia, pada Senin (8/26) kemarin.

Universitas Siber Asia sendiri merupakan kampus swasta pertama berbasis pembelajaran daring penuh (*full online learning*) di Indonesia, di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), yang baru akan menerima mahasiswa pada 2020 mendatang.

Menilik rekam jejaknya di laman Universitas Nasional (Unas), **Jang Youn Cho** pernah menjabat sebagai Asisten Profesor di University Nebraska-Lincoln pada 1996-1987. Dan selama tujuh tahun, dia kerap mencatatkan namanya dalam nominasi ‘Profesor Terbaik’.

Namun University Nebraska-Lincoln bukan kampus istimewa di Amerika Serikat (AS). Menurut QS World University Ranking 2020, kampus tersebut berada di urutan 561-570 di dunia. Sedangkan di seluruh AS, University Nebraska-Lincoln bercokol di peringkat 97.

Tiga perguruan tinggi Indonesia justru lebih baik peringkatnya dibandingkan dengan University Nebraska-Lincoln. Saat ini, Universitas Indonesia (UI) berada di ranking 296, diikuti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di posisi 320, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di peringkat 331.

Pada 1997, **Jang Youn Cho** pulang dari AS setelah 17 tahun merantau. Sepulangnya ke Korea Selatan, dia memperoleh jabatan profesor di Departemen Administrasi Bisnis, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) hingga 2017.

Sepanjang 1997-2017, Cho sempat memegang sejumlah posisi. Pada 1999-2000, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan.

Selanjutnya, pada 2004-2007, Cho menjadi anggota Komite Pengawas Akuntansi Layanan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Keuangan Korea Selatan, serta sempat menjadi editor di jurnal akuntansi Korean Accounting Review.

Kiprah Cho di bidang akuntansi dan keuangan memang tak lepas dari latar belakangnya. Cho tercatat memfokuskan penelitiannya pada tiga bidang, yakni penilaian dan analisis bisnis, kinerja penghasilan, dan akuntansi internasional.

Sehingga tak heran pula, Cho sempat diangkat sebagai anggota dewan di perusahaan S-Oil, sebuah perusahaan kerjasama antara Saudi Aramco dan pemerintah Korea Selatan.

Berlanjut ke tahun 2006, **Jang Youn Cho** diangkat sebagai Dekan di Sekolah Pascasarjana Bisnis, Hankuk University of Foreign Studies. Saat menjabat sebagai dekan inilah Cho membuka program Master Administrasi Bisnis (MBA) daring (*online*), dan dianggap sebagai profesor pendidikan daring pertama di Korea menurut laman Unas.

Cho tidak pernah menjabat sebagai rektor, sebagaimana perbincangan yang beredar di tengah masyarakat. Menurut laman resmi Cyber Hankuk University of Foreign Studies (CUFS), dia hanya menduduki posisi Wakil Presiden CUFS selama tiga tahun sejak 2014-2017. Posisi itu kali pertama ada di CUFS semenjak berdiri.

Semasa Cho menjadi Wakil Presiden, CUFS dipimpin oleh In-cheol Kim yang menjabat sebagai presiden keempat, sebelum digantikan oleh Jung-Ryul Kim pada 2017 sampai sekarang. Perlu diketahui, CUFS lahir dari rahim Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), yang dicanangkan pada 2002 silam. Setahun kemudian, rencana pendirian ini disetujui Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Korea Selatan dengan nama awal Cyber University of Foreign Studies.

Pada Maret 2004, Cyber University of Foreign Studies dibuka untuk pertama kali dengan lima fakultas, yakni Bahasa Inggris, Bahasa China, Bahasa Jepang, Bisnis Daring, dan Media dan Hubungan Masyarakat, dan 1.000 mahasiswa.

Barulah empat tahun kemudian, Cyber University of Foreign Studies resmi berganti nama menjadi Cyber Hankuk University of Foreign Studies atau CUFS.

Di bawah Kim dan Cho (2014-2017), CUFS berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Jumlah perjanjian kerjasama, baik dengan pemerintahan, industri, maupun perguruan tinggi asing meningkat. Di era inilah, Cho meneken perjanjian pendidikan dengan Universitas Nasional (Unas), tepatnya pada Agustus 2015.

Kendati berhasil meningkatkan jumlah kerjasama, keberadaan Cho di CUFS tak sontak berpengaruh pada ranking dunia HUFS. Seperti dikutip dari data QS World University Ranking, di dua tahun pertama Cho menjadi Wakil Presiden CUFS, peringkat HUFS melorot dari 431-440 menjadi 481-490 pada 2015, dan 491-500 pada 2016. Baru di tahun terakhirnya menjabat, peringkat HUFS kembali ke posisi 431-440. Jika dibandingkan, Universitas Indonesia justru punya catatan lebih baik di periode tersebut. Selama 2014-2017, secara berturut-turut UI berada di posisi 309, 310, 358, dan 325.

Sesat Pikir Kebijakan Rektor Asing

Pengamat pendidikan tinggi, Ubaid Matraji menilai kebijakan Menristekdikti mendatangkan rektor asing merupakan bentuk sesat pikir. Dia menyebut tidak akan ada perubahan yang terjadi, karena masalah pendidikan tinggi di Tanah Air bukan terletak pada rektornya.

“Di kampus, mahasiswa bukan hanya belajar soal kompetensi, tapi mereka juga belajar soal ke-Indonesiaan dan nasionalisme. Tahu apa rektor soal ini? Banyak orang pintar tapi tidak berintegritas, ini masalah kita,” kata Ubaid saat dihubungi *Jurnas.com*, pada Selasa (27/8).

“Belum lagi SDM (sumber daya manusia) dosen kita masih rendah. Apa bisa tiba-tiba jadi hebat gara-gara rektor asing?” imbuh dia.

Alih-alih mendatangkan rektor asing, Ubaid menyarankan pemerintah membenahi kualitas dosen di Indonesia. Menurut dia, ibarat permainan sepak bola, satu pemain bintang tidak akan membuat tim bersinar, jika 10 pemain lainnya tidak kompeten.

“Sayangnya (peningkatan kualitas dosen) belum menjadi prioritas pemerintah. Malah ini membuat kebijakan instan dan tidak jelas *output*-nya,” tandas Ubaid.

Sumber: <http://www.jurnas.com/artikel/58285/Prestasi-Biasa-Saja-Rektor-Asing-Pertama-Indonesia/>

Pembelajaran Materi Reproduksi Harus Kontekstual



Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Foto/Dok. Pribadi.

Pendidikan Pendidikan Reproduksi

Muhammad Syahrul Ramadhan • 26 Agustus 2019 13:21

Jakarta: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) yang menempel atau tertanam pada mata pelajaran harus dikaitkan dengan problema reproduksi. Hal tersebut akan menjadikan pendidikan reproduksi lebih kontekstual sehingga efektif bagi siswa dalam memahami isi materi Kespro.

Ia mencontohkan, siswa harus tahu isu soal kematian ibu dan anak saat melahirkan, kerentanan menikah di bawah umur. Kemudian dampak pergaulan bebas.

“Pembelajaran ini harus dikaitkan dengan problem reproduksi minimal dalam konteks lokal dan nasional. Apa saja problem-problem sosial dari isu reproduksi ini? Ini untuk menumbuhkan kesadaran melalui pemahaman konteks dan nalar kritis,” kata Ubaid kepada *Medcom.id*, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Sementara itu, Ubaid juga mengakui saat ini pendidikan reproduksi di sekolah belum optimal. Padahal pendidikan reproduksi ini penting.

“Belum optimal karena kapasitas guru yang tidak mampu men-*deliver* pesan dan menginternalisasi dalam proses pembelajaran,” ujarnya.

Maka itu, ujar Ubaid, harus ada peningkatan kapasitas guru untuk bisa mampu menguasai materi dan menginternalisasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Bukan justru menyendirikan pendidikan reproduksi.

“Pelajaran ini harus diintegrasikan dengan mapel (mata pelajaran) yang sudah ada, misalnya masuk dalam Biologi, Bahasa, atau lainnya,” kata Ubaid.(CEU)

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRVP6OK-pembelajaran-materi-reproduksi-harus-kontekstual>

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Baiknya Tetap Lebur dalam Mapel



Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Foto/Dok. Pribadi.

Pendidikan Reproduksi

Muhammad Syahrul Ramadhan • 23 Agustus 2019 18:00

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud, Muhadjir Effendy berencana mengeksklusifkan atau menyendirikan pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) sebagai kokurikuler. Rencana ini dinilai kurang tepat, dikhawatirkan akan membebani dan mengakibatkan pemahaman siswa akan terpotong-potong dan tidak integratif.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, selama ini pendidikan kespro di sekolah-sekolah belum optimal. Padahal kespro sangat penting untuk dipahami generasi muda.

Menurutnya, pendidikan kespro baiknya tetap dilebur ke dalam mata pelajaran lain seperti Biologi, agar terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada. Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Muhadjir menjadikan pendidikan kesehatan reproduksi berdiri sendiri menjadi kokurikuler karena materi reproduksi yang terkandung pada mata pelajaran tersebut belum optimal.

Muhadjir ingin materi kespro ini lebih fokus, seperti pendidikan keputrian yang pernah diterapkan di sekolah-sekolah tempo dulu. Namun, kata Ubaid, jika pendekatan yang selama ini dilakukan melalui mata pelajaran dirasa belum optimal, maka yang harus menjadi sorotan adalah gurunya. Bukan malah menyendirikan pendidikan reproduksi.

“Harus dievaluasi gurunya, lalu harus ada program peningkatan kapasitas guru. Harus begitu, bukan malah *nambahi* beban siswa dan siswa lagi-lagi dijadikan obyek ketidakmampuan guru dalam pembelajaran di kelas,” kata Ubaid kepada *Medcom.id*, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Ia meminta Kemendikbud untuk tidak menyalahkan siswa, atas ketidakmampuan guru yang tidak dapat menyampaikan materi pendidikan reproduksi dengan baik. “Yang harus dievaluasi lalu diintervensi kemampuannya supaya ada kenaikan kompetensi dan perbaikan mutu itu gurunya,” tegas Ubaid.

Ubaid justru meminta pemerintah meningkatkan kapasitas guru, agar mampu menguasai materi dan menginternalisasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu sekolah, ujar Ubaid, seharusnya juga bisa menggandeng lembaga-lembaga yang *concern* terhadap pendidikan reproduksi.

Termasuk masyarakat sipil yang juga mempunyai perhatian. “Tapi sayangnya selama ini mereka ditinggalkan dan tidak dijadikan bagian dari masyarakat sekolah. Ini fatal akibatnya. pentingnya sekolah perlu bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga terkait,” ujarnya.

Wacana ini menjadikan pendidikan kespro menjadi kokurikuler, kata Muhadjir, berangkat dari fakta masih tingginya angka *stunting* di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya mengacu pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Kemerdekaan di Gedung MPR beberapa waktu lalu.

“Presiden menekankan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD itu juga terkait kesehatan ibu dan anak. Beliau juga menyinggung tingginya angka *stunting* bukan karena kekurangan gizi saat gede tapi ketika di dalam kandungan,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meninjau kembali atau menguatkan kembali pendidikan reproduksi di sekolah. Selama ini, pendidikan reproduksi dimasukkan sejumlah mata pelajaran, salah satunya Biologi.

“Karena itu saya sarankan untuk sekolah mulai menyendirikan atau mengeksklusifkan pendidikan reproduksi atau yang dulu disebut keputrian,” kata Muhadjir di Kampus Uhamka, Jakarta Timur, Rabu 21 Agustus 2019. (CEU)

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRVP6OK-pembelajaran-materi-reproduksi-harus-kontekstual>

Keterbukaan Informasi Publik Pemkot Tangsel Rendah, JPPI Sebut Pejabat Pendidikan Potensi Koruptif

Rabu, 21 Agustus 2019 09:39



Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Pamulang, Selasa (20/8/2019). Foto TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, PAMULANG - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, heran dengan peringkat jeblok Tangerang Selatan (Tangsel) dalam hal keterbukaan informasi publik di antara kota dan kabupaten lain se-Banten versi Komisi Informasi Banten pada tahun 2018.

Ubaid heran karena banyaknya kampus yang notabene menghasilkan orang-orang pintar, tidak berbanding lurus dengan sikap terhadap informasi.

“Ini kan aneh, kampus-kampus ada di Tangsel, orang-orang pintar ada di Tangsel,” ujar Ubaid di Pamulang, Selasa (20/8/2019).

Lebih jauh, Ubaid mengatakan, secara umum, informasi yang tertutup membuat perilaku koruptif mudah berkembang.

“Artinya keterbukaan informasi publik itu kan bagian dari upaya untuk menutup celah tindakan koruptif. Ketika informasi publik ini ditutup berarti ada banyak permainan di belakang layar itu bisa kita indikasikan tindakan korupsi bahkan tindakan koruptif,” jelasnya.

Berkaitan dengan dunia pendidikan, Ubaid menghubungkan keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik rasuah.

Ia memberi contoh jika seorang wali murid meminta laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada pihak sekolah.

Namun karena indeks keterbukaan informasi yang rendah sehingga membuat si wali murid tidak mendapatkan laporan dana BOS itu.

“Kalau dia indeksnya rendah dia tidak ada keterbukaan di level sekolah di level dinas di level kabupaten kota, artinya celah untuk menutup kasus korupsi itu menjadi terbuka lebar, karena informasinya tertutup,” jelasnya.

Informasi yang terbuka membuat masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi praktik rasuah di dunia pendidikan.

“Kalau informasi itu dibuka maka memperkecil kemungkinan orang melakukan korupsi. Tapi ketika informasi publik ditutup maka tindakan korupsi potensial dilakukan oleh pejabat terkait,” jelasnya.

Sumber: <https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/21/keterbukaan-informasi-publik-pemkot-tangsel-rendah-jppi-sebut-pejabat-pendidikan-potensi-koruptif>

HEADLINE: Dongkrak Ranking Perguruan Tinggi Lewat Rektor Asing, Efektifkah?

Yopi Makdori 21 Agu 2019, 00:00 WIB



Menristekdikti, Mohamad Nasir/Foto <http://rpl.ristekdikti.go.id>

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berniat mendatangkan rektor asing untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia di level dunia. Namun keinginannya tersebut menuai polemik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan dekan-dekan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan mendatangkan rektor asing bukan solusi yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

“Kami masih mempertanyakan kebijakan mendatangkan rektor asing sebagai solusi, karena sebenarnya permasalahan utamanya bukan itu,” ujar Hetifah kepada **Liputan6.com**, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dia mengatakan, kebijakan impor rektor asing dapat melahirkan konsekuensi logis mulai dari perubahan regulasi hingga pembengkakan anggaran. Apalagi keberadaannya tidak akan memberikan pengaruh yang berarti jika tidak mendapat dukungan-dukungan.

“Karena gaji rektor asing itu, saya tanya, jauh juga (perbedaannya), jauh sekali, perbandingannya bisa berlipuh kali lipat,” kata Hetifah.

Jika memang pemerintah siap mengucurkan anggaran besar, Hetifah menyarankan lebih baik dimanfaatkan untuk mendatangkan diaspora Indonesia yang sukses di luar negeri. Dia menyebut, lebih dari 300 diaspora Indonesia berkiprah di universitas asing dan menempati posisi-posisi strategis.

“Banyak dari mereka berkiprah menjadi kepala jurusan, dekan, atau direktur lembaga riset. Bahkan di Amerika saja lebih dari 100 (orang). Mereka itu kan direkrut karena mereka bagus ya, kenapa kita enggak minta mereka balik saja. Kan mereka punya *network-network* yang bagus,

bahasa asing oke, pengalaman juga di universitas sana, dan dia mengerti kultur Indonesia juga,» ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu mengakui, sejauh ini rencana impor rektor asing belum pernah dibahas secara khusus di DPR. DPR juga belum berencana meminta penjelasan Menristekdikti.

Namun jika polemik impor rektor asing ini tak kunjung selesai dan justru menimbulkan keresahan publik, bukan tidak mungkin Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah itu akan memanggil Menteri Nasir untuk menjelaskan duduk persoalan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji mengatakan, wacana mendatangkan rektor asing adalah kebijakan ngawur. Dia menilai, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan.

“Itu keinginan pemerintah pusat yang memikirkan kampus-kampus ini bisa maju tetapi tidak melihat apa kebutuhan kampus itu. Jadi kesannya kebijakan ini kebijakan yang tidak berdasar dan ngawur,” ujar Ubaid kepada **Liputan6.com**, Selasa (20/8/2019).

Menurut Ubaid, perguruan tinggi di Indonesia memiliki masalah pada kualitas dosen atau tenaga pengajar. Meski begitu, bukan berarti pemerintah harus mengimpor dosen asing, tapi fokus pada peningkatan sumber daya tenaga pengajarnya.

“Kalau misalkan dikaitkan dengan *ranking* dunia itu kan kaitannya dengan kemampuan dosen dalam melakukan riset, kemudian menuliskan dalam jurnal ilmiah. *Wong* kemampuan bahasa asingnya saja sangat rendah, bagaimana dia melakukan riset kemudian ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Jadi harus ada program atau dana yang dialokasikan untuk *support* peningkatan SDM dosen itu,» ucapnya.

Dia juga mengingatkan, Tri Dharma perguruan tinggi bahwa kampus di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab pada pendidikan dan penelitian saja, tapi juga pengabdian terhadap masyarakat. Karena itu, kebijakan impor rektor asing dinilai bukan solusi terbaik mengatasi persoalan pada perguruan tinggi di Indonesia.

“Yang jelas rektor asing itu kan dia hanya tahu manajerial, dia tidak tahu konteks Indonesia, dia tidak tahu sosial politik di Indonesia, dia juga enggak tahu problem yang dihadapi kampus-kampus di Indonesia. Kalaupun dia *expert* di negaranya sana, tentu berbeda dengan sosio konteks yang ada di Indonesia. Artinya dinamika ini yang pasti dia (rektor asing) tidak sampai,» kata Ubaid.

Ubaid lebih setuju pemerintah mendatangkan ahli-ahli asing ketimbang rektor asing untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mereka tidak dihadirkan sebagai pemangku kebijakan, tapi sebagai pendukung dalam meningkatkan SDM di dalam lembaga pendidikan.

Meniru Singapura dan Arab Saudi



Menristekdikti Mohamad Nasir (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya masih menggodok rencana mendatangkan rektor asing untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Nasir ingin Indonesia memiliki universitas yang masuk peringkat 200 perguruan tinggi terbaik di dunia.

Tak main-main, Nasir mengklaim, pihaknya akan memperbaiki 16 peraturan pemerintah untuk merealisasikan rencana mengimpor rektor asing.

“Ini mau kita *freeze* menjadi satu peraturan. Memasukkan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, dari PNS, bisa dari non-PNS, orang asing, yang punya reputasi yang baik, punya *network*, punya pengalaman riset, memimpin perguruan tinggi, dan reputasi yang mengangkat perguruan tinggi biasa menjadi 200 besar dunia,” ujar Nasir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 19 Agustus 2019.

Nasir kemudian menyontohkan keberhasilan Singapura dan Arab Saudi, yang dianggap berhasil mendongkrak kualitas perguruan tingginya berkat mendatangkan rektor asing. Dia menyebut, Nanyang Technological University (NTU), Singapura yang berdiri sejak 1981 telah masuk peringkat 12 besar dunia.

“Di Arab Saudi, dari 800 sekarang sudah masuk 189 dunia. Karena mereka dari orang asing banyak, 40 persen dari asing, rektor dan dosennya. Kita masih sangat jauh, dan kita masih sangat alergi dengan asing. Padahal itu hal biasa di dunia perguruan tinggi, harus berkolaborasi,” ucapnya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menampik, banyak pihak yang menolak rencananya mendatangkan rektor asing. Menurutnya, mereka hanya butuh adaptasi. Bahkan dia mengaku, Presiden Jokowi dan Wapres JK mendukung rencananya.

“Pada prinsipnya bapak presiden ingin mencoba bagaimana. Pada prinsipnya beliau setuju, tapi regulasinya suruh menata kembali, jangan sampai kita berbenturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata Nasir.

Nasir berharap, rencananya mendatangkan rektor asing ke perguruan tinggi negeri (PTN) dapat direalisasikan di 2020. Namun pihaknya akan mencoba lebih dulu menerapkannya di perguruan tinggi swasta (PTS).

“Kalau ini bisa diperbaiki selesai 2019, 2020 bisa jalan. Kalau swasta, sekarang bisa jalan. Karena swasta regulasinya tidak terlalu ketat seperti di negeri. Mudah-mudahan dalam periode ini bisa saya launching swasta yang sudah jalan,” ucapnya.

Lampu Hijau dari Jokowi



Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan lampu hijau terkait usulan penerapan rektor asing di beberapa universitas percontohan. Dia menjelaskan, hal tersebut sebagai uji coba dan tantangan tersendiri agar tercipta persaingan yang lebih baik.

“Dalam sebuah kesempatan presiden pernah menyampaikan perlu kita uji coba. Karena biar menjadi tantangan tersendiri,” kata Moeldoko, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Dia juga meminta kepada publik untuk tidak hanya melihat sisi negatifnya saja, namun sudut

pandang secara global juga harus digunakan. Menurut Moeldoko, keberadaan rektor asing di Indonesia akan menghadirkan kompetisi yang baik.

“Presiden sesungguhnya niat baiknya ingin bawa orang Indonesia berkompetisi. Kalau ada rektor dari luar, mungkin ada BUMN dirut dari luar, presiden ingin melihat bagaimana kalau bangsa ini berkompetisi. Poinnya di situ, kita ingin memasuki dunia kompetitif,” ucapnya.

Moeldoko mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji rencana perekrutan rektor asing. Jika nantinya disetujui, dia menuturkan tetap diperlukan uji coba agar menjadi tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia Indonesia.

“Kalau itu dilakukan dan bisa menumbuhkan persaingan, itu juga bagus,” ujar Moeldoko.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga setuju dengan gagasan tersebut. Hanya saja, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar universitas tidak kaget dalam penerapan kebijakan mendatangkan rektor asing.

Menurut JK, kebijakan mendatangkan tenaga asing harus dimulai dari level penasihat teknis hingga dekan, setelah itu baru tingkat rektor.

“Setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga universitas tidak kaget, rektornya juga tidak kaget. Dimulai dari penasihat teknis, dekan, baru kalau dimajukan, jadi rektor,” kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 6 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, mendatangkan rektor asing sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Salah satunya mendatangkan dosen, serta ahli-ahli asing. Walaupun saat ini ahli dalam negeri memiliki standar tinggi.

“Dari situ antara lain rektor walau saya sarankan juga, yang pertama dekan dulu. Karena kalau rektor kan urusannya banyak, urusan anggaran, urusan sosial, urusan raker sini-sana, sehingga kalau asing bisa bingung dia,” ucap JK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendukung rencana impor rektor asing. Menurut dia, itu merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kampus di Indonesia.

“Jadi semangatnya bagaimana universitas itu bisa lebih baik daripada sekarang. Kenapa kemudian kita tidak mencoba untuk bisa mempunyai pemikiran yang lebih maju,” ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.

Kendati, Puan mengingatkan agar konsekuensi dan manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan impor rektor asing juga harus dilihat. Saat ini, rencana tersebut tengah digodok oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti).

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu menegaskan, bahwa rencana tersebut semata-mata untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan masuknya rektor asing, maka SDM diharapkan dapat meningkat dan lebih berkompeten.

“Ini mau kami lihat. Yang pasti ke depan itu fokus pemerintah adalah SDM yang lebih unggul, sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya dan bisa mempunyai kompetensi lebih baik. Ya bagaimana menuju ke arah sana,” jelas dia.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4042764/headline-dongkrak-ranking-perguruan-tinggi-lewat-rektor-asing-efektifkah>

“Kita menyimpulkan bahwa pemerintah kota Tangerang Selatan dan penegak hukumnya ya melempem gitu ya,” jelas Ubaid di Pamulang, Selasa (20/8/2019).

Terlebih, Ubaid juga menyayangkan Pemkot Tangsel yang tidak mengapresiasi Rumini dengan aksinya yang berusaha menguak praktik rasuah di dunia pendidikan itu.

“Kasus Rumini ini seharusnya pemerintah memberikan apresiasi kepada Rumini, karena dia guru honorer, kemudian membuka kepada masyarakat apa yang terjadi di sekolah.”

“Bukan malah sebaliknya malah dipecat dan kasusnya enggak jelas. Tidak ada tanggapan dari dinas, dari wali kota, ya kita menyayangkan,” ujarnya.

Sumber: <https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/20/harusnya-dapat-apresiasi-kasus-guru-honorer-bongkar-pungli-di-tangsel-melempem>

Anies Diminta Perhatikan Kemampuan Ahli Asing Saat Mengajar Siswa



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [tirto.id/Andrey Gromico](https://tirto.id/Andrey-Gromico)

Oleh: Riyan Setiawan - 20 Agustus 2019

JPPI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan kemampuan akademik dan kemampuan berbahasa Indonesia ahli asing saat mengajari para siswa.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperhatikan kemampuan pengajar atau ahli asing dalam mengajari siswa di Sekolah.

Selain kemampuan akademik, juga kemampuan berbahasa Indonesia ahli asing agar para siswa yang diajari pun mudah mengerti.

Hal tersebut menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mendatangkan sekitar 60 ahli dari Jerman untuk membantu siswa-siswi SMK di Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan menyatakan, langkah itu lebih efisien ketimbang mengirim sejumlah pelajar untuk menimba ilmu di luar negeri.

“Penting juga diperhatikan soal kemampuan orang asing dalam beradaptasi. Sering kejadian, mereka tidak bisa beradaptasi dan mereka kembali ke negeri asal, maka program pun gagal,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (20/8/2019).

Jika Ahli dari asing itu kurang mampu beradaptasi dan kemampuan berbahasa Indonesianya kurang cakap.

Ubaid pun meminta Pemprov DKI Jakarta agar mendampingi para ahli dengan translator untuk menjembatani komunikasi antar ahli asing dengan para siswa.

Ia menilai, jika hal tersebut dilakukan dapat meningkatkan kapasitas siswa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ahli asing.

Kemudian, JPPI pun meminta kepada Anies Baswedan untuk menjalankan program tersebut secara transparan.

Supaya terlihat secara jelas apa yang diberikan oleh ahli asing dan hasil kemampuan siswa dari pengetahuan yang mereka ajarkan. Tak hanya itu, lingkungan sekolah pun punya kesempatan yang sama untuk dapat belajar dengan ahli asing.

“Ini penting tidak hanya menghemat anggaran, tapi juga membuka jaringan internasional dan capacity building untuk siswa dan juga guru,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Anies Baswedan agar mengerjakan program ahli asing mengajar ini secara jangka panjang. Lalu tidak bisa dijalankan secara terburu-buru.

“Jadi harus pula disertai rencana-rencana strategis yang sistematis dalam cetak biru program ini,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya pun menegaskan kepada Anies, agar ahli asing itu jangan ditempatkan sebagai Kepala Sekolah, sebagaimana rencana Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk memilih rektor universitas dari pihak asing.

“Lebih tepatnya mereka adalah para ahli bidang tertentu yang akan melakukan coaching langsung dengan guru dan siswa. Jadi bukan pada level pemegang kebijakan,” pungkasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta mendampingi para ahli dengan translator.

Sumber: <https://tirto.id/anies-diminta-perhatikan-kemampuan-ahli-asing-saat-mengajar-siswa-egCv>

Jadwal UTBK akan Dilakukan Sebelum UN: Apa Dampaknya Bagi Siswa?



Ilustrasi UTBK. FOTO/Istockphoto

Oleh: Riyan Setiawan - 18 Agustus 2019

Wacana Menristekdikti Mohamad Nasir mengubah jadwal UTBK sebelum UN mendapat banyak protes, salah satunya melalui laman change.org.

tirto.id - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana untuk memajukan jadwal Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2020. UTBK yang seharusnya digelar pada awal 2020 dimajukan menjadi akhir 2019. Tujuannya agar murid memiliki waktu lebih panjang mempersiapkan ujian nasional (UN).

Sebab, dengan jadwal UTBK dimajukan, para siswa diharapkan dapat lebih fokus pada UN, tanpa harus memikirkan UTBK yang sudah mereka lewati di semester lima.

“Jadi kalau ini kita jalankan, perguruan tinggi akan mendapat sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Contoh jumlah pendaftar UTBK tahun ini menurun. Itu artinya dengan sistem UTBK calon mahasiswa kini lebih rasional dan lebih terbuka,” ujar Menristekdikti Mohamad Nasir di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Pelaksanaan UTBK sendiri dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP). LTMP

merupakan lembaga di bawah Kemenristekdikti, yang kini merupakan satu-satunya institusi penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari website resmi <https://ltmpt.ac.id> mulai 2019 ini, siswa yang hendak mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) wajib mengikuti UTBK.

Sementara, untuk jadwal UTBK pada tahun ini dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, sebanyak 10 kali. Setiap hari terdapat dua sesi tes, yaitu pagi dan siang sebanyak 20 sesi (kecuali hari libur nasional). Jadwal lengkapnya bisa dilihat di tautan ini.

Namun, usulan Menristekdikti Mohamad Nasir itu mendapat banyak protes, salah satunya melalui laman change.org. Hingga Sabtu siang (17/8/2019) petisi ini sudah ditandatangani oleh sekitar 92.547 orang.

Berdasarkan petisi itu, langkah Kemenristekdikti ini dinilai tidak melalui pertimbangan yang matang. Sebab, dimajukannya jadwal UTBK ke akhir semester 5 bukan akan meningkatkan hasil UTBK dan UN, tetapi justru berpotensi menjatuhkan keduanya.

Respons Sekolah dan Siswa

Kepala Sekolah SMAN 1 Depok, Jawa Barat, Supyana mengatakan, sebaiknya UTBK dilaksanakan setelah UN berlangsung. Alasannya, kata dia, hal itu akan mengganggu konsentrasi peserta didik pada proses belajar mengajar.

Apalagi, kata Supyana, siswa yang tengah menginjak bangku kelas 12, proses belajar mengajarnya sangat ketat untuk menyelesaikan dan menguasai seluruh mata pelajaran.

“Untuk dapat lulus dari satuan pendidikan, seluruh peserta didik harus menyelesaikan dan tuntas semua program pembelajaran. Apabila ditambah beban harus mempersiapkan UTBK, saya khawatir pencapaian hasil tidak maksimal,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (15/8/2019).

Supyana mengatakan, jika hasil UTBK tersebut bagus, maka mungkin saja akan menambah semangat para peserta didik. Sebaliknya, jika hasil UTBK yang diterima para peserta didik tidak sesuai dengan harapan mereka, maka akan berpengaruh terhadap semangat siswa-siswi dalam belajar. Bahkan drop sebelum mengerjakan UN.

“Tapi kalau ini [UTBK] harus dilaksanakan sebelum UN, Kemenristekdikti harus segera diputuskan [waktunya]. Sehingga sekolah dapat merevisi program untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, khususnya kelas 12,” kata dia.

Akbar, siswa kelas 12 SMK Walang Jaya, Jakarta mengatakan memang bagus jika UTBK dilaksanakan sebelum UN. Sebab, kata dia, dirinya jadi mengetahui seberapa besar nilai yang ia dapatkan untuk mengikuti ujian SBMPTN kelak.

“Kalau ada UTBK duluan, kan, enak. Jadi kami sudah tahu nanti bakal masuk perguruan tinggi yang mana sesuai sama nilai kita. Kalau hasilnya bagus juga, kan, bikin kami makin semangat,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto.

Sebaliknya, kata Jayanti Mandasari, siswi kelas 12 SMAN 72 Jakarta, dirinya khawatir, jika nilainya tak sesuai harapannya, maka justru akan menurunkan semangat belajarnya untuk mengikuti UN nanti.

“Takut saja gitu kalau keluar hasilnya nilainya kecil. Pasti pengaruhnya ke semangat belajar,” ucapnya kepada reporter Tirto.

Namun, mereka berdua memilih untuk mengikuti apa pun kebijakan yang ada di Kemenristekdikti dan juga pihak sekolah.

“Ya paling persiapan yang dilakukan belajar terus biar bisa menguasai materi. Jadi enggak masalah mau duluan UTBK atau belakangan dari UN,” kata perempuan yang akrab disapa Yanti ini.

Siswa Bisa Stres Kebanyakan Ujian

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, manfaat jika UTBK dilakukan sebelum UN yaitu para peserta didik dapat mengukur nilai untuk masuk Perguruan Tinggi yang akan mereka pilih.

Namun, kata dia, jika siswa tersebut tidak siap dengan hasil yang mereka terima karena tak sesuai dengan harapan, maka akan menyebabkan mereka bertambah stres sebelum mengikuti UN.

“Ya begitu, jadi sangat menentukan nasibnya, padahal mereka gelisah karena merasa tidak siap dan belum menguasai soal-soal UTBK,” kata Matraji kepada reporter Tirto.

Matraji mengatakan dirinya merasa kasihan kepada para siswa. Sebab, dengan banyaknya ujian yang harus dilakukan oleh para peserta didik, akan membuat mereka semakin stres. Apalagi jadwal UTBK rencananya akan diubah oleh Kemenristekdikti.

“Sekolah itu mencerdaskan bukan malah membuat anak-anak stres. Selama ujian-ujian itu masih diberlakukan, pasti menimbulkan keributan,” pungkasnya.

Selain itu, Matraji pun menyoroti sejumlah problem terkait pelaksanaan UTBK. Salah satunya soal kendala teknis terkait jaringan komputer. Menurut dia, itu merupakan keluhan tahunan yang tidak pernah direspons dengan baik.

“Soal gangguan teknis itu, ya mesti ada langkah antisipatif yang terukur dan teruji dengan baik. Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi masalah, sudah ada jalan keluarnya dan tidak mengganggu proses ujian berlangsung,” kata dia.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Ismunandar memastikan rencana dimajukannya waktu UTBK menjadi akhir 2019 belum pasti dilaksanakan dan masih dikaji.

Ia juga belum menjelaskan kapan rencana memajukan UTBK tersebut selesai dikaji. Ia bahkan enggan menyebut siapa saja yang terlibat dalam pembahasan rencana tersebut.

UTBK 2020 rencananya akan dimajukan pada akhir 2019

Sumber: <https://tirto.id/jadwal-utbk-akan-dilakukan-sebelum-un-apa-dampaknya-bagi-siswa-egtx>

Siswa Dinilai Terbebani dan Stres Bila UTBK Dimajukan Dikti



1-3. Suasana pelaksanaan UTBK di Fakultas Pertanian UNEJ. FOTO/Rilis UNEJ

Oleh: Riyan Setiawan - 15 Agustus 2019

Beban siswa akan bertambah bila UTBK untuk masuk perguruan tinggi digelar sebelum Ujian Nasional 2020.

tirto.id - Siswa bakal terbebani dengan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) masuk perguruan tinggi negeri (PTN) bila digelar sebelum Ujian Nasional (UN). Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

Menurut dia, siswa tidak akan siap dengan hasil UTBK bila buruk, sehingga menyebabkan mereka bertambah stres sebelum UN.

“Ya begitu, jadi sangat menentukan nasibnya, padahal mereka gelisah karena merasa tidak siap dan belum menguasai soal-soal UTBK,” kata dia kepada Tirto, Kamis (15/8/2019).

Para siswa, kata dia, bakal punya beban banyak, dengan penambahan ujian. Apalagi jadwal UTBK rencananya akan diubah oleh Kemenristekdikti.

“Sekolah itu mencerdaskan bukan malah membuat anak-anak stres. Selama ujian-ujian itu masih

diberlakukan, pasti menimbulkan keributan,” kata dia.

Selain itu, dirinya pun menyoroti beberapa problem terkait pelaksanaan UTBK. Seperti kendala teknis terkait jaringan komputer. Menurutnya, itu merupakan keluhan tahunan yang tidak pernah direspon dengan baik.

“Soal gangguan teknis itu ya mesti ada langkah antisipatif yang terukur dan teruji dengan baik. Jadi, kalo sewaktu-waktu terjadi masalah, sudah ada jalan keluarnya dan tidak mengganggu proses ujian berlangsung,” tutur dia.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kemenristekdikti, Ismunandar memastikan rencana dimajukannya waktu UTBK menjadi akhir tahun 2020 belum pasti dilaksanakan dan masih dikaji.

“Akan dievaluasi dan ditentukan dulu,” ujar Ismunandar, Rabu (14/8/2019) lalu.

Kemudian, ia pun juha belum menjelaskan kapan rencana memajukan UTBK tersebut selesai dikaji. Dia juga enggan menyebut siapa saja yang terlibat dalam pembahasan rencana itu.

Oleh karena itu, kata dia, sampai saat ini belum ada kejelasan soal pelaksanaan rencana itu. Ia berharap masyarakat untuk menunggu keputusan akhir dari Kemenristekdikti.

“Tunggu sampai ada berita pastinya saja. Tidak perlu resah,” kata dia.

Siswa akan bertambah stres bila hasil UTBK buruk

Sumber: <https://tirto.id/siswa-dinilai-terbebani-dan-stres-bila-utbk-dimajukan-dikti-egmN>

Wacana DAU untuk Guru Honorer, JPPI: Perlu Kepastian Status Juga



Guru honorer dan guru tidak tetap melakukan aksi tutup mulut saat menggelar aksi di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin (29/10/2018). ANTARA FOTO/Irfan Anshori/kye.

Oleh: Riyan Setiawan - 13 Agustus 2019

Tanpa status kepegawaian tetap, para guru honorer meski mendapatkan gaji dari dana alokasi umum (DAU) tetap rawan, karena bisa kapan pun diberhentikan oleh kepala sekolah.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Dalam usulannya, Muhadjir mewacanakan agar guru honorer dapat bisa digaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) melalui dana alokasi umum (DAU).

Menurut Ubaid, sudah selayaknya para guru honorer itu diperhatikan oleh pemerintah. "Usulan untuk gaji diambilkan dari DAU saya setuju supaya mereka dibayar dengan layak minimal UMR [upah minimum regional]," ujar dia, kepada Tirto, Selasa (13/8/2019).

Namun, kata dia, pemerintah harus bisa memberikan kepastian terkait gaji guru honorer. Sebab kenyataannya, ujar dia, di beberapa daerah masih banyak guru honorer yang pendapatannya di bawah UMR. Bahkan, pembayaran gajinya pun sering mengalami keterlambatan .

Meski usulan dari Mendikbud bagus, kata Ubaid, persoalannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Para guru honorer juga membutuhkan kepastian terkait status mereka.

Status tersebut seperti pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebab, ujar dia, jika status mereka selamanya menjadi guru honorer yang dikontrak, bisa diputus kapan pun pihak sekolah. “Selama ini kebijakan pemerintah hanya untuk ngadem-ngadem masalah saja. Tidak menyelesaikan masalah.

Hidup mereka bergantung dengan status honorer yang kapan pun bisa diberhentikan dan ini masalahnya,” kata dia.

Pemerintah diminta memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan status kepegawaian.

Sumber : <https://tirto.id/wacana-dau-untuk-guru-honorer-jppi-perlu-kepastian-status-juga-egcG>

Polemik eSports Jadi Mata Pelajaran di Bangku Sekolah

Senin, 12 Agustus 2019 17:41 WIB

Penulis: Annisa Hardjanti, Matheus Elmerio Giovanni | Editor: Ivan Reinhard Manurung 1 0 komentar



© INDOSPORT/Istimewa Pro Kontra Esport masuk kurikulum pendidikan di Indonesia.

INDOSPORT.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mengutarakan niatnya untuk memasukkan olahraga elektronik atau eSports ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Tentu saja komentar ini bakal mengundang pro dan kontra.

“Pelajar saya kira harus dibuka kurikulum tentang pengetahuan eSports ini secara formal,” kata Imam di Aula Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara, 28 Januari 2019 lalu.

Gagasannya itu bukan tanpa alasan, Imam meyakini bahwa ide ini nantinya akan mampu mencetak atlet-atlet masalah depan di cabang olahraga eSports.

Polemik atas komentar ini pun muncul. Bagi sebagian siswa rencana ini mereka anggap positif. Demam eSports atau olahraga elektronik seperti Mobile Legends, Arena of Valor, PUBG, Clash Royale, Hearthstone, StarCraft 2, PES 2018, Dota 2, dan lainnya sangat digandrungi oleh banyak anak didik Indonesia.

Ada yang menyebutnya sebagai sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, ada pula yang menilai wacana itu hanya akan membebani siswa.

Respons para siswa pun beragam. Andrew Danis, siswa SMAN 5 Depok mengatakan bahwa eSports bisa membawa banyak dampak positif pada siswa, misalnya melatih konsentrasi dan

kerja sama dan mengasah kepedulian.

“Di game eSports, kita diajarkan buat belajar solid, harus peduli sama rekan satu tim yang lain. Kita juga dilatih untuk bisa lebih kontrol diri, enggak gampang emosi,” ucap siswa tersebut seperti dilansir dari laman berita olahraga Antara.

Sementara Rakha Fadhilah, siswa SMAN 9 Tangerang, berpendapat memasukkan eSports dalam kurikulum juga akan bisa menekan perilaku negatif siswa seperti tawuran ataupun menggunakan obat-obatan terlarang.

“Jadi yang tadinya suka ngumpul-ngumpul enggak jelas buat tawuran, sekarang bisa lebih terarah gitu kan, mereka beralih jadi bermain gim. Itu bagus sih, jadi lebih positif,” kata Rakha, yang saat ini duduk di Kelas XI.

Awas Kecanduan



© Fitra Herdian/INDOSPORT Suasana kompetisi eSports.

Psikolog anak dan remaja Ratih Zulhaqqi mengatakan bermain eSports dalam waktu lama dapat menyebabkan kecanduan pada anak. Dia menyebut dampak kecanduan yang timbul bisa menyerupai ketagihan narkoba.

“Mungkin efeknya mirip narkoba ketika mereka sudah menutup tontonan (game), tetapi mereka tetap memikirkan itu, sehingga akhirnya mereka selalu mengakses ke situ, sampai melupakan apa yang harus mereka lakukan,” ujar Ratih.

Ratih mengatakan tingkat kecanduan pada level seperti itu sudah tergolong berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja, karena dapat memicu emosi yang tidak stabil serta mempengaruhi nilai akademik anak di sekolah.

Ketua Umum Indonesia eSports Association (IeSPA) Eddy Lim menanggapi. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terlalu gaduh menyikapi gagasan Menteri Pemuda dan Olahraga memasukkan eSports ke kurikulum.

Wacana tersebut, menurut dia, mestinya dilihat sebagai upaya positif untuk mendukung

pengembangan pendidikan siswa.

“Yang pasti itu bukan mengajak orang untuk bermain game. Kalau ajak orang bermain game, tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum, kita larang orang juga akan main dengan sendirinya. Jadi kalau dimasukkan dalam kurikulum itu lebih kepada pembentukan sumber daya manusia untuk industri eSports ke depannya,” kata Eddy.

Eddy melihat gagasan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membangun ekosistem industri eSports di Indonesia.

“Kalau eSports diajarkan dalam kurikulum itu berupa bisnis atau ekonomi, misal menjadi event organizer atau programmer membuat game, itu kenapa tidak boleh? Itu bisa diajarkan lewat bisnis atau ekonomi,” tambah dia.

Terlalu Berlebihan?



© KememporaRencana Mempora untuk menjadikan eSports ke kurikulum pendidikan Indonesia masih perlu dikaji ulang.

Pertanyaan besarnya, seberapa penting memangnya eSports untuk sampai mendapatkan tempat di tengah dunia pendidikan formal Indonesia?

Lalu, apakah instrument pendidikan negeri ini sudah cukup siap untuk mengarahkan para siswa ketika eSports kini sama halnya seperti mata pelajaran lainnya?

Kepada redaksi berita olahraga INDOSPORT, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji melihat gagasan tersebut lebih sebagai beban, baik bagi siswa maupun sekolah.

“Makin majemuk itu kurikulum dan membebani siswa,” ujar Ubaid.

Ia meyakini bahwa dengan kondisi tersebut, tentunya hasil yang diharapkan dari gagasan tersebut bakal tak maksimal. Menurut Ubaid, siswa saat ini sudah dibebani dengan begitu banyak mata pelajaran. Jika eSports sampai harus dimasukkan ke dalam kurikulum, dirinya menilai hal ini terlalu dipaksakan.

“Kalau masuk kurikulum, itu terlalu berlebihan. Ya, mungkin masuk ekstrakurikuler, peminatan khusus, yang punya minat khusus ke eSports, itu boleh,” jelasnya.

Memang membutuhkan perencanaan yang matang bagi pemerintah untuk mengambil langkah sejauh itu, melihat ketidaksiapan pendidikan dalam melibatkan kurikulum berbasis IT.

Ubaid mengambil contoh lewat Ujian Nasional (UN) berbasis komputer yang diterapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu yang ternyata terlalu membebani siswa.

“Lihat saja Ujian Nasional berbasis komputer, di lapangan saja berantakan karena banyak siswa tidak punya komputer, akibatnya pungli muncul karena siswa harus beli komputer,” kata dia.

Meski jika nantinya gagasan itu menjadi kenyataan, tampaknya bukan Menpora yang bakal berpikir lebih keras, melainkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Pasalnya, ada begitu banyak kajian yang mesti dilakukan untuk membawa eSports ambil bagian dalam kurikulum pendidikan di negeri ini. Salah satunya adalah guru.

Sebagai tenaga pengajar, penting bagi mereka untuk dapat membuat siswanya memahami materi yang disampaikan di dalam kelas.

Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2018, hanya 40 persen guru non-teknologi di Indonesia yang memahami penggunaan teknologi.

“Banyak guru-guru di sekolah itu belum bisa memakai teknologi dengan tepat. Sekolah-sekolah sendiri fasilitasnya juga tidak rata di Indonesia,” kata Ubaid.

Ubaid sendiri melihat ekstrakurikuler menjadi wadah yang pas dan seharusnya dipilih oleh pemerintah dalam mengembangkan eSports lebih luas lagi di Indonesia.

“Sepak bola saja tidak masuk kurikulum kan. Jika berminat, bisa digali lebih dalam lewat ekstrakurikuler saja,” ujarnya.

Lebih dari itu, pada dasarnya, eSports sendiri cukup menjadi bagian dari pengetahuan dalam pelajaran olahraga, layaknya cabang olahraga lainnya, seperti basket dan bulutangkis.

“Jika memang siswa ada ada passion ke sana, bisa diikuti ke ekstrakurikuler atau komunitas yang semacamnya,” katanya lagi.

Pemerintah saat ini memang melihat bahwa dunia pendidikan, terutama sekolah sebagai instrument yang cukup dekat dengan anak-anak.

Ketertarikan game sendiri memang berkembang di tengah anak-anak. Agar lebih terarah, eSports pun masuk direncanakan masuk ke dalam kurikulum Pendidikan di Indonesia.

Namun sebenarnya, ada banyak wadah selain sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Pembangunan sport center khusus untuk eSports misalnya, bisa jadi jalan keluar ketimbang memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, dan malah justru mengundang kontroversi tersendiri.

Sumber: <https://www.indosport.com/multi-event/20190812/polemik-esports-jadi-mata-pelajaran-di-bangku-sekolah>

Guru Honorer Depok Belum Digaji 3 Bulan, Pemkot Diminta Investigasi



Sejumlah mahasiswa Fakultas Keguruan Untirta (Universitas Negeri Tirtayasa) Banten berunjuk rasa mendesak pemerintah memperbaiki nasib para guru honorer, di Alun-alun Serang, NBanten, Senin (26/11/2018). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Oleh: Riyan Setiawan - 7 Agustus 2019

Gaji guru honorer di Depok belum dibayar selama 3 Bulan, JPPI meminta Pemkot Depok bertanggung jawab dan segera menanggapi persoalan tersebut.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti sejumlah keluhan Guru Honorer Sekolah Dasar (SD) di Depok, Jawa Barat yang resah akibat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum juga membayar gajinya selama tiga bulan.

Bahkan, terhitung sejak Mei lalu, pembayaran gajinya tersendat hingga Agustus ini.

Ubaid menilai, Pemkot Depok tidak bertanggung jawab dan terkesan lepas tangan dengan kondisi tersebut.

“Sebab, ini bukan kejadian kali ini saja, tapi sudah berkali-kali tapi tidak ada upaya perbaikan,” kata dia kepada Tirto, Rabu (6/8/2019).

Sebaiknya, ujar Ubaid, Pemkot harus segera cepat menanggapi dan melakukan investigasi mengapa gaji Guru Honorer SD di Depok sampai tak dibayar hingga tiga bulan. Hal tersebut, lanjutnya, agar kejadian yang tidak diinginkan seperti ini tidak terulang lagi.

“Dalam banyak kasus, hal semacam ini tidak hanya soal keterlambatan uang honor, tapi ada oknum yang memainkan dana dan terendus tindak pidana korupsi. Jadi harus ada investigasi dan tindak tegas oknum yang terlibat,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini guru honorer selalu saja mengalami ketidakadilan, dan kebijakan pemerintah pun selalu saja tidak memihak kepada mereka.

“Mereka ini ada dan nyata kontribusinya, tapi tak dihargai oleh negara,” tegas dia.

Oleh karena itu, Ubaid pun meminta kepada pemerintah untuk menghargai jasa para Guru honorer dengan cara membayar kompensasinya secara tepat waktu.

“Jangan sampai telat-telat, udah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) telat lagi, kasihan mereka juga punya tanggung jawab besar di keluarganya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Guru SDN Sawangan 1, Jujun Rosandi mengatakan, terakhir kalinya menerima gaji menjelang Lebaran akhir Mei 2019. Hingga kini kurang lebih sudah tiga bulan, dia dan seluruh guru honor lainnya belum juga mendapatkan gaji.

“Belum juga cair gajinya sudah mau jalan tiga bulan, Juni-Agustus. Terakhir pas mau lebaran dibayar dua kali gaji dan tunjangan hari raya (THR),” kata Jujun, Senin (05/08/2019) lalu.

Jujun mengaku resah dengan kebijakan Pemerintah Kota Depok tentang prosedur penggajian honorer, yang selalu terlambat tiap bulannya.

Padahal, bendahara di sekolahnya selalu menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Disdik Kota Depok tepat waktu.

“Kami sudah bilang baik-baik untuk meminta tidak telat, tetap saja telat-telat juga, resah banget tiap bulan,” ujarnya. **“Mereka ini ada dan nyata kontribusinya, tapi tak dihargai oleh negara.”**

Sumber: <https://tirto.id/guru-honorer-depok-belum-digaji-3-bulan-pemkot-diminta-investigasi-efPC>

Timbang-Menimbang Rektor Asing untuk Kampus Negeri



Menristekdikti Muhammad Nasir bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR di gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 2 Agustus 2019

Menristekdikti usul ada kampus negeri yang dikepalai rektor asing. Dia menilai itu baik demi meningkatkan kualitas pendidikan, tapi yang lain merasa itu mubazir.

tirto.id - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mempertimbangkan menggunakan jasa orang asing sebagai pimpinan di kampus negeri. Itu semata agar kualitas pendidikan meningkat meski ditentang banyak orang, termasuk para rektor, katanya.

“Saya di-bully habis-habisan, para rektor protes kepada kami, padahal kita harus belajar dari luar negeri. Singapura sukses karena rektornya dari luar negeri, Taiwan dan Cina maju juga rektornya dari luar negeri, bahkan Arab Saudi rektornya dari Amerika dan dosennya 40 persen dari Amerika dan Eropa, sekarang masuk peringkat 189 dunia,” katanya 22 Juli lalu.

Nasir tampaknya tidak main-main dengan usulnya. Terbukti, Rabu (31/7/2019) lalu dia mengaku telah lapor ke Presiden Joko Widodo soal ini. Laporan dibutuhkan karena agar usulnya bisa terealisasi, ada regulasi yang perlu ditata ulang.

“Kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya,” katanya. Nasir lantas bicara soal kriteria calon rektor hingga kampus mana yang cocok dijadikan pilot project.

Para calon rektor akan ditantang meningkatkan kualitas pendidikan dengan keberhasilan yang

diukur secara kuantitatif. Misalnya, membawa kampus yang dia kelola jadi peringkat 200 terbaik dunia, lalu 150, lalu tembus 100. "Harus seperti itu, kami tidak bisa targetnya item per item."

Calon rektor juga mesti sudah punya pengalaman memimpin kampus dan telah meningkatkan kualitas kampus yang dia pimpin, tegas Nasir, bekas Rektor Universitas Diponegoro.

Sementara kampus yang cocok, katanya, adalah kampus yang sudah menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Jumlah PTNBH ada 11 dari total 112 PTN yang ada di Indonesia, dua di antaranya UI dan ITB.

Nasir menargetkan pada 2020 nanti sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor asing. Empat tahun kemudian, 2024, jumlahnya ditargetkan meningkat jadi lima. Bukan hanya rektor, Nasir juga usul kampus-kampus menerima dosen luar mengajar.

"Kalau dosen sifatnya homogen tidak akan maju. Rata-rata perguruan tinggi di Indonesia hampir homogen," ujarnya. "Kalau perguruan tinggi luar sudah ada dosen asing. Meneliti dan bekerja sama. Ini harus kita dorong," ujarnya.

Kontra

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menolak tegas usul ini. "Itu kebijakan ngawur. Enggak perlulah kalau asing dikasih posisi rektor," katanya kepada reporter Tirto, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya usul ini hanya upaya pemerintah menutup-nutupi kegagalan mereka mengembangkan sumber daya di bidang pendidikan. Tak perlu ada rektor atau bahkan dosen luar jika seandainya pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM.

"Bagaimana dengan program strategis peningkatan mutu dosen [lokal]? Itu yang kita enggak pernah dengar," katanya.

Mestinya, kata Ubaid, pemerintah membuat peta jalan yang jelas untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dalam peta jalan itu mengundang dosen luar bisa masuk dalam salah satu program saja.

"Jadi jangan bikin program-program yang pragmatis, yang tidak terorganisir dengan baik," tambahnya.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Komisi X mengurus bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah.

Hetifah bilang, peningkatan peringkat kampus tidak serta merta berhasil jika dipimpin rektor asing. Yang jadi akar masalahnya adalah pengelolaan perguruan tinggi, katanya kepada reporter Tirto.

Maka selama pengelolaannya diperbaiki, peningkatan kualitas akan mengikuti. Nasir tahu banyak yang menolak usulnya, tapi dia santai saja. Dia merasa ketidaksetujuan muncul karena ketidaktahuan. "Menolak itu biasa. Nanti kami jelaskan, baru dia paham," katanya kepada awak media di Jakarta Pusat.

"Itu kebijakan ngawur. Enggak perlulah kalau asing dikasih posisi rektor," kata pengamat

Sumber: <https://tirto.id/timbang-menimbang-rektor-asing-untuk-kampus-negeri-efst>

Pengamat: Angka Putus Sekolah Tinggi Akibat Pemerintah Kurang Fokus



Personel kepolisian didampingi seorang guru membagikan buku pelajaran dan buku bacaan kepada sejumlah anak yang putus sekolah di Desa Kabulak, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT belum lama ini. (Foto: ANTARA FOTO)

Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 24 Juli 2019 | 13:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, masih tingginya angka putus sekolah disebabkan pemerintah kurang fokus pada kelompok yang selama ini tereksklusi dalam sistem. Akibatnya, pemerintah masih berkuat dengan persoalan yang sama soal putus sekolah dan kendala akses.

Bahkan, Ubaid menyebut, kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum mampu menjangkau seluruh kalangan. Belum lagi ada persoalan soal ketidaktepatan sasaran yang tanpa adanya mekanisme kontrol ketat, bisa menimbulkan celah korupsi.

Oleh karena itu, Ubaid meminta pemerintah daerah (pemda) harus berkomitmen karena selama ini komitmen pemda patut dipertanyakan.

“Selama ini mereka belum fokus pada pengembangan SDM (sumber daya manusia, red) melalui pendidikan. Akibatnya, alokasi APBD untuk pendidikan juga masih rendah. Ini pasti berdampak pada akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya kepada *SP*, Rabu (7/24).

Kendati demikian, untuk menuntaskan angka putus sekolah, Ubaid mengharapkan pemda untuk fokus pada kelompok-kelompok anak yang selama ini tereksklusi. Selain itu, pemda juga

diminta melakukan evaluasi pada program KIP yang belum menjangkau semua dan banyak tidak tepat sasaran.

Kemudian, pemda harus berkomitmen mengalokasikan APBD minimal 20% untuk pendidikan di luar dana transfer pusat, serta fokus memperkuat pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) berbasis desa untuk daerah- daerah yang tidak terjangkau sekolah.

Sumber: Suara Pembaruan <https://www.beritasatu.com/nasional/566072/pengamat-angka-putus-sekolah-tinggi-akibat-pemerintah-kurang-fokus>

Di Perguruan Tinggi Negeri Sudah Banyak Orang Pintar yang Kualitasnya Sama Bahkan Melebihi Tenaga Asing.



Foto : ISTIMEWA Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.

JAKARTA – Rencana pemerintah merekrut rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dari luar negeri atau asing dinilai sangat kontraproduktif dengan misi Presiden Joko Widodo memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Selain itu, rencana itu, belum tentu sesuai kebutuhan perguruan tinggi di dalam negeri.

“Seorang rektor harusnya memiliki orientasi tentang kondisi kampus secara khusus dan secara umum memahami kondisi pendidikan di Indonesia. Hal ini yang akan menjadi kendala ketika kampus dipimpin oleh rektor dari luar negeri,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Jakarta, Selasa (23/7).

Ia menilai rencana merekrut rektor asing merupakan kebijakan atau langkah *ngawur* dan berlebihan. Bahkan, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah.

Menurutnya, masih banyak masalah yang harus dibenahi di sektor perguruan tinggi, ketimbang mendatangkan rektor asing. Beberapa permasalahan tersebut, di antaranya posisi perguruan tinggi yang masih seperti menara gading, kualitas dosen, sampai lulusan perguruan tinggi belum sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia menilai meski ada rektor asing memimpin kampus, tetap tidak akan berdampak positif selama elemen kampus belum memiliki kapabilitas.

Ubaid menyebut meski beberapa negara menerapkan sistem rektor dari asing, tapi hal itu masih belum sesuai jika harus diterapkan di Indonesia. “Tidak semua solusi bisa diterapkan di tiap

negara karena masalah yang berbeda-beda,” tandasnya.

Anggota Komisi X DPR, Djoko Udjiyanto, menilai rencana perekrutan rektor asing harus dilihat secara lebih objektif. Menurutnya, wacana tersebut boleh dilakukan jika diterapkan di perguruan tinggi swasta. “Di perguruan tinggi negeri sudah banyak orang pintar yang kualitasnya sama bahkan melebihi tenaga dari luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, khawatir kebijakan tersebut bisa berpengaruh terhadap proses mekanisme pemilihan rektor. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan ketidaksetaraan bagi akademisi dalam negeri.

Ia juga menyebut proses pemilihan rektor di Indonesia belum didasarkan pada kecakapan dan kemampuan.

“Di Indonesia bila calon rektor tidak menghadap sana sini, bahkan melakukan kompromi-kompromi politik, sulit untuk yang bersangkutan dapat menjadi rektor,” jelasnya.

Tingkatkan Kualitas

Secara terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mendukung rencana pemerintah merekrut rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi. Menurutnya, rencana tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

“Cara kita mengelola dan memimpin sistem pendidikan di Indonesia itu, kita harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran maupun praktik yang hasilnya baik,” katanya usai menghadiri Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang, di Semarang, Selasa (23/7).

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang membutuhkan waktu atau *long life learning*.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo yang akan merekrut rektor asing di Indonesia mulai 2020.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemetaan terkait dengan berbagai peraturan yang mendukung maupun yang tidak mendukung rencana tersebut, termasuk melakukan penyederhanaan,” katanya.

Selain itu, Kemristekdikti juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait dengan anggaran perekrutan rektor dari luar negeri agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ia menyebutkan salah satu latar belakang rencana perekrutan rektor dari luar negeri tersebut adalah jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai daya saing di tingkat internasional itu relatif sangat sedikit. **ruf/SM/E-3**

Sumber: <http://www.koran-jakarta.com/rektor-asing-bukan-solusi-tepat/>

Nasib Guru Honorer Era Jokowi: Jika Tak Kompeten, Jadi Guru Kontrak



Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/9/2018). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 20 Juli 2019

Di era SBY hampir 1 juta guru honorer diangkat menjadi PNS. Populis tapi problematis, sebab mengabaikan aspek kompetensi.

tirto.id - Kisah sedih datang dari Pandeglang, Banten. Guru honorer di SD Negeri Karyabuana 3, Nining Suryani, terpaksa memanfaatkan toilet sekolah menjadi bagian rumahnya sejak dua tahun terakhir. Nining hanya dibayar Rp350 ribu. Itu pun dibayar per tiga bulan.

Fakta bahwa Nining-Nining lain ada di berbagai wilayah di Indonesia membuat banyak pihak prihatin. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, misalnya, menyangkan bagaimana pemerintah belum serius menanggulangi problem terkait nasib guru honorer.

"Ini bukti buruknya tata kelola pendidikan kita," katanya kepada *Tirto*, Rabu (17/7/2019).

Tawaran solusinya masih sama: pengangkatan status guru-guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski demikian, Ubaid juga menekankan agar ada kebijakan afirmasi dengan sistem yang jelas. Tujuannya agar guru-guru honorer tidak disamakan dengan *fresh graduate* yang melamar sebagai PNS.

Lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo diwarnai perubahan kebijakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan dua periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Satriwan Salim, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI), mencatat bagaimana dalam sepuluh tahun SBY mengangkat hampir 1 juta guru honorer menjadi PNS, terutama dari golongan honorer tingkat satu (K1).

Kebijakan ini ia sebut populis sekaligus problematis. Persoalan guru honorer, katanya, tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tapi juga kompetensi. Mengutip hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2017, hasil rata-ratanya bahkan tidak mencapai nilai 70.



Infografis tirta.id

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dikumpulkan *Beritagar* menunjukkan rata-rata nilai UKG tertinggi didapat golongan guru Sekolah Menengah Atas, yakni 69,55. Nilai terendah dicapai oleh golongan guru Sekolah Dasar, yaitu 62,22.

“Perbandingan kebijakan antara rezim sebenarnya tidak hitam putih.

Pengangkatan sejumlah guru honorer memang memperbaiki status. Tapi pengangkatan ‘cuma-cuma’ itu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas guru,”kata Satriwan ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (18/7/2019). Hal yang sama diungkapkan Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI). Cara SBY dalam mengangkat sebanyak-banyaknya guru honorer ia pandang serampangan karena tidak didasarkan pada kualitas.

“Guru honorer tetap diprioritaskan. Tapi kan tidak seenaknya. Harus melalui proses rekrutmen yang baik, berbasis kualitas, menjadi saringan yang baik,” ujarnya kepada *Tirto*, Jumat (19/7/2019).

Pemerintahan Jokowi menawarkan jalan tengah melalui Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan pasal 6 dan 7, ASN dibagi menjadi pegawai tetap PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Untuk menjadi PPPK, pegawai honorer mesti menjalani tes seleksi terlebih dahulu. Jika lolos, gaji dan tunjangan menjadi setara dengan PNS. Perbedaannya PPPK tidak mendapat pensiun dan kontrak kerjanya disesuaikan dengan perjanjian bersama instansi terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK, perjanjian kerja PPPK minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Acuan penilaian kinerja.

Tidak semua guru honorer sepakat dengan konsep PPPK. Ribuan di antaranya yang berstatus honorer kategori dua (K2) menyelenggarakan demonstrasi di seberang Istana Negara pada akhir September 2018. Mereka meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pemerintah bergeming. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syarifuddin menegaskan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat seleksi CPNS bisa mengikuti seleksi PPPK.

“Sesuai Undang-undang ASN, tak boleh ada lagi rekrutmen guru atau aparat sipil negara honorer, karena rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan,” katanya di Kantor KemenPAN RB, Jumat (28/9/2018).

Satriawan menilai kebijakan PPPK membuat guru honorer usia tua bisa bernapas lega sebab tes seleksinya tidak terbatas untuk guru honorer usia muda.

Meski demikian ia mengkritik banyaknya guru honorer K2 yang mengikuti seleksi PPPK namun sampai sekarang belum menerima hasilnya. “Ini berdasarkan laporan teman-teman. Salah satunya seorang guru di salah satu SMA negeri di Bogor.”

Di sisi lain Ramli memandang proses seleksi PPPK sudah berjalan cukup transparan. Catatannya ialah soal-soal tesnya bisa lebih spesifik untuk mengukur kemampuan guru di masing-masing bidang. Baginya, sistem komputerisasi saja tidak cukup.

Ramli mencontohkan guru bahasa Inggris yang perlu dites secara verbal karena banyak yang belum memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik. Demikian juga guru agama mengenai kemampuan khotbah Jumat dan lain-lain.

Wacana nasib guru di Indonesia bukan hanya soal kesejahteraan, mengutip Satriawan, tapi juga kompetensi. Sayangnya, ia menilai program-program peningkatan kompetensi guru dalam lima tahun belakangan masih memakai pola-pola lama yang serupa dengan yang dijalankan pada era Orde Baru.

“Guru dari daerah dibawa ke Jakarta, diceramahi selama dua tiga hari, lalu pulang. Bentuknya secara massal dan sporadis. Yang dibahas adalah isu yang ramai, seperti Kurikulum 2013 atau soal HOTS, dikasih modul, selesai. Ini pun tidak tersebar merata.” FSGI menawarkan beberapa poin penting. Pertama, program peningkatan kompetensi guru mesti difokuskan pada konten, bukan durasi pelatihan. Oleh sebab itu pengisi materinya adalah pakar dan pelaku pendidikan yang disesuaikan dengan bidang keilmuannya, bukan birokrat.

Kedua, program bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan. Artinya, bisa berbeda-beda di tiap daerah. Ketiga, program mesti berkelanjutan. Keempat, harus berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Satu tambahan lagi: program harus evaluatif, yang tidak lagi per daerah, tapi mulai per individu.

Satriawan dan Ramli sadar problem guru honorer tidak berada pada pundak pemerintah pusat

semata. Pemerintah daerah yang *political will*-nya rendah disasar sebagai faktor utama lain. Akarnya ada pada penyediaan dana pendidikan yang rendah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bahkan ada yang porsi untuk pendidikannya hanya lima persen dari total APBD. Pemetaan banyak yang belum matang. Kemendagri sebenarnya bisa koordinasi, menegur daerah yang anggarannya kecil sampai kurang menyejahterakan guru honorer,” ujar Satriawan.

Ia melanjutkan skema pembayaran gaji guru honorer hingga minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMR). DKI Jakarta disebut sudah melakukan hal ini. Sayangnya kemungkinan untuk dicontoh daerah lain terkendala status istimewa Jakarta hingga tingkat pendapatannya memang jauh melampaui daerah lain.

Ramli meminta pemerintahan Jokowi ke depan memprioritaskan kejelasan status guru sekolah dasar. Guru SD menurutnya golongan pendidik paling pokok karena rusak maupun suksesnya pendidikan di level pendidikan menengah dan tinggi disokong dari pendidikan dasarnya.

“Angkatlah, jika tidak ke PNS ya PPPK.”

Ramli kemudian mengutip visi Jokowi yang berharap pengangguran di Indonesia bisa berkurang melalui peningkatan kemampuan di bidang vokasi, terutama bagi mereka melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Tapi kan percuma juga jika gurunya juga tidak produktif. Salah satunya disebabkan oleh ketidakjelasan statusnya, alias masih honorer. Kadang latar belakangnya apa, tapi mengajarnya apa,” pungkasnya.

***Hasil Uji Kompetensi Guru masih belum baik,
tapi program peningkatan kompetensi masih
bergaya lama.***

Sumber: <https://tirto.id/nasib-guru-honorer-era-jokowi-jika-tak-kompeten-jadi-guru-kontrak-e>

JPPI: Guru Honorer Tinggal di WC Sekolah Bukti Buruknya Pendidikan



Ilustrasi toilet. Getty Images/iStockphoto

Oleh: Riyan Setiawan - 17 Juli 2019

Soal guru honorer yang tinggal di WC sekolah, JPPI menilai, bukti buruknya tata kelola pendidikan.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti kondisi Nining Suryani, guru honorer SD Negeri Karyabuana 3, Pandeglang yang terpaksa memanfaatkan toilet sekolah jadi bagian rumahnya sejak 2 tahun lalu. Bahkan, Nining hanya mendapat upah Rp350 ribu yang dibayarkan per tiga bulan.

Menurutnya, kondisi yang menimpa Nining itu merupakan bukti buruknya tata kelola pendidikan di Indonesia.

“Ini bukti buruknya tata kelola pendidikan kita. Guru diperlakukan secara tidak manusiawi. Nasib guru honorer hampir sama [di seluruh Indonesia] seperti di Pandeglang [Nining],” kata dia kepada Tirto, Rabu (17/7/2019).

Dirinya menyayangkan, selama ini pemerintah tidak pernah secara serius mengurus para guru honorer tersebut. Bahkan, kata dia, para guru honorer hanya diberikan harapan palsu oleh pemerintah tanpa diberi kepastian status.

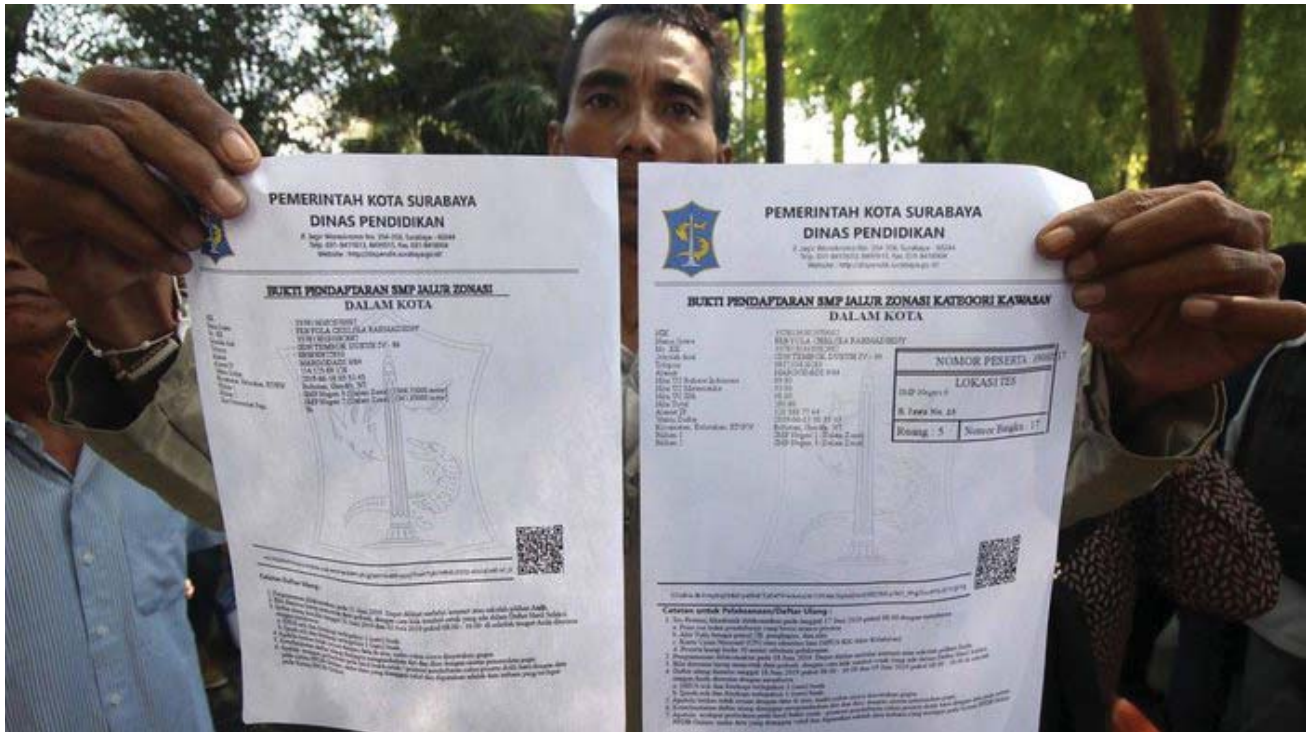
“Harus ada kebijakan afirmasi untuk para guru honorer ini. Jangan samakan mereka dengan fresh graduate yang melamar PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ucapnya.

Kemudian dirinya meminta, pemerintah harus memiliki skema khusus untuk mengafirmasi para guru honorer. Lalu ia juga meminta, agar Pemerintah daerah harus memiliki keberpihakan soal nasib para Guru Honorer yang hingga saat ini belum juga diangkat sebagai PNS.

“Pendataannya juga harus clear, sebab bila musim pengangkatan honorer, ada banyak orang yang nyerobot ambil jatah kursi honorer,” pungkas Ubaid. **“Nasib guru honorer hampir sama [di seluruh] seperti di Pandeglang”**

Sumber: <https://tirto.id/guru-honorer-tinggal-di-wc-sekolah-bukti-buruknya-pendidikan-eerR>

JPII Minta Satgas PPDB Libatkan Semua Komponen Pemerintah



Warga menunjukkan bukti pendaftaran SMP jalur zonasi saat berunjukrasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/pd.

Oleh: Riyan Setiawan - 15 Juli 2019

Pemerintah yang dimaksud Kemenag, Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan daerah, komite sekolah dan masyarakat sipil secara luas, serta pihak profesional.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII) Ubaid Matraji meminta Satuan Petugas (Satgas) Sistem Zonasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan semua komponen pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dinas Pendidikan Daerah, komite sekolah dan masyarakat sipil secara luas. Selain itu, menurutnya, juga penting melibatkan pihak-pihak yang profesional seperti dari kalangan akademisi.

“Sehingga Satgas bisa menampung suara dan mengevaluasi apa pun yang terjadi dari berbagai angle dan perspektif,” kata Ubaid saat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) ini juga meminta agar Satgas yang nanti dibentuk oleh pemerintah, jangan menggunakan “kacamata kuda”. Contohnya, kata dia, Satgas tersebut hanya berkordinasi dengan Dinas Pendidikan saja, sehingga hanya mendapat satu perspektif. Menurutnya, sangat penting jika satgas tersebut juga mendengarkan aspirasi dari para orang tua murid tentang apa saja yang terjadi selama sistem PPDB berlangsung.

“Kita sudah buktikan bahwa tahun ini adalah tahun terkisruh dan tahun tergaduh sampai di mana-mana demo menolak. Dan sampai hari ini, pertama masuk ada sekolah di Jawa Timur yang menyebarkan angket ke seluruh anak yang masuk mengatakan tidak ingin sistem zonasi diberlakukan tahun depan,” ucapnya

“Angkanya sampai 84 persen yang menolak zonasi ini, karena banyak anak yang enggak rela bisa masuk sekolah dekat rumahnya, yang ternyata sarana prasarana dan kualitas gurunya masih sangat rendah,” tambahnya.

Satgas yang nanti dibentuk oleh pemerintah, jangan menggunakan “kacamata kuda”.

Sumber: <https://tirto.id/jppi-minta-satgas-ppdb-libatkan-semua-komponen-pemerintah-eekf>

Pemerintah Didesak Investigasi Pungli dan Jual Beli Kursi PPDB 2019



Siswa melakukan verifikasi berkas pendaftaran seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pengajuan akun di SMA 7 Solo, Jawa Tengah, Senin (24/6/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/ama.

Oleh: Riyan Setiawan - 15 Juli 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) meminta pemerintah mengusut kasus dugaan pungli dan jual beli kursi dalam PPDB 2019.

tirto.id-Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) mendesak pemerintah menginvestigasi kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan jual beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Anggota KMSPP Ubaid Matraji menyatakan para pelaku pungli dan jual beli kursi dalam PPDB 2019 harus menerima sanksi keras.

Dia khawatir kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan sekolah, tapi juga dinas pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena ini menjadi racun di dunia pendidikan,” kata Ubaid di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Kordinator Nasional Jaringan Peduli Pendidikan Indonesia (JPPI) tersebut menemukan indikasi pungli dalam penarikan biaya daftar ulang sejumlah siswa yang sudah lolos PPDB online. Menurut dia, seharusnya siswa tidak perlu membayar saat daftar ulang jika sudah lolos PPDB. Akan tetapi, Ubaid menemukan masih ada sekolah negeri yang memungut biaya Rp5-10 juta untuk biaya daftar ulang siswa.

“Harusnya mereka yang sudah masuk PPDB online, itu langsung masuk sekolah, enggak pakai

daftar ulang, tapi ini masih terjadi. Makanya meski PPDB ini sudah selesai, masih terus kita kawal beberapa potensi-potensi terus ada, modus yang bisa kami awasi,” ujar Ubaid.

Dia menambahkan, pungli bisa terjadi saat sekolah dianggap unggulan. Status sekolah unggulan membuat orang tua murid rela membayar berapa pun agar anaknya bisa masuk ke sekolah itu.

“Jadi ada supply-demand. Kita harus edukasi masyarakat bahwa penting juga [melapor] kalau ada wali murid yang merasa terzalimi karena mestinya anaknya dapat bangku di situ, tapi karena ada orang-orang semacam itu [Jual beli bangku], akhirnya anaknya tidak bisa masuk,” kata Ubaid.

Oleh sebab itu, Ubaid mempersilakan masyarakat yang menemukan praktik pungli dan kecurangan dalam PPDB 2019 untuk melapor ke KMSPP. “Karena kami juga berkoordinasi dengan ombudsman, saber pungli dan KPK serta teman-teman masyarakat sipil. Kalau memang itu bisa dibuktikan, ya kita investigasi dan harus ditindak tegas,” ujar dia. **“Karenainimenjadiracundiduniapendidikan,”kataUbaid.**

Sumber: <https://tirto.id/pemerintah-didesak-investigasi-pungli-dan-jual-beli-kursi-ppdb-2019-eejR>

Sistem Zonasi Hanya Cocok di DKI Jakarta

Senin, 15 Juli 2019 15:28 WIB



Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (berbaju batik) dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan 2019 di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Memasuki hari pertama sekolah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 hanya cocok diberlakukan di DKI Jakarta.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, menuturkan, sementara untuk daerah-daerah sistem tersebut dipaksakan, mengingat belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia.

“Jadi stop zonasi ya, jadi zonasi jangan diberlakukan secara nasional, jangan dipaksakan, daerah-daerah belum siap ya,” ujar Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, ke depan diharapkan pemerintah tak hanya mengevaluasi, tetapi perlu memorandum sistem zonasi.

Sistem zonasi tahun ini dianggap sebagai yang terburuk selama 3 tahun penerapannya.

Ubaid menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih dahulu fokus pada pemerataan kualitas sekolah.

“Jangan paksakan daerah menggunakan zonasi dulu. Tapi kalau daerah-daerah seperti di Jakarta yang siap dengan kesenjangan mutunya nggak terlalu tinggi ya silahkan lakukan sistem zonasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, sistem zonasi akan terus dievaluasi.

Kemendikbud mengakui, kurangnya sosialisasi sampai ke masyarakat merupakan pangkal gaduhnya PPDB tahun ini.

Diketahui, sistem penerapan zonasi sendiri diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan zonasi menjadi berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Sumber: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/07/15/sistem-zonasi-hanya-cocok-di-dki-jakarta>.

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai PPDB 2019 Terburuk Pasca Reformasi



Ubaid JPPI saat berbicara dalam acara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan di Kantor ICW. Senin 15/7/2019. tirtoid/Riyan Setiawan

Oleh: Riyan Setiawan - 15 Juli 2019

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga melihat, kesenjangan mutu antara sekolah satu dengan lembaga pendidikan lainnya masih sangat jauh.

tirtoid - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi 2019 merupakan yang terburuk, terkisruh, dan terganggu pasca reformasi.

“Karena kebijakan zonasi ini seperti bencana bagi daerah, karena ini harus diterapkan secara nasional yang harus dipaksakan di daerah-daerah. Padahal di daerah-daerah itu belum siap,” ujar anggota KMSPP Ubaid Matraji saat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Apalagi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga melihat, kesenjangan mutu antara sekolah satu dengan lembaga pendidikan lainnya masih sangat jauh. Sehingga ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memaksakan sistem zonasi, akan terjadi kegaduhan di beberapa daerah, hingga sampai terjadi penolakan.

“Jadi stop zonasi ya, jadi zonasi jangan diberlakukan secara nasional, jangan dipaksakan, jadi

daerah yang belum siap, ya biarin mereka jangan menggunakan zonasi dulu. Tapi kalau daerah-daerah yang Jakarta siap dengan kesenjangan mutunya enggak terlalu tinggi, ya silakan,” ucapnya.

Menurutnya, daerah selain DKI Jakarta hingga saat ini belum siap menggunakan sistem tersebut. Sehingga jika Kemendikbud tetap ingin memaksakan menggunakan sistem ini secara nasional, pihaknya meminta agar pemerintah harus fokus dahulu pada dasar atau hulunya, yakni mutu pendidikan.

“Jadi perlu diperbaiki dulu, kalau mutu pendidikan bagus, sekolah bagus, mutunya merata, pasti ujungnya bagus,” tuturnya.

Ia juga menilai selama ini dengan adanya sistem zonasi, belum ada pemerataan pendidikan seperti yang diharapkan oleh Kemendikbud. Menurutnya, saat ini sistem zonasi hanya baru pemerataan akses pendidikan saja. Sehingga kata dia, sistem zonasi hanya memaksa anak untuk sekolah yang aksesnya dekat dengan rumahnya.

“Masalahnya orang tua enggak rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang dekat rumah dengan mutu rendah. Zonasi ini adalah persoalan yang ada di hilir. Jadi hulunya dibenerin dulu, mutunya dibagusin dulu, diratakan dulu, dengan begitu, orang tua akan senang hati sekolah di mana saja,” pungkasnya.

“Karena kebijakan zonasi ini seperti bencana bagi daerah”

Sumber: <https://tirto.id/koalisi-masyarakat-sipil-nilai-ppdb-2019-terburuk-pasca-reformasi-eehz>

Tak Perlu Sekolah Baru Saat Penerapan Sistem Zonasi PPDB



Calon peserta didik baru didampingi orang tuanya melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi serta jalur kurang mampu dan inklusi di Rumah Pintar, Denpasar, Bali, Senin (24/6/2019). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/ama.

Oleh: Riyan Setiawan - 9 Juli 2019

Tak perlu menambah sekolah negeri baru, cukup dengan menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, saran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menambah sekolah negeri untuk solusi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi bakal menyedot dana besar.

“Jumlah sekolah negeri memang kurang, tapi solusinya kalau bangun sekolah negeri, terlalu banyak dana yang dibutuhkan,” ujar dia, kepada Tirto, Selasa (9/7/2019).

Menurut dia, solusi yang lebih tepat dibanding menambah sekolah negeri yakni dengan menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta. Menurut dia, agar sekolah-sekolah swasta tersebut juga tidak kekurangan murid.

“Ini yang disebut sebagai public private partnership di bidang pendidikan,” ucap dia.

Menurut dia, bentuk kemitraan tersebut bisa seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan subsidi kepada anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Selain itu, kata dia, bisa juga pemerintah mengakuisisi sekolah swasta yang ada dengan pola akuisisi penuh atau pola kemitraan.

“Jadi di situlah letak kemitraannya. Swasta sediakan infrastruktur sekolah, pemerintah sediakan subsidi pendidikan,” ujar dia.

KPAI menerima 95 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sistem zonasi. Salah satu saran dari KPAI yakni dengan menambah sekolah negeri baru pada lokasi zonasi untuk menjangkau siswa yang tak tertampung. Penerapan sistem berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. ***Bila sekolah baru dibangun, sekolah swasta bakal kekurangan murid.***

Sumber: <https://tirto.id/tak-perlu-sekolah-baru-saat-penerapan-sistem-zonasi-ppdb-edX>

Kasus Rumini, JPPI Desak Airin Copot Kadisdikbud Tangsel

DAERAH KAMIS, 04 JULI 14:05:00 , 2019 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI



Rumini/Net

RMOLBanten. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota setempat, Taryono.

Desakan tersebut lantaran kasus pemecatan mantan guru honorer SDN Pondok Pucung 02, Pondok Aren, Kota Tangsel Rumini yang membongkar dugaan praktik pungli di sekolah tempatnya mengajar.

Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji saat dihubungi *Kantor Berita RMOLBanten*, Kamis, (4/7).

“Tindakan pemecatan itu sudah keterlaluan. Walikota harus sigap dan pecat Kadisdik Tangsel (Taryono-red). Memalukan sekali dan mencoreng institusi sekolah,” katanya.

Menurutnya, Rumini yang mengungkap dugaan pungli di sekolah harusnya diberi penghargaan. Bukan sebaliknya, dipecat. Hal itu merupakan kesalahan pimpinan di dinas terkait.

“Ya pasti lah. orang mengungkap kebenaran kok dipecat. Diberi penghargaan dong,” ucapnya.

Melihat kasus Rumini, Ubaid menjelaskan soal pungli ini menunjukkan praktek korupsi juga subur di sekolah. Sementara kasus pemecatan Rumini menunjukkan sekolah masih seperti penjara yang mengekang ini dan itu.

“Kalau ada pendapat yang berbeda maka dengan mudah disingkirkan. Harusnya di sekolah kita belajar bagaimana menjadi manuaia yang merdeka terutama dalam

bertindak, berfikir, dan berpendapat,” tegasnya.

Kata Ubaid, soal sumbangan di sekolah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Di payung hukum itu mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. “Biasanya, diputuskan berdasarkan rapat yang tidak melibatkan semua pihak, lalu tarikan itu bersifat wajib dan memaksa. Ini biasa modus pungli. Kalau persetujuan satu pihak dan itu wajib, pungli namanya. Tapi kalau kesepakatan bersama tanpa intimidasi ya tidak jadi soal,” tandasnya. **[ars]**

Sumber: <http://www.rmolbanten.com/read/2019/07/04/9602/Kasus-Rumini,-JPPI-Desak-Airin-Copot-Kadisdikbud-Tangsel->

JPPI Sebut Anggaran Pendidikan Jangan Didominasi untuk Belanja



Siswa mengikuti kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas darurat bekas parkir sepeda di SDN 03 Serut, Tulungagung, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kemendikbud berencana menambahkan anggaran pendidikan sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020. ANTARA FOTO/Destyana Sujarwoko

Oleh: Alfian Putra Abdi - 4 Juli 2019

JPPI menilai, rencana penambahan anggaran pendidikan yang diajukan Kemendikbud harus jelas peruntukannya, yakni pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk belanja tidak langsung.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti penambahan anggaran pendidikan yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Menurutnya, terdapat perhitungan yang masak dan jelas perihal proporsi anggaran belanja agar anggaran yang ada lebih dominan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk belanja tidak langsung.

“Sebab APBN untuk pendidikan banyak yang ditransfer ke daerah. Sementara daerah tampaknya belum ada political will soal pendidikan,” ujar Ubaid kepada Tirto, Kamis (4/7/2019).

Ia mengatakan, komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan dana pendidikan 20 persen perlu mendapat perhatian khusus publik. Selain itu, lanjutnya, peruntukan penambahan anggaran pendidikan harus jelas, salah satunya difokuskan pada pemerataan mutu pendidikan.

“Nomenklatur mutu atau kualitas ini juga harus clear. Sebab di banyak daerah peningkatan mutu itu dipakai untuk sekedar acara-acara sosialisasi,” ujarnya.

Dalam Raker dengan Komisi X, Kemendikbud menyampaikan, penambahan anggaran sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN TA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp34,534 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, penambahan anggaran tersebut demi mendukung empat program prioritas nasional

yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 di antaranya Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Kebudayaan dan Bahasa, serta Revitalisasi Vokasi. Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai salah satu kementerian yang mengelola anggaran pendidikan terbesar tahun anggaran 2018, daya serap Kemendikbud mencapai 97,10 persen.“

Dalam dua tahun terakhir realisasi anggaran Kemendikbud tertinggi dibandingkan 10 kementerian dan lembaga lain pemegang anggaran terbesar,” ujar Mendikbud di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).“***Daerah tampaknya belum ada political will soal pendidikan.***”

Sumber: <https://tirto.id/jppi-sebut-anggaran-pendidikan-jangan-didominasi-untuk-belanja-edy3>

Tentara Didik Siswa Baru: Memang yang Paham Nasionalisme Cuma TNI?



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Oleh: Haris Prabowo - 3 Juli 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta TNI ikut mengajar siswa baru agar jadi seorang nasionalis. Kebijakan ini dikritik, sebab bukan hanya TNI yang tahu perkara itu.

tirto.id - Bukan hanya siswa senior dan guru-guru yang akan membimbing dan membina siswa baru dalam masa orientasi sekolah. Tentara pun--yang tugas utamanya adalah menjaga pertahanan dan berperang--akan ikut campur. Ini diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Jumat, 21 Juni lalu.

Kebijakan ini berlaku di seluruh sekolah di Indonesia, bahkan yang letaknya terpencil sekalipun.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan mereka akan mempersiapkan baik personel di Koramil, hingga yang bertugas di Pangkalan AL dan Pangkalan Udara.

“Termasuk wilayah perbatasan,” kata Hadi. Para tentara ini akan dipekerjakan selama dua pekan. Muhadjir berharap para tentara bisa mengajarkan beberapa hal ke siswa, dari jejang SD sampai SMA/ sederajat: dari mulai membentuk karakter mereka hingga memperkuat materi dasar yang berkaitan dengan nasionalisme, bela tanah air, dan cinta tanah air. Semua dengan tujuan agar siswa “memiliki self defence bagi pengaruh dan paham yang dapat berpengaruh kepada NKRI.”

Dikritik

Kebijakan ini dikritik keras berbagai pihak. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, misalnya, mengatakan kebijakan ini cenderung ngawur dan tidak berdasar.

“Masak yang memahami nasionalisme itu hanya TNI? Ini harus dipertanyakan kembali,” kata Ubaid kepada reporter Tirto, Selasa (2/7/2019).

Ubaid khawatir jika tujuan utamanya adalah “menanamkan nasionalisme”--termasuk upacara dan baris-berbaris, sebagaimana yang Kemendikbud sebut sebagai “contoh bentuk pembinaan nasionalisme paling mendasar”--maka nasionalisme yang akan diajarkan adalah nasionalisme doktriner, “bukan nasionalisme yang dibangun berdasarkan refleksi, pemahaman mendalam, dan nalar kritis.”

Baca juga: Masa Orientasi Sekolah Tak Seharusnya Jadi Ajang Kekerasan Mengajak serta tentara menggempleng siswa juga contoh betapa pemerintah tidak percaya dengan kualitas guru, tambah Ubaid. Sebetulnya guru juga mampu melakukan itu. Tak perlu repot-repot mencari hingga ke barak.

“Lebih membiarkan keadaan mutu guru dan mencari-cari alternatif dari luar yang juga tidak bermutu dan tidak ada relevansinya,” tegasnya.

Kritik juga disampaikan peneliti militer sekaligus Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Beni Sukadis. Menurutnya TNI adalah alat negara dan tidak semestinya berada di ranah sipil.

“Saya khawatir. Kalau dari tupoksi dan peran TNI mestinya, kan, enggak boleh beraktivitas di ranah sipil. Kekhawatiran kami juga terlihat sejak 2-3 tahun lalu banyak MoU antara TNI dan beberapa lembaga negara. Ini juga sepertinya MoU dengan Kemendikbud,” kata Beni kepada reporter Tirto.

“Namun terlepas ada MoU atau tidak, itu juga jadi permasalahan karena TNI tak bisa bikin MoU.” Ucapan Beni beralasan mengingat TNI bukan lembaga otonom dan berada di bawah komando Presiden, sehingga tak bisa membikin MoU dengan lembaga lain. Hal itu juga pernah disinggung Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Makin lama berperan di ranah sipil, TNI akan makin melalaikan tugas aslinya. Ngapain dia di sekolah? Tugas utamanya menjaga keamanan negara, bukan melatih baris-berbaris. Itu terlalu teknis dan sudah bukan ranahnya.”

Senada dengan Ubaid, Beni juga khawatir kalau Kemendikbud tak lagi percaya pada guru-guru di bawah naungan lembaganya sendiri.

Selain dua pakar di atas, kritik juga disampaikan warganet. Dalam utas Kemendikbud yang mengumumkan soal kerja sama ini, beberapa orang menyampaikan keberatan, juga alternatif.

Misalnya pengguna Twitter bernama @arinadinahanifa. Dia mengusulkan materi orientasi lebih ditekankan ke aspek yang benar-benar menyangkut kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana mengurangi dan memilah sampah, atau tidak membuang-buang makanan. “Apakah kurang nasionalis?” tanyanya, retorik.

Pengguna Twitter lain mengatakan kalau baris-berbaris “tidak membantu saya bertahan hidup dan tidak menambah apa pun jenis pengetahuan saya.” Baca juga: Perpres 37/2019 dan Kekhawatiran Bangkitnya Dwifungsi ABR

“Enggak Seperti Itu...”

Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, merespons ragam kritikan yang dituding ke lembaganya. Ia menilai kebijakan Kemendikbud melibatkan TNI bukan dalam upaya memasukkan (kembali) militer ke ranah sipil. “Enggak seperti itu. TNI, kan, salah satu lembaga yang terlibat dalam PLS (Pengenalannya Lingkungan Sekolah). Ada juga Pramuka, BNN, PMI. Jadi itu enggak permanen, hanya pas PLS saja,” kata Muchlis saat dihubungi reporter Tirto, Selasa siang.

“Karena kami tahu, ada ilmu-ilmu lain yang tenaga kami enggak punya dan hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga yang memiliki spesialisasi.” Muchlis lantas menyimpulkan kalau kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan. “Masyarakat enggak perlu khawatir kalau ada upaya Dwifungsi ABRI. Enggak ada,” pungkasnya.

***Banyak cara mendidik
seseorang jadi nasionalis
(yang tidak doktriner)***

Sumber: <https://tirto.id/tentara-didik-siswa-baru-memang-yang-paham-nasionalisme-cuma-tni-edse>

Alamat Peserta PPDB Jabar Fiktif, JPPI: Pemda Belum Paham Zonasi



Orangtua dan calon siswa mengantre penyerahan dan pemeriksaan berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Oleh: Alfian Putra Abdi - 1 Juli 2019

temuan dua peserta beralamat fiktif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Bogor, Jawa Barat menjadi bukti bahwa sekolah favorit masih melekat pada perspektif orang tua siswa.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons penemuan dua peserta beralamat fiktif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut, menurutnya, masih tak lepas dari perspektif sekolah favorit menurut orang tua siswa.

“Ini terjadi karena masyarakat masih mengejar sekolah favorit, dan tidak mempedulikan zonasi. Jadi zonasi ini akan selalu menimbulkan banyak masalah selama mutu sekolah belum merata,” ujarnya kepada Tirto, Senin (1/7/2019).

Selain itu, ia menilai sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum berlangsung baik. Di satu sisi, pemerintah pusat menghendaki pemerataan, di lain sisi daerah justru membuat sekolah-sekolah unggulan. Sehingga dampaknya, menurutnya, membingungkan masyarakat.

“Butuh keseriusan dan political will dari pemda untuk pemerataan mutu,” ujarnya. Lebih lanjut, ia

menilai, pemda masih belum memahami secara komprehensif perihal kebijakan zonasi. Sehingga aturan main yang ditetapkan belum sesuai Permendikbud No.51/2018.

Menurut Ubaid, pemerintah pusat dan daerah kembali melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi dan menyepakati komitmen pemerataan mutu sekolah.

“Dengan begitu, pusat dan daerah, antara kebijakan dan implementasi bisa berjalan secara baik, sistematis, dan masif. Roadmap ini harus disepakati bersama supaya jalannya bersamaan dengan fokus yang sama,” pungkasnya.

Wali Kota Bogor Jawa Barat Bima Arya Sugiarto menemukan dua peserta beralamat fiktif saat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Peserta dengan alamat fiktif ini ditemukan di Kelurahan Paledang yang letaknya tak jauh dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, Jumat (28/6/2019) malam.

“Kita menerima aduan dari warga sejak seminggu lebih soal ini. Mereka tahu sebagai orang tua siswa bahwa anak-anak itu tidak tinggal di situ,” ujarnya, di Bogor, usai melakukan sidak.

“Butuh keseriusan dan political will dari pemda untuk pemerataan mutu,” ujarnya.

Sumber: <https://tirto.id/alamat-peserta-ppdb-jabar-fiktif-jppi-pemda-belum-paham-zonasi-edm3>

Jokowi Presiden Terpilih, JPPI: Persoalan Pendidikan Sudah Menanti



Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menyerahkan surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 1 Juli 2019

Tantangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin berat, terkhusus untuk segala problem di sektor pendidikan Indonesia.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan tantangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin berat, terkhusus untuk segala problem di sektor pendidikan Indonesia.

"Problem pendidikan begitu banyak," ujar Ubaid kepada Tirto, Senin (1/7/2019). Ia menjelaskan, persoalan-persoalan itu meliputi persoalan internal seperti rendahnya mutu guru sampai dengan faktor eksternal seperti tantangan kurikulum dalam era Revolusi Industri 4.0. Oleh sebab itu, ia berharap Jokowi dan Ma'ruf Amin mengevaluasi total segala persoalan-persoalan pendidikan tersebut serta membuat terobosan kebijakan.

"Ini harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Jangan hanya pihak pemerintah saja. Perlu juga melibatkan pihak swasta, CSO, dan masyarakat," tuturnya. Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (30/6/2019) sore. "Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01, saudara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Jokowi-Ma’ruf mengalahkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

“Problem pendidikan begitu banyak,” ujar Ubaid

Sumber: <https://tirto.id/jokowi-presiden-terpilih-jppi-persoalan-pendidikan-sudah-menanti-edmU>

IGI Dukung Skema SNMPTN Dihapus



Ilustrasi ujian masuk perguruan tinggi. (Foto: Istimewa)

Maria Fatima Bona / JAS Rabu, 26 Juni 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Skema zonasi pada penerima peserta didik baru (PPDB) yang menuai pro dan kontra, salah satunya dipicu pertimbangan orang tua untuk mempersiapkan putra dan putrinya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Sebab, selama ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menerapkan tiga skema masuk PTN meliputi; Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan jalur ujian mandiri (UM).

Kemristekdikti menyediakan kuota minimal 30 persen untuk skema SNMPTN. Dengan begitu, kesempatan siswa dari sekolah favorit yang berakreditasi terbaik sangat besar. Pasalnya, salah satu syarat masuk SNMPTN, pertimbangan akreditasi sekolah. Dengan rincian sekolah akreditasi A berhak mendaftar 50 persen siswa, B (30 persen), C (10 persen), dan akreditasi lainnya hanya disediakan kuota 5 persen.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, kuota untuk sekolah berakreditasi ini tentu tidak adil dan tidak jelas tujuannya. Pasalnya, sekolah yang berakreditasi bagus akan semakin bagus, sedangkan yang jelek akan semakin jelek. Oleh karena itu, IGI mendukung keinginan Kemdikbud agar kuota SNMPTN dihapuskan.

“IGI sangat setuju SNMPTN dihapuskan. Kami sudah membahas itu sejak pertama kali zonasi diberlakukan karena 2020 nanti produk zonasi sudah waktunya masuk perguruan tinggi,” kata Ramli kepada *Suara Pembaruan*, Selasa (25/6/2019) malam.

Menurut Ramli, sebaiknya SNMPTN Undangan dikembalikan ke pola jalur pemanduan potensi belajar (JPPB) yang pada masa lalu memberi kesempatan sekolah terpencil masuk PTN. Sebab, kebijakan JPPB ini menjaring anak-anak berbakat masuk PTN karena mereka jika dipertarungkan dengan anak-anak kota akan kalah karena pengaruh informasi dan bimbingan belajar (bimbel).

“Mereka dianggap tertinggal sehingga dibuat program matrikulasi untuk menyamakan kemampuan mereka dengan yang lulus lewat seleksi. Tapi setelah matrikulasi mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa hebat,” paparnya.

Ramli menuturkan, jika pemerintah tetap mempertahankan kuota SNMPTN dengan pola undangan, maka tak boleh lagi ada batasan dengan dasar akreditasi sekolah. Kata dia, akreditasi sekolah terkadang ada permainan. Misalnya, akreditasi ditentukan berapa tebal amplopnya atau seberapa mewah pelayanannya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kegigihan orangtua mempertahankan sekolah favorit karena pertimbangan akan lebih mudah mendapat kesempatan masuk PTN melalui jalur undangan atau SNMPTN yang melihat hasil hasil akreditasi sekolah.

Menurut Muhadjir, skema SNMPTN dengan kuota ini merupakan kebijakan yang tidak adil dan seharusnya dihapus. Sebab, sekolah-sekolah favorit setiap tahun mendapat kuota sangat tinggi.

“Biarlah anak memperjuangkan sesuai dengan individunya bukan karena sekolah. Jika memang anak bagus maka meskipun berasal dari sekolah akreditasi C, ia berhak untuk memperebutkan kesempatan masuk SNMPTN bukan mendapat kesempatan karena berada di sekolah tertentu,” ujar Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menjelaskan, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan pendidikan sejalan. Sebab sudah saatnya menghentikan praktik-praktik ketidakadilan.

Selain itu, kuota SMPTN sebaiknya dihapuskan karena bertentangan kebijakan zonasi. Pasalnya, dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPBD, pemerintah menggelar PPDB melalui tiga skema, yakni zonasi (90 persen), prestasi (5 persen), dan perpindahan orangtua/wali (5 persen) yang secara otomatis akan menghapus sekolah berlabel favorit untuk pemerataan pendidikan.

Untuk memperlancar kebijakan zonasi, Muhadjir mengaku, telah berkoordinasi dengan Kemristekdikti untuk evaluasi skema SNMPTN. “Respons Kemenristekdikti setuju, termasuk usulan kami mengenai dikembalikannya di lembaga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, red) untuk ada kuliah mayor dan minor sehingga setiap guru tidak menguasai satu mata pelajaran minimum serumpun,” pungkasnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, akan memperbaiki skema penerimaan mahasiswa baru di PTN khusus untuk skema SNMPTN.

Dalam hal ini, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menurunkan kuota 30 persen ini menjadi 20 persen, dengan sisanya akan dialihkan pada SBMPTN yang diyakini semakin baik karena menerima calon mahasiswa baru jalur seleksi menggunakan Ujian Tulis Berbasis

Komputer (UTBK).

“Kami ingin menjaring anak-anak ke depan, nanti ada klaster, yang belum baik kita akan perbaiki. Karena kami percaya sistem akreditasi makin tinggi berarti kualitas sekolah makin baik, itu kami awalnya mempercayai di situ untuk jalur SNMPTN,” kata Nasir.

Minim Koordinasi

Sementara Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyarankan Kemdikbud dan Kemristekdikti untuk duduk bersama karena kebijakan kedua kementerian ini saling terkait.

Ubaid menyebutkan, sejauh ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik itu antarkementerian di pusat, maupun pusat dengan daerah sangat minim koordinasi. Akibatnya tidak ada sinergi lalu menimbulkan ricuh di masyarakat

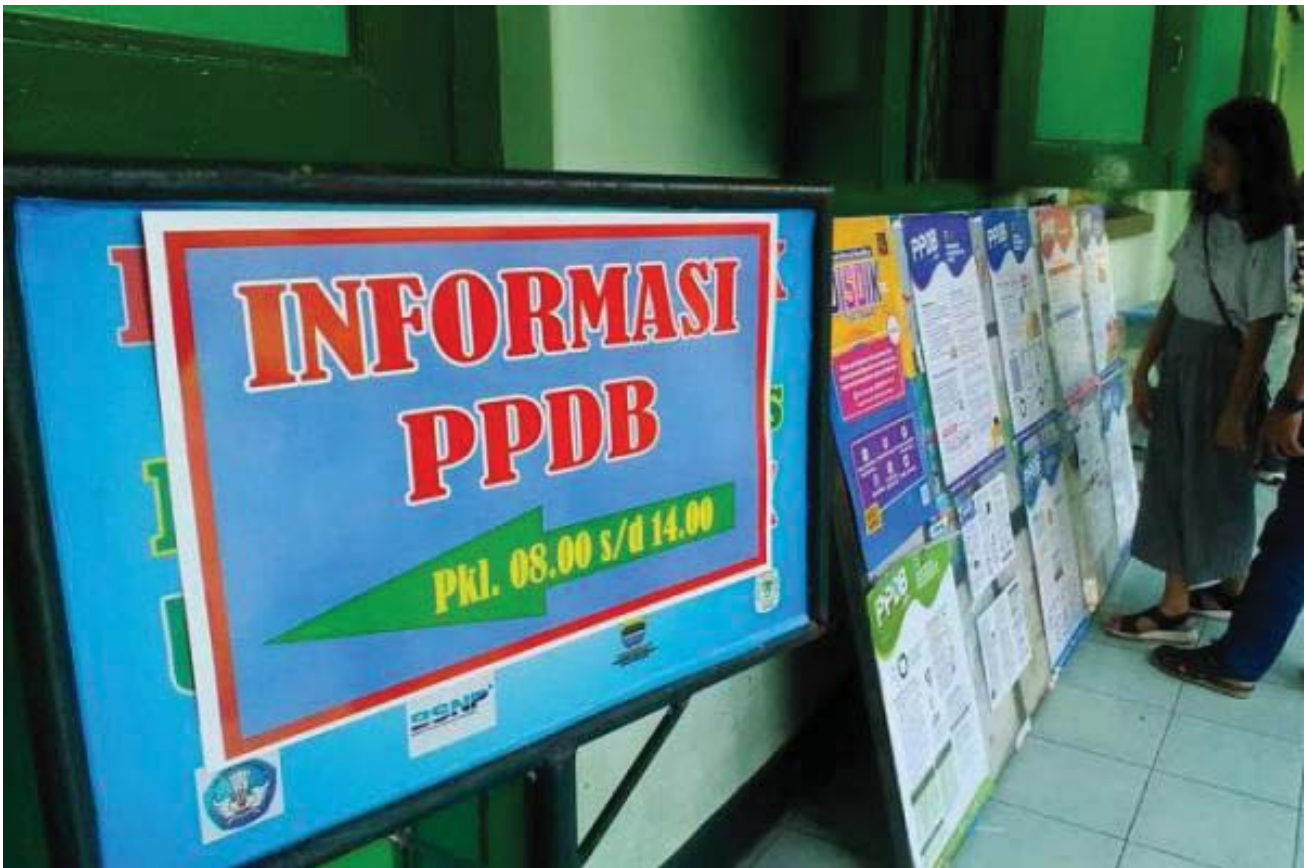
“Jika saat ini kebijakan zonasi paksa dijalankan tanpa dibarengi dengan kebijakan lain pasti akan ribut terus,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com <https://www.beritasatu.com/nasional/561307/igi-dukung-skema-snmptn-dihapus>

ZONASI PENDIDIKAN

Kebijakan Zonasi Dipaksakan, Mendikbud Bikin Gaduh

Mutiul Alim | Sabtu, 22/06/2019 17:01 WIB



Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Jakarta, Jurnas.com – Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlalu memaksakan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Akibatnya, yang terjadi ialah kegaduhan di level masyarakat.

“Ya (dipaksakan). Harus dievaluasi total. Daerah belum siap untuk penerapan sistem ini, tapi dipaksakan. Jadinya ya gaduh,” kata Ubaid kepada Jurnas.com pada Sabtu (22/6).

Menurut Ubaid, kebijakan zonasi belum tepat dilakukan saat ini, mengingat tingginya kesenjangan kualitas sekolah di seluruh Indonesia.

Dan bagaimanapun, orang tua tetap menginginkan anaknya masuk di sekolah yang dianggap bagus kualitasnya, meskipun jaraknya jauh dari rumah.

“Kalau kualitas sekolah merata, zonasi bisa terlaksana dengan baik. Tapi sekarang kan belum merata kualitasnya, ya kisruh jadinya,” ujar dia.

Ubaid juga menyinggung soal revisi terbaru Mendikbud, dengan menambah kuota jalur prestasi hingga 15 persen. Menurut dia, alih-alih menyelesaikan persoalan, revisi tersebut malah akan menambah kericuhan pada PPDB yang sudah berjalan.

“Pergub-pergub sudah diterbitkan, apa juga harus revisi pergub? Sudah sangat terlambat dan tidak membawa perubahan apa-apa di daerah,” kata Ubaid.

“Ini sudah sesi akhir pendaftaran, jadi (revisi) tidak akan menyelesaikan kegaduhan,” imbuh dia.

Seperti diketahui, praktik PPDB zonasi menuai pro dan kontra di berbagai daerah. Di Tangerang, Banten, sejumlah orang tua murid kecewa karena nilai anaknya yang cukup tinggi, tidak menjadi acuan dalam PPDB.

Hal senada juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Sejumlah orang tua mengeluh anaknya tidak bisa masuk ke sekolah favorit, sebab terkendala jarak, kendati hasil ujian nasionalnya bagus.

Sumber: <http://www.jurnas.com/artikel/54636/Kebijakan-Zonasi-Dipaksakan-Mendikbud-Bikin-Gaduh/>

NASIONAL

Wasekjen PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi Permendikbud Masih Prematur

Kamis 20 Juni 2019 21:0 WIB



Jakarta, *NU Online*

Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan KH Masduki Baidlowi (Cak Duki) menanggapi insiden kekisruhan di sejumlah kota di Indonesia terkait implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai implementasi Permendikbud tersebut terlalu dini.

Ia menilai sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tidak efektif. Pasalnya, implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini tidak diiringi dengan kesiapan pendukung di lapangan seperti sarana, sumber daya pendidikan, dan unsur pendukung lainnya.

“Problem utamanya adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Cak Duki kepada *NU Online*, Kamis (20/6) siang.

Ia menambahkan bahwa jumlah tenaga didik yang memenuhi kualifikasi tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Aktivitas sekolah berjalan tanpa adanya kegiatan belajar di mana peserta didik tidak mendapatkan sesuatu dari aktivitas sekolah tersebut.

“Kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan berbuah banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya, anak murid kita secara nasional masih akan mengalami apa yang disebut *schooling without learning* alias terjadi malapraktik pendidikan secara nasional,” kata Cak Duki.

Menurutnya, salah satu sebab atas terjadinya malapraktik tersebut adalah jumlah ketersediaan guru berkualitas yang belum memadai sehingga banyak peserta didik tidak mendapatkan hak pendidikan yang maksimal.

“Guru yang bermutu tidak seimbang dengan banyak murid yang hendak belajar di kelas. Banyaknya lembaga-lembaga bimbingan belajar menandakan bahwa berapa minim guru yang mengajar dengan baik, sekaligus menandakan betapa banyak murid belajar tetapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru pada si murid,” kata Cak Duki.

Ia memaklumi bahwa tidak ada kebijakan yang bim salabim atas masalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Menurutnya, semua butuh konsisten dan persisten untuk menjalani program-programnya. Perbaikan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

“Butuh waktu jangka lama. Cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional ya tingkatkan mutu guru. Karena itu kebijakan sertifikasi guru harus dievaluasi disesuaikan kembali dengan target semula, yaitu meningkatkan mutu guru dan mengadakan sistem evaluasi secara nasional dengan benar. Jangan dibiarkan seperti yang sekarang, uang negara habis ratusan triliun untuk gaji guru dan honor sertifikasinya tetapi pendidikan nasional tampak berjalan di tempat,” kata Cak Duki. **(Alhafiz K)**

Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/107661/wasekjen-pbnu-nilai-implementasi-sistem-zonasi-permendikbud-masih-prematur->

NASIONAL

Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Sistem Zonasi untuk Penerimaan Siswa Baru

Kamis 20 Juni 2019 19:5 WIB



(Foto: @bbc.com)

Jakarta, **NU Online**

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menanggapi pemberlakuan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara nasional. Ubaid menilai pemerintah tampak memaksakan dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi di tengah kesenjangan kualitas sekolah yang terjadi di lapangan.

Ia mengapresiasi niat baik Kemendikbud melalui sistem zonasi PPDB yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Tetapi semangat itu belum dapat dilaksanakan karena distribusi tenaga pendidik berkualitas tidak merata di samping beberapa persoalan ketidaksiapan lainnya.

“Zonasi yang digagas oleh pemerintah pusat ini secara konseptual bagus, tapi pertanyaannya adalah apakah kualitas sekolah sudah merata di daerah? Bagaimana komitmen atau *political will* pemda dalam pemerataan mutu sekolah?” kata Ubaid kepada *NU Online*, Kamis (20/6) siang.

Menurutnya, pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu. Distribusi tenaga didik yang bermutu harus merata pada sekolah-sekolah di daerah. Pemerintah daerah juga harus memiliki perhatian terhadap persoalan ini.

“Sistem zonasi itu terlalu dipaksakan oleh pusat sehingga bikin kisruh di daerah. Kebijakan itu timpang dan tidak sinkron antara apa yang dikehendaki pemerintah pusat dengan yang terjadi di daerah selaku implementor kebijakan tersebut,” kata Ubaid.

Ia menambahkan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi perlu dikawal dengan kebijakan lain dalam rangka persiapan dan pemulusan jalan implementasinya.

“Zonasi ini akan positif jika dibarengi dengan kebijakan lain soal pemerataan kualitas sekolah. Selama kualitas sekolah satu sama lain masih terjadi kesenjangan, maka zonasi sulit untuk diterapkan,” kata Ubaid.

Ia juga menawarkan alternatif lain. Menurutnya, kebijakan sistem zonasi diberlakukan secara bertahap dalam implementasi persentase zonasi. Ia menyayangkan penerapan paksa kebijakan ini secara merata di tengah kesiapan sekolah yang berbeda-beda.

“Sekarang ini kan dipukul rata. Semuanya harus menerapkan zonasi 90%. Ini juga bisa dilakukan secara bertahap, misalnya 50% dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah,” kata.

Di samping itu, penting juga koordinasi dan sinergi antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Ini hajatan bersama tetapi tampaknya masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan terjadi kegaduhan di lapangan.

“Yang lain, kebijakan zonasi ini juga harus diikuti dengan kebijakan lain terkait pemerataan mutu guru dan kualitas sekolah. Jika tidak, kisruh akan terus terulang,” kata Ubaid.

Ia mengatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini sudah berjalan tiga tahun dan selalu bikin kisruh ketika penerimaan siswa baru. Ia meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan ini untuk mencari masalah utamanya dan pemecahan atas permasalahannya.

“Menurut saya, penerapan zonasi ini harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah. Untuk daerah yang sudah siap dan kualitas sekolah yang sudah merata, bisa diberlakukan. Untuk daerah yang belum siap, *ya* ditunda dulu. Harus disiapkan dulu segala kebutuhannya,” kata Ubaid.

Sebagaimana diketahui, kekisruhan terjadi di sejumlah tempat terkait implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Kekisruhan terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jawa Barat, Banten, dan sejumlah daerah lain di Indonesia. **(Alhafiz K)**

Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/107656/pemerintah-pusat-perlu-evaluasi-sistem-zonasi-untuk-penerimaan-siswa-baru>

PPDB di Depok: Saat Orangtua Bersikukuh Daftar di ‘Sekolah Favorit’



Orang tua dan calon siswa berbincang dengan petugas saat sosialisasi dan simulasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/6/2019). Sosialisasi dan simulasi tersebut digelar untuk memahami jenis jalur penerimaan peserta didik baru dan memilih jalur yang sesuai dengan jarak rumah ke sekolah, nilai UN, prestasi UN dan non-UN serta pertimbangan lainnya. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wsj.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 19 Juni 2019

Zonasi hendak menghilangkan label ‘sekolah favorit’, tapi orangtua masih mempertimbangkan itu saat mendaftarkan anaknya.

tirto.id - Yeti Murniati (43) memilih menyekolahkan anaknya di SMA 1 Depok dengan alasan sederhana: sekolah itulah yang paling dekat dengan rumahnya, sebagaimana syarat zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kebetulan cuma ada sekolah ini yang negeri [SMAN 1 Depok],” katanya kepada saya, Selasa (18/6/2019) pagi kemarin. “Jadi saya hanya mengikuti alurnya saja.”

Jika semisal anaknya tidak diterima, ia sudah punya opsi menyekolahkan anaknya di SMAN 3 Depok yang letaknya di Kelurahan Sukmajaya dan SMAN 5 Depok yang terletak di Kelurahan Bedahan.

Keduanya cukup jauh dari rumahnya. Beda lagi dengan cerita Edy Rusmana (50). Dia ngotot memilih SMAN 1 Depok yang lokasinya lumayan lebih jauh dari rumahnya di bilangan Jembatan Serong, Cipayung, Depok, sebagai calon sekolah anaknya. Padahal dia tahu persis ada SMAN 12 Depok yang letaknya lebih dekat; masih satu kelurahan dengan tempat tinggalnya.

Kesungguhan Edy untuk menyekolahkan putranya di sekolah ini tidak main-main. Dia rela mengantre dua hari berturut-turut agar data diri anaknya bisa terdaftar. Senin (17/6/2019) lalu sebetulnya dia sudah datang pagi-pagi.

Sayang dia gagal mendapatkan nomor pendaftaran karena membludaknya pendaftar. Hari berikutnya dia coba lagi.

Saat itu Edy berhasil dapat nomor pendaftaran PPDB, meski berkas-berkas yang dia bawa tak langsung diproses. Sekolah baru akan memasukkan data anaknya hari ini. Apa sebab Edy rela memilih SMAN 1 Depok, alih-alih SMAN 12 Depok yang sebenarnya lebih dekat? Jawabannya sederhana:

“SMAN 12 itu, kan, baru [berdiri] soalnya. Kalau di sini [SMAN 1 Depok] sudah ketahuanlah, favorit,” akunya.

“Sekolah favorit”, konsep yang sebetulnya ingin dihilangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kala menerapkan sistem zonasi--prioritas penerimaan untuk anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah. Sebelum ada sistem zonasi, para siswa dan orangtua memburu sekolah favorit sehingga anak-anak berprestasi akan berkumpul dalam satu sekolah.

Sementara itu, siswa yang dianggap kurang pintar dan tidak mampu akan berkumpul di sekolah pinggiran atau non-favorit. Edy tahu soal ini, tapi toh itu tak menghilangkan anggapannya bahwa ada sekolah favorit, ada pula yang tidak.

“Yang dinilai [agar bisa diterima] pertama itu jaraknya dulu, karena kalau jaraknya ada yang sama baru akan dicek lagi siapa yang duluan mendaftar. Jadi bukan karena yang duluan mendaftar terus diterima,” ujarnya.

Masalah

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan bahwa persepsi masyarakat memang belum bisa lepas dari label ‘sekolah favorit’ dan ‘non-favorit’ dalam skema PPDB berbasis zonasi.

Ubaid menilai, harusnya implementasi skema zonasi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing. Bagi daerah yang sudah siap, skema zonasi bisa diberlakukan, begitu pula sebaliknya.

“Sekarang ini, kan, dipukul rata. Semua harus menerapkan zonasi 90 persen. Ini juga bisa dilakukan secara bertahap, misalnya 50 persen dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah,” ujarnya. Sekretaris Komisi D DPRD Depok, T. Farida Rachmayanti, mengatakan meski zonasi baik untuk alasan pemerataan, namun persoalannya tidak semua kabupaten kota, seperti halnya Kota Depok, memiliki cukup sekolah.

Ini membuat cita-cita zonasi untuk pemeratakan kualitas dan menghilangkan kasta antarsekolah terhambat. Baca juga: Cerita PPDB di SMAN 1 Depok:

Pergi Subuh, Tapi Belum Tentu Diterima Jumlah sekolah yang sedikit membuat zonasi di Depok hanya satu. Dengan ‘warisan’ cara pikir sekolah favorit-non favorit, maka akhirnya orangtua murid tetap berbondong-bondong datang ke sekolah yang dianggap lebih baik.

“Dari semua penjuru bisa ke SMAN 1 Depok. Alangkah baiknya dibuat dua zonasi minimal, barat dan timur. Sehingga bisa lebih terkonsolidasi,” ujar Farida saat saya temui ketika memantau proses PPDB di SMAN 1 Depok. “Harapan masyarakat menjadi besar [memasukkan anaknya

ke sekolah tertentu]. Sebenarnya kalau dibagi dua atau tiga zonasi, lama-lama sekolah akan menjadi favorit semuanya.”

Apa yang diharapkan Farida juga dibenarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan bahwa untuk saat ini memang “label sekolah-sekolah favorit itu tidak bisa dihindarkan.”

Meski demikian dia berjanji akan meningkatkan kualitas satuan pendidikan, baik yang negeri maupun yang swasta, secara bertahap.

“Kami punya upaya-upaya dan target-target bahwa sekolah negeri dan swasta akan kami tingkatkan. Ke depannya semua punya mutu yang baik,” katanya.

Janji lain diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ini terkait dengan salah satu faktor penentu yang membuat kualitas antara satu sekolah dan sekolah lainnya berbeda: kualitas guru. Dia bilang, guru-guru perlu dirotasi. Tak bisa hanya satu sekolah saja yang punya guru-guru berkualitas.

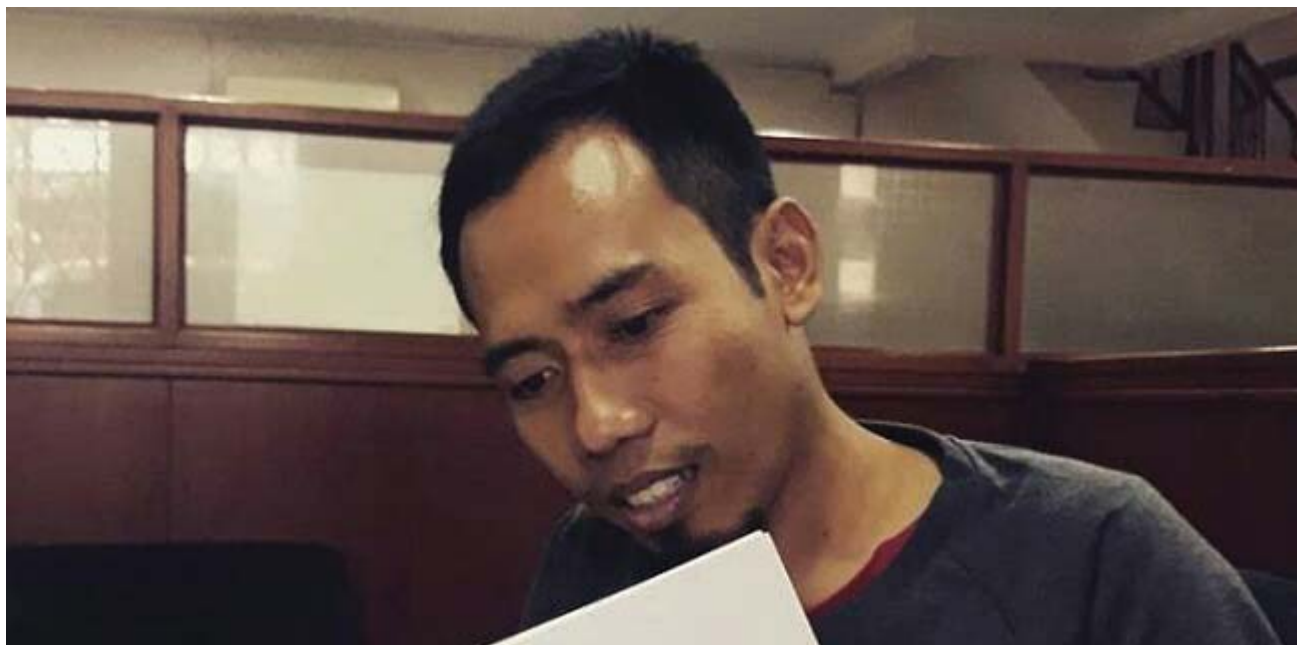
“Kita akan tahu juga, apakah sekolah favorit itu karena guru atau anak-anaknya. Ini juga bisa jadi bahan kajian,” ujarnya di Jakarta.

Sekolah favorit perlahan dihilangkan dengan sistem zonasi. Tujuannya agar pendidikan merata

Sumber: <https://tirto.id/ppdb-di-depok-saat-orangtua-bersikukuh-daftar-di-sekolah-favorit-ecB3>

Kisruh PPDB Akibat Ketidaksiapan Pemerintah Daerah

PENDIDIKAN SELASA, 18 JUNI 13:10:00 , 2019 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI



Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji/Foto Ist

RMOLBanten. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Banten akibat ketidaksiapan pemerintah daerah.

Demikian diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Selasa, (18/6). “Ini jelas terjadi karena pemerintah terlalu memaksakan zonasi, padahal kualitas sekolah belum merata. Akibatnya, tiap tahun PPDB selalu kisruh,” katanya.

Sebenarnya, kata Ubaid, sistem zonasi itu untuk pemerataan kualitas. Namun sayangnya, belum semua sekolah siap dengan sistem tersebut.

“Jadi ga ada lagi ini sekolah favorit ini bukan. Tapi kenyataannya sekolah kita masih banyak yg rendah kualitasnya. Akibatnya masyarakat masih saja ngantri di sekolah favorit, bukan di sekolah dekat rumah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan penerapan zonasi ini terkesan jalan sendiri di masing-masing daerah.

“Peraturannya pun beda-beda di tiap daerah soal penerapan zonasi ini. Itu juga membingungkan masyarakat dan bikin kisruh,” tegasnya.

Ia menilai sistem zonasi ini sangat tidak efektif karena tidak dibarengi dengan kebijakan soal peningkatan dan pemerataan mutu sekolah.

“Penerapan zonasi ini harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah. Untuk

daerah yang sudah siap bisa diberlakukan. Untuk daerah belum siap ya ditunda dulu harus disiapkan dukungan segala kebutuhannya,” terangnya.

Atau, sambung Ubaid bisa juga bertahap dalam implementasi persentase zonasi. Sekarang ini semua harus menerapkan zonasi 90%. Ini juga bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya 50% dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah.

Disamping itu, penting juga koordinasi dan sinergi antara kemendikbud, kemenag n kemendagri. Ini hajatan bersama tapi tampaknya masing instansi jalan sendiri-sendiri. Akibatnya masyarakat yang bingung dan gaduh.

“Kebijakan zonasi ini juga harus diikuti dengan kebijakan lain terkait pemerataan mutu guru dan sekolah. Jika tidak, kisruh akan terus terulang,” tandasnya. **[ars]**

Sumber: <http://www.rmolbanten.com/read/2019/06/18/9155/Kisruh-PPDB-Akibat-Ketidaksiapan-Pemerintah-Daerah->

PPDB Berbasis Zonasi Ricuh, JPPI: Kualitas Sekolah Belum Merata



Orang tua dan calon siswa mengantre penyerahan dan pemeriksaan berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 17 Juni 2019

Menurut Ubaid, Kemendikbud perlu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Kemenag dan Kemendagri dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai membludaknya antrean orang tua murid di sekolah tertentu saat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, disebabkan karena belum meratanya kualitas sekolah yang ada. Pemerintah, menurutnya, juga bersifat terlalu ambisius untuk menerapkan skema zonasi.

“Zonasi itu kan untuk pemerataan kualitas. Jadi enggak ada lagi ini sekolah favorit, ini bukan. Tapi kenyataannya sekolah kita masih banyak yang rendah kualitasnya, akibatnya masyarakat masih saja ngantre di sekolah favorit, bukan di sekolah dekat rumah,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (17/6/2019).

Pada hari ini, Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendaftaran PPDB berbasis zonasi sampai

dengan 22 Juni 2019. Pendaftaran secara online dengan bantuan operator satuan pendidikan bisa dilakukan dengan cara mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat di ppdb.disdik.jabarprov.

Hari pertama pendaftaran, telah terjadi keriuhan di Bekasi dan Depok. Para orang tua murid rela datang dini hari hanya untuk mendapatkan nomor antrean di sekolah yang mereka tuju.

Ubaid menilai, harusnya implementasi skema zonasi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing. Bagi daerah yang sudah siap, skema zonasi bisa diberlakukan, begitupun sebaliknya.

“Sekarang ini kan dipukul rata, semua harus menerapkan zonasi 90 persen. Ini juga bisa dilakukan secara bertahap, misalnya 50 persen dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Kemendikbud perlu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Kemenag dan Kemendagri dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini.

“Kebijakan zonasi ini juga harus diikuti dengan kebijakan lain terkait pemerataan mutu guru dan sekolah. Jika tidak, kisruh akan terus terulang,” ujarnya.

“Tapi kenyataannya sekolah kita masih banyak yang rendah kualitasnya,” kata Ubaid.

Sumber: <https://tirto.id/ppdb-berbasis-zonasi-ricuh-jppi-kualitas-sekolah-belum-merata-ecxk>

PERISTIWA Editor : Tomi sudjatkiko Minggu, 16 Juni 10:54 / 2019 WIB

Daerah Berbeda Terjemahkan Zonasi



Foto: Istimewa

JAKARTA, KRJOGJA.com - Masing-masing daerah berbeda menterjemahkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy di Jakarta, Sabtu (15/6 2019)

“Kita tegaskan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbeda dengan sistem rayon. Sebab, zona disini melewati batas-batas administratif.

Karena itu, lanjut Muhadjir, pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan terkait pendidikannya tetap menjalankan aturan tentang PPDB berbasis zonasi sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Pemda bisa fleksibel dalam melaksanakan program tersebut. “Jadi, zonasi itu jangan dipandang kaku. Zona ini melewati batas-batas administratif. Jadi kalau di kecamatan itu tidak ada sekolah, lebarkan zonanya sampai ada sekolah negeri yang bisa menampung,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Mendikbud menyayangkan beberapa daerah yang kesulitan saat menjalankan program PPDB zonasi ini. Mestinya, menurut dia, para pemangku kebijakan di daerah harusnya mengetahui kondisi lapangan sehingga bisa lebih kreatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Dia memaparkan, setelah PPDB dilaksanakan dengan zonasi, pemerintah daerah juga harus melakukan program redistribusi guru yang juga disesuaikan dengan kebutuhan zonasi. Kebijakan zonasi ini, lanjut ia, juga akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan sampai hal-hal terkecil.

“Kalau sampai daerah tidak menjalankan, bahkan mau menghapuskan kebijakan zonasi ini, saya rasa akan menghambat proses pemerataan pendidikan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, staf khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhamad, menyebut persentase yang ditentukan dalam PPDB kali ini yakni 90 persen untuk zonasi, 5 persen untuk prestasi, dan 5 persen lagi untuk pindahan mesti tetap dijalankan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab permasalahan daerah yang keberatan dengan pembagian tersebut karena tidak mewadahi murid yang benar-benar berprestasi. “Murid berprestasi juga bisa diwadahi di 90 persen untuk zonasi. Jadi tinggal diatur saja. Yang jelas anggaran wajib dari persentase zonasi itu harus dianggarkan pula untuk anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus,” paparnya.

Hamid tidak melarang adanya seleksi prestasi dalam PPDB kali ini selama masih ada dalam satu zona tertentu. Ia juga menjelaskan dengan adanya PPDB berbasis zonasi ini bisa jadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program selanjutnya.

Tinjau Ulang

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai PPDB setiap tahun selalu menjadi permasalahan. Ia beralasan tidak pernah ada evaluasi berkelanjutan terkait PPDB dan zonasi ini. “Akibatnya daerah-daerah yang kelabakan. Akhirnya, mereka bikin pergub sendiri-sendiri, beda-beda menerjemahkan zonasi seperti yang diatur dalam Permendikbud,” ujarnya. Dia juga menilai fleksibilitas yang terdapat dalam PPDB Zonasi ini tanggung dan membuat bingung pemerintah daerah. Pembagian persentase PPDB, banyak daerah protes dan terkendala dalam menjalankan program tersebut. Untuk mengantisipasi tersebut, ia meminta kebijakan PPDB ini dievaluasi dan keberadaannya ditinjau ulang agar tidak menjadi masalah yang berulang.(ati)

Sumber: https://krjogja.com/web/news/read/101996/Daerah_Berbeda_Terjemahkan_Zonasi

Saat 10 Ribu Subscriber Youtube jadi Syarat Kuliah di UPN Jakarta



Upacara hari pendidikan nasional di UPN Veteran Jakarta, 2/5/2019. FOTO/www.upnvj.ac.id

Oleh: Alfian Putra Abdi - 14 Juni 2019

Rektor UPNVJ mengatakan, keputusan menyertakan Youtube Content Creator dengan minimal 10.000 subscriber untuk menyesuaikan dengan semangat zaman, yaitu revolusi industri 4.0.

tirto.id - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mendapat sorotan warganet di media sosial. Pemicunya adalah Seleksi Mandiri (SEMA UPNVJ) tahun ajaran 2019 yang menetapkan syarat bagi Youtube Content Creator dengan minimal 10.000 subscriber dapat mendaftar di jalur prestasi.

Redaksi Tirto awalnya mengetahui informasi tersebut pertama kali melalui akun instagram @infomasukptn. Hingga Rabu (13/6/2019) pukul 20.39 WIB, unggahan tersebut telah dibanjiri 23.481 likes, dan sekitar 1.349 komentar warganet.

Reaksi warganet pun beraneka ragam: sebagian menyambut gembira, tapi sebagian yang lain menilainya dengan skeptis. "Ayo kita bikin cenel [channel] yutub [youtube] auto diterima kuliah," tulis akun @m.iqbalmub. "Biar tenar kan ya kampusnya. Eh," tulis akun @aurelyaputr.

"Ga heran anak zaman sekarang di tanya cita-citanya apa jawabnya 'jadi yutuber,'" tulis akun @rizalsimb.

Pendaftaran SEMA UPNVJ dilakukan secara online melalui website pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, yaitu di laman <https://pendaftaran.upnvj.ac.id/>.

Selain menetapkan syarat Youtube Content Creator minimal 10.000 subscriber, SEMA UNVI untuk jalur mandiri juga sebetulnya menetapkan syarat lainnya seperti Prestasi Akademik/Nonakademik. (Prestasi bidang olimpiade sains, olahraga dan seni peringkat 1-3 tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional 3 tahun terakhir, Hafiz Al-Quran Minimal 5 Juz, Ketua OSIS selama sekurang-kurangnya satu periode).

Namun, Rektor UPNVJ Erna Hernawati mengaku tidak mengetahui kalau persyaratan khusus yang dibuat rektorat itu ramai di media sosial.

“Belum tahu saya, soal itu [ramai di medsos]. Di Instagram apa? Coba nanti kasih linknya ke saya,” kata dia saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (13/6/2019).

Korelasi Youtube dan Akademik

Pendiri Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Najeela Shihab menilai belum memahami korelasi antara calon mahasiswa baru yang memiliki subscriber dalam kanal Youtube dengan kampus UPNVJ yang dikenal dengan jargon “Bela Negara” tersebut.

“Saya belum melihat kaitan langsung. Tapi mungkin ada beberapa paradigma atau rencana jangka panjang berkait kurikulum UPNVJ yang belum disampaikan dan menjadi dasar kebijakan ini,” kata Najeela saat dihubungi reporter Tirto. Sebab, kata Najeela, seleksi masuk perguruan tinggi itu bertujuan untuk menemukan kandidat yang paling sesuai dengan universitas juga fakultas yang diinginkan.

“Dalam arti paling besar kemungkinan suksesnya dalam menjalani program pendidik di tempat yang bersangkutan,” kata Najeela.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji justru mempertanyakan soal youtube dan konten seperti apa yang dimaksud oleh pihak UPNVJ. Sebab, kata dia, memang pihak universitas hanya menulis secara implisit.

“Perlu diperjelas soal kontennya. Harus yang mendidik dan bernilai positif,” ujarnya saat dihubungi reporter Tirto. Alasannya, kata Ubaid, banyak juga pemilik akun youtube dengan jumlah pengikut ribuan bahkan jutaan, tapi tidak memproduksi konten yang edukatif. Bahkan isinya cenderung menjurus hatespeech, berisi konten porno, dan sejenisnya. “Kualifikasinya tidak bisa asal-asalan,” kata Ubaid menambahkan.

Ubaid juga mengatakan, hal yang tidak kalah pentingnya lagi kuota penerimaan melalui jalur ini juga harus transparan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan.

“Harus jelas kuotanya. Ini bisa menjadi celah jual-beli kursi dan transaksional,” kata dia.

Rektor UPNVJ: Sesuai Semangat Zaman 4.0

Rektor UPNVJ Erna Hernawati mengatakan keputusan menyertakan Youtube Content Creator dengan minimal 10.000 subscriber sebagai syarat menempuh jalur prestasi pada pendaftaran mahasiswa baru SEMA UPNVJ 2019 berasal dari pihak rektorat.

“Itu, kan, sudah SK rektor. Kami baru memulainya tahun ini. Segala sesuatu sudah diputuskan rektor, tapi untuk teknis bisa ke ketua panitia,” kata Erna saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (13/6/2019).

Persyaratan bagi calon mahasiswa baru tersebut, kata Erna, untuk menyesuaikan dengan semangat zaman yakni revolusi industri 4.0 yang memang sedang berkembang di Indonesia.

“Kami ingin mahasiswa-mahasiswa di sini itu termotivasi agar lebih kreatif. Makanya kami beri penghargaan khusus Youtube Creator melalui jalur prestasi,” ujar dia.

Perihal akun youtube dengan konten seperti apa, yang akan diterima oleh pihak universitasnya, Erna berkata, hal tersebut akan dikuratori secara ketat oleh tim internal mereka. Setelah calon mahasiswa baru tersebut mendaftarkan data diri beserta link youtubanya di website universitas, kata dia, maka tim tersebut yang nanti akan melakukan proses seleksi dan mempertimbangkannya lebih lanjut.

“Tim internal kami akan mempertimbangkan soal kontennya. Tidak konten yang abal-abal. Jadi kontennya yang lebih edukatif dan berguna bagi masyarakat. Bukan provokasi,” ujar Erna.

***Ubaid Matraji menilai UPNVJ harus jelas soal
youtuber dan konten seperti apa yang dimaksud***

Sumber: <https://tirto.id/saat-10-ribu-subscriber-youtube-jadi-syarat-kuliah-di-upn-jakarta-ecm4>

Guru di Daerah Terpencil Harus Dapat Perlakuan Khusus



Ilustrasi guru Sekolah Dasar (SD). (Foto: Antara/Dewi Fajriani)

Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 13 Juni 2019 | 13:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengatasi kekosongan atau kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membuat kebijakan rotasi. Semua guru diwajibkan mengabdikan diri di daerah tersebut dalam waktu yang telah disepakati.

Merespons kebijakan tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, daerah 3T memang harus menjadi prioritas utama karena selama ini program-program pemerataan pendidikan belum menjangkau ke sana. Pasalnya, guru-guru yang ditempatkan di sana selalu gagal.

“Mereka tak betah lalu pindah. Itu yang terjadi. Jadi, harus ada prioritas dan perlakuan khusus supaya guru-guru tertarik untuk mengajar di daerah 3T. Jika tidak, kemungkinan kegagalan akan terulang lagi,” ujarnya kepada *SP*, Kamis (13/6).

Ubaid mengusulkan agar pemerintah membuat sebuah perjanjian sejak awal supaya hak dan kewajibannya jelas. Jika guru bertindak tidak sesuai perjanjian, ia harus diberi sanksi. Wujudnya mulai dari sanksi ringan berupa teguran administratif sampai terberat pemecatan sebagai ASN apabila guru tersebut melanggar perjanjian. Sebaliknya juga harus ada perlakuan

khusus sebagai daya dorong dan penyemangat daya juang karena medan yang dihadapi berat.

“Perlakuannya juga harus linear dengan profesi guru, misalnya pemberian beasiswa S-2 atau peningkatan kapasitas yang lain,” ucapnya.

Hal ini disampaikan Ubaid karena ia menilai kegagalan program guru daerah 3T seperti Guru Garis Depan (GGD) menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menggarap daerah 3T. Padahal sudah banyak upaya dari inisiatif masyarakat untuk menjangkau pendidikan di daerah 3T. “Seharusnya kalau sudah banyak inisiatif dari masyarakat, pemerintah tinggal meneruskan dan mengembangkan. Tapi tampaknya pemerintah tak melihat itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, para guru yang dirotasi ini adalah guru dalam satu zona dan berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kewajiban untuk siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja dalam kurun waktu tertentu.

Sumber: Suara Pembaruan <https://www.beritasatu.com/nasional/559142/guru-di-daerah-terpencil-harus-dapat-perlakuan-khusus>

Igauan Illuminati ala Baequni: Kontraproduktif & Bikin Umat Jumud



Penuhi Undangan MUI, Gubernur Ridwan Kamil dan Ustadz Rahmat Baequni Diskusi Membangun Ummat. screenshot/ youtube/Humas Jabar

Oleh: Haris Prabowo - 13 Juni 2019

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menilai teori konspirasi serta simbol Illuminati yang disampaikan Baequni kontraproduktif.

tirto.id - Perseteruan antara Ustadz Rahmat Baequni dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait arsitektur Masjid Al-Safar, di Jalan Tol Purbaleunyi Km 88 menjadi kontroversi dan bikin geger. Ridwan Kamil berkali-kali disoraki oleh jemaahnya Baequni saat keduanya berdebat di Balai Asri Pusdai Jawa Barat, pada Senin (10/6/2019).

“Huuuuuu!”

Merujuk video berdurasi 1,5 jam yang diunggah akun Atalia Praratya (istrinya Ridwan Kamil) di YouTube, Ridwan Kamil tengah membantah tuduhan Baequni. Ia menjelaskan bahwa desain segitiga yang dikoreksi trapesium di Masjid Al-Safar bukan simbol Illuminati.

Tuduhan itu menjadi viral, sebab Illuminati dihubungkan sebagai organisasi rahasia elite yang punya kekuatan serta kehendak mendominasi dunia.

Tuduhan Baequni bahwa desain Masjid Al-Safar menampilkan ciri khas Illuminati pun ramai di media sosial selama beberapa pekan terakhir. Di Twitter, misalnya, muncul video tentang penjelasan Baequni yang mempersoalkan desain masjid yang terletak di Rest Area KM 88 B Jalan

Tol Purbaleunyi arah Jakarta.

“Ini pintu masuknya dan lihat ini segitiga semua. Nyaris segitiga semua. Bahkan ketika masuk ke dalam, ini segitiga, satu mata. Maka, ketika kita salat, sebetulnya kita menghadap siapa, menghadap Allah atau segitiga satu mata?” kata Baequni dalam video tersebut. Saat tuduhan itu viral,

Ridwan Kamil sempat mengunggah bantahan di Instagram pada 31 Mei lalu.

“Saya tidak perlu marah terhadap tafsir, yang penting saya jelaskan bahwa jika Masjid Al Safar dikatakan sebagai implementasi dari simbol2 iluminati itu adalah kesimpulan KELIRU.”

Apa yang dijelaskan Baequni soal Illuminati seperti igauan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “perkataan yang bukan-bukan; omong kosong; ocehan”.

Kemunduran

Menanggapi itu, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, Arifin Junaidi menilai bahwa upaya mempermasalahkan teori-teori konspirasi dan simbol-simbol, seperti kasus di Masjid Al-Safar, merupakan hal yang tidak perlu. Ia mengatakan hal itu justru menunjukkan ketidaktahuan umat Islam.

“Saya sangat setuju dengan paparan Kang Emil kemarin. Orang itu [Ust. Rahmat Baequni] tidak adil, enggak proporsional. Masjid di Madinah, di mihrab nabinya saja ada lambang segitiga, kenapa enggak diprotes?” kata Arifin saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (12/6/2019).

Arifin juga merespons ucapan orang-orang yang masih mengagungkan kubah sebagai simbol masjid. Ia mengatakan bahwa masjid-masjid di zaman pertama kali Islam masuk ke Jawa dibangun tanpa kubah.

Arifin juga menilai dengan adanya pihak-pihak yang mempermasalahkan lambang segitiga, justru membikin peradaban Islam menjadi mundur. Ia sedikit menyinggung Abu Al-Wafa’, matematikawan dan astronom Muslim abad ke-10, yang menemukan rumus trigonometri--yang sarat dengan lambang segitiga.

“Ini jelas kemunduran cara berpikir kita. Contoh bagaimana dulu Abu Al-Wafa’. Kenapa lambang FPI yang segitiga itu enggak dipermasalahkan? Mau dituding Illuminati?” kata dia mempertanyakan.

Arifin menuturkan, Baequni sebagai pendakwah dan pendidik sebaiknya tidak mengedepankan hal-hal berbau konspiratif dan simbol-simbol semacam itu.

“Anak-anak jangan diajarkan seperti itu. Anak-anak dibuka wawasannya. Belajar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin,” kata dia.

“Islam itu diawal ditekankan dengan ‘iqra’, yaitu membaca. Perbanyak membaca dan tahu hal-hal yang berbeda. Islam yang paling penting membaca dan mengajar, bukan malah yang kurang baca tapi menyalahkan yang banyak baca,” lanjut dia.



Kontraproduktif dan Tak Substantif

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti juga menilai bahwa pendapat Masjid Al-Safar sebagai simbol Illuminati dan melarang umat Islam salat di dalamnya sangat kontraproduktif dan tidak substantif.

“Ketika beberapa tahun lalu logo UIN Jakarta diluncurkan ada juga yang berkomentar logo UIN itu menyerupai simbol-simbol Yahudi. Padahal logo itu merupakan simbol integrasi iman, ilmu, dan akhlak,” kata Mu'ti saat dihubungi saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (12/6/2019).

Mu'ti menuturkan di beberapa negara banyak masjid yang sebelumnya merupakan gereja, salah satunya Masjid Hagia Sophia atau Aya Sofya di Istanbul, Republik Turki. Ornamen Kristen di dalam gereja tidak diubah, sampai akhirnya masjid tersebut diubah menjadi museum. Ia juga menambahkan beragamnya desain masjid menunjukkan kemajuan arsitektur dalam dunia Islam.

“Ada masjid gaya Turki, Persia, Eropa, dan arsitektur lokal. Misalnya di Indonesia berkembang masjid arsitektur Walisongo, Banten, Aceh, Minangkabau, dan sebagainya.”

“Karena itu soal arsitektur masjid al-Safar tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi sampai ada larangan untuk salat di masjid tersebut,” tegas Mu'ti.

Menurut Mu'ti, hal yang penting didorong saat ini adalah bagaimana agar umat Islam semakin taat beribadah. Ia mengatakan khususnya salat berjamaah, menjadikan masjid sebagai pusat kebudayaan Islam, pendidikan, dan ekonomi, serta sebagai sarana mempersatukan umat Islam.

“Saatnya umat Islam bersatu serta memajukan umat dan bangsa dengan karya kreatif yang berkemajuan termasuk dalam arsitektur masjid,” ujarnya.

Dalam ranah pendidikan dan dakwah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji juga menilai teori dan simbol konspirasi sangat berbahaya.

Menurut Ubaid, selain tak berbasis data empiris, hal tersebut juga menjunjung tinggi praduga.

“Banyak juga guru-guru yang tergiring dengan opini-opini yang berdasarkan pada praduga, yang ujung-ujungnya adalah hoaks,” kata Ubaid.

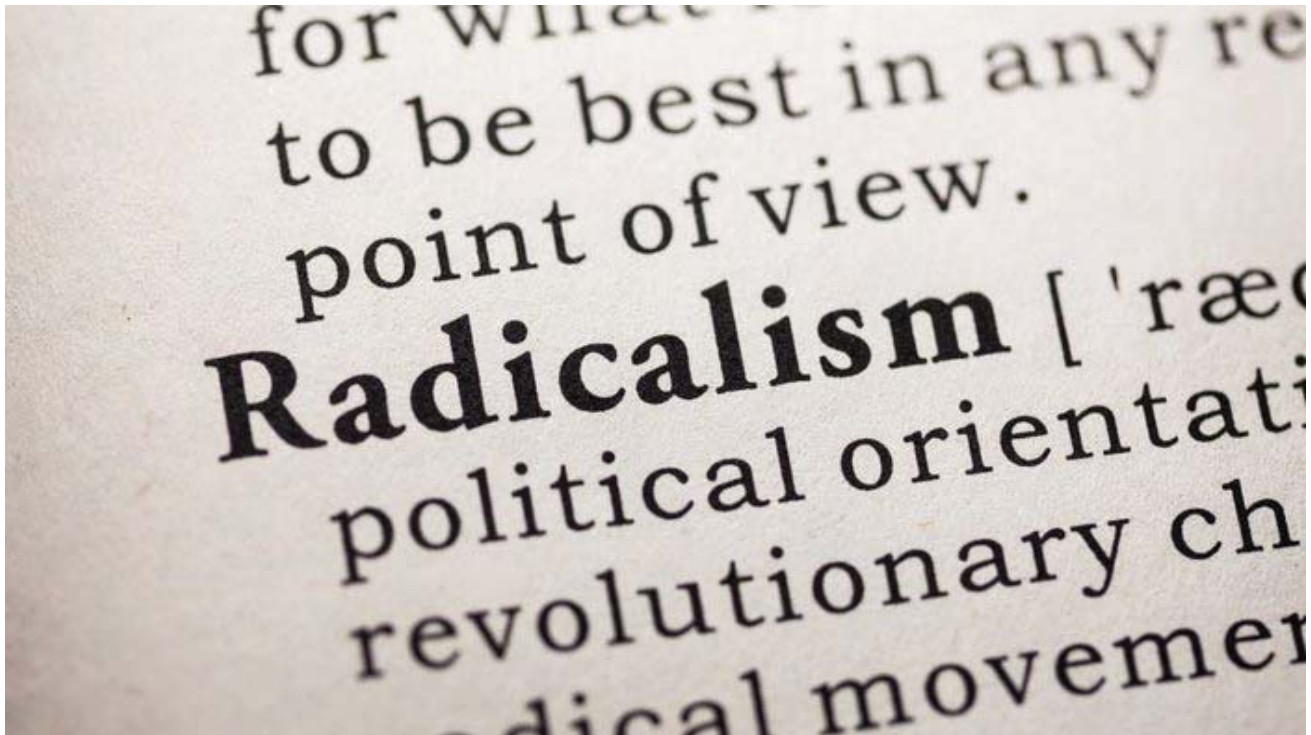
Ubaid menuturkan hal yang lebih penting dikedepankan adalah pendidikan dengan logika berpikir serta beralur. Dan juga, menjunjung tinggi pengetahuan yang berbasis data.

“Ini penting untuk diajarkan dalam dunia pendidikan, supaya kita bisa mengerti alur berpikir yang runtut dan sistematis dan terhindar dari hoaks, yang logika berpikirnya sporadis dan lompat-lompat,” kata dia.

Beragamnya desain masjid menunjukkan kemajuan arsitektur dalam dunia Islam.

Sumber: <https://tirto.id/igauan-illuminati-ala-baequni-kontraproduktif-bikin-umat-jumud-eciy>

JPPI: PTN Seharusnya Tak DO Mahasiswa yang Terpapar Radikalisme



Ilustrasi Radikal. FOTO/iStockphoto

Oleh: Haris Prabowo - 12 Juni 2019

Pengamat Pendidikan dari JPPIII meminta kampus-kampus tidak memecat atau men DO mahasiswa yang terpapar radikalisme.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons hasil riset Setara Institute yang menyimpulkan ada 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terpapar pengaruh paham radikal. Beberapa kampus tersebut di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Ubaid mengatakan, sudah saatnya kampus-kampus tersebut melakukan tindakan yang tepat dengan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang diduga terpapar radikalisme. Ia mengecam keras jika ada kampus-kampus yang lebih memilih memecat atau men-Drop Out (DO) mahasiswa-mahasiswa yang terpapar radikalisme.

"Menurut saya, sangat tidak bijak jika kampus men-DO atau mengeluarkan mahasiswa yang terindikasi atau terpapar radikalisme. Justru di sinilah letak urgensi kampus sebagai lembaga pendidikan," katanya kepada wartawan Tirto, Selasa (11/6/2019).

Ubaid menilai seharusnya kampus melakukan pembinaan terhadap mahasiswanya, bukan malah membinasakannya dengan cara dikeluarkan dari kampus. Karena bisa jadi, kata Ubaid, mahasiswa yang terpapar radikalisme itu adalah korban karena ketidaktahuannya atau awam soal Islam, lalu mereka dicuci otak oleh segelintir oknum di kampus.

“Maka, dengan adanya penelitian tersebut, pihak kampus jangan malah membela diri lalu bersih-bersih, harusnya kampus melakukan evaluasi diri dan menelisik mengapa institusi pendidikan jadi ajang persemaian radikalisme,” katanya.

Ia juga meminta kampus-kampus yang disebut Setara Institute tersebut mengambil langkah strategis dan sistematis yang harus dilakukan secepatnya. Ubaid juga menyoroti dan meminta pihak kampus untuk berhati-hati dalam menggunakan diksi “radikal” atau “radikalisme” di kampus. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menysar ke banyak pihak, termasuk mahasiswa yang kritis ke kampus.

“Diksi ‘radikal’ ini juga harus clear biar tidak membabi buta menysar banyak pihak. Harusnya tepat sasaran. Maka, sangat tidak tepat jika ‘radikalisme’ juga dialamatkan kepada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan kampus,” katanya.

“Kritisisme adalah ruh dari dunia akademik, maka harus dipupuk dan dikembangkan, bukan malah diberangus,” lanjutnya.

Sebelumnya, Juru Bicara UI Gandjar Laksana juga sempat merespons penelitian yang dilakukan BNPT tahun lalu soal UI yang menyatakan siap memecat mahasiswa yang terpapar radikalisme. Gandjar pun menepis hal tersebut.

“Itu maksudnya bahwa UI siap menindak sesuai hukum dan/atau ketentuan yang berlaku baik dalam lingkup hukum negara maupun internal UI,” kata dia. **“Sangat tidak bijak jika kampus men-DO atau mengeluarkan mahasiswa yang terindikasi atau terpapar radikalisme.”**

Sumber: <https://tirto.id/jppi-ptn-seharusnya-tak-do-mahasiswa-yang-terpapar-radikalisme-ecgk>

Sabtu 8/6/2019 | 06:00

Rekrutmen Guru

Pengalaman Guru Honorer Mesti Dihargai



Foto: Istimewa

JAKARTA- Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah adalah menjadikan guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program tersebut masih akan terus dilakukan meski menemui kendala salah satunya karena banyak guru honorer yang sulit bersaing dalam tes.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Pendidikan P2 Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anggi Afriansyah menilai perlu adanya penyesuaian dalam proses rekrutmennya. Proses kelulusan, lanjutnya, tidak hanya berdasar pada nilai pengerjaan soal, tapi juga pada rekam jejak guru honorer tersebut.

“Selama ini pengalaman kerja seperti tidak dihargai. Untuk menjaga kualitas ujian, nilai tetap jadi syarat. Namun, pertimbangan pengalaman kerja harus juga mendapatkan bobot yang besar. Jadi guru bukan hanya kecakapan akademik, tapi ada kecakapan lain yang didapat melalui pengalaman mengajar yang cukup,” ujar Anggi kepada *Koran Jakarta*, di Jakarta, Jumat (7/6).

Anggi menyebut, banyak guru honorer memiliki kualifikasi dan minat yang baik. Tapi, pada akhirnya mereka gugur di tengah jalan karena merasa menjadi guru honorer tidak rasional bagi pemenuhan hidup mereka.

Terkait ada program peningkatan kesejahteraan guru honorer menjadi PNS maupun PPPK, ia menilai program tersebut bagus jika direalisasikan dengan baik. Hanya saja, lanjutnya, penting juga bagi pemerintah untuk membuat skema yang berkelanjutan dan transparan.

“Pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan. Ini menentukan berapa jumlah yang dibutuhkan untuk PNS maupun PPPK. Penting juga melihat kebutuhan tiap daerah. Ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Jika tidak kualitas guru akan sulit meningkat karena nasib gurunya tidak menentu,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai guru honorer yang tidak bisa bersaing dalam tes terbuka, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan hal tersebut tidak secara langsung menunjukkan para guru honorer tidak berkualitas. Justru hal yang penting dilihat dari para guru honorer ini keberadaan mereka harus diakui dan diapresiasi pemerintah. **ruf/AR-3**

Sumber : <http://www.koran-jakarta.com/pengalaman-guru-honorer-mesti-dihargai/>

Demographic Bonus of Indonesia is made ineffective by Intolerance and Radicalism

by Jennie Brown May 28, 2019 Viewer 5041



Jakarta – As Indonesia is a developing country, a few reforms in its education system has set a prediction that the country will enjoy a demographic bonus in its productive population by 2030. The productive population of any state is the people who are self dependents. But this demographic bonus would be affected by intolerance and radicalism opinions that are spread in young people of the country. And there is a perception and a fear that if the government will not pay any attention to the issue, then serious drawbacks of demographic bonus will come forward in future.

Ubaid Matraji, who works in Network for Indonesian Education Watch said that a survey report of State Islamic University revealed, intolerance and radicalism are severe threats for Indonesia's youth.

The participants of the survey were Muslim teachers and Muslim students. As per gurupendidikan.co.id, the outcome of the study was that almost 63 percent of teachers and 57 percent of students are intolerant towards other religions. The survey also showed that half of the teachers' opinion could be considered as radical.

Ubaid Said, “if the government fails to pay serious attention to the problems of intolerance and radicalism, Indonesia can soon say goodbye to its demographic bonus.”

He blamed Indonesian government for radical opinion and intolerance spread in youngsters, and he also said that the government should pay attention to school conditions and national curriculum to prevent demographic bonus loss.

Earlier the government banned Islamic group Hizbut Indonesia Tahrir in 2017 for threatening state unity and disturbing the ideology Pancasila of the state. But, according to Ubaid, members of the group are still active, and they are targeting youngsters in schools and colleges.

Sumber : <https://oneworldherald.com/2019/05/28/demographic-bonus-of-indonesia-is-made-ineffective-by-intolerance-and-radicalism/>

Tak Bisa Dihindari, Pemilihan Rektor Sarat Korupsi

Editor Sumber Rajasa Ginting Kamis, 16 Mei 2019 - 06:46



indopos.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa lembaganya banyak mendapatkan laporan soal pemilihan rektor yang berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

”Memang perlu diklarifikasi lagi, banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi,” kata Syarif usai acara “Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi” di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut dia, potensi korupsi pemilihan rektor itu dapat terjadi baik perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama. ”Dua-duanya, baik itu Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama ada. Jadi, kalau di Kemenristekdikti itu kan ada kuota yang diberikan kepada menteri itu kan suaranya 30 persen (pemilihan rektor), itu biasanya bisa disalahgunakan,” ucap Syarif.

Syarif mengatakan bahwa lembaganya telah melakukan banyak hal, salah satunya kerja sama pengendalian konflik kepentingan di dalam perguruan tinggi. ”Yang kedua, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, yang ketiga dalam memperbaiki tata kelola perguruan tingginya itu sendiri dan salah satunya itu adalah tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilihan rektor,” ucap Syarif.

Khusus untuk pemilihan rektor itu, kata dia, lembaganya betul-betul sangat “concern” dan juga sudah membicarakan dengan Menristekdikti Mohamad Nasir. “Khusus untuk pemilihan rektor itu kami betul-betul sangat ‘concern’ dan itu kami sudah bicarakan dengan Menristekdikti, kami berharap tidak akan ada lagi ke depan,” ujar Syarif.

Sebelumnya, kasus jual beli jabatan rektor sempat mencuat terkait kasus yang melibatkan anggota DPR RI Romahurmuziy alias Rommy. Rommy bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi merupakan tersangka kasus suap terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

Nama Rektor UIN Jakarta Amany Lubis sempat dirumorkan terkait jual beli jabatan rektor itu. Amany Lubis pun memberi pernyataan resmi dalam laman <https://www.uinjkt.ac.id> terkait rumor dirinya yang saat terpilih menjadi rektor periode 2019-2023 dilakukan secara tidak wajar.

Amany membantah bahwa untuk meraih jabatan tersebut telah terjadi politik uang. Tidak adanya laporan yang masuk ke Kementerian ini juga yang menjadi dalih Menteri Nasir. Ia mengaku tidak mengetahui adanya praktik suap di bawah otorisasinya.

Untuk diketahui, Ombudsman RI mencurigai potensi jual beli jabatan tak hanya muncul di Kementerian Agama. Namun, adanya dugaan suap terkait pemilihan Rektor PTN. Adapun tiga pemilihan rektor yang diduga beraroma suap yakni, pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado Sulawesi Utara, Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, dan Universitas Haluoleo, Kendari-Sulawesi Tenggara, Universitas Padjajaran.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Doni A Koesoema menyatakan, pemilihan rektor masih bisa menjadi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme karena kewenangan veto Menristekdikti tinggi. Proses yang dari bawah bisa kalah oleh mekanisme panitia seleksi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi.

“Iya. mereka sangat menentukan sehingga hasil seleksi panitia lokal kampus yang harus menyerahkan 3 nama ke Menristekdikti dan yang menentukan Menristekdikti berdasarkan panitia seleksi pusat bisa menjadi sarana untuk tawar menawar,” ujar Pengamat pendidikan Doni A Koesoema kepada INDOPOS melalui telepon di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dari PTN atau PTS mereka menyerahkan 3 nama. Namun yang jadi masalah, seleksi 3 nama yang sudah ada di tangan menteri prosesnya tidak terbuka. Maka Permainan KKN bisa terjadi, apalagi tim pansel yang membentuk Menristekdikti sendiri dengan kriteria yang kurang jelas. “Iya. Dalam proses di kampus sendiri pun juga tidak transparan,” ucapnya.

Hak suara Menteri dalam proses pemilihan besarnya 35 persen. Menurutnya hak ini terlalu besar bila tidak ada sistem kontrol transparan tentang kriteria calon rektor sehingga selain berpotensi KKN juga dipolitisasi.

“Jadi setelah proses penjaringan yg melahirkan 3 nama, menteri memiliki hak suara 35 persen sedangkan senat 65 persen. Sehingga suara aspirasi dari senat yg berasal dari bawah akan bisa mentah karena kuatnya hak suara menteri,” terangnya.

Terbanyak yang terpilih harus 50 plus 1, jadi sistem KKN bisa dengan orang senat sendiri, mengambil 16 persen. Dengan sistem 35 hak suara hanya untuk menteri, itu terlalu besar sementara masing-masing anggota senat secara keseluruhan hanya 65 persen. “Masing-masing anggota senat suaranya satu. Pemilihan akhirnya pun dengan senat dilakukan tertutup. Kalau

pemilihan dilakukan terbuka, akan terlihat transparansinya,” terangya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa praktik korupsi tak bisa dihindari. Meski di tingkat perguruan tinggi. Pasti sangat mungkin terjadi. Jual beli jabatan bisa masuk arena ini. Pemilihan kepala sekolah saja banyak modus korupsinya apalagi ini rektor. Saya pikir sama saja,” ungkapnya.

Ketua APTISI Indonesia M Budi Sudjatmiko menuturkan, biasanya senat PTN mengajukan 2 hingga 3 nama calon yang sudah dipilih oleh senat PTN kepada kementerian, dan Menteri yang menentukan.

Kemudian Kementerian akan melihat portofolio setiap calon rektor. Namun adanya praktik kecurangan memang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu. “Sejauh ini aroma terjembus. Sangat kuat terhebus, tapi saya tidak yakin itu dilakukan oleh pimpinan di kemenristekdikti. Saya menduga ada oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan partai dan mereka memainkan hal ini,” tutur Budi Sudjatmiko.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Ismunandar enggan menanggapi adanya dugaan praktik korupsi di perguruan tinggi.

Namun dalam pengangkatan jabatan rektor memang merupakan kewenangan instansinya. “Tergantung status PTnya. PTN/PTS. Kalau PTN Apakah satuan kerja Badan Layan Umum (BLU) atau Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH),” ucapnya.

Sumber : <https://indopos.co.id/read/2019/05/16/175367/tak-bisa-dihindari-pemilihan-rektor-sarat-korupsi/>

Pendidikan Nasional - Program Instruktur Asing Akan Dilakukan Lebih Masif

Guru Asing Fokus Pendidikan Vokasi



Foto istimewa

Instruktur tidak diangkat jadi PNS, dikontrak dalam jangka panjang atau menggantikan guru.

JAKARTA – Instruktur-instruktur yang akan didatangkan dari luar negeri untuk mengajar guru-guru vokasi di Tanah Air merupakan amanat Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, bukan impor guru seperti yang ramai diberitakan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, di Jakarta, Selasa (14/5).

Mendikbud menambahkan, program instruktur asing ini akan dilakukan lebih masif, meski bukanlah program baru. “Ini bukan program baru, tapi mau dimasifkan. Itu yang diinginkan Menko PMK (Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan). Bukan impor, diangkat PNS, dikontrak dalam jangka panjang atau menggantikan guru. Saya jamin itu tidak akan terjadi. Ini untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas guru,” tegasnya.

Muhadjir menyebutkan, fokus dari instruktur asing nanti akan diarahkan untuk mengisi kebutuhan vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). Hampir semua bidang vokasi membutuhkan

program ini, tapi bidang yang berkaitan teknologi digital akan lebih didahulukan.

Proses penentuan para instruktur ini, lanjut Muhadjir, akan disesuaikan dengan kelebihan dari negara tersebut. Secara usia, para instruktur yang akan didatangkan ada yang berpengalaman dan ada yang sesuai kebutuhan zaman.

“Selama ini berasal dari lembaga pelatihan luar negeri yang biasanya mereka itu *senior expert*, mantan-mantan guru yang sudah pensiun dan punya pengalaman. Ada yang muda-muda terutama berkaitan teknologi terbaru. Ini terus bergulir dan terus merespons perubahan-perubahan ini,” jelasnya.

Muhadjir akan memastikan para instruktur yang datang ke Indonesia nantinya tidak hanya melatih guru. Tapi, mereka juga diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Mendikbud menilai dari segi proses pelatihan, mendatangkan instruktur dari luar negeri ini lebih efektif dibanding mengirim guru dan instruktur dari Indonesia ke luar negeri. Salah satunya adalah karena instruktur mengenali langsung lingkungan sekitar.

“Kalau mereka datang ke sini bisa lihat sekolah kondisinya seperti apa, rumah belajarnya seperti apa. Sehingga dia bisa memodifikasi dan berimprovisasi terhadap pelatihan-pelatihan yang akan diberikan,” tuturnya.

Meski program akan dilaksanakan pada tahun ini, Muhadjir menyebut masih ada beberapa hal yang masih harus dibahas lebih dalam, terutama terkait anggaran dan hal-hal teknis lain ketika para instruktur asing itu berada di Tanah Air.

Terobosan Program

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai program instruktur asing tersebut jauh sekali dari kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Ubaid justru menginginkan pemerintah memberitakan terkait terobosan program yang lebih berdampak luas. Bukan malah mendatangkan instruktur yang hanya perkara teknis.

“Yang menjadi penasaran pertanyaan publik adalah apa terobosan program pemerintah untuk intervensi kualitas guru yang masih rendah ini? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya supaya bisa merata dan tidak terfokus di kota-kota besar? Ini yang belum dijawab oleh Kemendikbud,” tegas Ubaid.

Ubaid juga mempertanyakan terkait penyelenggaraan program instruktur asing yang akan dilakukan lebih masif. **ruf/E-3**

Sumber : <http://www.koran-jakarta.com/guru-asing-fokus-pendidikan-vokasi/>

Pendidikan Nasional - Guru Asing untuk Melatih Guru-guru Dalam Negeri

“Impor Guru” Kontraproduktif



Kornas JPPI Ubaid Matraji/RMOL Banten

Rencana impor guru, justru terkesan pemerintah tidak peduli pada masalah dan kondisi guru-guru di Indonesia.

JAKARTA – Rencana pemerintah mendatangkan guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia dinilai tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya kualitas pendidikan di Tanah Air. Rencana tersebut justru terkesan bahwa pemerintah lepas tangan mengurus pendidikan.

“Itu kebijakan (impor guru) *ngawur* dan tidak berdasarkan kajian yang mendalam. Pemerintah terkesan tidak mau memperbaiki keadaan, justru lepas tangan dan menyerahkan pada orang asing,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, kepada *Koran Jakarta*, di Jakarta, Minggu (12/5).

Ubaid menyebut, rencana tersebut merupakan bentuk kolonisasi pemikiran dan kebudayaan bangsa. Sebab, budi pekerti dan warisan budaya bangsa Indonesia, merupakan modal besar dalam pendidikan yang bisa tergerus dengan kehadiran guru asing.

Ia mencontohkan isu tenaga kerja asing yang diresahkan banyak pihak, jangan sampai terulang dalam rencana impor guru ini. Untuk itu, ia meminta pemerintah menjelaskan ke publik secara transparan terkait mendatangkan guru dari luar negeri tersebut.

“Rencana ini harus dijelaskan dulu landasan pemikiran, *output*, dan *income*-nya. Supaya tidak memantik kegaduhan yang justru kontraproduktif,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Peneliti Pendidikan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah. Menurutnya, impor guru tidak akan menyelesaikan persoalan pendidikan di Tanah Air.

“Mungkin argumen Puan Maharani (Menko PMK) disebabkan adanya keinginan agar ada *transfer*

knowledge. Tapi, menurut saya, yang dibutuhkan bukan itu,” jelas Anggi.

Anggi menilai dengan rencana impor guru, pemerintah seolah tidak peduli pada masalah dan kondisi guru-guru di Indonesia. Padahal, jumlah guru di Indonesia sudah terbilang banyak sehingga tidak perlu lagi mendatangkan guru dari luar negeri.

Menurutnya, daripada mendatangkan guru dari luar, lebih baik meningkatkan kualitas guru melalui program yang harus dikedepankan. “Guru ujung tombak keberhasilan pendidikan. Yang paling penting adalah pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas guru,” ujarnya.

Anggi menambahkan, daripada mendatangkan guru dari luar negeri, lebih baik pemerintah mencontoh sistem pengelolaan pendidikan di luar negeri, tentunya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Anggi mengambil contoh Finlandia sebagai salah satu negara dengan sistem dan kualitas pendidikan terbaik dunia. Di Finlandia, calon guru mendapat pendidikan yang ketat, bahkan seleksi yang dilakukan untuk menjadi guru juga sama ketatnya.

“Di Finlandia tak sembarang orang jadi guru. Kesejahteraan dan prestise seorang guru bahkan sama dengan profesi lain, seperti hakim, jaksa, dan ekonom,” tegas Anggi.

Melatih Guru

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa guru yang akan didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Tanah Air.

“Salah satu pertimbangan Menko PMK, Puan Maharani, dengan mendatangkan instruktur atau guru dari luar negeri untuk meningkatkan kemahiran instruktur atau guru Indonesia. Juga bisa lebih efisien dari pada mengirim instruktur atau guru Indonesia ke luar negeri,” ujar Mendikbud.

Dia menambahkan, yang dimaksud Menko Puan bukan “mengimpor”, melainkan “mengundang” guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers atau ToT.

Instruktur luar negeri itu tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk lembaga pelatihan yang berada di kementerian lain, misalnya Balai Latihan Kerja atau BLK.

“Sasaran utamanya adalah untuk peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK juga pembelajaran *science, technology, engineering and mathematics* (STEM),” tambah dia. **ruf/E-3**

Sumber : <http://www.koran-jakarta.com/-impor-guru--kontraproduktif/>

Rencana Menko PMK Impor Guru Asing, JPPI: Harus Jelas Tujuannya



Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Oleh: Alfian Putra Abdi - 11 Mei 2019

Ubaid justru menyarankan agar pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer yang belum juga tuntas.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan wacana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk mendatangkan guru asing ke Indonesia, sebagai suatu upaya yang tidak perlu.

“Harus dijelaskan dulu, landasan pemikiran, output dan outcome-nya, supaya tidak memantik kegaduhan yang justru kontra produktif,” ujar Ubaid kepada Tirto, Sabtu (11/5/2019).

Sebab, kata dia, hal tersebut akan menjadi bencana jika tidak dipikirkan matang dan dijelaskan secara transparansi ke masyarakat. Belum lagi berbagai persoalan di dunia pendidikan, seperti isu kesejahteraan guru honorer yang menurutnya belum juga tuntas.

“Pemerintah terkesan tidak mau usaha memperbaiki keadaan, justru lepas tangan dan menyerahkan pada orang asing,” ujarnya.

Ia mengatakan, apabila guru asing tersebut memang dibutuhkan, setidaknya kriteria kompetensi dan wilayah kerja mereka harus jelas dulu. Agar tidak menimbulkan gesekan dengan guru-guru lokal.

“Bahkan calon-calon guru lulusan LPTK juga masih banyak yang menganggur,” pungkasnya.

Menko PMK Puan Maharani mengutarakan wacananya untuk mendatangkan guru asing ketika menghadiri agenda Musrenbangnas di Jakarta pada Kamis (9/5/2019) kemarin.

“Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia,” ujar Puan.

Politikus PDIP ini mengatakan, apabila nantinya ditemukan adanya kendala bahasa, maka bisa menyiapkan banyak penerjemah dan alih bahasa.

Untuk itu, Puan menegaskan, dirinya akan meminta pihak sekolah menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan beserta jumlahnya. Dan usulan ini, kata dia, akan dikoordinasikan lagi.

***“Pemerintah terkesan tidak mau usaha
memperbaiki keadaan, justru lepas
tangan,” kata Ubaid.***

Sumber: <https://tirto.id/rencana-menko-pmk-impor-guru-asing-jppi-harus-jelas-tujuannya-dAbg>

126 Murid SMA Ketahuan Sebar Bocoran UNBK



Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti siswa SMA. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / FMB Jumat, 10 Mei 2019 | 10:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Muchlis R Luddin mengatakan, dari 8,3 juta peserta Ujian Nasional (UN), terdapat 126 peserta UN Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/SMK yang ketahuan melakukan kecurangan. Mereka ketahuan memotret soal UN dan menyebarkan ke media sosial (medsos).

Muchlis menuturkan, 126 peserta ini tersebar di 25 provinsi dengan sebaran yang tidak merata. Pasalnya, ada yang hanya terdapat satu atau dua peserta, tetapi ada juga yang melampaui angka 10 peserta. Ada pun provinsi tersebut adalah; Jawa Timur (21) kasus, Kalimantan Selatan (18), Lampung (13), Jawa Barat (13), dan Bali (12).

“Setiap laporan yang masuk diverifikasi terlebih dahulu oleh tim Irjen, dan laporan tersebut sudah terverifikasi dan sudah ada keterangan dari orangtua, guru, pengawas, dan kepala sekolah. Memang ia mengaku, memotret soal UNBK,” kata Muchlis kepada *Suara Pembaruan*, Jumat (10/5/2019).

Muchlis menuturkan, Kemdikbud mengantongi semua nama peserta dan sekolah tetapi, untuk menjaga masa depan anak, tidak akan mempublikasi sekolah dan identitas peserta untuk melindungi peserta tersebut. Tetapi, pada umumnya kecurangan ini dilakukan oleh peserta UNBK yang berada di kota.

Muchlis juga menambahkan, berdasarkan hasil penelurusan Tim Irjen, para peserta ini rata-rata memotret satu atau dua soal, kemudian menyebarkan ke medsos saat UN sedang berlangsung. Bahkan ada siswa yang mengaku memotret ketika selesai mengerjakan soal UN.

Hal ini menunjukkan ada kelemahan dalam pengawasan UN. Maka, Muchlis menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan UNBK di masa mendatang. Dalam hal ini akan merevisi tata tertib dalam Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggara UN.

“Memang ini ada kelemahan dalam sistem pengawasan kita, itu yang menjadi masukan dan bahan evaluasi. *Handphone* memang dikumpulkan, tetapi ada yang lolos,”ujarnya.

Menurutnya, dari pengakuan peserta, pada umumnya mereka iseng memanfaatkan situasi saat pengawas lengah. Padahal mereka sebetulnya sudah selesai mengerjakan soal tersebut.

Selanjutnya, meski ada kecurangan, Muchlis menegaskan, pelaksanaan UN 2019 ini berjalan lancar. Pasalnya, dari 8,3 juta peserta yang terkonfirmasi melakukan kecurangan hanya 126 peserta. Sehingga jumlah tersebut sangat sedikit secara persentase. “Saya kira ini sebetulnya jumlahnya kecil dari total peserta UN,”ujarnya.

Sebagai informasi, para peserta ketahuan melakukan kecurangan resmi mendapat nilai nol untuk mata pelajaran tersebut. Meski begitu, Muchlis menuturkan, Kemdikbud tetap mempertimbangkan nasib peserta. Dalam hal ini, mereka tetap diberi kesempatan ikut ujian perbaikan pada Juni mendatang. Sedangkan pengawas, mereka tidak diperkenankan untuk menjadi pengawas UN di masa mendatang.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, adanya kecurangan yang dilakukan peserta pada UNBK, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada siswa. Sebab banyak laporan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan UNBK lemah pengawasan.

“Ada laporan pengawasnya datang terlambat, sering keluar ruangan, bahkan banyak juga yang mengawasi sambil main *handphone*. Jadi Kemdikbud harus fokus pada pengawasan juga,”ujarnya.

Lanjut Ubaid, sanksi pemberian nilai nol sebetulnya tidak perlu dilakukan. Panitia UNBK cukup melakukan ujian perbaikan nilai untuk peserta. Serta memberi sanksi tambahan yakni para peserta dikarantina untuk pelatihan pendidikan karakter. Pasalnya, Ubaid menilai, kecurangan yang dilakukan siswa pada UNBK menunjukkan kegagalan pendidikan karakter di sekolah. Sebab, pendidikan karakter terintegrasi dengan pembelajaran dan perilaku siswa di sekolah.

Untuk itu, Ubaid juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak praktik pendidikan karakter. Jangan hanya sebatas teori. “Menurut saya pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah selama ini masih sebatas teori di kurikulum, tetapi belum optimal diimplementasikan di sekolah karena masih banyak guru-guru yang masih merasa kebingungan bagaimana mengimplementasi pendidikan karakter,”kata Ubaid.

Sumber: Suara Pembaruan <https://www.beritasatu.com/nasional/553401/126-murid-sma-ketahuan-sebar-bocoran-unbk>

Minat Siswa Jadi Guru Minim, JPPI Khawatirkan Rendahnya Mutu Guru



Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan guru penerima penghargaan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia, di Stadion Pakansari, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 8 Mei 2019

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji memaklumi apabila banyak generasi muda saat ini tidak mau bercita-cita menjadi guru.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji memaklumi apabila banyak generasi muda saat ini tidak mau bercita-cita menjadi guru. Sebab, menurutnya, banyak faktor yang mengkondisikan demikian, tak terkecuali perihal kesejahteraan.

“Pertama, profesi guru di Indonesia tidak menjanjikan secara ekonomi. Kedua, beban akademik yang begitu berat. Ketiga, penghargaan terhadap profesi sangat kurang. Keempat, tidak ada kepastian perlindungan hukum bagi profesi guru,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (8/5/2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru pada tahun 2019, menyertakan tes angket kepada peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA dengan tujuan mengkaji informasi non-kognitif siswa. Terdapat satu angket yang diperuntukkan untuk mengetahui cita-cita peserta didik yang disebar kepada 512.500 siswa di 8.549 SMA/MA. Masing-masing sekolah, menyertakan maksimal 60 siswa untuk menjawab.

Hasilnya mencatat 89 persen siswa bercita-cita sebagai pengusaha segala bidang dan presiden. Sekitar 11 persen yang bercita-cita menjadi guru dengan mayoritas perempuan. Namun, dari data angket tersebut, 11 persen siswa yang bercita-cita menjadi guru adalah mereka yang berada dalam kelompok nilai tidak maksimal.

Berkeenaan hal tersebut, menurut Ubaid, perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Sebab, jika peminat profesi guru masih minim akan memberikan dampak pada ketersediaan guru dan mutu pendidikan di Indonesia.

“Ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu guru di Indonesia, sebab input LPTK adalah calon-calon guru dengan nilai rendah. Selain itu, ini tugas besar yang harus diemban LPTK untuk menggenjot mutu calon-calon guru,” pungkasnya.

“Ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu guru di Indonesia”

Sumber : <https://tirto.id/minat-siswa-jadi-guru-minim-jppi-khawatirkan-rendahnya-mutu-guru-dti5>

UNBK Diwarnai Kecurangan, Apa yang Mesti Dilakukan Kemendikbud?



Pelajar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 di SMA Negeri 16 Banda Aceh, Aceh, Senin (1/4/2019). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj.

Bentuk kecurangan yang paling dominan adalah memotret soal di komputer lalu membagikannya melalui gawai.

tirto.id - Dzurahmansyach, siswa Kelas 12 SMK Bisnis Informatika Kota Bekasi, bisa bernafas lega. Ia bersyukur lantaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK berjalan lancar, kendati sempat kesulitan saat mengerjakan soal matematika. Ijur, sapaan Dzurahmansyach, mengaku bisa mengerjakan UNBK dengan santai lantaran pengawasan UNBK ini tidak terlalu ketat.

“Pengawasnya baik, enggak terlalu sinis. Mereka hanya mengawasi dari tempat duduk,” ujarnya kepada reporter Tirto, Selasa (7/5/2019).

Perasaan santai mengerjakan soal ini juga dialami Riska Febiyati, siswa kelas 12 SMK Citra Negara Depok. Kalau pun ada kendala, Riska mengaku, hanya kesulitan mengerjakan soal matematika. “Seperti enggak ujian,” ujar Riska kepada reporter Tirto.

Bahkan saking santainya, Riska mengatakan peserta ujian dalam satu ruangan sampai bisa menengok ke kiri dan kanan.

“Sikap pengawasnya enggak bikin tegang,” tambahnya.

Namun, pengawasan UNBK yang tak begitu ketat ini ternyata membuka celah peserta untuk curang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat ada 202 aduan kecurangan selama Ujian Nasional 2019 tingkat SMA/SMK/MA berlangsung.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R. Luddin mengatakan jumlah kecurangan tersebut menyusut menjadi 126 kasus setelah diverifikasi. Menurut Muchlis, laporan yang masuk paling banyak melalui WhatsApp dengan jumlah 90 laporan, email sebanyak 5 laporan, Posko Itjen dengan 18 laporan, media sosial dengan 13 laporan, sementara yang datang langsung serta menelepon tidak ada sama sekali.

“Memang ada yang mengaku memotret,” ujar Muchlis di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Tren Kecurangan Meningkat

Muchlis berkata jumlah aduan kecurangan terus meningkat dari tahun ke tahun: 71 peserta mengadu pada 2017, 79 peserta mengadu pada 2018, dan 126 peserta yang mengadu pada 2019. Untuk tahun ini, kecurangan yang terjadi yakni memotret soal dari komputer dengan handphone untuk dibagikan ke siswa lain.

Para peserta yang kedapatan curang ini bakal diberi nilai 0 untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Tak hanya itu, peserta yang curang pun tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan. Mereka hanya boleh ikut ujian perbaikan pada Juni mendatang.

“[Ujian] susulan untuk mereka yang tidak ikut ujian karena sakit, dll,” kata dia.

Meningkatnya tren kecurangan ini, kata Muchlis, memperlihatkan masih ada kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan UNBK. Ia mengakui Kemendikbud kurang jeli melihat perkembangan zaman karena peringatan yang sebelumnya dibuat luput memerhatikan perkembangan gawai.

“Siswa ada yang membawa smartphone [berbentuk jam tangan]. Itu yang tidak pernah kami hitung. Jadi semakin canggih, kami lupa sehingga yang dikumpulkan hanya handphone saja,” dalihnya.

Hal semacam ini bakal dijadikan bahan evaluasi untuk pengawasan UNBK yang lebih baik ke depannya.

“Kami sudah minta ke dinas pendidikan masing-masing wilayah dan kepala sekolah, untuk konsisten dengan SOP [Standar Operasional Prosedur]. Rata-rata yang ada kasus itu, karena SOP-nya tidak dipenuhi dengan baik,” kata dia.

Evaluasi Sistem Pengawasan

Peneliti sekaligus Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Elin Driana menilai indikasi kecurangan pada pelaksanaan UNBK kali ini perlu didalami pemerintah.

Menurutnya, laku curang tersebut bisa saja didorong untuk mendapatkan jawaban dari siswa lain yang berbeda ruangan.

“Tidak mudah juga untuk berbagi jawaban karena soal-soal yang diberikan melalui UNBK berbeda-beda,” ujar Elin kepada reporter Tirto.

Terlepas dari itu, Elin justru skeptis terhadap sistem pengawasan yang berlaku ketika ujian berlangsung. Ia mengatakan perlu ada evaluasi terhadap sistem pengawasan UNBK. Elin pun sepakat siswa yang terbukti curang untuk diberikan sanksi nilai 0 pada mata pelajaran yang ia curangi dan diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan.

“Agar tidak mengulangi hal yang sama,” ujarnya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat kecurangan ini terjadi karena masih lemahnya sistem pengawasan. Celah tersebut dimanfaatkan peserta untuk curang. Ubaid bahkan menilai kecurangan tersebut menjadi bukti penerapan pendidikan karakter terhadap siswa tidak berjalan baiknya. Jika penerapannya sudah optimal, kecil kemungkinan siswa berbuat curang.

“Pendidikan karakter masih menjadi wacana tapi minim implementasi. Bahkan guru-guru yang tidak sepenuhnya paham bagaimana mengintegrasikannya,” ujar Ubaid kepada reporter Tirto.

Namun, Ubaid tidak sependapat apabila siswa yang berlaku curang diberikan nilai 0. Menurutnya, peserta yang curang cukup diberikan ujian perbaikan saja, sehingga nilai yang dipakai sesuai dengan hasil ujian tersebut.

“Penting juga bagi sekolah untuk mendidik kembali anak-anak tersebut menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Untuk menguatkan karakter mereka,” pungkasnya.

Kemendikbud mengklaim tidak ada kebocoran soal pada UNBK tahun ini.

Sumber : <https://tirto.id/unbk-diwarnai-kecurangan-apa-yang-mesti-dilakukan-kemendikbud-ds9Y>

Pelatihan Basis Zonasi Jadi Cara Kemendikbud Kembangkan Guru



Ilustrasi guru. Kemendikbud berencana fokus pada pengembangan tenaga pendidik pada tahun ini, caranya dengan mengadakan berbagai pelatihan berbasis zonasi yang dinilai efisien. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan memprioritaskan program pengembangan sumber daya pendidik pada tahun ini. Hal ini disebut menyesuaikan dengan fokus pembangunan dari pemerintah pusat.

“Secara bertahap, fokus pemerintah akan beralih dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia,” ujar Mendikbud Mudjahir Effendy di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (5/2).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan implementasi dari arah kebijakan tersebut adalah dengan penyelenggaraan berbagai pelatihan untuk para tenaga pengajar.

“Yang kami siapkan adalah gurunya. Makanya kemarin kami kirim guru 1.200 [orang] ke luar negeri. Dengan adanya pelatihan seperti ini, berbasis zonasi, high order thinking skill, dan lain-lain” ucap Supriano.

Supriano menyebut pelatihan tersebut akan berbasis wilayah atau zonasi dan bakal dimulai pada tahun ajaran baru nanti.

Keputusan untuk membuat pelatihan itu berbasis zonasi diklaim Kemendikbud menjadi cara pembangunan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidikan, yang lebih efektif.

Kemendikbud menyebut, dengan pelatihan berbasis wilayah, tenaga pendidik tak perlu datang ke

pusat pelatihan. Dan melalui berbagai pelatihan yang diberikan, kompetensi guru bisa dibagikan lagi oleh sesama pengajar ke wilayah yang lebih kecil lainnya.

“Sistem pelatihan saat ini kita berbasis zona melalui MGMP [Musyawarah Guru Mata Pelajaran] dan nanti fokusnya kita penekanan kepada analisis, sintesis dan menciptakan,” kata Supriano.

Masih Ada ‘PR’

Sementara itu secara terpisah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan pada perayaan Hardiknas 2019, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan.

Salah satunya sikap intoleransi dan paham radikalisme di lingkungan sekolah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menerangkan berdasarkan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) pada 2018 terhadap 2.237 guru Muslim di 34 provinsi menunjukkan 6 dari 10 guru memiliki opini intoleransi terhadap pemeluk agama lain.

“Survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru Muslim memiliki opini radikal,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis, Kamis (2/5).

Ia juga menyayangkan langkah pemerintah yang tidak segera menindak salah satu penyebaran sikap intoleran yang salah satunya terjadi dalam konten UASBN.

“Sayangnya, pihak pemerintah tidak menelusuri kasus ini dan menguak jaringan yang melingkupinya. Lagi-lagi, pemerintah cenderung membiarkan kasus-kasus intoleransi semacam ini, seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. (ani/end)

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503002959-20-391531/pelatihan-basis-zonasi-jadi-cara-kemendikbud-kembangkan-guru>

Mendikbud Sebut Intoleransi dan Radikalisme Tidak Sistemik



Mendikbud Muhadjir Effendy menilai intoleransi dan radikalisme bukan persoalan sistemik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai masalah intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan di Indonesia bukan disebabkan oleh sistem pendidikan.

Belakangan ini sejumlah konten sarat intoleransi dan radikalisme ditemukan di lingkungan sekolah. Terbaru, terdapat dalam konten Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy menilai jumlah temuan peristiwa yang terkait radikalisme dan intoleransi itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan total 53 juta siswa yang ada di Indonesia.

“Satuan pendidikannya ada di atas 200 ribu, memang ini urusan besar, bukan kecil. Sehingga kalau ada kasus, satu, dua, mohon dipahami itu suatu hal yang kasuistis dan penyelesaiannya harus per kasus. Bukan karena satu persoalan sistemik,” ujar Muhadjir setelah menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (2/5).

Meski begitu, ia tetap mengakui persoalan tersebut masih ada dan belum selesai di sejumlah satuan pendidikan. Ia menambahkan Kemendikbud bersama Kementerian Agama berusaha mengurangi persoalan tersebut di sekolah-sekolah dan madrasah.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan langkah pencegahan. Namun, kata dia, upaya tersebut tidak bisa terlaksana jika hanya bergantung pada Kemendikbud.

“Tapi juga peran masyarakat keseluruhan dan selalu saling memantau, memberi informasi

sehingga ketika ada gejala langsung bisa diatasi,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan pada perayaan Hardiknas kali ini, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Salah satunya sikap intoleransi dan paham radikalisme di lingkungan sekolah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menerangkan berdasarkan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) pada 2018 terhadap 2.237 guru Muslim di 34 provinsi menunjukkan 6 dari 10 guru memiliki opini intoleransi terhadap pemeluk agama lain.

“Survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru Muslim memiliki opini radikal,” kata Ubaid melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/5).

Ia juga menyayangkan langkah pemerintah yang tidak segera menindak salah satu penyebaran sikap intoleran yang salah satunya terjadi dalam konten UASBN.

“Sayangnya, pihak pemerintah tidak menelusuri kasus ini dan menguak jaringan yang melingkupinya. Lagi-lagi, pemerintah cenderung membiarkan kasus-kasus intoleransi semacam ini, seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502174012-20-391466/mendikbud-sebut-intoleransi-dan-radikalisme-tidak-sistemik>

Kemendikbud Akui Intoleransi dan Radikalisme Masih Ada di Sekolah



Mendikbud Muhadjir Effendy. FOTO/antaranews

Oleh: Alfian Putra Abdi - 2 Mei 2019

Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui, sikap atau pola pikir intoleransi serta radikalisme masih terjadi di lingkungan sekolah, baik tingkat bawah hingga tingkat atas.

tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengakui, sikap atau pola pikir intoleransi serta radikalisme di satuan pendidikan masih ada di tingkat dasar hingga atas dan saat ini sedang dalam proses penanganan.

“Saya tidak mengatakan bahwa [intoleransi dan radikalisme] itu telah selesai. Tapi pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenag yang memiliki domain di sekolah dan madrasah, terus meningkatkan cara-cara untuk mengatasi agar jangan sampai praktik yang tidak baik terutama pemikiran dan paham berbahaya mengancam ideologi nasional, bisa diatasi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai Upacara Hari Pendidikan Nasional di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Meski demikian, Muhadjir mengatakan hal-hal tersebut tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang ada di Indonesia saat ini.

“Kita punya 46 juta siswa, kalau ditambah PAUD bisa 53 juta dan jumlah satuan pendidikannya ada di atas 200 ribu. Memang ini urusan besar, bukan kecil. Sehingga kalau ada kasus satu-dua, mohon dipahami itu suatu hal yang kasuistis,” ujarnya.

Sehingga menurutnya, upaya penanganannya pun harus tetap per kasus dan bukan karena suatu perkara yang sistematis. Meski demikian, ia mengaku hal ini bukanlah persoalan yang mudah diatasi, perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta peran aktif masyarakat untuk selalu memantau atau memberi informasi, sehingga jika timbul gejala bisa langsung diatasi.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud masih belum optimal mengurus persoalan intoleransi dan radikalisme di sekolah.

Pemerintah tidak memiliki langkah konkrit terhadap penanganan enam dari sepuluh guru muslim yang memiliki perspektif intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Sehingga menurutnya, perlu pemerintah untuk mengutamakan moderatisme beragama dan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pembelajaran di sekolah.

Hal tersebut sebagai upaya penangkal sikap dan pola pikir intoleran dan radikalisme dalam satuan pendidikan.

“Harus ada evaluasi dan langkah intervensi yang sistematis terhadap guru-guru yang terpapar pemikiran dan sikap intoleran dan radikal,” pungkasnya.

“Sehingga kalau ada kasus satu-dua, mohon dipahami itu suatu hal yang kasuistis.”

Sumber : <https://tirto.id/kemendikbud-akui-intoleransi-dan-radikalisme-masih-ada-di-sekolah-dnu3>

Peringatan Hardiknas 2019

JPPI Usul Kemendikbud Utamakan Tangkal Intoleransi & Radikalisme



Sejumlah pelajar SMA Negeri 2 Kudus mengikuti simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT) di Kudus pada tanggal Rabu (12/5/2018). AN-News - OTOMUS.com/Agroho.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 2 Mei 2019

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2019, JPPI menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan.

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merayakan Hari Pendidikan Nasional 2019 dengan menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun tingkat atas.

Menurut JPPI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih belum optimal mengurus persoalan tersebut.

“Di tahun ini, konten intoleransi ini juga masuk dalam soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolah. Mengerikan sekali, nama ujiannya saja berstandar nasional, tapi soalnya tidak mendidik dan sungguh tidak sesuai standar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui pesan singkat, Kamis (2/5/2019).

Berkenaan dengan kasus tersebut, ia menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak mendalami temuan-temuan semacam itu. Ia juga menjabarkan, pemerintah tidak memiliki langkah konkret terhadap penanganan enam dari sepuluh guru muslim yang memiliki perspektif intoleran terhadap pemeluk agama lain.

“Begitu hasil survei PPIM tahun 2018 terhadap 2.237 guru Muslim di 34 provinsi. Selain intoleransi, survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru Muslim memiliki opini radikal,” ujarnya.

Sebab itu, ia tekankan perlunya pemerintah untuk mengutamakan moderatisme beragama dan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pembelajaran di sekolah. Hal tersebut sebagai upaya penangkal sikap dan pola pikir intoleran dan radikalisme dalam satuan pendidikan.

“Harus ada evaluasi dan langkah intervensi yang sistematis terhadap guru-guru yang terpapar pemikiran dan sikap intoleran dan radikal,” pungkasnya.

“Di tahun ini, konten intoleransi ini juga masuk dalam soal USBN di sekolah.”

Sumber: <https://tirto.id/jppi-usul-kemendikbud-utamakan-tangkal-intoleransi-radikalisme-dnuY>

Keamanan Siswa di Sekolah Masih Jadi Masalah

Kamis 02 May 2019 13:22 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Esthi Maharani



Ilustrasi Sekolah

Kualitas pendidikan Indonesia yang paling rendah soal safety learning environment

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai keamanan siswa di sekolah masih menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia. Berdasarkan penelitian Right to Education Index (RTEI) pada Desember 2018, indikator kualitas pendidikan Indonesia yang paling rendah adalah soal *safety learning environment*, artinya sekolah masih menjadi tempat yang tidak aman bagi anak.

Masalah pertama adalah sekolah rawan dengan sikap intoleransi dan radikalisme. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kasus beredarnya buku ajar di sekolah yang bermuatan konten intoleransi beberapa kali terjadi dan terus terulang.

“Di tahun ini konten intoleransi ini juga masuk dalam soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolah. Mengerikan sekali, nama ujiannya saja berstandar nasional, tapi soalnya tidak mendidik dan sungguh tidak sesuai standar,” kata Ubaid, Rabu (2/5).

Ubaid menyayangkan pemerintah tidak menelusuri hal ini dan terkesan membiarkannya. Ubaid juga menilai pemerintah tidak memiliki langkah konkret terkait penelitian PPIM tahun 2018 terhadap 2.237 guru muslim di 34 provinsi yang hasilnya hampir setengah dari mereka memiliki opini radikal.

Ia melanjutkan, masalah lainnya adalah kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Ubaid mencontohkan kasus Baiq Nuril yang menurutnya sangat mencoreng muka pendidikan Indonesia. “Korban pelecehan seksual di sekolah ternyata tidak hanya anak, tapi juga guru. Kalau guru saja tidak berdaya di sekolah, apalagi anak-anak peserta didik,” kata dia.

Hingga kini, kasus kekerasan di sekolah masih terus bermunculan dan merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kasus terakhir yang diributkan publik adalah penganiayaan Audrey. Bahkan hingga hari ini, kekerasan di sekolah masih menghiasi berita-berita di media massa.

Ubaid juga menyinggung soal politisasi sekolah dan penyebaran hoaks khususnya pada saat menjelang Pemilu 2019 lalu. Selain itu, masalah narkoba juga perlu mendapatkan perhatian agar dapat diselesaikan. Menurut Ubaid, peredaran narkoba ini sangat mengancam anak-anak di sekolah.

“Bahkan, di awal 2019, kita dikejutkan dengan salah satu sekolah di Jakarta Barat yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba,” kata Ubaid.

Terkait hal ini, JPPI merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya membuat peraturan soal sekolah ramah anak tapi menekankan tentang bagaimana sekolah ramah anak bisa diwujudkan. Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/05/02/pqv5qa335-keamanan-siswa-di-sekolah-masih-jadi-masalah>

Mendikbud: Pemda Diharap Terapkan PPDB 90% Berbasis Zonasi

Dhita Seftiawan Selasa, 23 Apr 2019, 16:50



PPDB/ DOK PR

proses PPDB berbasis zonasi. Menurut dia, Kemendagri siap mendukung dengan menerapkan sistem identitas tunggal yang menjadi acuan utama dalam PPDB. Kemendikbud dan Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran bersama untuk memastikan semua pemerintah daerah menjalankan Permendikbud.

“Yang penting konsistensi, saya minta provinsi kab/kota untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati. Jangan lagi ada diskresi atas nama apapun, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa. Karena jika ada perlakuan istimewa, ada yang terdiskriminasi dan itu tidak sesuai prinsip pelayanan publik,” ujar Muhadjir.

Penggiat Pendidikan Eka Simanjuntak menilai positif kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Mendikbud dan Mendagri tentang PPDB 2019. Menurut dia, SEB ini juga memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD.

Berpotensi timbulkan masalah

Pendapat berbeda disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Ia menilai, PPDB berbasis zonasi akan tetap berpotensi menimbulkan masalah

karena tidak ada perubahan signifikan secara aturan. Tiga jalur yang ditetapkan Kemendikbud, yakni zonasi, prestasi, dan domisili orang tua murid sudah diterapkan pada PPDB tahun lalu.

“Dugaan saya masih tetap ada pelanggaran karena *online system* yang digunakan masih sebatas *registration tool*, belum menjadi mekanisme yang transparan dan akuntabel,” kata Ubaid***

Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/04/23/mendikbud-pemda-diharapkan-ppdb-90-berbasis-zonasi>

Penerimaan Siswa Baru Kini Libatkan Dinas Dukcapil



Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 23 April 2019 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran baru 2020/2019 akan segera dilakukan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, PPDB 2019 ini secara keseluruhan akan menggunakan skema zonasi. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), untuk memetakan populasi siswa.

Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan agar siswa memiliki *single identity* (data tunggal) sehingga ada kesatuan data untuk mengintegrasikan data pokok pendidikan (Dapodik) dengan data Dukcapil.

Penggiat pendidikan, Eka Simanjuntak menilai positif kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri tentang PPDB 2019.

“Ini bagus sekali karena yang mengelola data penduduk adalah Dinas Dukcapil. Dengan demikian SEB ini mendukung penggunaan satu sumber data,” ujar Direktur PT Wacana Tata Akademika ini kepada *SP*, Selasa (23/4/2019).

Lanjut dia, SEB ini juga memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 Sekolah Dasar.

“Ini akan memastikan bahwa di PAUD tidak ada lagi pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Selama ini agak susah meyakinkan pengelola PAUD untuk tidak memaksa siswanya agar mampu membaca, menulis dan berhitung karena kemampuan ini menjadi salah satu syarat untuk masuk SD,” ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut menekan maraknya keberadaan bimbel bagi anak Taman Kanak-Kanak (TKK). Meski begitu, Eka juga mendorong pemerintah untuk tetap bekerja keras memastikan kesenjangan kualitas di antara sekolah-sekolah pemerintah semakin kecil. “Walau sekarang tidak ada lagi sekolah favorit, tapi tetap saja banyak orangtua yang tidak rela kalau anaknya harus masuk sekolah yang kualitasnya tidak baik,” ujarnya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menyebutkan, tidak ada perubahan dalam mekanisme zonasi ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kemungkinan besar masalah tahun lalu akan terulang kembali.

“Dugaan saya masih tetap ada pelanggaran karena *online system* yang digunakan masih sebatas registration tool, belum menjadi mekanisme yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ubaid kepada SP.

Oleh karena itu, Ubaid meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan harus diberi sanksi tegas sesuai dengan peraturan. “Kalau hanya sanksi administratif bisa diperingatkan sampai jabatan dicopot. Atau jika ada unsur pidana, ya harus bisa ditahan,” ujarnya.

Sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/550272/penerimaan-siswa-baru-kini-libatkan-dinas-dukcapil>

Kontroversi Isu Pembakaran Bendera HTI dalam Soal UASBN di Garut



Beredar Naskah Soal ujian USBN SMP Bubarkan Banser di Garut. FOTO/SEGI Garut

Oleh: Haris Prabowo - 11 April 2019

Pembuat soal kontroversial di UASBN Garut memang salah. Tapi pemerintah pusat juga tak bisa lepas tangan. Kasus ini bukti kalau pengawasan tak maksimal.

tirto.id - Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama alias Banser NU geram atas munculnya pertanyaan provokatif dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Bahasa Indonesia tingkat SMP di Garut, Jawa Barat. Mereka pun langsung meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan setempat.

“Apa maksudnya soal itu? Mengapa bisa ada?” kata Komandan Satuan Koordinator Nasional Banser Nurruzaman kepada reporter Tirto, Kamis (11/4/2019).

Pada soal nomor 9, peserta ujian diminta menyimpulkan masalah utama dari dua potong teks berita dari CNN Indonesia dan JawaPos yang memberitakan soal pembakaran bendera HTI pada Oktober 2018.

Dari empat pilihan jawaban, menurut kunci jawaban yang didapat Pengurus Cabang NU Garut, yang benar adalah opsi A yang tertulis: “Teks 1: kecaman dan desakan agar anggota Banser NU pembakar bendera meminta maaf. Teks 2: permintaan agar Banser NU dibubarkan karena tidak berguna dan cenderung arogan.”

Iniilah yang membuat Nurruzaman dan Banser lain kesal. “Kenapa soalnya mem-framing seakan-

akan Banser melakukan kesalahan?” tanyanya.

Dugaan-dugaan

Nurruzaman lantas menduga soal tersebut bisa muncul karena tim yang menyusun soal sudah “tersusup kelompok-kelompok HTI.” Ia bilang akan membawa masalah ini ke ranah hukum, jika memungkinkan, tapi mungkin juga hanya meminta pihak yang membuat soal ujian untuk memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong, soal tersebut diduga dibuat oleh tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Garut.

Dalam konteks UASBN, MGMP memang punya wewenang yang luas untuk menentukan soal seperti apa yang akan disajikan untuk siswa. Angkanya mencapai 80 persen dari total soal. Sementara sisanya, 20 persen, dibuat pemerintah pusat. Baca juga: Apa sih yang Susah dari Soal UN Matematika?

Pemerintah daerah sebetulnya telah meminta MGMP tak menyinggung hal-hal sensitif ketika membikin soal, termasuk isu SARA. Dengan demikian, apa yang dilakukan MGMP ini sebetulnya memang menyalahi aturan.

Karena itu pula Totong meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung.

“Kami selaku pimpinan Dinas Pendidikan memohon maaf atas kejadian yang terjadi kali ini,” katanya seperti diwartakan Antara.

Totong pun mengatakan mereka bakal mengulang UASBN khusus Bahasa Indonesia di kemudian hari. Mengenai motivasi pembuat soal, Totong mengaku belum bisa menjawab. “Kami akan menanyakan kepada MGMP apa motivasi dalam membuat soal itu,” katanya.

Dalam Surat Kepala Dinas Kabupaten Garut No. 420/597-Disdik tertanggal 10 April 2019 yang diterima reporter Tirto, disebutkan kalau Totong mengusulkan Kabid SMP, Kasi Kurikulum SMP, dan Tim Penyusun Soal US SMP diberhentikan. Tiga pihak inilah yang dianggap paling bertanggung jawab atas soal kontroversial tersebut.

Tidak Murni Salah Pembuat Soal

Menurut Satriwan Salim, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), benar bahwa si pembuat soal (tim/individu) salah. Namun menyalahkan mereka sepenuhnya juga tak tepat. Sebab, masalahnya lebih sistematis dari itu.

Kasus ini menunjukkan pula pengawasan yang dilakukan dinas pendidikan di daerah tersebut masih lemah. Ini juga menunjukkan bahwa guru masih belum mendapat pelatihan yang optimal agar kompetensinya meningkat.

“Alih-alih guru diminta membuat soal ujian yang bermuatan HOTS (High Order Thinking Skills) yang terjadi justru soalnya malah aneh, nyeleneh, dan tidak berbobot.

Kami tak henti-hentinya meminta Kemdikbud dan jajarannya sampai di daerah melatih guru-guru untuk peningkatan kompetensi,” kata Satriwan dalam rilis resmi yang diterima reporter Tirto.

Hal serupa dikatakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

“Kejadian ini sudah sering terjadi, waktu itu pernah ISIS, juga pernah membahas jihad. Ini padahal soal ujian dalam tataran remeh-temeh. Tak usah yang level terlalu tinggi. Ini soal-soal standar saja bisa kecolongan,” katanya.

Sementara pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Nisa Felicia Faridz, mengatakan soal-soal seperti ini tak mesti selalu buruk.

Ia bisa saja melatih siswa kritis, jika itu dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka. Masalahnya dalam kasus ini itu adalah soal pilihan ganda yang jawaban pastinya sudah ditentukan.

“Harusnya isu bendera HTI itu bisa diperdebatkan. Soalnya bisa diubah menjadi esai. Siswa diminta menulis pandangannya. Jangan pilihan ganda yang malah mengarah ke jawaban dan doktrin tertentu. Itu politis sekali,” katanya.

“Ini soal-soal standar saja bisa kecolongan.”

Sumber : <https://tirto.id/kontroversi-isu-pembakaran-bendera-hti-dalam-soal-uasbn-di-garut-dlTf>

Banyak Kecurangan, JPPI Minta UN Dihapus



Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti siswa SMA. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 9 April 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk jenjang SMA dan Madrasah Aliyah (MA) telah selesai dilakukan. Namun, pelaksanaan UN khususnya yang berbasis komputer (UNBK) sejak hari pertama diwarnai aksi kecurangan yang dilakukan oleh sebagian peserta. Mereka memotret soal UN, kemudian dibagikan di grup media sosial seperti *Line* ataupun *WhatsApp* untuk meminta bantuan peserta lain mengerjakannya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, banyaknya pelanggaran yang dilakukan peserta menandakan UN sebagai bentuk pemetaan sekolah tidak dapat berjalan. Pasalnya, pandangan tentang UN masih seputar nilai sehingga segala upaya dikerahkan agar peserta dapat memperoleh nilai tinggi dan melupakan integritas.

Untuk itu, Ubaid menyarankan sebaiknya fungsi UN sebagai pemetaan dihapuskan. Pemetaan sekolah lebih baik menggunakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) saja yang telah dijalankan beberapa tahun terakhir ini.

“Kecurangan selalu terjadi di UN, selalu ada celah dan sangat tidak mendidik. Harusnya memang UN ini sudah ketinggalan zaman, enggak perlu lagi diadakan. Relevansinya tidak ada,” kata Ubaid kepada Beritasatu, Selasa (9/4).

Menurut dia, pemetaan menggunakan USBN lebih masuk akal karena saat ini kebutuhan mendesak pendidikan adalah pemetaan guru yang tidak pernah dilakukan. Padahal, hal itu

berdampak sangat besar pada standar pendidikan nasional.

“Harusnya ada uji kompetensi, atau apalah namanya, untuk guru sebagai bahan pemetaan kualitas guru. Berdasarkan data tersebut, pemerintah lalu melakukan intervensi peningkatan mutu guru. Dengan begitu, strategi peningkatan mutu guru dan pemerataan kualitas guru bisa terpenuhi,” ujarnya.

Sanksi

Sementara itu, kepada peserta yang melanggar prosedur operasional standar (POS) UN, ia meminta mereka harus diberi sanksi. Namun, sanksi itu jangan sampai merugikan peserta. Mereka harus tetap diberikan kesempatan untuk mendapat nilai UN.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Moch Abduh mengatakan, peserta yang melakukan kecurangan akan diberi nilai nol untuk mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, ia harus mengikuti UN susulan.

Sedangkan untuk pengawas yang lalai menjalankan tugas, Abduh menuturkan, selama proses pemeriksaan, panitia UN provinsi melarang yang bersangkutan untuk menjadi pengawas ujian.

Selanjutnya, terkait dengan sanksi, Abduh menyebutkan, sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan tersebut akan diterapkan sesuai POS UN yang telah diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

“Prinsipnya jika terjadi hal yang sama seperti kecurangan sebelumnya, kami akan melakukan penelusuran berdasarkan jejak digital yang dilaporkan. Selanjutnya akan kami teruskan ke Itjen untuk investigasi lebih lanjut,” ujarnya.

Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/547663/banyak-kecurangan-jppi-minta-un-dihapus>

Penempatan Pengawas dan Kepsek Sering Disebabkan Alasan Politis



Sejumlah siswa-siswi SMP Negeri Ciomas, Kabupaten Bogor, melakukan pengenalan lingkungan bersama guru dan kepala sekolah, 17 Juli 2017. (Foto: BeritaSatu Photo/Vento Saudale)

Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 29 Maret 2019 | 13:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penempatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terjadi selama ini sangat berbau politis. Pasalnya, banyak kepala sekolah dan pengawas sekolah tiba-tiba dipindahtugaskan atau diturunkan dari jabatannya karena berbeda pandangan dengan kepala daerah (pemda).

“Politik di lingkungan pendidikan korbannya banyak sekali dan ini merata di semua daerah. Tetapi soal ini terkesan biasa saja,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu, Jumat (29/3).

Untuk itu, ia berharap agar jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan secara terbuka dengan adanya uji publik. Masyarakat akan bisa terlibat untuk menilai calon kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam proses seleksi.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini Kemdikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan, jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan pola karier.

“Bila bagus, guru bisa jadi kepala sekolah, dan kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas,” ujar Muhadjir saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta baru-baru ini.

Apabila bagus kinerjanya, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa menjabat lebih dari dua periode, dengan catatan mereka harus pindah ke sekolah lainnya. Selain itu, apabila ada kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik, Muhadjir meminta agar ia jangan dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sebab, hal ini malah akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Untuk itulah, pemda dituntut agar berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berdasarkan kompetensi, bukan karena dipengaruhi kepentingan politik. “Asumsi saya, sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk sekolah yang dia pimpin, Insya Allah sekolah itu akan maju,” ujarnya.

Selanjutnya, Muhadjir juga berharap, apabila ada daerah yang memiliki anggaran berlebih, tidak perlu lagi meminta bantuan dari pusat, tetapi sebaiknya membantu daerah di sekitarnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/545728/penempatan-pengawas-dan-kepsek-sering-disebabkan-alasan-politis>

Capres-Cawapres Disebut Jarang Sentuh Isu Pendidikan Saat Kampanye



Banner Debat Capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta Kamis 17 Januari 2019. ANTARA FOTO/Rangga Jingga

Oleh: Alfian Putra Abdi - 11 Maret 2019

Isu pendidikan dinilai oleh JPPI kurang disentuh oleh paslon capres-cawapres selama kontestasi Pilpres 2019 ini berlangsung.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, isu pendidikan kurang banyak disentuh selama kontestasi politik 2019 ini berlangsung.

Padahal, kata dia, isu pendidikan termasuk hal penting untuk disoroti kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

“Tampaknya isu pendidikan tidak dianggap isu penting, karena kurang banyak disinggung dan dibicarakan oleh kedua paslon. Padahal Human Development Index [HDI] kita masih rendah,” ujarnya kepada Tirto, Senin (11/3/2019).

Padahal, menurut Ubaid, ada beberapa hal terkait pendidikan yang setidaknya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut oleh kedua paslon tersebut. Antara lain terkait akses, kualitas, dan anggaran pendidikan.

“Soal akses kita masih punya kendala di level SMA, SMK, dan MA, aksesnya masih sangat rendah. Program wajar [wajib belajar] 12 tahun tidak banyak berjalan di level provinsi,” tuturnya.

Ubaid mengatakan, kelompok-kelompok marjinal seperti anak difabel, anak perempuan, anak dari keluarga miskin, korban bencana dan korban konflik, belum mendapatkan akses pendidikan yang merata. Begitu juga dengan persoalan kualitas.

Menurutnya, kualitas tenaga ajar dan kurikulum pendidikan di Indonesia masih tidak sebanding dengan negara-negara lain.

“Belum banyak berkontribusi pada peningkatan kualitas peserta didik,” ujarnya.

Yang tak kalah pentingnya, tambah dia, yakni persoalan anggaran dan kesejahteraan.

Ubaid menilai, gaji tenaga ajar baik di pusat maupun daerah belum mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan.

Sehingga perlu ada terobosan baru untuk menyelesaikan persoalan macam ini. “Harus ada terobosan bahwa anggaran 20 persen untuk pendidikan itu harus di luar gaji,” pungkasnya.

Pada 17 Maret 2019 nanti akan diselenggarakan debat ketiga antara para calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat. Debat tersebut bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Debat ini akan disiarkan secara langsung di Trans TV, Trans7, dan CNN TV Indonesia.

“Tampaknya isu pendidikan tidak dianggap isu penting.”

Sumber : <https://tirto.id/capres-cawapres-disebut-jarang-sentuh-isu-pendidikan-saat-kampanye-de3l>

Sektor Pendidikan Zaman Jokowi Masih Jauh Dari Kata Berhasil

6 March 2019 | 16:25



Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Foto : Istimewa

Oleh : Zahirudin |

Program Indonesia Pintar yang selama ini digadang-gadang sebagai buah keberhasilan pun masih menyisakan sekelumit masalah.

jogjainside.com, Jakarta – Sektor pendidikan selama kurang lebih lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih jauh dari kata berhasil. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kerap menjadikan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan mereka dengan masifnya distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun hal tersebut ternyata masih menyimpan segudang persoalan.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, banyak ditemukan di banyak tempat ternyata distribusi KIP tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan karena rumitnya sistem pendataan dan juga kurangnya transparansi dalam prosesnya baik dari hulu sampai hilir.

“Iya KIP itu sebagai awal yang baik boleh aja. Tapi kan di lapangan masih tersisa banyak masalah. Misalnya KIP sebagai program afirmasi bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu itu bagus. Tapi apakah sudah mencakup 100 persen, itu kan belum,” terangnya kepada Indonesiainside.id, Rabu (6/3).

Menurutnya berdasarkan fakta di lapangan seharusnya banyak peserta didik yang tidak mendapatkan KIP. Sebabnya bisa berupa-rupa seperti sekolah yang memberikan agar KIP

diberikan kepada 100 orang ternyata yang baru bisa ditangani baru 10 orang saja.

Makanya dia meminta agar sistem pendataan tidak rumit dan harus menjunjung transparansi serta dapat diakses oleh semua pihak. Sedangkan selama ini sistem yang dipakai adalah birokrasi yang tertutup dan ternyata hanya membuat urusannya menjadi ribet.

Selain itu, persoalan yang tidak kalah rumitnya adalah terkait tenaga pengajar, baik yang berstatus PNS maupun honorer. Menurut Ubaid kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di Indonesia sangat memprihatinkan.

“Kita dapat lihat di data Uji Kompetensi Guru (UKG). Dari skala 0-10, rata-rata kualitas tenaga pengajar masih di antara 5-6. Artinya mencerminkan hal yang tidak baik. Dan yang menjadi catatan penting bahwa guru yang kesejahterannya baik pun tidak jadi jaminan kualitasnya mumpuni. Termasuk juga mereka yang sudah bersertifikat masih jauh dari kualitas yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya menjelang debat calon presiden ketiga yang akan dilakukan pada 17 Maret 2019 mendatang Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan akan mengangkat tema perbaikan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan kompetensi guru termasuk menaikkan taraf kesejahteraan guru mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini serta rencana memberikan kartu mahasiswa unggul.

Menurut Sandiaga, pendidikan Indonesia akan mengalami kemajuan jika sistemnya menitikberatkan kepada kompetensi dan kualitas guru yang mumpuni. Hal ini bisa terjadi jika mereka memiliki kesejahteraan yang sepadan.

“(Sebab selama ini) masih banyak sekali guru honorer yang mengeluh karena merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang adil,” kata Sandiaga. **(EPJ)**

Sumber: <https://jogjainside.com/sektor-pendidikan-zaman-jokowi-masih-jauh-dari-kata-berhasil/>

Situs UTBK Bermasalah, Pemerintah Tak Siap Kelola Kebijakannya



Peserta mengikuti SBMPTN. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/

Oleh: Alfian Putra Abdi - 4 Maret 2019

Situsweb pendaftaran UTBK bermasalah sejak hari pertama pendaftaran dan ditutup sementara pada hari kedua.

tirto.id - “Saya belum bisa daftar [UTBK] dikarenakan saat pendaftaran itu servernya selalu penuh, saat sudah masuk webnya pun kadang suka keluar sendiri.” Begitu keluh Sedy Terra, pelajar salah satu SMA di Jakarta kepada reporter Tirto, Minggu (3/3/2019).

Remaja 18 tahun ini berkali-kali gagal mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menjadi syarat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019. Sedy pertama kali mengakses situs pendaftaran UTBK pada Jumat (1/3/2019) pukul 11.00 WIB.

Setelah berkali-kali gagal, ia mencoba kembali daftar UTBK pukul 15.00 WIB namun tetap tak berhasil.

“Saya takut enggak kebagian tempat yang saya inginkan untuk tesnya saja gitu. Sama takut nggak dapat waktu ujian yang saya inginkan juga,” ujar remaja yang ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia ini.

Meski gagal pada hari pertama, Sedy menyatakan bakal kembali mencoba daftar UTBK hari ini, Senin (4/3/2019). Situs pendaftaran UTBK yang mengalami masalah pada Jumat (1/3/2019) diakui Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Namun, hal itu lekas direspons Ketua LTMPT Ravik Karsidi dengan menyatakan situsweb

pendaftaran UTBK sudah pulih dan bisa diakses.

“Di awal memang seperti kaget, karena seperti diserbu bareng. Tapi sekarang sudah lancar. Silahkan masuk,” ujar Ravik Karsidi kepada reporter Tirto, Jumat (1/3/2019).

Ravik mengatakan saat itu ada sekitar 96 ribu pendaftar UTBK. Baca juga: Pendaftaran UTBK Ditutup Sementara, Buka Lagi Senin Pukul 08.00 WIB Namun, esok harinya, Sabtu (2/3/2019),

LTMPT mengabarkan bahwa situs pendaftaran UTBK ditutup sementara. Pendaftaran UTBK akan kembali dibuka hari ini pukul 08.00 WIB. “Berdasarkan evaluasi pendaftaran UTBK sejak dibuka dari 01 Maret 2019 sampai dengan 02 Maret 2019 pukul 12.00 WIB ternyata masih ditemui beberapa kendala,” kata Ravik melalui surat edaran resmi yang diterima Tirto.

Terkait tidak optimalnya situs pendaftaran UTBK, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prastyo enggan menjelaskan lebih detail penyebabnya. Ia hanya mengatakan ada hal yang tidak terprediksi sebelumnya oleh tim LTMPT.

“Kami sedang melakukan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya tidak kami prediksi. Besok saja setelah dibuka kembali, kami lakukan evaluasi,” ujar Budi kepada Reporter Tirto, Minggu (4/3/2019).

Sistem yang Dipaksakan

Ketidaksiapan situs pendaftaran UTBK menerima ribuan pengunjung secara bersamaan dinilai sebagai kecerobohan pemerintah. Hal itu disampaikan pakar keamanan siber, Pratama Persadha. Menurut Pratama, seharusnya pemerintah melakukan serangkaian uji coba dulu sebelum situs UTBK diluncurkan. Apalagi, kata dia, jumlah pendaftar UTBK bisa diperkirakan.

“Diuji berkali-kali dulu dengan stress test yang banyak,” kata Pratama kepada reporter Tirto, Minggu (2/3/2019). Menurut Pratama, LTMPT tinggal memperbesar bandwidth dan membuat unlimited traffic meter jika masalahnya adalah server down akibat tak bisa menampung banyaknya pengunjung.

Namun, untuk memastikan penyebab utamanya perlu dilakukan audit digital forensik. Ia memperkirakan jika ada 96 ribu pendaftar mengakses situs secara bersamaan, setidaknya dibutuhkan bandwidth dengan kapasitas minimal 1000 Mbps. “Kalau bisa dedicated connection. Bukan sharing.”

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji juga menyesalkan ketidaksiapan situs pendaftaran UTBK. Ia menyarankan LTMPT selaku penyelenggara mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan ujian berbasis offline.

Ubaid menambahkan soal akses internet yang belum merata, yang juga menjadi persoalan tersendiri yang harus diantisipasi pemerintah.

“Bilang soal calon mahasiswa yang tinggalnya jauh dari jangkauan internet. Jaringan dalam kondisi normal saja mereka susah akses internet, apalagi server yang suka down. Ini dikhawatirkan mempersulit akses,” ujar Ubaid kepada reporter Tirto, Minggu (3/3/2019).

LTMPT enggan menjelaskan detail masalah yang terjadi pada situs UTBK.

Sumber: <https://tirto.id/situs-utbk-bermasalah-pemerintah-tak-siap-kelola-kebijakannya-dihn>

Kontroversi TNI Mengajar: Guru Saja Masih Banyak Bermasalah



Prajurit TNI mengajar mengaji anak-anak di masjid Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (23/7/2018). ANTARA FOTO/Siswowododo

Oleh: Gilang Ramadhan - 1 Maret 2019

“Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang.”

tirto.id - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggaet TNI Angkatan Darat sebagai guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) dipertanyakan banyak kalangan. Ragam tanggapan ini muncul terutama menyangkut kapasitas tentara untuk mengajar di sekolah.

Aktivis HakAsasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai keputusan tersebut tidak tepat. Ia mengatakan sebaiknya tentara fokus latihan perang ketimbang mengajar di sekolah. “Dia tugasnya latihan buat perang. Buat apa ada pendidikan guru, kenapa mesti tentara yang diangkat, ya, kan?” ujar Haris kepada reporter Tirto, Jumat (1/3/2019).

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation itu menyarankan Kemendikbud untuk lebih memberdayakan guru honorer daripada menggaet tentara. Menurutnya, tentara hanya bisa diberdayakan sebagai pengajar jika terjadi situasi darurat. “Ngaco lah Kemendikbud itu, enggak penting [keputusan menggaet tentara],” ujar Haris. Pelibatan TNI untuk menjadi tenaga pengajar juga berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan kegiatan tentara selain perang harus melalui keputusan politik dari Presiden.

“Jadi kalau tadi ditanya soal guru, maka basis dasarnya adalah apakah pelibatan itu didasarkan

keputusan politik? Kalau tidak, itu suatu kekeliruan,” kata Al Araf saat ditemui di Komnas HAM, Jumat (1/3/2019).

Keputusan politik yang dimaksud Al Araf salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun Presiden harus mengasumsikan pelibatan TNI untuk mengajar hanya bersifat sementara.

“Berikutnya, apakah Presiden dalam menilai pelibatan TNI mengajar itu menganggap situasi dan kondisinya memang di daerah tersebut tak memiliki kapasitas guru yang ada?” tanya Al Araf.

Dampak dari Pemerataan Guru Belum Optimal

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga sepekat bahwa pelibatan tentara dalam pendidikan tidak bisa sembarangan. Ubaid menyarankan Kemendikbud untuk mencari alternatif lain.

“Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang dan pengalaman mendidik di institusi sipil yang mengedepankan dialogis bukan instruktif,” ujar Ubaid kepada reporter Tirto.

Ubaid menilai kebijakan Kemendikbud ini sebagai dampak belum optimalnya pemerataan guru di daerah. Ia mengatakan ada kesenjangan dari segi kuantitas maupun kualitas guru yang tersedia di daerah dengan kota.

“Harus ada evaluasi guru, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Lalu pemerintah membuatkan roadmap kebijakan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas guru,” usulnya.

Dengan evaluasi menyeluruh, kata dia, akan terlihat daerah mana saja yang kekurangan dan kelebihan guru.

Sementara itu, Kemendikbud berdalih keputusan merekrut tentara menjadi tenaga pengajar karena dilatarbelakangi masih ada wilayah-wilayah yang sulit diakses guru biasa.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pengajar Kemendikbud, Supriono, mengatakan para personel TNI AD ini akan diberikan pelatihan sebelum mengajar di wilayah yang ditentukan.

“Ini jaga-jaga, karena ketika sekolah tidak ada gurunya atau siswa ingin belajar tidak ada gurunya, justru mereka lah [TNI AD] yang memfasilitasi,” kata Supriono.

Pada tahap pertama, Kemendikbud menyiapkan 900 personel TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut dan Batalyon 600 Raider Balikpapan. Mereka akan diperbantukan mengajar di Nunukan dan Malinau, Kalimantan Utara.

Pemerataan guru di daerah dinilai belum optimal.

Sumber : <https://tirto.id/kontroversi-tni-mengajar-guru-saja-masih-banyak-bermasalah-dicd>

Jokowi Janji Keluarkan KIP Lanjutan, JPPI: Asal Membenahi yang Lama



Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (8/3/2018). ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Oleh: Alfian Putra Abdi - 25 Februari 2019

Menurut Ubaid, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar tidak sebaik Kartu Jakarta Pintar yang mana sekolah bisa langsung mengusulkan muridnya untuk menjadi terdaftar.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, setuju dengan rencana Calon Presiden nomor 01 Joko Widodo yang akan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Lanjutan.

Janji itu disampaikan Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat: Optimistis Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) kemarin.

Jokowi mengaku akan melanjutkan KIP sampai perkuliahan apabila terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.

Kendati setuju dengan janji Jokowi, Ubaid tetap memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki. "Saya setuju dengan KIP kalau diteruskan, tapi dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki," ujarnya pada Tirto, Senin (25/2/2019).

Menurut Ubaid, beberapa catatan yang perlu dibenahi. Pertama, mengenai ketidaktepatan penerima. Kedua, susahya mengakses KIP. Ketiga, distribusi yang tidak merata. Keempat, KIP harus dari bawah ke atas.

“Pengaduan dari wali murid banyak simpang siur. Ada banyak usulan yang tidak diakomodir. Di komplek ke sekolah, lho ini data dari atas,” tuturnya. Ia membandingkan, pelaksanaan KIP tidak sebaik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mana sekolah bisa langsung mengusulkan muridnya untuk menjadi terdaftar.

“Beda dengan KJP di Jakarta yang birokrasinya mudah dan sekolah bisa langsung usul dan KJP bisa turun,” ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi janji Jokowi tersebut. Sebab kehadiran KIP bisa meringankan para peserta didik.

“KIP ini membantu akses ke sekolah bagi siswa dari keluarga kekurangan secara ekonomi,” tandasnya.

“Saya setuju dengan KIP kalau diteruskan, tapi dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki.”

Sumber : <https://tirto.id/jokowi-janji-keluarkan-kip-lanjutan-jppi-asal-membenahi-yang-lama-dhKr>

Banyak Kartu Tak Efisien, Kok Jokowi Janjikan “Kartu Sakti” Baru?



Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pidato pada acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019). Konvensi Rakyat itu mengangkat tema optimis Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Oleh: Hendra Friana - 25 Februari 2019

Tiga kartu baru yang dijanjikan Jokowi bakal menambah panjang daftar kartu-kartu “sakti” yang telah ia terbitkan sebelumnya.

tirto.id - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo tampaknya belum mau menanggalkan jurus “Kartu Sakti” sebagai janji kampanye, pada Pilpres 2019. Padahal, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tercatat sudah ada 5 kartu yang ia keluarkan.

Beberapa di antaranya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (Rastra), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Semua hal tersebut tidaklah cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya, di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu malam, 24 Februari 2019.

Sang petahana kini menjanjikan tiga kartu baru, yaitu: Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Pekerja. Tujuannya antara lain untuk menjamin pendidikan masyarakat miskin hingga perguruan tinggi, pelatihan kepada lulusan SMK hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Tentu, tiga kartu yang dijanjikan itu bakal menambah panjang daftar kartu-kartu “sakti” yang telah ia terbitkan sebelumnya.

Namun, yang lebih penting dikritisi, menurut hasil survei Indonesia Corruption Watch, adalah

kurang efisiennya kartu-kartu tersebut. Hal ini dapat terbaca dari hasil survei terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan ICW pada pertengahan 2018 lalu. Jika dilihat lebih detail, maka permasalahan yang muncul dalam program “kartu sakti” Jokowi memang berada di kementerian teknis.

Masalah pada implementasi KIP, misalnya, adalah akurasi data yang masih bermasalah. “Data yang dipakai adalah data kemiskinan hasil survei BPS, kemudian masuk komite nasional percepatan penanggulangan kemiskinan ke Kemensos, baru Kemendikbud,” kata staf divisi Investigasi ICW Lais Abid saat dihubungi reporter Tirto, Senin (25/2/2019).

Menurut Lais, permasalahan data seharusnya sudah selesai dalam empat tahun pemerintahan Jokowi. Sehingga, efisiensi distribusi bantuan bisa dilakukan dengan mengintegrasikan kartu-kartu yang telah ada ke dalam satu kartu. Sebab, kata Lais, persyaratan beberapa kartu yang dikeluarkan pemerintah saling beririsan, yakni memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai penanda keluarga kurang mampu.

Di sisi lain, rencana integrasi dalam satu kartu dan penyaluran nontunai ini bertujuan agar penyaluran dana bantuan sosial dapat lebih transparan, terkontrol, dan tepat sasaran. Karena itu, akan sangat efektif bila kepala keluarga hanya memegang satu kartu, tapi memiliki banyak fungsi.

“Makanya Kemensos harus segera menuntaskan perbaikan data ini. Baru setelah datanya benar mau digabungkan tentu akan lebih baik,” kata Lais.

Masalah inefisiensi dalam kartu-kartu Jokowi ini juga disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara tak langsung. Ia mengatakan, program bantuan berbasis kartu yang telah dijalankan pemerintah di sektor pendidikan bisa diintegrasikan. Sehingga, kartu-kartu baru, seperti KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja tak perlu dipisahkan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bisa diintegrasikan dengan dana Bidik Misi hingga dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani juga menyarankan agar program integrasi kartu-kartu tersebut perlu diiringi oleh evaluasi secara menyeluruh. Sehingga, kata dia, anggaran yang selama ini tersebar di berbagai program juga bisa terkonsolidasi dan lebih akuntabel.

“Ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Perlu Pembenahan

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji setuju dengan rencana Jokowi membuat program KIP Kuliah. Kendati demikian, Ubaid memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki.

“Saya setuju dengan KIP kalau diteruskan, tapi dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki,” kata Ubaid saat dihubungi reporter Tirto, Senin, 25 Februari 2019.

Menurut Ubaid, beberapa catatan yang perlu dibenahi, antara lain: Pertama, mengenai ketidaktepatan penerima. Kedua, susahnya mengakses KIP. Ketiga, distribusi yang tidak merata. Keempat, KIP harus dari bawah ke atas.

“Pengaduan dari wali murid banyak simpang siur. Ada banyak usulan yang tidak diakomodir. Di komplek ke sekolah, lho ini data dari atas,” kata dia.

Ubaid membandingkan, pelaksanaan KIP tidak sebaik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mana sekolah bisa langsung mengusulkan muridnya untuk menjadi terdaftar.

“Beda dengan KJP di Jakarta yang birokrasinya mudah dan sekolah bisa langsung usul dan KJP bisa turun,” kata dia.

Meski demikian, Ubaid tetap mengapresiasi janji Jokowi tersebut. Sebab, kata dia, kehadiran KIP bisa meringankan para peserta didik.

Program bantuan berbasis kartu di sektor pendidikan bisa diintegrasikan

Sumber : <https://tirto.id/banyak-kartu-tak-efisien-kok-jokowi-janjikan-kartu-sakti-baru-dhKR>

JPPI: Sekolah Ramah Anak Bisa Jadi Solusi Kekerasan Anak di Sekolah



Kekerasan Pada Anak. Foto/Istockphoto.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 13 Februari 2019

Kasus kekerasan seksual anak masih marak terjadi di lingkungan sekolah, JPPI menilai Sekolah Ramah Anak bisa jadi solusi atas hal tersebut.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji merespons kejadian dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SDN Kauman 3 Malang dengan mendorong pemerintah untuk fokus dalam penerapan Sekolah Ramah Anak.

Hal tersebut ia sampaikan mengingat kasus kekerasan seksual yang terus mewarnai dunia pendidikan Indonesia.

“Sekolah Ramah Anak harus diterapkan di seluruh sekolah. Kejadian ini [kekerasan seksual] terus terulang dan terjadi di mana-mana,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (13/2/2019).

Indikator Sekolah Ramah Anak tersebut, Ubaid menjelaskan, yang pertama tidak boleh ada kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non fisik. Kedua, sarana dan prasarana di sekolah harus mendukung anak.

“Misalnya, jalan di sekolah, menuju sekolah dan sekitar sekolah harus aman. Tidak membahayakan anak,” ujarnya.

Lalu ia melanjutkan, proses belajar mengajar harus menerapkan pola disiplin positif dan terbangunnya komunikasi efektif antar anak, orang tua, dan sekolah. Yang tak kalah penting,

menurutnya, ketersediaan tenaga ajar yang berkompeten dalam memahami anak.

“Yang mampu memahami dan menerapkan hak-hak anak di sekolah,” ujarnya.

Sayangnya, konsep Sekolah Ramah Anak ini di Indonesia, menurutnya, belum ditanggapi serius oleh pemerintah. Konsep ini masih sebatas imbauan saja dan tak efektif.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penerapan ini. Lalu perlu untuk diperbaiki dan diperluas ke sekolah-sekolah lain,” tandasnya.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti pada akhir Desember 2018 lalu merilis temuannya terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Retno menyebutkan angka kekerasan seksual pada tahun 2018, yaitu mencapai 177 korban terdiri dari 135 korban murid laki-laki dan 42 korban murid perempuan.

Sebelumnya, guru olahraga SDN Kauman 3 berinsial IS diduga melakukan tindak pelecehan seksual ke sejumlah siswinya. Atas temuan tersebut, sejumlah wali murid yang gelisah melaporkan kasus itu ke Polres Malang Kota pada Senin (11/2/2019) kemarin.

Konsep Sekolah Ramah Anak masih sebatas imbauan saja dan tak efektif

Sumber : <https://tirto.id/jppi-sekolah-ramah-anak-bisa-jadi-solusi-kekerasan-anak-di-sekolah-dgME>

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Hampir 100% Selesai



Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastrea kepada masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). (Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw)

Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 12 Februari 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk membantu mengurangi angka anak putus sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah hampir %100 dilakukan dengan sasaran 17,9 juta anak Indonesia.

Berdasarkan data Kemdikbud, bantuan PIP dimulai sejak 2014 dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 4.322.559.975.000. Hingga bulan Desember 2018, total dana PIP yang telah disalurkan sebesar Rp 42.837.024.725.000.

“Penyaluran KIP sudah hampir 100%. KIP ini bukanlah sekadar kartu identitas yang menunjukkan kepemilikan hak, tetapi juga bisa untuk mengambil uang sehingga pemilik bisa mengambil secara bertahap sesuai kebutuhan. Bahkan untuk SMA dan SMK bisa untuk menabung kalau kebetulan dapat rezeki,” kata Muhadjir dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, Bojongsari Depok, Jawa Barat, Senin (11/2) malam.

Agar tepat sasaran, Muhadjir menyebutkan, pemerataan sebaran KIP ini melibatkan tiga pihak yakni, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial (Kemsos) untuk data, dan Kemdibud yang mendistribusikan KIP.

“Ketiga pihak ini saling berkaitan sehingga KIP memenuhi target. Misalnya untuk data, ada proses penyepadan dari dapodik (data pokok pendidikan, red) dan data di Kemsos. Jadi tidak hanya murni dari sekolah, tetapi dari Kemsos juga,” ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk mempermudah pencairan dana manfaat PIP, Kemdikbud telah mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman. Kini, siswa tidak lagi harus antre di teller bank. Mereka dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat milik bank penyalur yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud.

Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Irfansyah, memberikan apresiasi pembaruan pengembangan layanan PIP yang menggunakan ATM. Menurutnya, penggunaan KIP ATM di wilayahnya sangat membantu, khususnya daerah yang jauh dari kota. Siswa tidak perlu lagi mencari bank yang telah ditunjuk untuk melakukan proses administrasi pencairan dana manfaat PIP. Ia berharap pihak bank penyalur dapat melakukan jemput bola untuk mempermudah pencairan dana PIP, seperti membawa mobil ATM.

Hal senada juga diungkapkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhartini. Menurut dia, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dari keluarga tidak mampu merupakan salah satu kunci jawaban untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suhartini mengemukakan, dana manfaat PIP di Kota Mataram cukup besar. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah kota Mataram perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada sekolah terkait teknis penyaluran dan pencairan dana tersebut.

“Kami memberikan pengarahan kepada guru dan kepala sekolah untuk teknis penyaluran dana PIP, dan bila perlu guru mendampingi siswa dalam proses pencairan dana manfaat PIP, tanpa memungut serupiah pun dari siswa,” ungkapnya.

Suhartini mengungkapkan, sosialisasi PIP dilakukan secara rutin sebagai salah satu upaya agar penyalurannya tepat sasaran. “Sebelum proses penyaluran Kartu Indonesia Pintar, kami kumpulkan semua kepala sekolah di Kota Mataram untuk pengarahan teknis penyaluran PIP,” ungkapnya.

Putus Sekolah

Namun, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, PIP secara umum memang bagus untuk membantu akses bagi siswa miskin. Namun, ia menilai, program tersebut belum dapat diklaim berhasil mengurangi angka putus sekolah. Sebab, sistem dan birokrasi penyaluran PIP masih harus dibenahi karena masih belum tepat sasaran dan sulit diakses.

“PIP belum bisa ke arah situ (kurangi angka putus sekolah, red) karena dari akses masih sulit. Ini dapat dilihat dari jumlah sekolah negeri untuk SMA dan SMK masih terbatas dan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan lulusan SMP,” ujarnya kepada SP, Selasa (12/2).

Untuk itu, Ubaid mengatakan, pemerintah harus berbenah dan memperbaiki akses. Pasalnya,

JPPPI menemukan masih banyak anak Indonesia yang susah mengakses pendidikan dan belum mendapat bantuan.

PIP sendiri dirancang pemerintah untuk membantu anak usia 6-21 tahun dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya, baik itu di sekolah formal maupun nonformal.

Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/537594/penyaluran-kartu-indonesia-pintar-hampir-100-selesai>

Problem Permenristekdikti Soal Pembinaan Ideologi Bangsa di Kampus



Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/4/2018). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Oleh: Alfian Putra Abdi - 11 Februari 2019

Kampus semestinya menjadi tempat adu pemikiran, ideologi, dan gagasan yang harus dijunjung tinggi.

tirto.id - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir kembali menggalakkan sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55/2018 ke sejumlah kampus. Kebijakan yang sempat ramai pada November 2018 ini mengatur soal pembinaan ideologi bangsa dalam kegiatan kemahasiswaan.

Nasir mengatakan, regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman akan ideologi bangsa serta mencegah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di lingkungan kampus. "Peraturan menteri ini ada untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui unit kegiatan mahasiswa," kata Nasir, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Februari 2019.

Nasir menjelaskan, fokus Permenristekdikti ini mengacu kepada empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya pikir mahasiswa yang punya potensi besar untuk membangun negeri ini. Kalau urusan kebangsaannya saja masih bermasalah, ini akan menjadi problem bagi mereka untuk membangun negara di masa yang akan datang,” kata Nasir.

Namun, Permenristekdikti itu dikritik peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Ia justru mengkhawatirkan peraturan menteri itu akan membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berkegiatan di kampus.

“Dengan membentuk organisasi yang langsung bertanggung jawab ke pimpinan perguruan tinggi. Apakah akan ada jaminan terhadap keleluasaan mahasiswa untuk melakukan kegiatan sebagaimana wajarnya?” kata Siti Zuhro saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/2/2019).

Menurut Siti, semestinya mahasiswa itu patut bangga sebagai warga negara karena mereka mampu memposisikan diri menjadi intelektual muda yang kritis, idealis, dan memerankan diri sebagai agent of change.

Ia menggarisbawahi agar Permenristekdikti No.55/2018 ini tidak berpotensi menggerus kritisisme mahasiswa. “Itu yang jangan sampai terjadi [pengikisan dengan hadirnya Permenristekdikti]” kata dia.

Hal senada diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Ia berharap Kemenristekdikti benar-benar menegaskan kepada perguruan tinggi agar mereka tidak salah menafsirkan Permenristekdikti itu.

“Peraturan ini harus ditafsirkan dengan benar. Masalahnya banyak aturan di atas yang diterjemahkan di kampus menjadi berbeda. Ini yang tidak boleh terjadi,” kata Ubaid.

Ubaid menambahkan, kampus semestinya menjadi tempat adu pemikiran, ideologi, dan gagasan yang harus dijunjung tinggi.

“Misalnya dari Permenristekdikti ini diturunkan menjadi aturan kampus yang melarang ini dan itu. Seperti ini [larangan yang tak berdasar] tidak boleh terjadi,” kata Ubaid.

Asal Tidak Dogmatis

Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Beni Sukardis masih memandang peraturan menteri tersebut dengan positif. Namun, kata dia, dengan catatan aturan tersebut tidak bersifat dogmatis dan normatif.

“Justru pembinaan harus menggunakan bahasa yang memikat generasi sekarang, sehingga mahasiswa benar-benar akan mempraktikkan apa yang sudah ada dalam ideologi nasional kita,” kata pria yang juga dosen di UPN “Veteran” Jakarta ini.

Beni juga belum melihat indikasi hadirnya peraturan menteri tersebut mampu mengikis budaya kritis dalam lingkup kampus.

“Saya pikir belum mengarah ke sana [mengikis budaya kritis mahasiswa],” kata Beni. Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im menolak kekhawatiran yang dilontarkan Siti Zuhro dan Ubaid Matraji.

Menurut dia, Permenristekdikti ini bertujuan mengatur kegiatan mahasiswa yang dapat mengakibatkan seseorang mempunyai pandangan yang menentang NKRI, berlawanan dengan Pancasila, dan UUD 1945.

“Itu kan, tidak benar kalau [kegiatan] seperti itu,” kata Ainun. Namun, kata Ainun, apabila hal yang bertentangan tersebut berada dalam format kajian akademik, misalnya diskusi perihal tema

kekhalfahan atau marxisme sekalipun, kata dia, tak menjadi soal.

“Kalau akademik, kan, lain. Bukan begitu [mengekan] maksudnya. Kajian itu beda dengan usaha yang cenderung membuat seseorang punya pandangan yang melawan NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ainun. Ainun menambahkan “kalau untuk pengetahuan, kan, kita harus belajar semuanya.” Ia juga menampik anggapan apabila peraturan menteri tersebut hadir justru untuk mengikis budaya kritis di kampus. Ia justru menilai malah sebaliknya.

“Justru kami mendorong budaya yang kritis yang inovatif. Berpikir kritis harus tetap dibangun itu,” kata dia.

Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na'im menolak kekhawatiran yang dilontarkan Siti Zuhro dan Ubaid Matraji.

Sumber : <https://tirto.id/problem-permenristekdikti-soal-pembinaan-ideologi-bangsa-di-kampus-dgFH>

NASIONAL

Soal Perbaikan Pembelajaran di Kelas, MGMP Perlu Direvitalisasi



Editor Ali Rahman Minggu, 10 Februari 2019 - 22:32

INDOPOS.CO.ID – Upaya peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran di dalam kelas terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guna menjadikan kelas menyenangkan dan memperoleh hasil memuaskan dalam proses belajar mengajar. Peningkatan itu dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan sistem zonasi.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, prinsipnya belajar harus menyenangkan. MGMP harus dijadikan tempat capacity building bagi para guru dalam konteks peningkatan mutu guru.

“MGMP harusnya mampu mendorong ini. Tapi selama ini belum mampu mengarah ke sana. Biasanya hanya diisi dengan bikin soal, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tapi tidak membicarakan mutu pendidikan dan peningkatan kapasitas guru,” ujarnya kepada INDOPOS melalui telepon di Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Padahal bila Kemendikbud serius bisa menjadi gambaran yang bagus. Bagi pemetaan mutu guru per mata pelajaran. Namun ini belum dilakukan. “Jangan hanya dijadikan pertemuan yang sifatnya sangat administratif,” jelas Ubaid Matraji.

Pengamat pendidikan Doni A Koesoema menilai sistem zonasi tidak terkait langsung dengan pembelajaran di kelas. Namun, sistem ini dapat membantu peningkatan kualitas guru di suatu zona melalui wadah MGMP.

Wadah tersebut tidak otomatis memperbaiki proses pembelajaran di kelas tergantung dari isi pelatihan yang diadakannya. Kalau isinya hanya bedah standar kompetensi lulusan untuk buat soal tidak akan efektif.

“Biasanya seperti itu. Jarang sekali yang isinya sharing pengalaman mengajar dan berbagi praktik baik. MGMP perlu direvitalisasi agar isi pertemuannya lebih fokus pada perbaikan pembelajaran di kelas,” terang Doni.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano mengatakan, fokus membenahi proses belajar di kelas agar siswa berpartisipasi aktif.

“Saat ini kita fokus pada peningkatan proses pembelajaran, bagaimana meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Jadi prosesnya bukan konten atau materi pembelajarannya,” ungkap Supriano. (dan)

Hoaks Dipercaya Sebab Literasi Masyarakat Rendah Sejak di Sekolah



i-kelas-

Relawan mendampingi anak-anak menulis proses mencapai cita-citanya di sekolah alam Kampung Batara di Papring, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (24/9). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 11 Januari 2019

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai hoaks mudah dipercaya oleh masyarakat karena budaya literasi dan membaca sudah rendah sejak di sekolah.

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai budaya literasi di kalangan masyarakat Indonesia selama ini rendah karena kegemaran membaca tidak didorong sejak di sekolah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan gerakan literasi di mayoritas sekolah di Indonesia selama ini lesu sehingga tidak banyak siswa gemar membaca buku. "Lihat saja perpustakaan-perpustakaan di sekolah, jarang ada siswa yang mampir, apalagi kerasan berlama-lama di sana," kata Ubaid kepada reporter tirto di Jakarta pada Jumat (11/1/2019).

Ubaid menyesalkan para guru selama ini terlalu sibuk dengan hal-hal administratif sehingga lalai untuk menumbuhkan minat baca kepada murid-muridnya.

"Gara-gara literasi yang rendah ini, masyarakat bingung membedakan mana hoaks dan fakta. Ini terjadi karena mereka tidak punya tradisi literasi yang kuat," ujarnya lagi. Sampai memasuki tahun 2019, Ubaid belum melihat adanya perubahan minat baca di Indonesia ke arah yang lebih

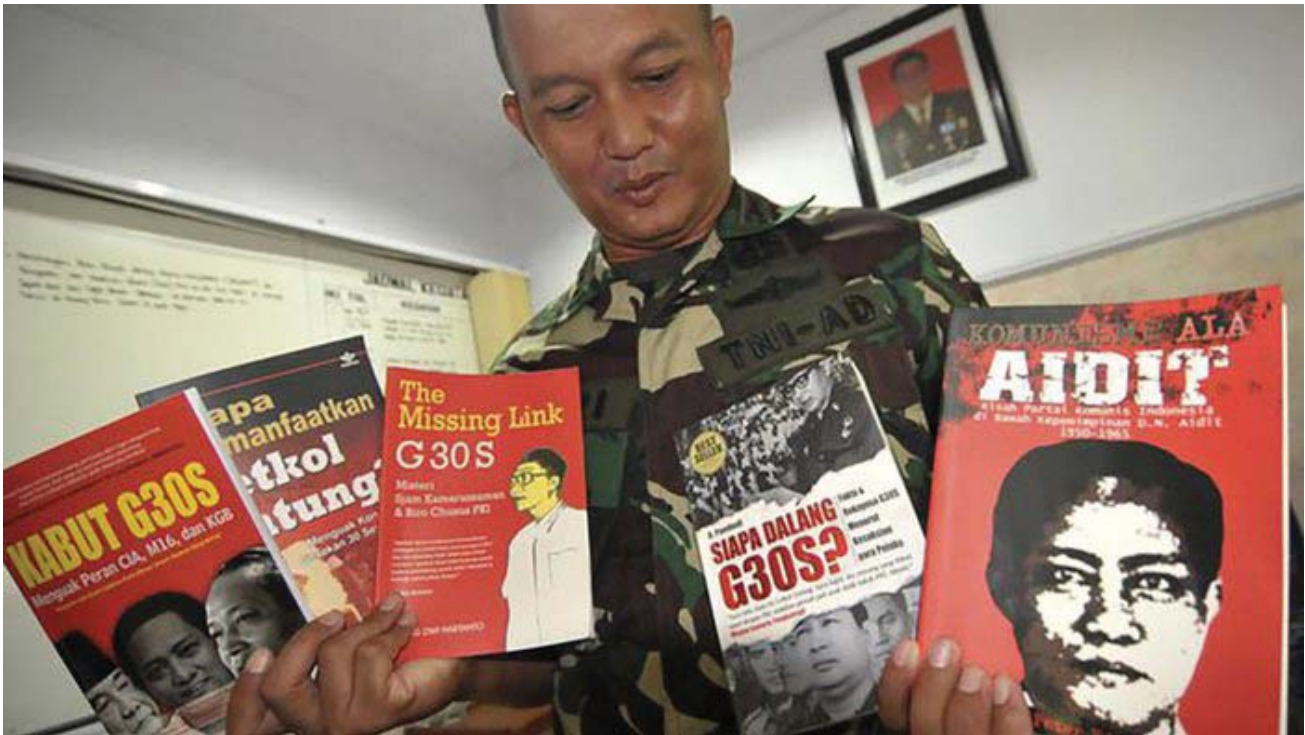
baik lagi. Oleh karena itu, Ia masih menantikan peranan pemerintah untuk segera membuat langkah yang serius untuk memperkuat budaya literasi di sekolah dengan membuat program secara nasional dan merata hingga daerah.

“Perlu digalakkan secara nasional dan diturunkan menjadi program-program prioritas di daerah hingga ke desa-desa,” kata dia.

***“Gara-gara literasi yang rendah ini, masyarakat bingung membedakan mana hoaks dan fakta,”
ujar Ubaid.***

Sumber : <https://tirto.id/hoaks-dipercaya-sebab-literasi-masyarakat-rendah-sejak-di-sekolah-dd9q>

JPII Nilai Razia Buku Bertema Kiri oleh Militer Terlalu Berlebihan



Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku yang disita dari sebuah pusat perbelanjaan di Kodim 0712/Tegal, Jawa Tengah. ANTARA/Oky

Lukmansyah. Oleh: Alfian Putra Abdi - 11 Januari 2019

Razia buku yang terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh pihak militer lantaran bertemakan ideologi kiri terlalu berlebihan.

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII) menilai razia buku yang terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh pihak militer lantaran bertemakan ideologi kiri terlalu berlebihan.

Koordinator Nasional JPII Ubaid Matraji menganggap hal tersebut sebagai wujud menciderai kebebasan dan pengekan akses masyarakat terhadap pengetahuan.

Ubaid menilai, langkah itu juga keliru, melihat tingkat literasi di Indonesia yang terbilang rendah.

“Indonesia ini negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah nomor dua dari belakang. Harusnya pemerintah menggalakkan gerakan literasi, bukan malah memberangus perbukuan dan membungkam kebebasan,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (11/1/2019).

Ubaid juga menyayangkan sekaligus heran, mengenai razia buku bertema kiri yang selalu muncul pada musim-musim politik. Ia menduga, kalau razia tersebut hanya akal-akalan dengan tujuan yang politis.

“Janganlah. Jangan dibodohi rakyat dengan tontonan politik menebar ketakutan. Beri rakyat

harapan dan optimisme,” ujarnya. Menurutnya, seharusnya masyarakat diberi kebebasan dalam mengakses sumber pengetahuan selama dalam konteks untuk pembelajaran. Bukannya malah diseragamkan, dengan merazia sebagian buku.

“Belajar itu harus dari berbagai sumber. Jika ada pembatasan buku, itu bagian dari politik penyeragaman seperti yang terjadi di era Orde Baru. Jangan lah kita bergerak ke belakang. Harusnya maju ke depan dengan belajar dari sejarah masa lampau,” tandasnya.

Ubaid juga menyayangkan razia buku bertema kiri yang selalu muncul pada musim-musim politik

Sumber : <https://tirto.id/jppi-nilai-razia-buku-bertema-kiri-oleh-militer-terlalu-berlebihan-dd7t>

Skema Pengajuan KIP Dinilai Harus Lebih Transparan



Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Foto: Kemendikbud

Pengajuan KIP dinilai belum transparan dan birokrasinya masih berbelit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pemerintah perlu merancang sistem pengajuan Kartu Indonesia Pintar yang lebih transparan dan skema yang jelas. Karena pengajuan KIP dinilai belum transparan dan birokrasinya masih berbelit.

“Skema pengajuan KIP itu tidak jelas. Tidak seperti mengajukan BPJS misalnya, jelas tahapan pertamanya apa, ke mana kita ajukan, ke siapa kita minta rekomendasi dan lainnya. Nah KIP ini tidak jelas,” kata Ubaid saat dihubungi *Republika*, Kamis (10/1).

Menurut dia, seharusnya skema pengajuan KIP lebih dipermudah. Misalnya dibuatkan pendaftaran secara daring, bisa diakses oleh siswa langsung, dan langsung tersambung ke pusat. Untuk kemudian pemerintah pusat melakukan validasi langsung, apakah siswa tersebut berhak atau tidak mendapatkan KIP.

Dia mengungkapkan beberapa kerancuan dan ketidakjelasan dalam proses pengajuan KIP. Menurut Ubaid, JPPI pernah menemukan beberapa sekolah yang sebenarnya tidak pernah mengajukan KIP, namun tiba-tiba pihak sekolah menerima data dari pusat bahwa ada siswanya

yang berhak menerima KIP. Hal ini, kata Ubaid, tentu menimbulkan pertanyaan besar.

“Lalu pernah juga ada sekolah yang mengajukan beberapa siswanya, tapi tidak diterima semua. Dan alasannya tidak kuat, karena validasinya lemah. Jadi ya timbul lah protes dari orang tua siswa,” jelas Ubaid.

Selain itu, Ubaid juga menemukan fakta bahwa di sekolah-sekolah swasta di kawasan Jabodetabek masih banyak siswa miskin yang tidak mengetahui program KIP. Parahnya, pihak sekolah juga tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan KIP bagi siswanya.

Untuk itu dia menilai, pemerintah harus terus mengencangkan sosialisasi tentang KIP. Karena KIP ini diperuntukkan bagi semua siswa miskin yang bersekolah di negeri maupun swasta.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, SKTM tidak akan berlaku lagi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Adapun untuk afirmasi peserta didik yang kurang mampu, lanjut dia, cukup dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kita sudah pastikan (PPDB tahun 2019) tidak ada SKTM. Jadi afirmasi siswa kurang mampu sumbernya cukup dari penerima KIP,” kata Muhadjir.

Dia menjelaskan, peniadaan SKTM tersebut lantaran mempertimbangkan kasus-kasus pemalsuan SKTM yang marak terjadi pada PPDB tahun sebelumnya. Kebijakan ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin pendidikan peserta didik penerima KIP bisa berkelanjutan.

Selain KIP, menurut Muhadjir, keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan siswa yang direkomendasikan sekolah juga bisa menjadi syarat afirmasi bagi siswa tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/01/10/pl48a6335-skema-pengajuan-kip-dinilai-harus-lebih-transparan>

JPPI: Pembaruan Data Penerima KIP Masih Berbelit-belit

Kamis 10 Jan 2019 19:04 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar.Foto: Kemendikbud

Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dalam hal pengurusan KIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuntut agar pemerintah mempermudah *updating* data siswa miskin penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tuntutan itu disampaikan seiring dihapuskannya surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat afirmasi siswa tidak mampu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2019.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, hingga kini prosedur *updating* data KIP masih berbelit-belit. Sehingga dia menuntut agar pemerintah melakukan reformasi birokrasi dalam hal

pengurusan KIP.

“*Updating* data KIP itu susah dilakukan. Kalau SKTM dihapus, usulan saya proses mendapatkan KIP harus dipermudah. Jangan seperti sekarang yang masih susah dan berbelit-belit birokrasinya,” tegas Ubaid saat dihubungi *Republika*, Kamis (10/1).

Birokrasi yang berbelit itulah yang berdampak pada masih banyaknya siswa-siswi miskin yang belum terdaftar sebagai penerima KIP. Bahkan, Ubaid mengasumsikan hampir di setiap sekolah ada satu atau dua anak yang tidak mampu namun belum terdaftar KIP.

“Datang saja ke sekolah, pasti ada anak yang harusnya dapat KIP tapi belum dapat,” jelas Ubaid.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah segera melakukan pendataan kembali terhadap siswa dan keluarga yang tidak mampu secara masif. Sehingga ketika PPDB berlangsung dipastikan tidak ada siswa miskin yang putus sekolah, karena keterbatasan biaya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, SKTM tidak akan berlaku lagi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Adapun untuk afirmasi peserta didik yang kurang mampu, lanjut dia, cukup dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kita sudah pastikan (PPDB tahun 2019) tidak ada SKTM. Jadi afirmasi siswa kurang mampu sumbernya cukup dari penerima KIP,” kata Muhadjir.

Dia menjelaskan, peniadaan SKTM tersebut lantaran mempertimbangkan kasus-kasus pemalsuan SKTM yang marak terjadi pada PPDB tahun sebelumnya. Kebijakan ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin pendidikan peserta didik penerima KIP bisa berkelanjutan.

Selain KIP, menurut Muhadjir, keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan siswa yang direkomendasikan sekolah juga bisa menjadi syarat afirmasi bagi siswa tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/01/10/pl46v5335-jppi-pembaruan-data-penerima-kip-masih-berbelitbelit>

Pengamat: Madrasah Terdiskriminasi Akibat Kebijakan

Mutiul Alim | Rabu, 09/01/2019 15:45 WIB



Siswa madrasah (Foto: Facebook MAN 1 Jembrana)

Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut ada perlakuan yang tidak seimbang antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah di Indonesia. Madrasah, yang dikenal sebagai pendidikan formal berciri khas agama, terdiskriminasi akibat kebijakan pusat yang tidak tuntas.

“Kebijakan di level pusat yang tidak tuntas terkait bagaimana mengelola sekolah dan madrasah. Akibatnya berimbas pada kebijakan guru, tata kelola, dan akses siswa,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi *Jurnas.com*, pada Rabu (9/1) di Jakarta.

Salah satu bukti nyata diskriminasi pemerintah terhadap madrasah ialah dari jumlah anggaran

yang relatif kecil. Sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memperoleh suntikan anggaran lewat transfer daerah dan pusat.

“Sedangkan madrasah hanya dari pusat,” sebutnya.

Sementara itu perbandingan jumlah madrasah negeri dan swasta juga timpang. Dari total 50 ribuan madrasah, hanya lima persen yang berstatus negeri.

“Guru-guru madrasah menjerit. Sama-sama mengajar di lembaga pendidikan, tapi diperlakukan beda antara guru sekolah dengan guru madrasah,” tegasnya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher. Dia menilai ada ketidakberpihakan pemerintah terhadap madrasah dan sekolah-sekolah agama.

Selain minimnya jumlah madrasah negeri, pemenuhan sarana dan pra sarana madrasah juga belum maksimal. Kondisi ini ditambah lagi dengan tidak adanya *blue print* pendidikan madrasah secara utuh, dan belum meratanya kualitas guru madrasah.

“Ada ketidakberpihakan kepada madrasah. Padahal negara seharusnya turut mendorong sekolah-sekolah agama agar bisa lebih berkembang,” ujar Ali kepada *Jurnas.com*, pada Selasa (8/1) di Jakarta.

Ali juga menyarankan Kementerian Agama selaku penanggung jawab madrasah, melakukan pemekaran internal, yakni dengan memecah Direktorat Pendidikan Islam (Pendis) menjadi tiga ditjen, yakni Ditjen Perguruan Tinggi, Ditjen Madrasah, dan Ditjen Diniyah/Pesantren.

“Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kebutuhannya mendesak. Selama ini Ditjen Pendis hanya fokus pada perguruan tinggi, sedangkan masih ada pendidikan dasar dan menengah, di antaranya madrasah dan diniyah,” terangnya.

Sementara Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Umar dalam kesempatan berbeda mengakui, terbatasnya jumlah madrasah negeri membuat Kemenag kesulitan melakukan peningkatan akses dan mutu pendidikan Islam.

Sebab secara umum, madrasah swasta di Indonesia didirikan oleh masyarakat dengan kondisi yang terbatas. Ditambah pula, hingga saat ini belum ada kejelasan regulasi dari pemerintah untuk memberikan bantuan APBD kepada madrasah swasta.

Sumber : <http://www.jurnas.com/artikel/46535/Pengamat-Madrasah-Terdiskriminasi-Akibat-Kebijakan/>



Nasional

Kemendikbud Akan Hapus SKTM

Editor Nurhayat Rabu, 9 Januari 2019 - 08:51

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan menghapuskan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk penerimaan siswa baru tahun 2019. Karena sistem ini dinilai menyulitkan pelaksanaan penerimaan siswa di sekolah, mengingat penerimaan siswa lewat jalur SKTM tahun 2018 yang menemui masalah.

”Sedang kita pertimbangkan untuk PPDB tahun ini tidak ada SKTM cukup dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejenisnya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2019).

Pemerintah juga telah menyiapkan solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk jaminan sekolah. Melalui penerima KIP, nantinya kartu tersebut bisa digunakan berkelanjutan karena menjamin bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

”Jadi untuk afirmasi siswa miskin sumbernya cukup dari penerima KIP. Sehingga mereka yang sudah menerima KIP dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Dia bisa digunakan untuk status tertentu. Kemudian kedua mereka yang punya keluarganya yang mendapatkan PKH atau pegang layanan sosial lainnya,” jelas Muhadjir Effendy.

Dalam waktu dekat Kemendikbud akan mengeluarkan surat edaran perihan rencana penghapusan SKTM. Hal itu untuk mensosialisasikan kepada jajarannya dan menginformasikan kepada semua masyarakat. ”Dalam Surat Keputusan peraturan menteri toh. Tapi kita sudah pasti tidak ada SKTM lagi,” terang Mantan Rektor Universitas Muhamdiyah Malang itu.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Hamid Muhamad mengatakan hal serupa, bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memperkuat penghapusan SKTM. "Permendikbudnya kita upayakan paling lambat bulan ini. Kalau bisa pertengahan bulan ini bisa selesai," kata Hamid Muhamad.

Untuk menghindari penyalahgunaan yang menerima KIP di sekolah. Kemendikbud menyampaikan akan terus mengawasinya dengan ketat. Terlebih ada pengawasan guru sehingga dana KIP bisa sesuai penggunaannya. "Ada pendampingan untuk penggunaan KIP dari guru yang dipercaya untuk mendampingi penggunaan KIP tepat sasaran diberikannya," tegas Muhadjir Effendy.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendukung rencana Kemendikbud penghapusan SKTM. Lantaran jalur tersebut mudah dipalsukan. Tapi harus ada pendataan keluarga miskin yang terintegrasi. Kemudian, updating datanya juga harus dipermudah.

"Sebab banyak anak miskin yang belum dapat KIP, supaya dapat maka proses mendapatkan KIP harus dipermudah. Masih susah dan masih banyak komplain dari masyarakat. Birokrasinya masih panjang dan berbelit-belit. Karena itu banyak sekolah dikomplain masyarakat terkait anaknya yang harusnya dapat tapi nggak dapat," ucap Ubaid Matraji.

Menurutnya pengurusannya bisa dilakukan secara online sehingga bisa lebih mudah. Maka pendataan dan pendistribusiannya akan merata. "Ngurusnya masih ribet, ini yang harus dipermudah. Jadi menghapus SKTM harus mempermudah siswa mendapatkan KIP," tukasnya. (dan)

Sumber : <https://indopos.co.id/read/2019/01/09/161169/kemendikbud-akan-hapus-sktm/>

Penelitian PBNU-JPPI: Dana Pendidikan di Daerah Banyak Digunakan untuk Rapat Dinas

Masih banyak dana yang digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yang salah satunya digunakan untuk membiayai rapat dinas pendidikan.

BERITA , NASIONAL Kamis, 03 Jan 2019 21:27 WIB

Author Muthia Kusuma



Ilustrasi. Kegiatan pendidikan di sekolah darurat di Palu Sulawesi Tengah, Senin (3/12/2018). (Foto: ANTARA/ Mohamad Hamzah)

KBR, Jakarta - PBNU dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendapati fakta penyerapan dana pendidikan di daerah tidak dimaksimalkan untuk kebutuhan siswa. Sehingga program wajib belajar 12 tahun sulit dirasakan seluruh siswa.

Padahal menurut UU No.23 tahun 2014, wewenang SMA dan SMK ada pada Provinsi. PBNU dan JPPI pun melakukan penelitian di tiga provinsi, yakni Riau, Banten, dan Jawa Timur.

Salah seorang peneliti, Muawanah mengatakan masih banyak dana yang digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yang salah satunya digunakan untuk membiayai rapat dinas pendidikan.

“Sebenarnya untuk APBD Provinsi pun kan alokasi untuk pendidikannya kan 20 persen. Nah dari masing-masing tiga daerah tersebut, memang belum ada yang mencapai 20 persen. Ada

yang tertinggi itu Riau, Provinsi Riau itu paling tinggi penyerapannya 19,9 persen tapi itu juga penyerapannya untuk belanja langsung pendidikan, yaitu masih sangat kecil hanya 8,8 persen,” ucap Muawanah, saat dihubungi KBR, pada Kamis, (3/1/2018).

Sementara di Banten, penyerapannya hanya 16,6 persen, dari dana sebesar itu, 8,4 persen diperuntukan belanja langsung. Di Jawa Timur, dari alokasi dana pendidikan dari APBD sebesar 17,4 persen, belanja langsung hanya 5,4 persen. Mengenai data ini, peningkatan mutu pendidikan dinilai tidak bisa maksimal.

Selain melakukan penelitian, PBNU dan JPPI juga melakukan advokasi dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait, seperti DPRD, NGO daerah, dan Dinas Pendidikan. Tujuannya untuk menyatukan persepsi dan menguatkan komitmen bersama agar dapat mengurangi penggunaan biaya tidak langsung. Nantinya diharapkan kebutuhan siswa akan terpenuhi dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Editor: Agus Luqman

Sumber : https://kbr.id/nasional/01-2019/penelitian_pbnu_jppi_dana_pendidikan_di_daerah_banyak_digunakan_untuk_rapat_dinas/98620.html

2018 Pentingkah Pendidikan Bencana Masuk Kurikulum seperti Ide Jokowi?



Presiden Joko Widodo mengamati bangunan Hotel Mutiara Carita yang rusak akibat tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin (24/12/2018). ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo.

Oleh: Riyan Setiawan - 28 Desember 2018

Selain pendidikan, hal penting yang mesti disiapkan pemerintah adalah teknologi deteksi dini bencana

tirto.id - Wacana pendidikan bencana menjadi kurikulum sekolah yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai kritik. Sebab, selain memberatkan peserta didik, ide tersebut juga dinilai tidak akan efektif.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, daripada menjadikan pendidikan bencana menjadi pelajaran tersendiri, lebih baik pemerintah mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya sesuai kurikulum 2013.

Sebab, kata Ubaid, jika pendidikan bencana dimasukkan ke dalam mata pelajaran khusus, maka akan menjadi kompleks dan memberatkan siswa. "Itu [bencana] sangat penting dibicarakan di sekolah, tapi caranya adalah terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ada," kata Ubaid kepada reporter Tirto, Kamis (27/12/2018).

Hal senada diungkapkan Ahli Geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adrin Tohari. Menurutnya, pendidikan tentang bencana sangat penting bagi siswa, karena Indonesia berada dalam ancaman wilayah "cincin api."

"Sebagai dasar agar masyarakat memahami keadaan lingkungannya [dari] potensi ancaman, potensi risiko yang berada di sekitar daerah yang mereka tinggali," kata Adrin.

Namun demikian, selain pendidikan bencana, kata Adrin, hal penting yang mesti disiapkan pemerintah adalah teknologi deteksi bencana. Adrin menegaskan, teknologi kebencanaan ini sangat penting untuk memberikan kewaspadaan bagi masyarakat.

Sebab, tanpa teknologi yang dapat mendeteksi potensi bencana terjadi, maka pendidikan bencana akan terhambat. “Karena tanpa teknologi sistem peringatan ini terasa tidak lengkap, masyarakat harus waspada. Teknologi itu, kan, memberikan kewaspadaan bagi masyarakat, dan masyarakat sendiri juga harus mendapatkan pengetahuan,” kata dia.

Menurut Adrin, upaya mitigasi bencana seperti yang ada di daerah Selat Sunda seharusnya melibatkan tiga pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, ilmuwan, dan swasta. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam menghadapi bencana.

“Seperti kejadian kemarin di Pandeglang di Selat Sunda. Itu, kan, banyak perusahaan pariwisata. Kalau mereka punya pengetahuan dan kewaspadaan, mungkin mereka akan melakukan upaya bagaimana saat terkena tsunami tidak rubuh. Akhirnya memakan korban jiwa,” kata dia.

Respons Kemendikbud

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap akan merealisasikan keinginan Presiden Jokowi agar pendidikan kebencanaan masuk dalam kurikulum sekolah.

“Kami usahakan mulai tahun ajaran 2019,” kata Muhadjir, di Kantor Kemendikbud, Kamis (27/12/2018). Muhadjir menjelaskan Kemendikbud telah menyiapkan modul-modul untuk pendidikan kebencanaan.

Modul tersebut terdiri dari Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) yang nantinya diutamakan untuk memberi keterampilan dasar dalam hidup.

“Tetapi yang harus dipahami ini bukan mata pelajaran. Jadi tema-tema yang terintegrasi, istilahnya saya sebut adalah dasar-dasar keterampilan hidup untuk menjadi warga negara,” kata Muhadjir.

Selain tentang pendidikan mitigasi bencana, kata Muhadjir, modul tersebut juga menjelaskan pengetahuan lainnya.

Menurut dia, pengetahuan tersebut mencakup tentang bahaya narkoba serta pencegahan terhadap pikiran-pikiran berbahaya, seperti radikalisme dan intoleran. Kemudian kesadaran hukum terutama dalam berlalu lintas, dan antikorupsi. “Jadi itu satu paket di dalam PPPK. Dan itu masih terbuka, jadi kalau nanti ada hal yang harus masuk kita masukan,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, modul yang terdiri dari PPPK itu nantinya akan diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. “Itu nanti kami berikan kepada siswa, kami berikan kalau itu berupa pengetahuan,” kata dia.

Muhadjir: Kemendikbud telah menyiapkan modul-modul untuk pendidikan kebencanaan

Sumber : <https://tirto.id/pentingkah-pendidikan-bencana-masuk-kurikulum-seperti-ide-jokowi-dcKT>

Koordinasi Pendidikan Belum Apik

LARASWATI ARIADNE ANWAR 27 Desember 2018



KOMPAS/LARAWATI ARIADNE ANWAR

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuran (paling kanan) menjelaskan pentingnya koordinasi antarlembaga terkait pendidikan dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan di Jakarta, Rabu (26/12/2018). Di sebelahnya, dari kiri ke kanan, adalah Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, peneliti Lakpesdam PBNU Muawanah, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sampoerna Nisa Felicia.

Contoh koordinasi yang buruk ada pada sistem zonasi, yang sejatinya baik untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, kebijakan ini multitafsir.

JAKARTA, KOMPAS – Minimnya koordinasi beserta ego sektoral pemerintah pusat, daerah, hingga ke level sekolah masih menjadi inti permasalahan pendidikan selama tahun 2018. Silang sengkabut koordinasi ini juga mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam proses pendidikan maupun penggunaan anggaran pendidikan di sekolah.

Hal ini mengemuka dalam diskusi “Catatan Akhir Tahun Pendidikan” yang diadakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta pada hari Rabu (26/12/2018). “Setiap pihak seolah merasa tersandera. Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengaku tidak memiliki wewenang mengatur daerah karena otonomi daerah, sementara pemerintah daerah mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pendidikan sehingga masih mengandalkan pemerintah pusat, adapun sekolah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dinilai buruk oleh dinas pendidikan,” kata Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sampoerna Nisa Felicia.

Salah satu bentuk koordinasi buruk ialah sistem zonasi. Menurut Nisa, sistem ini sejatinya

baik untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Akan tetapi, kebijakannya masih multitafsir di lapangan. Ia mencontohkan definisi zonasi yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Ada yang berdasarkan radius sekolah ke permukiman, besar wilayah kecamatan, hingga berdasarkan jumlah kelurahan.

Akibatnya, banyak siswa yang tidak mendapat sekolah karena rumah mereka jauh dari zona mana pun. Bisa juga meskipun mereka tinggal di dekat sekolah, populasi wilayah yang padat membuat kuota siswa baru cepat terisi. Hal ini juga ditambah dengan orangtua yang bersikeras anaknya harus masuk sekolah negeri dengan alasan prestise serta mutu pendidikan. "Ini menunjukkan skema peningkatan mutu sekolah tidak merata," tutur Nisa yang juga peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.

Kebijakan zonasi yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud 14/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga belum didukung oleh peraturan turunan di daerah. Sistem ini sejatinya untuk menampung keunikan permasalahan di setiap wilayah karena perbedaan geografis dan budaya lokal di Nusantara tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang bersifat kaku.

Nisa berpendapat, apabila zonasi belum bisa diterapkan secara optimal, lebih baik diterapkan di provinsi-provinsi yang sudah siap. Adapun provinsi lain diberi waktu untuk menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebijakan tersebut.

Belum transparan

Kurang koordinasi juga dirasakan pada level sekolah. Antara orangtua, guru, siswa, dan orangtua belum sepenuhnya membangun komunikasi yang terbuka dan efektif. "Pengalaman JPPI di lapangan mengungkapkan bahwa tidak semua guru mengetahui jumlah dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik dari Kemendikbud maupun dari pemda. Semua dikelola sendiri oleh kepala sekolah," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

Ia menjelaskan, belum semua sekolah memanfaatkan keberadaan komite sekolah untuk membahas penggunaan serta evaluasi dana BOS. Tanpa adanya persetujuan komite dan pengawasan, pemakaian dana BOS dikhawatirkan tidak tepat sasaran, contohnya malah membeli kebutuhan sekunder seperti perangkat komputer, sementara kebutuhan primer seperti ketersediaan ruang kelas, bangku dan meja, ataupun peningkatan kompetensi guru terabaikan.

Dari sisi PPDB, masyarakat juga mengeluhkan sistem daring yang membuat masyarakat tidak bisa memantau prosesnya. Tidak pernah ada penjelasan mengenai penerimaan ataupun penolakan calon siswa dari satu sekolah. Padahal, siswa tersebut memenuhi persyaratan administratif. "Tanpa koordinasi, tidak ada kepercayaan yang terbangun. Padahal, pendidikan dibangun berdasarkan kepercayaan," ujar Ubaid.

Tanpa adanya persetujuan komite dan pengawasan, pemakaian dana BOS dikhawatirkan tidak tepat sasaran, contohnya malah membeli kebutuhan sekunder seperti perangkat komputer, sementara kebutuhan primer seperti ketersediaan ruang kelas, bangku dan meja, ataupun peningkatan kompetensi guru terabaikan.

Minim anggaran

Koordinasi yang kurang baik juga tampak antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan. Peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama, Muawanah, menerangkan bahwa 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk pendidikan masih mencakup gaji guru. Porsi yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan sedikit.

Ia juga mencermati provinsi-provinsi masih mangkir mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. Dari 34 provinsi, hanya Riau yang mengalokasikan hampir 20 persen, yakni 19,9 persen. Namun, dari jumlah itu, ternyata sebanyak 11 persen digunakan oleh dinas pendidikan sebagai belanja tidak langsung.

“Artinya, mayoritas dana pendidikan habis untuk rapat-rapat dinas, lokakarya, dan pelatihan guru yang sistemnya tidak transparan serta tidak terukur perubahannya. Dana pendidikan yang dinikmati oleh siswa tidak sampai 10 persen,” tuturnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/12/27/koordinasi-pendidikan-belum-apik/>

JPPI : Keadilan Kebutuhan Pendidikan Anak Jakarta dengan Papua Berbeda

By DN - December 26, 2018



Majalahayah.com, Jakarta – Memasuki area sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 telah menjadi perbincangan hangat hingga membuat kisruh di masyarakat. Disampaikan oleh Ubaid Matraji sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) makna merata bukan berarti sama, namun harus berkeadilan.

“Keadilan bagi anak-anak Jakarta dengan anak-anak di Papua itu kebutuhannya berbeda. Di Papua lebih membutuhkan afirmasi, seperti jarak kesekolah masih jauh, guru hanya 1 orang, sekolahnya belum layak, kondisi seperti itu tidak bisa disamakan dengan Jakarta,” ujarnya saat ditemui di Bakoel Coffe, Jakarta Pusat (26/12/2018).

Menyatakan kebijakan sistem zonasi dinilai cukup berani, Nisa Felicia, selaku Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Sampoerna katakan bahwa saat dikoreksi ternyata belum ada filosofi yang jelas terkait sistem zonasi.

“Sistem zonasi ini merupakan langkah awal dari pemerataan pendidikan Indonesia, namun saat saya tanyakan ke orang Kemendikbud apa arti zonasi saja jawabannya berbeda-beda karena belum ada latarbelakang yang jelas. Oleh karena itu, jangan terburu-buru membuat sistem zonasi secara nasional,” tutur Nisa.

Naasnya, sambung Ubaid pemerintah masih berkeinginan kuat untuk mempertahankan sistem zonasi secara nasional

“Mereka bilang bahwa kalau mau masuk sekolah tidak perlu daftar. Langsung masuk saja ke sekolah terdekat. Padahal kita tau datanya masih amburadul. Ini menyangkut anak-anak Indonesia dan para orangtua yang menginginkan anaknya untuk bersekolah. Zonasi yang manual aja berantakan begini, apalagi diterapkan sistem seperti itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ubaid sarankan agar sistem zonasi difokuskan terlebih dahulu di Jakarta. Hal tersebut dikarenakan agar daerah lain mempunyai contoh terlebih dahulu.

“Biarkan Jakarta jadi contoh terlebih dahulu bagaimana cara pemerataan pendidikan sekolah, mulai koordinasi guru dengan komite sekolah, dengan dinas pendidikan, kalau sudah siap boleh di adakan secara nasional. Jangan pemerintah berpikir bahwa seklah itu seperti jakarta semua,” tukas Ubaid.

Sumber : <https://majalahayah.com/jppi-keadilan-kebutuhan-pendidikan-anak-jakarta-dengan-papua-berbeda/>

Tanpa Landasan Kuat Kebijakan Zonasi Rawan Dipolitisasi

Intan Yunelia • Rabu, 26 Dec 2018 14:10 WIB Sistem Zonasi News Peristiwa



Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University, Nisa Felicia, Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Kebijakan sistem zonasi pendidikan dinilai tak memiliki landasan dan filosofis yang kuat. Kebijakan ini rawan dipolitisasi di parlemen karena dianggap tidak populer.

“Ketika kebijakan tidak berlandaskan filosofi yang jelas maka bisa menjadi rentan di tangan politikus,” kata Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University, Nisa Felicia saat memaparkan diskusi Catatan Akhir Tahun Pendidikan di Bakoel Coffee, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.

Kebijakan zonasi yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat berpotensi dimanfaatkan segelintir politikus. Para politikus membutuhkan afirmasi dari publik untuk menolak kebijakan ini.

“Jika memang disuarakan terus-terusan maka bisa diberhentikan (zonasi), karena dianggap tidak populer dan politisi biasanya ingin kebijakan yang populer,” ujar Nisa.

Padahal kata Nisa, kebijakan sistem pendidikan seharusnya memiliki pengaruh yang berkesinambungan. Kemendikbud dalam hal ini harus menguatkan pondasi dan filosofi kebijakan zonasi.

“Nah ini yang menunjukkan betapa rentannya pendidikan di Indonesia, jika dia tidak memiliki landasan filosofi yang jelas,” tuturnya.

(CEU)

Sumber : <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/wkBDXBgN-tanpa-landasan-kuat-kebijakan-zonasi-rawan-dipolitisasi>

Kemendikbud Didesak Kaji Ulang Sistem Zonasi Sekolah



Sejumlah siswa didampingi wali siswa mengantre untuk mendaftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018). ANTARA FOTO/Maulana Surya

Oleh: Alfian Putra Abdi - 26 Desember 2018

Kemendikbud diminta mengkaji ulang kebijakan sistem zonasi sekolah yang diberlakukan dalam penerimaan siswa baru sejak 2017 lalu.

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan sistem zonasi bisa menimbulkan masalah baru karena kualitas sekolah di Indonesia belum merata.

“Jadi ketika [zonasi] diberlakukan secara nasional, kami melihat kualitas sekolah berbeda-beda. Tetapi, [zonasi] dipaksakan [berlaku] supaya orang bisa bersekolah di sekolah yang dekat,” kata Ubaid pada Rabu (26/12/2018), di Jakarta.

“Ketika ada sekolah dengan kualitas yang jelek, [misalnya] gurunya jarang masuk sehingga muridnya lebih banyak bermain, kemudian rumah saya dekat situ, masa tega memasukan anak ke sekolah itu,” dia melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut Ubaid, perlu dilakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu, untuk mengetahui sekolah mana saja yang kualitasnya sudah membaik, sebelum sistem zonasi diberlakukan. Menurut dia, saat ini sistem zonasi belum layak diberlakukan secara nasional.

“Bagaimana dengan yang di daerah, yang bisa berjam-jam dan berkilo-kilo [perjalanan siswa menuju sekolah terdekat dengan rumahnya],” ujarnya.

Baca juga: Kemdikbud Ingin ada Pemerataan Guru dengan Sistem Zonasi

Ubaid menilai pemerataan distribusi siswa melalui sistem zonasi yang dimaksud oleh pemerintah belum tepat, karena tidak menimbang dulu aspek lokal.

“Ini kebijakan cara berpikir orang Jakarta. Berkeadilan bagi anak di Jakarta dan Papua itu beda, karena anak-anak yang sekolah di Papua masih butuh afirmasi: jaraknya jauh, sekolahnya jelek, gurunya cuma satu. Jadi tidak bisa disamakan dengan Jakarta,” kata Ubaid.

Dia pun mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat proyek percontohan terlebih dahulu sebelum sistem zonasi diterapkan secara nasional. Minimal, kata Ubaid, sistem zonasi diterapkan pada tiga kota besar untuk percontohan, seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

“Ketika sudah berhasil, konsentrasinya pindah ke Jawa Tengah, misalnya. Kalau sudah bagus baru bisa zonasi [secara nasional],” kata Ubaid. “Tidak bisa pemerintah mengadakan pemerataan secara simsalabim, lalu dibuat zonasi.”

Sejak 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan sistem zonasi di PPDB. Kementerian mengklaim sistem zonasi diberlakukan tidak hanya untuk pemerataan akses peserta didik ke layanan pendidikan, tapi juga kualitas sekolah.

(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Alfian Putra Abdi

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Addi M Idhom

***JPPI meminta Kemendikbud tidak
terburu-buru menerapkan sistem zonasi
sekolah secara nasional***

Sumber : <https://tirto.id/kemendikbud-didesak-kaji-ulang-sistem-zonasi-sekolah-dcBY>

Nasional

Skema Zonasi PPDB Harus Sejalan Dengan Kualitas Pendidikan

Redaktur: Dani Tri Wahyudi

Rabu, 26 Desember 2018



KRITIS-Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji memberikan keterangannya di Jakarta. Foto: DHIKA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritisi penerapan skema zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Karena pemerintah cenderung memaksakan kebijakan itu dan selalu menimbulkan masalah.

Meski dalam evaluasi PPDB 2018 berjalan baik, namun masih menemui beberapa hambatan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk catatan akhir tahun pendidikan 2018, yang berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

“Sejak diberlakukan dua tahun zonasi ini menimbulkan masalah. Dan nampaknya pemerintah mengabaikannya. Jadi ketika diberlakukan secara nasional, kita melihat kualitas sekolah berbeda-beda,” ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Menurutnya, bila penerapan zonasi ini tetap dipaksakan sebagai upaya peserta didik bisa bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tanpa memikirkan kualitas sekolah tersebut tentu berdampak terhadap pola pembelajaran. Untuk wilayah yang kualitas pendidikannya sudah merata, tentu skema zonasi bisa diberlakukan.

”Kemudian rumah saya dekat situ, masa tega memasukan anak ke sekolah itu? Jadi harus diperbaiki dulu kualitas sekolah. Maka itu perlu ada pemetaan, mana wilayah yang kualitas sekolahnya merata dan mana yang belum,” jelas Ubaid Matraji. Kualitas pendidikan merata itu bukan berarti sama semua, melainkan harus berkeadilan. Artinya adil bagi peserta didik di Jakarta maupun daerah lainnya. Sebab itu, sistem zonasi perlu dikaji kembali. Karena kebijakan tersebut tidak mudah menjalankannya.

”Perlu dikaji dulu. Semacam piloting kota yang angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) sudah tinggi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Ketika sudah berhasil. Konsentrasinya pindah lagi ke Jawa Tengah misalnya. Kalau sudah bagus bisa zonasi,” ungkap Ubaid.

Menurutnya, Kemdikbud telah menetapkan 1.900 zonasi. Namun jumlah tersebut akan bertambah bahkan berkurang sesuai masukan dari kepala dinas pendidikan (kadisdik) dan pemerintah daerah/kota serta provinsi yang sejauh ini ditugaskan untuk mendata daya dukung pendidikan setiap zonasi. (dan)

Sumber : <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/26/159949/skema-zonasi-ppdb-harus-sejalan-dengan-kualitas-pendidikan>

JPPI Minta Sekolah Menyediakan Pendidikan Bencana



Pemandangan kawasan Kecamatan Sumur yang hancur diterjang gelombang tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 26 Desember 2018

“Mau tidak mau harus ada pembelajaran [bencana alam] di sekolah. Bagaimana kalau kita kedatangan bencana, apa yang akan kita lakukan,” kata Ubaid.

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah perlu serius dalam mempertimbangkan pendidikan bencana alam di tingkat sekolah. Hal tersebut dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang menjadi bagian dari ring of fire.

“Masuk kurikulum atau tidak, yang penting pendidikan bencana harus menjadi bagian dari situ [sekolah],” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji ketika ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/12/2018).

Menurut Ubaid, semua tergantung pemerintah, entah mau menjadikan pendidikan bencana alam sebagai pelajaran tematik atau hanya sekedar ekstrakurikuler saja. Yang pasti, Ubaid merasa perlu adanya pendidikan mengenai itu.

“Mau tidak mau harus ada pembelajaran [bencana alam] di sekolah. Bagaimana kalau kita kedatangan bencana, apa yang akan kita lakukan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuna beranggapan tidak mungkin,

apabila pendidikan bencana alam menjadi mata pelajaran di sekolah.

“Kalau jadi mata pelajaran mungkin berat, karena tidak semua orang ada perhatian ke arah itu. Di negara manapun juga tidak ada,” ujarnya ketika ditemui di tempat yang sama.

Popong lebih setuju jika pendidikan bencana alam dijadikan ekstrakurikuler saja. Tujuannya, agar hal tersebut lebih terfokus kepada orang-orang yang berminat saja, tanpa ada paksaan.

Lebih lanjut, Popong mengatakan sebetulnya pendidikan tentang bencana alam sudah ada namun tidak spesifik, yakni kegiatan kepramukaan.

“Sebetulnya pendidikan pramuka itu, secara mikirnya menolong orang yang kecelakaan. Secara makro untuk bencana. Walaupun penanganannya berbeda dengan BNPB,” ujarnya lagi.

Di dalam pramuka, menurut Popong, juga harus bisa ditekankan kembali prinsip menolong sesama yang memang membutuhkan pertolongan.

“Bukan cuma tali-temalnya saja yang penting. Tapi niat menolongnya juga penting,” ujarnya.

Baca juga artikel terkait TSUNAMI atau tulisan menarik lainnya Alfian Putra Abdi

(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Alfian Putra Abdi

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Alexander Haryanto

Popong lebih setuju jika pendidikan bencana alam dijadikan ekstrakurikuler saja.

Sumber : <https://tirto.id/jppi-minta-sekolah-menyediakan-pendidikan-bencana-dcDF>

JPPI Minta Pemerintah Cabut Izin Sekolah yang Ajarkan Paham Radikal



pelajar membubuhkan tanda tangan di spanduk tolak radikalisme dan terorisme saat deklarasi dan komitmen bersama menolak radikalisme dan terorisme, di Semarang, Jateng, Selasa (26/7). deklarasi diikuti ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, TNI, dan Polri. antara foto/r rekotomo/kye/16.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 26 Desember 2018

intoleran. Selain itu, 40,14 persen guru diketahui mempunyai opini radikal

“Maka tak heran jika seringkali ditemukan buku-buku ajar di sekolah, bahkan soal-soal ujian yang menjurus pada paham intoleran,” kata Ubaid.

Menurut dia, tindakan guru yang mengharamkan hormat pada bendera merah putih dan menyebut presiden sebagai thogut merupakan contoh sikap yang didasari paham radikalisme dan tidak sesuai dengan Pancasila.

“NKRI dan Pancasila itu sudah konsensus kita bersama, sejak negara ini merdeka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Ubaid menilai pemerintah harus bersikap tegas pada sekolah yang terbukti mengajarkan paham radikal. “Karena itu izin sekolah bisa saja dicabut, seandainya ada indikasi ke arah sana. Jangan sampai sudah ‘terbakar’, baru pada melek,” kata Ubaid.

(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Alfian Putra Abdi

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Addi M Idhom

“Jangan sampai sudah ‘terbakar’, baru pada melek,” kata Ubaid.

Sumber : <https://tirto.id/jppi-minta-pemerintah-cabut-izin-sekolah-yang-ajarkan-paham-radikal-dcDv>

JPPI: Pemda Belum Serious Implementasikan Wajib Belajar 12 Tahun

Deni Muhtarudin Kamis, 27 Desember 2018 15:24 WIB Kaleidoskop 2018



Suasana belajar mengajar di sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (20/12/2018). Sekolah yang didirikan sejak tahun 2002 merupakan alternatif pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah untuk menuntut ilmu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Program wajib belajar 12 tahun dinilai hanya jalan di tempat alias mandek.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa di 2018 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) belum tampak serius dalam mengimplementasikan program Wajib Belajar 12 Tahun tersebut.

“Wajar 12 tahun masih berhenti pada tataran regulasi, tapi minim implementasi. Ini dikarenakan minimnya kepedulian pemerintah daerah,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Padahal, Ubaid menjelaskan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp444 triliun di tahun 2018, 60 persennya ditujukan untuk transfer ke daerah. Tapi menurut Ubaid, yang terjadi di daerah adalah anggaran tersebut banyak dikorupsi daripada untuk perbaikan kualitas Pendidikan.

“Wajar 12 tahun masih dijadikan jargon kampanye pemda tapi belum terlaksana dengan baik, setidaknya ini tercermin di lokasi penelitian JPPI tahun 2018, yaitu di Banten, Jawa Timur dan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Selain faktor dukungan anggaran dari pemerintah provinsi yang kurang dari 20 persen, Ubaid menyebutkan, kendala lain yang terjadi di lapangan adalah ketersediaan infrastruktur sekolah, jumlah guru yang tersedia dan kesenjangan pendidikan yang tidak merata.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber : <https://akurat.co/news/id-453473-read-jppi-pemda-belum-serius-implementasikan-wajib-belajar-12-tahun>

JPPI: Pemerintah Belum Serius Sikapi Wajib Belajar 12 Tahun



Seorang siswa bersiap mengikuti upacara bendera saat hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Menteng 02, Jakarta, Senin (16/7/2018). [tirto.id/Andrey Gromico](http://tirto.id/Andrey-Gromico)

Oleh: Alfian Putra Abdi - 27 Desember 2018

Salah satu ketidakseriusan pemerintah terkait tidak maksimalnya implementasi jargon Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun yang terhenti di daerah.

tirto.id -

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah belum bisa serius menyikapi persoalan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya terkait tidak maksimalnya implementasi jargon Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun yang terhenti di daerah.

“Wajar masih berhenti pada tataran regulasi, minim implementasi,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Ubaid menilai, ketidakseriusan tersebut terlihat dari minimnya kepedulian pemerintah daerah. Padahal menurutnya, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun di tahun 2018, 60

persennya dialokasikan untuk daerah.

“Tapi apa yang terjadi? Anggaran tersebut banyak dikorupsi daripada untuk perbaikan kualitas pendidikan,” kata dia.

Sehingga Ubaid menilai Wajar masih sebatas jargon mati saja. Setidaknya itu yang ia lihat dari tiga wilayah yang menjadi objek penelitiannya di Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau pada tahun 2018.

“Kendala yang terjadi di lapangan adalah faktor dukungan anggaran dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) yang kurang dari 20 persen, ketersediaan infrastruktur sekolah, jumlah guru yang tersedia, dan kesenjangan pendidikan tidak merata,” ucapnya lagi.

Karenanya, Ubaid mengusulkan perlu adanya amandemen UU sidiknas No. 20 tahun 2003 dan UU guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 demi mempercepat Wajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pengajar.

“Sebab regulasi tersebut sudah ketinggalan zaman. Banyak perkembangan di dunia pendidikan yang harus direspon dan diadaptasi di Indonesia,” paparnya.

Reporter: Alfian Putra Abdi

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Dewi Adhitya S. Koesno

“Infrastruktur sekolah, jumlah guru yang tersedia, dan kesenjangan pendidikan tidak merata.”

Sumber : <https://tirto.id/jppi-pemerintah-belum-serius-sikapi-wajib-belajar-12-tahun-dcES>

Catatan Akhir Tahun Bidang Pendidikan Versi JPPI

Deni Muhtarudin Kamis, 27 Desember 2018 17:04 WIB Kaleidoskop 2018



Suasana belajar mengajar di sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (20/12/2018). Sekolah yang didirikan sejak tahun 2002 merupakan alternatif pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah untuk menuntut ilmu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dunia pendidikan Indonesia dinilai masih banyak sekali kekurangannya. Mulai dari program wajib belajar 12 tahun yang jalan di tempat, maraknya korupsi di sektor pendidikan, sekolah terpapar intoleransi dan radikalisme, sistem yang tidak tepat, hingga pelecehan atau kekerasan seksual.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pun mencoba untuk mengurai permasalahan-permasalahan tersebut, dengan rekomendasi yang mungkin saja bisa dijalankan oleh pemerintah.

Program Wajib Belajar 12 Tahun Mandek

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa di 2018 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) belum tampak serius dalam mengimplementasikan program Wajib Belajar 12 Tahun tersebut.

“Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun masih berhenti pada tataran regulasi, tapi minim implementasi. Ini dikarenakan minimnya kepedulian pemerintah daerah,” ungkapinya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Padahal, Ubaid menjelaskan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp444 triliun di tahun 2018, 60 persennya ditujukan untuk transfer ke daerah. Tapi menurut Ubaid, yang terjadi di daerah adalah anggaran tersebut banyak dikorupsi daripada untuk perbaikan kualitas Pendidikan.

“Wajar 12 tahun masih dijadikan jargon kampanye pemda tapi belum terlaksana dengan baik, setidaknya ini tercermin di lokasi penelitian JPPI tahun 2018, yaitu di Banten, Jawa Timur dan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ubaid menyebutkan, kendala yang terjadi di lapangan adalah faktor dukungan anggaran dari pemerintah provinsi yang kurang dari 20 persen, ketersediaan infrastruktur sekolah, jumlah guru yang tersedia dan kesenjangan pendidikan yang tidak merata.

Dana Pendidikan Jadi Lahan Korupsi

Di penghujung 2018, Ubaid menyampaikan, rakyat Indonesia dipertontonkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi dana pendidikan. Dana alokasi khusus yang harusnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, ternyata dibuat bancakan para pihak yang terkait di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

“Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta, yaitu korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah. Sepanjang tahun 2018, banyak juga kepala sekolah yang tersandung kasus korupsi dana BOS,” katanya.

Bahkan, Ubaid menuturkan, berdasarkan keterangan KPK, bidang pendidikan merupakan sektor yang paling banyak terjadi korupsi, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Berdasarkan pantauan JPPI sendiri, menurut Ubaid, dana pendidikan yang rawan dikorupsi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sarana prasarana sekolah, infrastruktur sekolah, buku dan pungutan liar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Modusnya juga beragam, mulai dari penggelapan, penggelembungan, pemotongan, pungli, hingga penyalahgunaan anggaran proyek fiktif,” ungkapnya.

Sekolah Terpapar Intoleransi dan Radikalisme

Ubaid menilai, pelan tapi pasti, virus intoleransi dan radikalisme mewabah di institusi pendidikan. Menurut Ubaid, sudah banyak sekolah di Indonesia yang terpapar kedua hal tersebut.

“Tahun ini, publik dikejutkan dengan pawai TK bercadar dengan membawa replika senjata,” ujarnya.

Lalu, Ubaid menyampaikan, diskursus intoleransi dan radikalisme di sekolah kembali menuai perdebatan. Bahkan ternyata, menurut Ubaid, benar adanya bahwa sekolah menjadi salah satu tempat persemaian paham intoleransi.

Ubaid menjelaskan, berdasarkan survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, diperoleh fakta bahwa guru sekolah/madrasah sejak jenjang TK hingga SMA memiliki sikap intoleran dan radikal yang tinggi.

“Maka tak heran jika seringkali ditemukan buku-buku ajar di sekolah, bahkan soal-soal ujian yang menjurus para paham intoleran,” katanya.

PPDB yang Masih Kisruh

Setiap tahun, Ubaid mengungkapkan, PPDB selalu saja membuat gaduh. Menurut Ubaid, kebijakan zonasi menjadi faktor yang membuat kisruh PPDB. Tahun ini, kisruh dipicu oleh mekanisme pendaftaran daring yang tidak transparan.

“Banyak komplain dari masyarakat yang tidak terima, akibatnya, anaknya tidak diterima di sekolah padahal masuk area zonasi,” ungkapnya.

Selain itu, Ubaid mengatakan, masih banyak kasus jual beli kursi dan juga manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu. Yang juga memprihatinkan saat PPDB 2018, menurut Ubaid, adalah tidak ada kuota afirmasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Ubaid menegaskan, kendala akses yang masih terjadi hingga hari ini adalah kesempatan sekolah bagi kelompok yang tereksklusi. Peralnya, di antara anak-anak Indonesia, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus.

“Banyak orang tua dari ABK enggan bersekolah di sekolah selain SLB (Sekolah Luar Biasa), karena tidak ada komitmen dari pihak sekolah. Mereka juga menyayangkan, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak memberikan kuota afirmasi bagi kelompok difabel,” ujarnya.

Sekolah Vokasi di Persimpangan Jalan

Ubaid menilai, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang seharusnya mencetak lulusan langsung kerja, ternyata malah sebaliknya, yakni SMK malah mencetak pengangguran.

Di tahun 2016, menurut Ubaid, Presiden sudah menginstruksikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 untuk revitalisasi SMK, tapi nyatanya hingga tahun 2018, belum ada perkembangan yang menggembirakan.

“Pemerintah sendiri masih bingung bagaimana menyelesaikan urusan ini,” ujarnya.

Ubaid menyebutkan, setidaknya masalah lulusan SMK ini sangat terkait dengan beberapa masalah, yakni kurikulum yang masih konvensional, kualitas guru yang rendah, fasilitas yang minim dan belum ada kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Kekerasan dan Pelecehan Seksual Masih Marak di Sekolah

Ubaid mengungkapkan, kasus yang paling membetot perhatian publik adalah yang menimpa Baiq Nuril, seorang mantan guru honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurut Ubaid, kasus Baiq Nuril menjadi salah satu kasus yang menunjukkan benang kusut penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah.

“Kasus semacam ini kerap diabaikan dan seakan bukan masalah serius. Padahal, efek yang ditimbulkannya berakibat sangat signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak-anak di sekolah,” ungkapnya.

Ubaid mengatakan, rendahnya penilaian dan kepercayaan diri serta kecemasan sangat potensial mereka alami, hingga bukan tidak mungkin, performa di institusi pendidikan merosot dari hari ke hari.

“Jenis pelecehan seksual yang sering terjadi dan dilaporkan di sekolah antara lain sentuhan fisik yang tak diinginkan, komentar berkonten seksual, menunjukkan media berkonten seksual, mengamati secara seksual bagian tubuh privat orang lain,” katanya.

JPPI pun memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan di atas, yakni:

1. Untuk mempercepat Wajib Belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas guru, perlu adanya amandemen UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Sebab, regulasi tersebut sudah ketinggalan zaman. Banyak perkembangan di dunia pendidikan yang harus direspon dan diadaptasi di Indonesia.

2. Dana di sekolah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Sekolah harus mampu menggunakan aplikasi online dalam rangka memudahkan berbagai pihak dalam mengakses informasi pengelolaan dana di sekolah.
3. Penguatan komite sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Tidak hanya pada monitoring, tapi melibatkan mereka sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Ini untuk menyeimbangkan peran kepala sekolah dan dinas pendidikan yang terlalu dominan.
4. Mengarusutamakan pendidikan karakter, bukan akademik semata. Banyak sekolah-sekolah yang hanya menekankan muatan akademik dan mengesampingkan pendidikan karakter. Ini tidak boleh terjadi. Guru-guru harus mampu menggunakan Kurikulum 2013 sebagai bagian dari pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran.
5. Sistem zonasi dalam PPDB sebaiknya tidak diberlakukan secara nasional, tapi dilakukan dengan model piloting system. Daerah yang sudah dinyatakan siap, boleh memberlakukan model zonasi. Jadi, fokus utama saat ini adalah perbaikan mutu sekolah dan pemerataan sebaran guru berkualitas.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber : <https://akurat.co/news/id-453717-read-catatan-akhir-tahun-bidang-pendidikan-versi-jppi>

Nasional

Legislator Setuju PMP Diterapkan

Redaktur: Ahmad Nugraha

Kamis, 27 Desember 2018



POLITISI SENIOR - Popong Otje Djundjuna memberikan keterangannya dalam diskusi publik bertajuk catatan akhir tahun pendidikan 2018 di Cikini, Jakarta Pusat. FOTO: Dhika Alam Noor

INDOPOS.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi X Popong Otje Djundjuna merespon positif usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengaktifkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila pada jenjang sekolah. Hal ini dianggap mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

“Saat reformasi PMP dihilangkan. Hanya karena dianggap produk orde baru. Ini kesalahan fatal. PMP tidak bisa dihilangkan dimana dalam Pancasila itu komplit lahir batin. Ada Ketuhanan yang Maha Esa kan jelas” ujar Popong Otje Djundjuna di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (26/12).

Maka tak heran, menurutnya bila remaja saat ini banyak yang tidak hafal poin Pancasila. Bahkan lupa dengan makna Pancasila sendiri. Sebab itu, pendidikan Pancasila merupakan bagian penting sebagai upaya mencecerdeaskan kehidupan bangsa.

Bahkan penghapusan mata pelajaran tersebut juga dipertanyakan, lantaran muatan dalam mata pelajaran itu mengandung nilai Pancasila yang pastinya dapat dipertahankan dan menjadi bagian dalam kehidupan, khususnya lingkungan sekolah.

“Jangan salahkan anak-anak saat reformasi kemudian itu menjadi remaja apalagi melaksanakan hafal juga tidak Pancasila karena dihilangkan ideologi negara dihilangkan. Bayangkan hanya karena itu dianggap produk orde baru. Padahal Pancasila itu dilahirkan 18 Agustus 1945. Itu

adalah prodak dari para pendiri negara kita,” jelas anggota DPR fraksi Golkar itu.

Terlebih komisi X DPR mendukung sepenuhnya dan meminta agar pendidikan moral pancasila segera diterapkan kembali pada dunia pendidikan. Mengingat pentingnya hal tersebut mak generasi muda sebagai penerus bangsa perlu menanamkan nilai budaya bangsa yang diyakini kebenarannya.

Nilai yang dimaksud adalah terkandung dalam sila pancasila yang meliputi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi bangsa itu mengajarkan gagasan dan keyakinan sebagai acuan tingkah laku masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

“Bayangkan kemanusiaan yang adil dan beradabnya dihilangkan jadi banyak garong, banyak preman. Walaupun masih wacana kami komisi X Dpr pasti porsir harus. kalau bisa secepatnya ya tentunya tahun ajaran baru,” ungkap Popong.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, mendukung usulan penerapan kembali mata pelajaran moral pancasila sehingga kawula muda saat ini bisa memaknai sepenuhnya nilai pancasila.

“Sangat positif kami mendukung. PGRI mendukung menghidupkan kembali pendidikan moral pancasila. dengan diperbaharukan dengan keadaan yang kekinian tidak doktrinisasi dan guru perlu diberi pemahaman dan pelatihan tentang hal tersebut. Makanya diperlukan menghidupkan kembali dilaksanakan dari kehidupan sehari hari,” tukas Unifah Rosyidi. (dan)

Sumber : <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/27/160015/legislator-setuju-pmp-diterapkan>

Kemendikbud: Angka Kelulusan dari Tahun ke Tahun Menurun

Muslimin Kamis, 27 Desember 2018 21:55 WIB



Siswa belajar di ruang kelas yang berada di rumah gurunya yang diubah menjadi sekolah gratis sementara yang menampung 700 siswa, di Taiz, Yaman 18 Oktober 2018. | REUTERS

AKURAT.CO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat bahwa angka kelulusan program wajib belajar 12 tahun mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Angka kelulusan dari tahun ke tahun mengalami penurunan,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa Pemerintah belum serius mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan, program wajib belajar 12 tahun ini hanya ada dalam tataran aturan dan regulasi. Akan tetapi implementasinya tidak ada.

“Ini karena minimnya kepedulian pemerintah daerah. Padahal total anggaran pendidikan sekitar 444 triliun di tahun 2018, 60 persennya ditujukan untuk ditransfer di daerah,” ujarnya.

Ia menduga bahwa anggaran tersebut banyak dikorupsi daripada untuk perbaikan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, ia mengatakan, wajib belajar 12 tahun hanya jargon kampanye pemerintah daerah.[]

Editor: Arief Munandar

Sumber : <https://akurat.co/news/id-454061-read-kemendikbud-angka-kelulusan-dari-tahun-ke-tahun-menurun>

JPPI Menilai Konsep HOTS Belum Diajarkan Secara Optimal

Kamis 27 Dec 2018 17:02 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Ujian Nasional

Foto: Republika/ Yasin Habibi

Ketidakefektifan itu disebabkan oleh mutu para pendidik yang masih rendah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, proses ajar yang mengacu pada cara berpikir dengan nalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) di berbagai daerah masih belum merata dan optimal. JPPI menyimpulkan ketidakefektifan itu disebabkan oleh mutu para pendidik yang masih rendah, bahkan belum paham tentang konsep HOTS.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matriaji mengungkapkan, dari hasil penelitiannya masih banyak daerah yang belum mengintervensi dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu para pendidik. Akibatnya, mutu pendidik di berbagai daerah masih rendah.

“Misalnya kami kemarin melakukan penelitian di Banten, Jawa Timur dan Kepulauan Riau (Kepri) anggaran untuk peningkatan kualitas guru itu tidak ada yang lebih dari satu persen. Anggaran

pendidikan yang 20 persen di lokal banyak yang dipakai gaji guru, infrastruktur, atau rapat. Kalau alokasi 1 persen kita berharap apa untuk guru?” Ungkap Ubaid saat dihubungi Republika, Kamis (27/12).

Untuk itu, Ubaid juga memprediksi pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2019 masih akan menimbulkan kegaduhan. Mengingat, soal-soal UN tahun 2019 bakal menyajikan soal HOTS.

Ubaid bahkan mengibaratkan, kebijakan pemerintah untuk menyajikan soal HOTS dalam Ujian Nasional seperti ‘obsesi tanpa aksi’. Dia menegaskan, materi dan cara berpikir bernalar tinggi (HOTS) sangat penting bagi perkembangan otak anak. Untuk itu seharusnya ada upaya strategis pemerintah dalam menguatkan materi ajar HOTS.

“Soal HOTS ini sebenarnya hanya keinginan dari pemerintah pusat orang Jakarta yang ingin dinasionalkan. HOTS itu juga perkara penting jadi bagaimana HOTS ini dikuatkan di sekolah-sekolah,” kata Ubaid.

Sementara itu, Ubaid juga mempertanyakan kajian ilmiah yang dijadikan dasar pemajuan jadwal UN tahun 2019. Karena menurut dia, dengan dimajukannya jadwalnya harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam hal infrastruktur dan lainnya. Terlebih persiapan UN Berbasis Komputer (UNBK) yang mana perlu menyiapkan jaringan, komputer dan lain-lain.

“Infrastruktur atau alat persiapan UNBK yang menunjang itu tidak dibangun, sehingga tidak sesuai antara keinginan dan kebutuhan yang ada dilapangan. Dan ini lagi-lagi korbannya adalah murid,” tegas Ubaid.

Sebelumnya, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, waktu pelaksanaan UN 2019 akan bergeser ke depan dibandingkan tahun 2018. UN tahun 2018 akan dimulai pada bulan April, sedangkan UN tahun 2019 dimulai pada bulan Maret. Dia berdalih, pergeseran ini karena menyesuaikan waktu puasa Ramadhan yang diproyeksikan mulai tanggal 5 Mei 2019.

UN SMK/MAK tahun 2019, terus Bambang, akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 Maret 2019, sedangkan UN SMA/MA pada tanggal 1,2, 4, dan 8 April 2019. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019.

“Kalau UN SMP/MTs pada tanggal 22-25 April 2019, sedangkan UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019,” jelas dia.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/12/27/pke3w8335-jppi-menilai-konsep-hots-belum-diajarkan-secara-optimal>

Kemendikbud Akui Banyak Guru Salah Persepsi Terkait HOTS

Kamis 27 Des 2018 19:44 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Foto :

Republika/Prayogi

Sejumlah peserta mengerjakan soal ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) / Ilustrasi

Banyak guru yang berasumsi soal-soal HOTS adalah soal yang rumit dan sulit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui masih banyak guru yang salah persepsi terkait konsep ajar bernalar tinggi atau High Order Thinking School (HOTS). Selain itu, masih banyak juga guru yang berasumsi soal-soal HOTS adalah soal yang rumit dan sulit.

“Masalah dibanyak tempat, guru masih mispersepsi terhadap HOTS. Kadang-kadang dipersepsikan HOTS itu identik dengan sulit, tetapi sesungguhnya HOTS itu hanya memerlukan kreatifitas guru untuk membuat anak-anak itu bernalar dalam memecahkan soal,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno usai Taklimat media kilasan kinerja 2018 Kemendikbud di Jakarta, Kamis (27/12).

Totok menerangkan, soal-soal HOTS bukan berarti soal yang sulit. Karena pada dasarnya HOTS

adalah bagaimana cara para guru membuat kebaruan-kebaruan dalam proses belajar serta bagaimana guru melatih daya nalar serta kritis siswa.

Untuk itu, menurut Totok, selama ini pun Kemendikbud telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman para guru terkait HOTS. Salah satunya dengan melakukan Aksi for School yang juga menyelenggarakan pelatihan dan pengenalan terhadap soal-soal HOTS.

“Pada aksi itu banyak contoh soal HOTS buatan guru yang sudah dilatih yang jadi inspirasi bagi guru-guru lain (yang mispersepsi). Dari soal yang dilatihkan tadi para guru juga bisa melatih kan soal lagi itu ke murid di kelas,” ungkap Totok.

Sementara itu, sebelumnya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, proses ajar yang mengacu pada cara berpikir dengan nalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) di berbagai daerah masih belum merata dan optimal. JPPI menyimpulkan ketidakefektifan itu disebabkan oleh mutu para pendidik yang masih rendah, bahkan belum paham tentang konsep HOTS.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matriaji mengungkapkan, dari hasil penelitiannya masih banyak daerah yang belum mengintervensi dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu para pendidik. Alhasil, mutu pendidik di berbagai daerah masih rendah.

“Misalnya kami kemarin melakukan penelitian di Banten, Jawa Timur dan Kepulauan Riau (Kepri) anggaran untuk peningkatan kualitas guru itu tidak ada yang lebih dari satu persen. Anggaran pendidikan yang 20 persen di lokal banyak yang dipakai gaji guru, infrastruktur, atau rapat. Kalau alokasi 1 persen kita berharap apa untuk guru?” Ungkap Ubaid saat dihubungi Republika, Kamis (27/12).

Untuk itu, Ubaid juga memprediksi pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2019 masih akan menimbulkan kegaduhan. Mengingat, soal-soal UN tahun 2019 bakal menyajikan soal HOTS.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/12/27/pkebep335-kemendikbud-akui-banyak-guru-salah-persepsi-terkait-hots>

JPPI Sebut Dana Pendidikan Jadi Lahan Korupsi

Deni Muhtarudin Kamis, 27 Desember 2018 16:11 WIB Kaleidoskop 2018



Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menggelar konferensi pers terkait OTT di Kabupaten Cianjur, Rabu (12/12) | AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Dana pendidikan yang harusnya digunakan untuk kemaslahatan para murid di sekolah, justru jadi bancakan para oknum tak bertanggungjawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, saat menanggapi sejumlah kasus korupsi di sektor pendidikan yang ditangani oleh KPK.

Di penghujung 2018, Ubaid menyampaikan, rakyat Indonesia dipertontonkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Ubaid mengungkapkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harusnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, ternyata dibuat bancakan para pihak terkait, seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

“Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta, yaitu korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah. Sepanjang tahun 2018, banyak juga kepala sekolah yang tersandung kasus korupsi dana BOS,”

ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Bahkan, Ubaid menuturkan, berdasarkan keterangan KPK, bidang pendidikan merupakan sektor yang paling banyak terjadi korupsi, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan pantauan JPPI sendiri, lanjut Ubaid, dana pendidikan yang rawan dikorupsi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sarana prasarana sekolah, infrastruktur sekolah, buku dan pungutan liar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Modusnya juga beragam, mulai dari penggelapan, penggelembungan, pemotongan, pungli, hingga penyalahgunaan anggaran proyek fiktif,” ujarnya.

Editor: Ridwansyah Rakhman

Sumber : <https://akurat.co/news/id-453577-read-jppi-sebut-dana-pendidikan-jadi-lahan-korupsi>

JPPI Sebut Sekolah Ramah Anak Belum Maksimal Dikelola



Murid-murid SD Pertiwi Makassar meneriakkan yel-yel anti kekerasan terhadap anak pada pencaanangan Gerakan Anak Sebagai Agen Perubahan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/10). Sebanyak 125.000 anak menjadi Agen Perubahan sebagai pelopor upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini. ANTARA FOTO/Dewi Fajriani/aww/16.

Oleh: Alfian Putra Abdi - 28 Desember 2018

“Kasus Baiq Nuril seakan menampar muka pendidikan kita. Betapa kuatnya kepala sekolah dan tidak berdayanya komunitas sekolah. Harusnya semua punya peran yang balance.”

tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merasa perlu ada pembenahan tata kelola di sekolah. Hal ini teretus setelah Komisi Pelayanan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan bidang pendidikan di tahun 2018.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai selama ini sekolah menjadi wilayah yang dikuasai hanya oleh kepala sekolah. Hal tersebut, menurutnya, perlu juga dibenahi dan membuat peningkatan kualitas sekolah menjadi tidak baik.

“Kasus Baiq Nuril seakan menampar muka pendidikan kita. Betapa kuatnya kepala sekolah dan tidak berdayanya komunitas sekolah. Harusnya semua punya peran yang balance,” ujarnya pada Tirto, Jumat (28/12/2018).

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana yang diamanatkan pada Intruksi Presiden No.01 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Hidup Sehat hingga saat ini dinilai belum berjalan maksimal karena implementasi yang loyo sehingga SRA belum bisa menjadi gerakan nasional.

“Yang mau mengadopsi ya silakan. Yang tidak tertarik dengan program itu, ya tidak. Bahkan banyak sekolah yang tidak tahu apa itu program sekolah ramah anak,” paparnya.

Sepanjang tahun 2018, KPAI mencatat ada 445 kasus bidang pendidikan, yang meliputi kasus kekerasan sebanyak 228, kasus tawuran pelajar 144 kasus, dan kasus kebijakan mencapai 73 kasus.

Oleh karena itu, KPAI juga berharap Kemdikbud, Kemenag, dan dinas-dinas terkait lebih memaksimalkan kembali program SRA yang selama ini belum maksimal.

“Jumlah SRA baru sekitar 11 ribu sekolah dan pesantren. Diharapkan SRA dapat menurunkan kekerasan di lingkungan sekolah,” ujar Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantornya, pada Kamis (27/12/2018).

Reporter: Alfian Putra Abdi

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Nur Hidayah Perwitasari

Sumber : <https://tirto.id/jppi-sebut-sekolah-ramah-anak-belum-maksimal-dikelola-dclg>

Koordinasi Pendidikan Belum Apik

LARASWATI ARIADNE ANWAR 27 Desember 2018



KOMPAS/LARAWATI ARIADNE ANWAR

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan (paling kanan) menjelaskan pentingnya koordinasi antarlembaga terkait pendidikan dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan di Jakarta, Rabu (26/12/2018). Di sebelahny, dari kiri ke kanan, adalah Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, peneliti Lakpesdam PBNU Muawanah, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sampoerna Nisa Felicia.

Contoh koordinasi yang buruk ada pada sistem zonasi, yang sejatinya baik untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, kebijakan ini multitafsir.

JAKARTA, KOMPAS – Minimnya koordinasi beserta ego sektoral pemerintah pusat, daerah, hingga ke level sekolah masih menjadi inti permasalahan pendidikan selama tahun 2018. Silang sengkabut koordinasi ini juga mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam proses pendidikan maupun penggunaan anggaran pendidikan di sekolah.

Hal ini mengemuka dalam diskusi “Catatan Akhir Tahun Pendidikan” yang diadakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta pada hari Rabu (26/12/2018). “Setiap pihak seolah merasa tersandera. Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengaku tidak memiliki wewenang mengatur daerah karena otonomi daerah, sementara pemerintah daerah mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pendidikan sehingga masih mengandalkan pemerintah pusat, adapun sekolah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dinilai buruk oleh dinas pendidikan,” kata Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sampoerna Nisa Felicia.

Salah satu bentuk koordinasi buruk ialah sistem zonasi. Menurut Nisa, sistem ini sejatinya

baik untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Akan tetapi, kebijakannya masih multitafsir di lapangan. Ia mencontohkan definisi zonasi yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Ada yang berdasarkan radius sekolah ke permukiman, besar wilayah kecamatan, hingga berdasarkan jumlah kelurahan.

Akibatnya, banyak siswa yang tidak mendapat sekolah karena rumah mereka jauh dari zona mana pun. Bisa juga meskipun mereka tinggal di dekat sekolah, populasi wilayah yang padat membuat kuota siswa baru cepat terisi. Hal ini juga ditambah dengan orangtua yang bersikeras anaknya harus masuk sekolah negeri dengan alasan prestise serta mutu pendidikan. "Ini menunjukkan skema peningkatan mutu sekolah tidak merata," tutur Nisa yang juga peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.

Kebijakan zonasi yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud 14/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga belum didukung oleh peraturan turunan di daerah. Sistem ini sejatinya untuk menampung keunikan permasalahan di setiap wilayah karena perbedaan geografis dan budaya lokal di Nusantara tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang bersifat kaku.

Nisa berpendapat, apabila zonasi belum bisa diterapkan secara optimal, lebih baik diterapkan di provinsi-provinsi yang sudah siap. Adapun provinsi lain diberi waktu untuk menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebijakan tersebut.

Belum transparan

Kurang koordinasi juga dirasakan pada level sekolah. Antara orangtua, guru, siswa, dan orangtua belum sepenuhnya membangun komunikasi yang terbuka dan efektif. "Pengalaman JPPI di lapangan mengungkapkan bahwa tidak semua guru mengetahui jumlah dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik dari Kemendikbud maupun dari pemda. Semua dikelola sendiri oleh kepala sekolah," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

Ia menjelaskan, belum semua sekolah memanfaatkan keberadaan komite sekolah untuk membahas penggunaan serta evaluasi dana BOS. Tanpa adanya persetujuan komite dan pengawasan, pemakaian dana BOS dikhawatirkan tidak tepat sasaran, contohnya malah membeli kebutuhan sekunder seperti perangkat komputer, sementara kebutuhan primer seperti ketersediaan ruang kelas, bangku dan meja, ataupun peningkatan kompetensi guru terabaikan.

Dari sisi PPDB, masyarakat juga mengeluhkan sistem daring yang membuat masyarakat tidak bisa memantau prosesnya. Tidak pernah ada penjelasan mengenai penerimaan ataupun penolakan calon siswa dari satu sekolah. Padahal, siswa tersebut memenuhi persyaratan administratif. "Tanpa koordinasi, tidak ada kepercayaan yang terbangun. Padahal, pendidikan dibangun berdasarkan kepercayaan," ujar Ubaid.

Tanpa adanya persetujuan komite dan pengawasan, pemakaian dana BOS dikhawatirkan tidak tepat sasaran, contohnya malah membeli kebutuhan sekunder seperti perangkat komputer, sementara kebutuhan primer seperti ketersediaan ruang kelas, bangku dan meja, ataupun peningkatan kompetensi guru terabaikan.

Minim anggaran

Koordinasi yang kurang baik juga tampak antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan. Peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muawanah, menerangkan bahwa 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk pendidikan masih mencakup gaji guru. Porsi yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan sedikit.

Ia juga mencermati provinsi-provinsi masih mangkir mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. Dari 34 provinsi, hanya Riau yang mengalokasikan hampir 20 persen, yakni 19,9 persen. Namun, dari jumlah itu, ternyata sebanyak 11 persen digunakan oleh dinas pendidikan sebagai belanja tidak langsung.

“Artinya, mayoritas dana pendidikan habis untuk rapat-rapat dinas, lokakarya, dan pelatihan guru yang sistemnya tidak transparan serta tidak terukur perubahannya. Dana pendidikan yang dinikmati oleh siswa tidak sampai 10 persen,” tuturnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/12/27/koordinasi-pendidikan-belum-apik/>

Harnas.co - Kamis, 22 November 2018 04:00

Kasus Baiq Nuril, Kemendikbud Dinilai Abai



Peserta aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang, Minggu (18/11/2018). (ANTARA FOTO | FENY SELLY)

Kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun sangat mencoreng dunia pendidikan di Indonesia.

JAKARTA (HN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu menjadikan kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun -mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)-sebagai momentum untuk melakukan pembenahan. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Menteri Muhadjir Effendy ini dinilai masih mengabaikan prosedur baku dalam merespon dan menangani kasus pelecehan seksual dalam dunia pendidikan di Indonesia.

“Padahal pelecehan seksual bukannya kasus pertama di lingkup pendidikan, sistem atau tata kelola di sekolah tidak sampai mengantisipasi kasus ini,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (21/11).

Baiq Nuril terseret kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setelah dia merekam pembicaraannya dengan H Muslim-saat masih Kepala SMAN 7 Mataram-. Pembicaraan itu soal cerita hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Nuril merekam percakapan tersebut demi melindungi diri serta bukti bahwa dia tidak memiliki hubungan khusus dengan pelaku. Namun, Nuril dilaporkan H Muslim karena dituduh menyebarkan rekaman tersebut.

Pengadilan Negeri Mataram (PN) menyatakan Baiq Nuril bukan pihak yang mendistribusikan rekaman percakapan asusila. Namun, perkara ini berujung kasasi ke MA. Dalam putusannya, MA memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Sejumlah kalangan keberatan dan memprotes putusan MA karena dinilai mengabaikan fakta sidang PN Mataram. Kejaksaan Agung akhirnya menunda eksekusi terdakwa Baiq Nuril Maknun terkait dugaan tindak pidana UU ITE. Hal ini berdasar pertimbangan persepsi keadilan.

Ubaid menjelaskan, Kemendikbud bagaimanapun harus bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di dunia pendidikan Tanah Air. Menurut dia, kasus yang menyeret Baiq Nuril sangat mencoreng dunia pendidikan di Indonesia dan merupakan lampu merah atau menjadi peringatan bagi pemerintah.

“Kemendikbud harus melakukan pembelaan terhadap korban pelecehan seksual khususnya di wilayah pendidikan. Sebab, jika perilaku tenaga pendidik potretnya seperti ini jangan berharap banyak dengan bagaimana para peserta didiknya,” ujarnya

Kemendikbud harus melakukan investigasi lebih lanjut menyangkut kasus tersebut.

Lebih lanjut, menurut Ubaid, peringatan Hari Guru yang akan diperingati 25 November mendatang tidak perlu dirayakan secara meriah. Pсалnya, para guru dan perangkat pendidikan lainnya harus merasa ikut prihatin dan berduka terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril.

“Ini menjadi refleksi bersama, karena itu sebenarnya tata kelola yang ada di sekolah penting untuk dihidupkan supaya tidak semua yang ada di sekolah terpusat kepada guru atau kepala sekolah,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi mengatakan, kasus Baiq Nuril adalah peringatan bagi semua pihak.

“Baiq Nuril sedang membela dirinya, karena itu penegak hukum harus melihat ini secara komprehensif. Apa tidak bisa dimediasi kasus seperti ini, atau tidak bisa dilihat terlebih dahulu konteksnya. Hukum tidak boleh kering,” kata Unifah.

Dalam kasus ini, Unifah berpendapat, penerapan kode etik profesi guru perlu dikuatkan. Namun, dia menyebut, Dewan Kehormatan Guru tidak pernah diajak bicara.

“Kode etik profesi sudah ada, masalahnya Kemendikbud tidak memberikan kewenangan kepada organisasi profesi. Dewan Kehormatan Guru hampir tidak difungsikan, sebab kasus-kasus ini bisa diselesaikan lewat musyawarah terlebih dahulu.”

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati menerangkan, pihak Kemendikbud seharusnya menerapkan pakta integritas terkait kesepakatan larangan melakukan kekerasan seksual kepada seluruh pengampu institusi pendidikan. Menurut Sri, sekolah merupakan tempat di mana kekerasan seksual kerap terjadi.

“Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual. Kalau dilihat secara kedinasan mestinya diberhentikan, sanksi pidana juga diberikan.”

Reportase : Ahmad Muhajir

Editor : Aria Triyudha

Sumber : <http://m.harnas.co/2018/11/22/kasus-baiq-nuril-kemendikbud-dinilai-abai>

Sistem Pendidikan di Indonesia Disesuaikan Perubahan Zaman



Ribuan calon muda praja mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik 1.994 orang calon muda praja menjadi muda praja IPDN untuk selanjutnya menempuh pendidikan selama empat tahun guna mempersiapkan muda praja menjadi aparatur pemerintahan. (Foto: ANTARA FOTO / Raisan Al Farisi)

Model pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman

Maria Fatima Bona / EAS Jumat, 2 November 2018 | 11:32 WIB

Jakarta - Guru Besar bidang ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan, upaya untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter, unggul, dan kompetitif di masa depan, ditentukan sistem dan model pendidikan yang bermutu dan relevan dengan perubahan zaman.

“Sistem dan model pendidikan bermutu dan relevan ini tidak bisa lepas dari perhatian terhadap keberadaan, kondisi, serta potensi yang dimiliki oleh generasi muda di seluruh Indonesia. Hebatnya, Indonesia memiliki generasi muda dengan kearifan lokal yang berbeda-beda,” kata Rochmat kepada SP, baru baru ini.

Melihat hal itu, pemerintah dikatakan Rochmat sebaiknya menyediakan banchmark pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, bagi generasi muda yang memiliki potensi berkompetisi secara internasional harus disiapkan model pendidikan dan latihan bagi mereka. Model pendidikan dari dalam negeri yang bertumpu dengan lokal dengan parameter tingkat dunia, sehingga kualitasnya tetap diakui

dunia. Selain itu, perlu diperbaharui setiap saat untuk tetap terjaga relevansinya dengan tuntutan zaman.

Mantan rektor UNY ini juga mengatakan, selain fokus terhadap kompetensi, sistem dan model pendidikan yang perlu diciptakan harus memperhatikan tiga hal. Pertama, pembentukan karakter bangsa, kemampuan inovasi, dan penguasaan bahasa internasional. Sistem pendidikan formal harus berorientasi kepada pembentukan jati diri bangsa, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang baik dan cinta Tanah Air (NKRI).

Kedua, kemampuan berpikir kritis dan kreatif harus dimiliki untuk menghasilkan inovasi yang tiada henti. Ketiga, mengupayakan generasi muda memiliki bahasa internasional yang menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk berkiprah dalam dunia kerja.

“Penguasaan bahasa internasional membekali generasi tidak hanya pada tahap rekrutmen tapi juga pada saat aktif dalam tugas,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penyelenggaraan pendidikan harus fokus pada pendidikan karakter dan keteladanan. Menurut dia, banyaknya masalah penyelenggaraan pendidikan seperti masih adanya pungutan liar (pungli) dan minimnya transparansi dana sekolah hingga masih tingginya korupsi di sektor pendidikan harus segera ditata.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan, kualitas pendidikan tentu harus didukung dengan anggaran. Namun, yang terjadi saat ini pemerintah malah memangkas anggaran pendidikan hingga Rp 4 triliun dari Rp 39 triliun menjadi Rp 35 triliun.

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/520257-sistem-pendidikan-di-indonesia-disesuaikan-perubahan-zaman.html>

Jurusan Baru Terus Dikembangkan

DEONISIA ARLINTA 28 September 2018



Kompas/Iwan Setiyawan

Sejumlah siswa sekolah kejuruan mempraktikkan bongkar pasang mesin diesel di Balai Besar Latihan Kerja Industri di Solo, Jawa Tengah. Pendidikan vokasi bagi siswa SMK diharapkan bisa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.

JAKARTA, KOMPAS – Perubahan pada sistem pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan menjadi sebuah keniscayaan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Sejumlah pekerjaan, seperti di bidang otomotif, tekstil, dan busana terancam oleh otomatisasi. Untuk itu, pemerintah pun berupaya mengembangkan sejumlah jurusan baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad di Jakarta, Kamis (27/9/2018) menyampaikan, sejumlah bidang baru terkait teknologi 4.0 sudah mulai disiapkan. Bidang-bidang tersebut, seperti realitas maya atau virtual reality (VR), 3D printing, desain komunikasi visual (DKV), bisnis daring (e-commerce), dan augmented reality.

“Mulai tahun ini bidang-bidang baru tersebut dimasukkan dalam jurusan yang relevan seperti TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), elektronika, mekatronika, dan bisnis pemasaran. Upaya ini menjadi strategi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informatika yang terus berkembang,” katanya.

Ia menyampaikan, sosialisasi terkait bidang baru itu masih akan dilakukan hingga Desember 2018 nanti. Pihaknya juga tengah menyiapkan kurikulum yang baru, serta tenaga pendidik yang

memiliki kompetensi yang sesuai. Sertifikasi terkait kompetensi guru di bidang baru ini juga disiapkan.

Kerjasama dengan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) pun ditingkatkan untuk menunjang kematangan bidang pembelajaran baru tersebut. “Harapannya tahun depan sudah ada beberapa sekolah yang sudah menjalankan bidang baru ini. Kami akan intervensi sekolah yang memang siap melalui anggaran SMK,” ucap Hamid.

Selain itu, upaya revitalisasi SMK juga terus dilakukan. Ada empat upaya revitalisasi, yakni penyesuaian kurikulum dengan industri dengan 142 jurusan yang sudah diselaraskan dengan industri; peningkatan kompetensi guru; sertifikasi lulusan SMK; dan kerjasama langsung dengan industri, baik untuk pemagangan atau penerimaan tenaga kerja.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq menilai, upaya revitalisasi SMK belum memperlihatkan hasil yang optimal. Pembinaan yang dilakukan, mulai dari kurikulum, kompetensi guru, anggaran, dan sarana praktik kurang memadai.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan kebijakan yang baik untuk sekolah kejuruan lewat penganggaran yang tepat. Penganggaran tersebut seperti, menambah alat praktik penunjang belajar siswa SMK, penambahan jumlah peralatan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta program peningkatan kualitas guru SMK secara profesional.

“Pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Problem utamanya adalah tidak ada link and match dengan dunia kerja (DUDI) sehingga lulusan SMK menumpuk dan tidak terdistribusi dengan baik,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018, mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 6,87 juta penduduk. Dari jumlah itu 8,92 persen merupakan penduduk berpendidikan SMK. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding kelompok pendidikan lain, seperti Diploma I-III (7,92 persen), SMA (7,19 persen), universitas (6,31 persen), SMP (5,18 persen), dan SD (2,67 persen).

TENAGA KERJA INDONESIA

Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor*



Definisi:

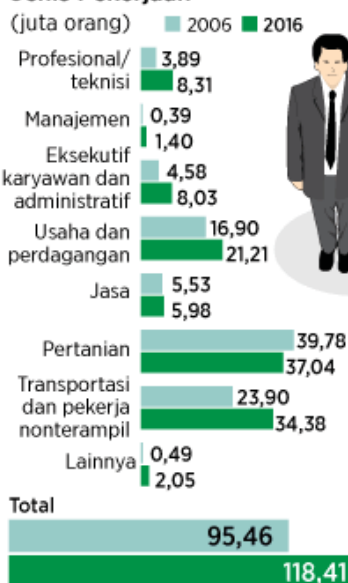
Sektor formal mencakup kategori:

- Berusaha dibantu buruh tetap
- Buruh/karyawan

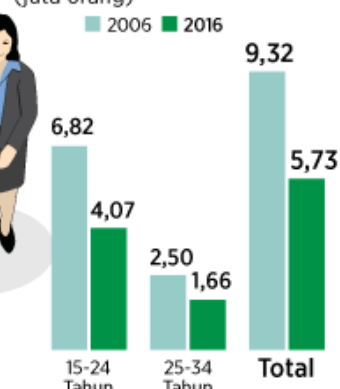
Sektor informal mencakup kategori:

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap
- Pekerja bebas
- Pekerja tak dibayar

Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan***



Pengangguran Usia Muda***



Keterangan:

* Data periode bulan Agustus

** Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu sebelum pelaksanaan survei

*** Data ILO dalam laporan Indonesia Jobs Outlook 2017



Sumber: Litbang "Kompas"/RTA/ERN, diolah dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Buruh Internasional

INFOGRAFIK: ANDRI

Kerja sama

Untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK di bidang sains, teknologi, kerekayasaan, dan matematika, Kemdikbud bekerjasama dengan PT Casio Computer Co. Ltd. Kerjasama ini dimulai dengan mengirimkan 20 peserta didik terpilih dari 10 SMK di seluruh Indonesia untuk bekerja di pabrik Casio di Thailand pada Oktober 2018.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) bersama Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Hiroshi Nakamura melakukan penandatanganan kerja sama dalam meningkatkan kompetensi siswa dan tenaga pendidik di bidang sains, teknologi, kerekayasaan, dan matematika di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Hiroshi Nakamura menyampaikan, ada 2.000 siswa yang akan dikirimkan secara bertahap untuk melakukan praktik kerja magang. Selain itu, sebanyak lebih dari 9.000 guru juga akan dilatih dalam memanfaatkan teknologi, seperti teknologi kalkulator saintifik sebagai penunjang pembelajaran di sekolah.

“Semua program yang telah kami jalankan sudah diformulasikan agar meningkatkan kompetensi pengajar dan peserta didik di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan perangkat kurikulum, metode pembelajaran, dan bahan ajar,” katanya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/28/jurusan-baru-terus-dikembangkan/>

Pembenahan Pendidikan Vokasi Belum Optimal Pendidikan Kejuruan

Pembenahan Pendidikan Vokasi Belum Optimal

M Zaid Wahyudi 28 September 2018



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Siswa mengikuti Ujian Praktik Kejuruan di bengkel kendaraan ringan SMK Negeri 3 Yogyakarta, Jetis, Yogyakarta, Senin (19/2/2018), sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa selama di sekolah. Pendidikan vokasi akan jadi tumpuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Namun, pembenahan pendidikan vokasi itu hingga kini belum optimal.

JAKARTA, KOMPAS – Separuh penduduk usia produktif Indonesia adalah generasi milenial. Namun, kualitas mereka masih rendah. Keterampilan dan produktivitas mereka tak hanya kalah bersaing dengan negara lain, tetapi juga oleh robot.

Harapan lama sekolah tenaga kerja Indonesia memang sudah lebih dari 12 tahun, tapi rata-rata lama sekolahnya baru 8 tahun. Keterampilan kerja serta kemampuan matematika, sains dan membaca mereka termasuk rendah. Mereka juga punya beban stunting (tumbuh pendek) di masa balita yang membuat otak dan fisiknya kurang berkembang optimal.

Dengan segala keterbatasan itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit di Jakarta, Kamis (27/9/2018) menilai pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah dan pelatihan bagi yang sudah bekerja bisa jadi

solusi untuk mendongkrak keterampilan mereka.

“Dengan pendidikan vokasi, mereka seharusnya bisa langsung masuk ke pasar kerja,” katanya. Hanya dengan keterampilan yang memadai dan terserapnya generasi milenial ke pasar kerja akan membuat bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi maju dan berkelanjutan bisa tercapai.

Secara terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir dalam kunjungan ke Universitas Jember, Jawa Timur, mengatakan 88 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan setara atau kurang dari SMA/SMK. Karena itu, pendidikan vokasi disiapkan bukan hanya agar mereka siap masuk pasar kerja, namun juga berwirausaha mandiri.



Kompas/Gregorius Magnus Finesso

Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Purbalingga, Jawa Tengah, sedang mengerjakan praktek teknik pengelasan di bengkel praktikum sekolah, Senin (21/11/2016). Pembinaan SMK mendesak dilakukan hingga mereka bisa langsung diserap pasar kerja.

Setengah hati

Meski dianggap penting, penguatan pendidikan vokasi di Indonesia dinilai Anton masih setengah hati. Pemerintah dan masyarakat masih menganggap vokasi sebagai pendidikan kelas dua, kalah dengan pendidikan umum dan profesi. Besar gaji mereka pun masih kalah dengan lulusan pendidikan umum lain meski seringkali mereka punya keterampilan lebih baik.

Upaya perbaikan SMK sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia belum optimal. Pengembangan SMK pun menjadi sangat bergantung pada kesadaran pemerintah daerah sebagai pengelola SMK.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah membangun SMK tanpa guru, laboratorium, bengkel dan peralatan penunjang yang memadai. “Kebijakan penganggaran untuk sekolah kejuruan masih banyak yang belum tepat,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq.

SMK pun banyak dibangun tanpa ditopang keberadaan industri dan potensi di sekitarnya hingga siswa tak bisa praktik, seperti SMK multimedia yang dibangun di daerah berbasis pertanian atau kelautan. Pendidikannya pun masih lebih banyak teori yang seringkali teori lama yang tak sejalan dengan perkembangan industri dan teori yang tak memiliki hubungan dengan peningkatan keterampilan siswa.

“Terbatasnya industri di daerah membuat kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri jadi terbatas,” kata Kepala Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Saryadi.



KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Calon petani dan penyuluh pertanian di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, Kabupaten Batanghari, Jambi, Senin (10/10/2016), praktik di lapangan menanam bawang. Meski generasi milenial lebih tertarik masuk ke sektor industri jasa, pengembangan pertanian tidak boleh dilupakan karena menopang kebutuhan pangan Indonesia ke depan.

Belum kuatnya keterikatan antara SMK dengan dunia usaha dan industri sekitarnya membuat banyak lulusan SMK menganggur. Bahkan, jumlah pengangguran lulusan SMK paling tinggi dibanding kelompok pendidikan lain.

Studi Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada Oktober 2017 menunjukkan lulusan SMK yang paling banyak menganggur berasal dari jurusan teknik komputer dan informatika, otomotif, perminyakan, teknik elektronika dan teknik furnitur.

Kalaupun ada lulusan SMK yang terserap industri, industri harus melatih mereka terlebih dahulu hingga tidak efisien dan boros biaya. “Lulusan SMK masih belum sesuai kebutuhan industri,”

tambah Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani.

Selain dukungan industri sekitar, pengembangan SMK seharusnya disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah, bukan berdasar tren di daerah lain yang belum tentu cocok diterapkan di tempat berbeda. Meski industri pariwisata sedang berkembang di banyak daerah dan diminati banyak generasi milenial, pengembangan SMK yang menopang industri manufaktur dan pertanian tidak boleh dilupakan.

“Pembangunan infrastruktur yang masif oleh pemerintah seharusnya mendorong pertumbuhan industri manufaktur sehingga kebutuhan tenaga pendukung juga diperlukan,” katanya. Selain itu, sebagai negara agraris, sektor pertanian akan tetap dibutuhkan sehingga perlu upaya serius menarik minat anak muda masuk ke vokasi bidang pertanian.

(ESTER LINCE NAPITUPULU dan DEONISIA ARLINTA)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/28/pembenahan-pendidikan-vokasi-belum-optimal/>

Skema PPDB Diubah, Pengamat: Jangan Hanya Berpatokan pada Daerah Maju!



Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 19 September 2018 | 15:07 WIB

Jakarta - Untuk memperkuat sistem zonasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengubah skema penerimaan peserta didik baru (PPDB). Para peserta didik tidak harus mendaftarkan diri untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pasalnya, sejak awal Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) telah menentukan peserta didik tersebut akan meneruskan ke sekolah sesuai dengan zonasi, termasuk menawarkan pilihan alternatif.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai, kebijakan Kemdikbud sering memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kondisi di daerah atau kabupaten/kota. Ia menyarankan, setiap kebijakan Kemdikbud sebaiknya jangan hanya berpatokan pada daerah maju seperti DKI Jakarta. Hal ini berkaca dari kesuksesan sistem zonasi yang ditawarkan hanya dapat ditemui di sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta.

Untuk itu, Ubaid menuturkan, setiap kebijakan, pemerintah pusat sebaiknya cukup memberikan gambaran-gambaran umum saja. Sedangkan teknisnya kembali diserahkan kepada pihak penyelenggara, karena sistem zonasi ini akan berdampak bagus pada sebagian kota yang sudah siap. Sedangkan pada beberapa daerah dengan kualitas pendidikan tidak merata, kebijakan itu akan bermasalah.

Kemudian, ia mengatakan, perubahan skema PPDB dengan fokus ke zonasi atau apapun tetap akan menimbulkan masalah karena pemerintah pusat kerap membuat kebijakan yang tidak diterjemahkan secara tepat oleh pihak penyelenggara. Pasalnya, secara otonomi, kebijakan pendidikan ada di wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Yang terjadi selama ini, penyelenggara sekolah selalu melakukan

kebijakan yang tidak sinkron dengan pusat. Bahkan banyak kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

“Jadi maunya di pusat apa dan dipahami serta ditangani pemprov dan kabupaten apa. Ini terbukti dengan model zonasi pada PPDB 2018 kemarin. Apa yang dikehendaki Kemdikbud diterjemahkan beda oleh penyelenggara. Kami (JPPI, red) menemukan bahwa banyak kabupaten kota dan provinsi yang menerjemahkan kebijakan zonasi dengan berbeda-beda. Hal ini menunjukkan carut-marut pendidikan baik di level pusat maupun penyelenggara langsung pemerintah provinsi atau kabupaten/kota,” kata Ubaid kepada SP, Rabu (19/9) pagi.

Ubaid juga menyarankan, pemerintah pusat dalam berkoordinasi jangan hanya dengan dinas pendidikan. Peralnya penyelenggara pendidikan di daerah adalah bupati, walikota dan gubernur karena mereka lah yang akan menandatangani peraturan terkait dengan PPDB.

“Sebaiknya pusat melakukan koordinasi dengan kepala daerah karena di daerah yang memiliki otoritas penuh adalah bupati dan wali kota, juga gubernur. Kerena meski Dinas Pendidikan sepakat dengan pusat tapi Bupati atau Gubernur tidak setuju, bisa lain ceritanya. Yang terjadi selama ini kepala daerah melakukan sebuah kebijakan bukan hanya pertimbangan persoalan pendidikan tetapi juga politik,” ujarnya.

Sumber: <http://www.beritasatu.com/nasional/511408-skema-ppdb-diubah-pengamat-jangan-hanya-berpatokan-pada-daerah-maju.html>

IGI: Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan



Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. (Foto: Antara)

Jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi CPNS guru tahun ini. Tahun ini ada 51.000 guru pensiun, tahun 2019 ada 60.000 ttpi kuota guru yang diangkat tahun ini hanya 82.000.

Maria Fatima Bona / JAS Senin, 17 September 2018 | 10:14 WIB

Jakarta - Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pendidikan saat ini tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini berkaca dari jumlah kekurangan guru pada sekolah negeri.

Ramli mengatakan, jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tahun ini. Hal ini menandakan perekrutan guru 2018 ini hanya untuk menutupi kekosongan guru 2018 dan 2019.

“Perekrutan guru yang akan dilakukan ini bukan untuk menutupi kekurangan guru tetapi mengganti posisi guru yang pensiun tahun ini dan tahun depan,” kata Ramli kepada Suara Pembaruan, Senin(17/9).

Ramli menyebutkan, berdasarkan data IGI, tahun ini ada 51.000 guru yang pensiun. Sedangkan 2019, ada 60.000-an pensiun. Sedangkan kuota guru yang diangkat tahun ini hanya pada kisaran 82.000.

Padahal dari data Kemdikbud 2018, sekolah mengalami kekurangan guru sebanyak 707.324 orang. Maka, dengan tidak adanya keberpihakan formasi CPNS guru. IGI menilai pemerintah tidak serius menangani masalah kekurangan guru.

Untuk itu, Ramli mengatakan, IGI menawarkan solusi jangka pendek untuk kekurangan guru tersebut. Pertama; optimalisasi guru yang berlebih dengan cara mutasi dari sekolah yang kelebihan dengan sekolah yang kekurangan guru. Dalam hal ini, guru PNS yang saat ini mengabdikan di sekolah swasta sebaiknya ditarik untuk kembali ke sekolah negeri supaya kebutuhan sekolah negeri tertutupi.

Kedua; guru dapat mengajar multisubject. Ketiga; status guru honorer harus diperjelas yakni mereka sebaiknya dikontrak lima tahun agar dapat fokus mengajar.

“Selama ini guru honorer tidak konsen mengajar karena mereka dihantui apakah tahun depan masih dipakai lagi atau tidak dan selain itu gaji mereka tidak signifikan dan masih sangat rendah,”ujarnya.

Meski memperjuangkan guru honorer, Ramli juga menegaskan, skema pengangkatan guru honorer harus memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru tidak hanya profesionalisme saja, tetapi guru harus memenuhi empat kompetensi yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

“Kita dulu menemukan guru yang secara akademik sangat mampu tetapi sulit atau tidak mampu melakukan transfer ilmu kepada kita. Dia ngajarin siswa, dia mengerti sendiri dan siswanya tidak mengerti. Nah seperti itu tidak boleh jadi guru,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, jumlah guru PNS sangat kurang bisa dilihat dari hampir semua sekolah negeri pasti diisi oleh guru honorer. Untuk itu, dalam mengatasi masalah kekurangan guru PNS pada sekolah negeri. Ubaid menyarankan, pemerintah sebaiknya membuka kuota afirmasi untuk guru honorer termasuk kategori K-2 yang sudah lama mengabdikan.

Selanjutnya, Guru Besar bidang ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan, dengan adanya wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Seharusnya ketersediaan guru menjadi salah satu prioritas. Apalagi Wajar 12 ini telah digaungkan dari pemerintah sebelumnya.

“Diakhir pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Wajar 12 tahun ini sudah dideklarasikan, maka seharusnya di era Jokowi Wajar 12 tahun leih dimantapkan. Berarti guru-gurunya pun harus wajib dipenuhi,” kata Rochmat.

Menurut Rochmat, prinsip zero growth untuk pengangkatan PNS belum tepat untuk guru. Hal ini berkaca dari data kekurangan guru kelas maupun guru mata pelajaran versi Kemdikbud. Belum lagi ditambah dengan Kementerian Agama (Kemag). Sedangkan kuota CPNS untuk guru 2018 ini pemerintah hanya menyediakan sebanyak 120.000 dialokasikan untuk formasi tenaga pendidik yakni guru dan dosen.

“Pemerintah hanya menyediakan kuota 120.000, Angka ini yang sangat jauh dari memadai. Tidak bisa kondisi ini diabaikan, Bagaimana kekurangan guru yang hampir separuh itu tidak ditangani. Tentu ini akan berdampak jelek terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan,” pungkas mantan rektor UNY itu.

Menurut dia, dengan kondisi sekolah kekurangan guru ini. Banyak siswa tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Untuk itu, ia mengharapkan, pemerintah meningkatkan kuota CPNS untuk guru tiap tahunnya, sehingga dalam waktu 5 hingga enam tahun dapat terpenuhi kebutuhan guru tersebut.

Selanjutnya, Rochmat juga mengatakan, pemerintah harus mengubah prinsip pengangkatan guru. Dalam hal ini, prinsip pengangkatan PNS disesuaikan dengan angka pensiun dan kebutuhan baru seiring dengan penambahan penduduk. Sehingga PNS tidak mengikuti Zero Growth.

Selain itu, ia menyebutkan, penambahan sekolah negeri perlu dikendalikan dengan pertimbangan adanya sekolah swasta. “Jika ada dana untuk unit sekolah baru, sebaiknya diarahkan untuk pengangkatan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah swasta,”ujarnya.

Menurut Rochmat, orientasi pembangunan ke depan sebaiknya tidak hanya pada infrastruktur, melainkan

pada sumber daya manusia (SDM). Sedangkan untuk pengadaan infrastruktur sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara terpisah, anggota komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, adanya data terbaru kekurangan guru. Ia menyarankan sebaiknya menghitung ulang terhadap kebutuhan guru. "Kenapa saya minta hitung ulang, karena selama ini Kemdikbud selalu mengatakan sesungguhnya tidak ada kekurangan guru," kata politisi Golkar itu.

Ia menyebutkan, jika kelebihan guru terjadi pada PNS di daerah tertentu maka harus ada ketegasan pemerintah untuk melakukan mutasi guru berdasarkan peraturan perundangan-undangan aparatur sipil negara (ASN).

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/510902-igi-perekrutan-guru-2018-hanya-tutupi-kekosongan.html>

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Realisasi Program Wajib Belajar Belum Optimal

DEONISIA ARLINTA 14 September 2018



KOMPAS/RIZA FATHONI (RZF) 04-09-2018

Sejumlah siswi Sekolah Menengah Pertama berkumpul di lapangan sekolah. Pemerintah saat ini menargetkan wajib belajar 12 tahun pada 2022.

JAKARTA, KOMPAS – Realisasi program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara sistematis. Meskipun regulasi sudah dibentuk, implementasi lebih lanjut dari pemerintah daerah tidak optimal. Hal ini terutama terkait komitmen penyediaan anggaran pendidikan di tingkat daerah.

Pemerintah telah berkomitmen menjalankan program wajib belajar 12 Tahun atau Wajar 12 Tahun di tahun 2022. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat pun telah menganggarkan 20 persen biaya APBN untuk sektor pendidikan, yaitu sekitar Rp 444 triliun di tahun 2018. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen anggaran ditujukan untuk transfer daerah.

“Wewenang pengelolaan sekolah sebenarnya ada di pemerintah daerah. Untuk sekolah tingkat dasar dan menengah berada di bawah pemerintah kabupaten/ kota, sementara sekolah menengah atas atau pun kejuruan ada di pemerintah provinsi. Masalahnya, soal program Wajar

12 tahun, sepertinya masih sebatas jargon politik dari pemda, komitmennya belum ada,” kata pengamat pendidikan Doni Koesoema saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Ia menambahkan, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya ada 8 provinsi yang efektif menjalankan peraturan daerah terkait wajib belajar 12 tahun. Perlu ada regulasi yang kuat untuk mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut, misalnya melalui Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya disebutkan pendidikan dasar hanya sampai 9 tahun, sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan Wajib 12 tahun.

Untuk menunjang program wajib belajar 12 tahun, Doni mengatakan, pemerintah harus memastikan infrastruktur sekolah sudah siap. Infrastruktur yang dimaksud adalah keberadaan gedung sekolah yang layak. Berdasarkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK tahun 2017 sebesar 75,81 persen dan APK SMP hampir mencapai 80 persen.

“Jangan sampai sudah mewajibkan belajar 12 tahun, tetapi daya tampung sekolah menengah atas ataupun kejuruan tidak mencukupi karena sekolahnya tidak ada,” ujarnya.



PINGKAN ELITA DUNDU

Bangunan sekolah dengan dinding dari anyaman bambu yang sudah bolong SD Negeri (paralel) Mata Wee Tame di Dusun Lolo Wano, Sumba Barat, NTT, Kamis (16/8/2018).

Selain itu, persoalan lain yang harus diperhatikan terkait program Wajar 12 tahun adalah besarnya jumlah siswa yang putus sekolah. Tercatat ada sebanyak 3,82 juta anak usia 7-18 di Indonesia yang tidak bersekolah, baik karena putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi, Rabu (12/9/2018) mengatakan, persoalan wajib belajar 9 tahun sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu. Jika belum tuntas, program wajib belajar 12 tahun menjadi sulit tercapai.

Ia menambahkan, kesenjangan lain yang juga harus diselesaikan adalah terkait kualitas guru serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG), perolehan rata-rata nasional masih 53,02. Jumlah itu di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yaitu 55,0.

Sebanyak 27 provinsi memiliki rata-rata nilai hasil UKG di bawah standar kompetensi minimal. Hanya ada tujuh provinsi di atas standar, yaitu Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Hasil UKG terendah berada di Provinsi Maluku Utara (41,87) (Kompas, 12/9/2018).

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/09/14/realisasi-program-wajib-belajar-belum-optimal/>

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Kesenjangan Layanan Pendidikan Masih Jadi Masalah Indonesia

DEONISIA ARLINTA 12 September 2018 · 22:10 WIB



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

(kanan-kiri) Peneliti senior dari Article 33 Indonesia Lukman Hakim, Deputy Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi, serta Senior spesialis pendidikan dari Bank Dunia Javier Luque dalam Forum Kajian Pembangunan yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Program wajib belajar 12 tahun di Indonesia masih menuai kendala. Meski taraf pendidikan penduduk rata-rata di Indonesia meningkat, kesenjangan layanan pendidikan di Indonesia masih cukup besar.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 tercatat sebesar 7,84 tahun, pada 2016 menjadi 7,95 tahun, dan pada 2017 menjadi 8,10 tahun. Namun, masih ada 14 provinsi yang capaian RLS lebih rendah dari capaian nasional, seperti Papua (6,4 tahun), Kalimantan Barat (7,52 tahun), dan Nusa Tenggara Timur (7,55 tahun). Sementara, angka RLS tertinggi ditemui di DKI Jakarta, yaitu 10,89 tahun.

“Sebelum menjalankan sistem wajar (wajib belajar) 12 tahun, tuntaskan dulu wajar 9 tahun. Ini (wajar 9 tahun) sendiri belum selesai di sebagian besar daerah. Selain itu, kalau dilihat secara nasional, partisipasi penduduk untuk pendidikan dasar memang meningkat, tetapi jika dilihat di setiap daerah, disparitasnya masih tinggi,” ujar Deputy Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan

Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Subandi dalam Forum Kajian Pembangunan di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

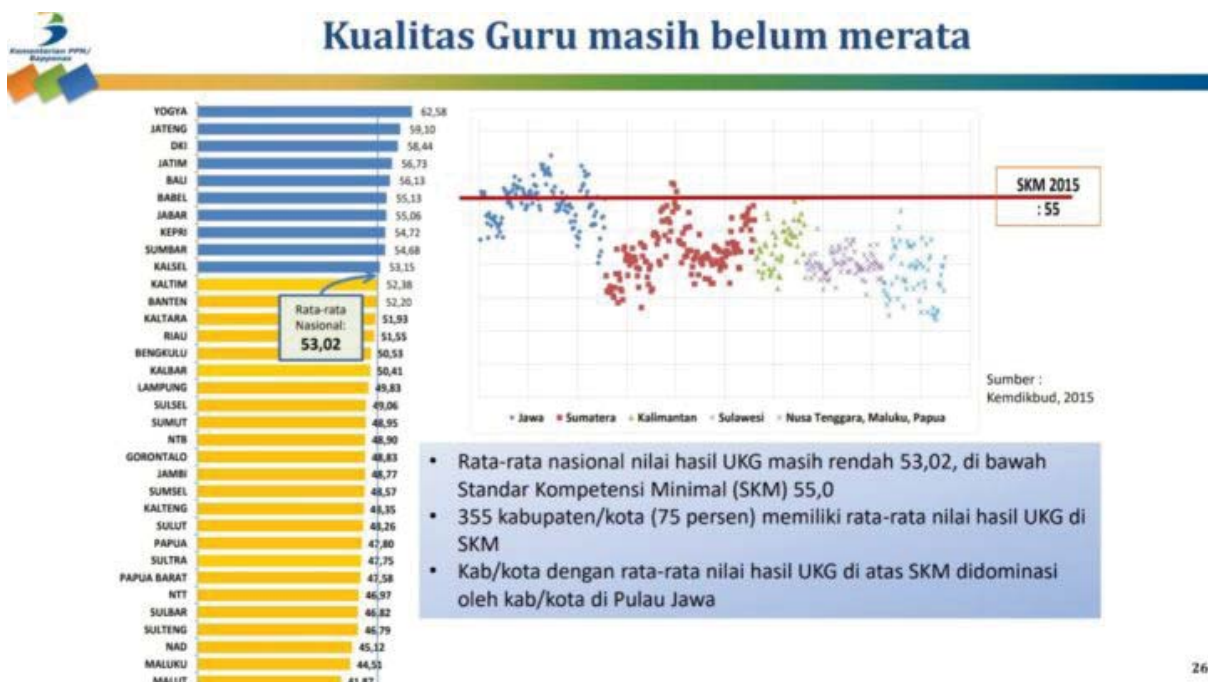
Ia menambahkan, kesenjangan lain yang juga harus diselesaikan yaitu terkait kualitas guru serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG), perolehan rata-rata nasional masih sebesar 53,02. Jumlah itu di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan yaitu 55,0.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Subandi

Sebanyak 27 provinsi atau sekitar 80 persen dari total keseluruhan memiliki rata-rata nilai hasil UKG di bawah standar kompetensi minimal. Hanya ada tujuh provinsi yang di atas standar, yaitu Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Hasil UKG terendah berada di Provinsi Maluku Utara (41,87).



Senior spesialis pendidikan dari Bank Dunia Javier Luque berpendapat, capaian terkait sistem pendidikan di Indonesia sudah baik. Bahkan, capaian rata-rata lama pendidikan di Indonesia hampir mencapai rata-rata global, yaitu 8,5 tahun. “Agar terus bergerak ke depan, Indonesia juga perlu memastikan pendidikan yang dimiliki juga berkualitas,” katanya.

Ia menyarankan, sistem perekrutan guru dan kualitas guru harus ditingkatkan. Selain itu, fasilitas terkait sarana dan prasarana sekolah juga perlu ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah kejuruan. Untuk sekolah yang kualitasnya rendah harus diidentifikasi sehingga intervensi dari pemerintah bisa tepat sasaran. “Pastikan juga jangan sampai ada siswa yang putus sekolah,” ujarnya.

Peneliti senior dari Article 33 Indonesia Lukman Hakim menambahkan, dukungan pendanaan dari pemerintah juga menentukan keberhasilan dari program wajib belajar 12 tahun. Dengan sistem pemerintahan desentralisasi saat ini, penyediaan anggaran pemerintah daerah di bidang pendidikan sangat menentukan.

Berdasarkan hasil kajian dari Article 33 Indonesia pada Desember 2017, kebutuhan anggaran pendidikan untuk wajib belajar 12 Tahun selama lima tahun hingga 2022 sekitar Rp 1.600 triliun. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk biaya gaji dan tunjangan guru (Rp827 triliun), pengeluaran rumah tangga untuk kuintil I dan II (Rp 383 triliun), biaya operasional sekolah (Rp 254 triliun), dan biaya pelatihan guru (Rp 39 triliun).

“Estimasi kebutuhan pendanaan dan gapnya untuk mencapai Wajar 12 Tahun perlu memperhatikan konteks bagaimana anggaran pendidikan dikelola. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya sistem desentralisasi, flow of funds, serta komitmen dan kontribusi pemerintah daerah,” katanya.

Perhitungan kebutuhan anggaran pendidikan

*Persentase Kebutuhan Anggaran Pendidikan untuk Wajar 12 Tahun
(2018-2022. dalam present value)*



Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Eka Nugrahini mengatakan, pemerintah pusat telah menganggarkan 20 persen dana APBD untuk sektor pendidikan. Untuk

pemerataan kualitas layanan pendidikan, termasuk kualitas guru akan diupayakan dengan pelatihan dan sertifikasi.

“Saat ini sudah ada sekolah rujukan yang dirancang memenuhi standar minimal, seperti adanya laboratorium, internet, dan sarana prasarana lain. Kualitas guru pun jadi indikator. Nantinya, sekolah rujukan ini yang akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah satelit di sekitarnya. Jika memungkinkan, kami akan lakukan pertukaran guru agar kualitasnya bisa merata,” ujarnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/09/12/kesenjangan-layanan-pendidikan-masih-jadi-masalah-indonesia/>

JPPI Beberkan Sejumlah Persoalan Guru Honorer



Kornas JPPI Ubaid Matraji (batik motif)/Wartabanten

15 Agustus, 2018

BANTEN HARI INI, Kota Tangsel

Tangsel (WB)- Dari tahun ke tahun nasib para guru honorer terkatung-katung tanpa ada penyelesaian secara rigid. Hal tersebut dapat diketahui dari daftar inventarisasi masalah yang dialami oleh guru honorer yang pernah diadukan ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Kepada Warta Banten, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, membeberkan sejumlah persoalan yang pernah diadukan para guru honorer selama kurun waktu Januari 2017 hingga maret 2018. Menurutnya, selama satu tahun tiga bulan tersebut ada 637 pengaduan terkait dengan masalah guru honorer.

Diantaranya, guru honorer agama atau madrasah tidak dapat kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebanyak 130 aduan. Guru honorer tidak fokus mengajar, kerja sampingan sebanyak 66 aduan. Guru honorer status PNS yang hanya janji, sebanyak 101 aduan. Pencairan gaji guru honorer sering telat, sebanyak 91 aduan. Guru honorer tidak ada kepastian hukum, sebanyak 83 aduan. Gaji para tenaga honorer masih di bawah UMR, sebanyak 166 aduan.

“Aduan yang dilaporkan ke kami itu, dari guru honorer se-Jabodetabek. Didalamnya termasuk guru honorer Kota Tangerang Selatan (Tangsel),” bebernya.

Menurut Ubaid, keberadaan guru honorer adalah fakta karena masih banyak sekolah yang merasa kekurangan guru. Akan tetapi yang menjadi persoalan nasib guru-guru honorer terkatung-katung tanpa ada penyelesaian. Sehingga, pihaknya pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten untuk mengutamakan guru honorer.

“Jadi harus ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer kategori K2 yang belum PNS. Harus ada jalur khusus untuk guru honorer K2, mengingat mau ada rekrutmen jumlah guru, dan guru yang diangkat Pemerintah Daerah (Pemda),” pungkasnya (mg3/yat).

Sumber : <https://wartabanten.id/2018/08/jppi-beberkan-sejumlah-persoalan-guru-honorer.html>

JPPI: Asian Games Harus Jadi Momen Pembelajaran Siswa

Selasa 07 Agu 2018 06:06 WIB

Rep: Rahma Sulistya/Farah Noersativa/ Red: Bilal Ramadhan



Foto: dok. Istimewa

Disdik DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan 70 sekolah yang diliburkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 70 sekolah yang berada di rute venue Asian Games 2018 diliburkan selama 12 hari dari 20-31 Agustus 2018 mendatang. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang mengalami penyesuaian waktu belajar mengajar selama Asian Games 2018.

Hal itu dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada perwakilan masing-masing sekolah untuk rapat koordinasi. Dia mengatakan sekolah-sekolah tersebut telah menyatakan menerima kebijakan penyesuaian waktu belajar atau libur sekolah tersebut.

Sebab menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk kontribusi dari sekolah demi menyukseskan perhelatan olahraga Asian Games 2018. Dia juga menegaskan, tak ada masalah dengan adanya keputusan dari INASGOC yang pada akhirnya menambah satu rute yang akan dilewati. Rute itu adalah rute sembilan dari Wisma Atlet Kemayoran ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulungan Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah satu rute yang dilewati oleh para atlet Asian Games. Hal itu berdasarkan validasi antara Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang kelancaran perjalanan atlet pada saat Asian Games.

“Bagi sekolah yang tidak terdampak, proses kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta tetap berlangsung seperti biasa,” kata Bowo, Senin (6/8).

Guru sejarah di SMA Diponegoro yang menjadi salah satu sekolah yang diliburkan, Nur Aprilia Juwita mengatakan akan memberikan tugas kepada para siswa selama libur akibat Asian Games. Dengan libur tersebut, maka ia akan kehilangan dua kali pertemuan dalam dua pekan tersebut.

Mengenai materi pengayaan soal Asian Games, ia mengaku tidak dapat memasukkannya ke dalam materi pengajaran. Ia menjelaskan di kelas X, materi pelajaran seputar dasar-dasar sejarah. Kemudian di kelas XI terkait kolonialisasi Eropa. Sedangkan di kelas XII tentang disintegrasi bangsa.

“Mungkin sih bisa dimasukkan ke kelas 12, tapi materinya tentang integrasi bangsa dan itu sekitar pertengahan semester dua bulan lagi,” kata Ria, begitu ia kerap disapa.

Terkait Asian Games, sekolahnya hanya meminta guru olahraga untuk mengimbuu kepada siswa untuk menonton pertandingan pesta olahraga tersebut. “Kalau dengan tekanan bisa mempengaruhi nilai, mungkin siswa akan nonton. Kalau hanya imbauan, saya pesimistis mereka mau nonton,” ujar dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid menekankan tidak mempermasalahkan liburnya sekolah. Namun pihak sekolah harus memiliki pedoman untuk memberikan pembelajaran di luar sekolah dengan mengaitkan pembelajaran di luar sekolah dan Asian Games.

“Artinya proses pembelajaran itu kan tidak harus di dalam kelas ya, tapi bisa dilakukan di luar kelas. Penting juga untuk memberi pengetahuan kepada siswa untuk tahu mengenai sejarah Asian Games, apakah dulu ada hal serupa di Indonesia, lalu bagaimana peran Indonesia,” kata Abdullah.

Dia juga menyarankan, sekolah juga bisa mengkaitkan perhelatan Asian Games dengan minat dari masing-masing siswa, terutama di bidang olah raga. Menurutnya, para guru bisa mendata siswa-siswa yang berminat di olah raga dengan berbagai bidang, lalu mengajak mereka berdiskusi mengenai olah raga tersebut.

Hal itu, artinya, kata dia, para guru bisa menjadikan Asian Games sebagai konten pembelajaran di luar sekolah. Para pendidik juga bisa mengajarkan perihal Asian Games dengan berbagai sudut pandang.

Dia juga mengatakan, pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah juga menjadi penting. Sebab adanya perhelatan Asian Games di Indonesia menjadi sebuah peluang pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi siswa.

“Apalagi ini event internasional, yang belum tentu beberapa tahun lagi ada di Indonesia. Kapan lagi mereka akan bergaul dengan orang-orang di dunia internasional. Siswa-siswa yang juga bisa berbahasa Inggris juga bisa menerapkan atau mempraktikkan bicara dengan negara-negara lain. artinya ada banyak angle yang bisa dipelajari dari Asian Games,” kata dia.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/08/06/pd1s9u330-jppi-asian-games-harus-jadi-momen-pembelajaran-siswa>

Kebobrokan PPDB Online Di Tangsel 2018 Terungkap

Pendidikan SENIN, 23 JULI 2018 , 19:17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Kebobrokan PPDB Online Di Tangsel 2018 Terungkap



Foto : IST

RMOLBanten. Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kota Tangsel membongkar bobroknya penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2018.

KMPP yang terdiri dari berbagai lembaga kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat ini mencatat ratusan pengaduan permasalahan PPDB online 2018.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdul Ubaid Matraji mengatakan, pihaknya mencatat selama proses PPDB online terdapat 692 pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut didominasi wilayah Jabodetabek.

“Pengaduan dari masyarakat banyak yang mempertanyakan soal zonasi, kuota dan juga adanya praktek pungli,” katanya saat konferensi pers di Pamulang, Kota Tangsel, Senin (23/7).

Menurutnya, permasalahan tersebut sudah terjadi sejak tahun lalu. Namun, tahun ini lebih parah. Apalagi kasus di Kota Tangsel, server PPDB online sering nge-down. Sehingga mempersulit akses saat orang tua calon siswa untuk mendaftarkan anaknya.

“Bahkan masih ada yang kami temukan operator penyelenggara PPDB yang masih belum paham soal sistem online,” ujarnya.

Selain itu, kuota penerimaan siswa di sekolah banyak menyalahi aturan. Salah satunya penerimaan melalui jalur orang tidak mampu. Pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sering disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin.

“Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” tegasnya.

Sementara itu, terkait temuan pungli dan jual beli kursi, JPPI juga menemukan praktik pungli dan jual beli kursi yang dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman PPDB.

“Ya betul, (praktik pungli dan jual beli kursi) bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan bahkan saat proses daftar ulang,” terangnya.

Sementara Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho menjelaskan buruknya persiapan panitia PPDB online menjadi salah satu penyebab kekisruhan. Dalam catatan TRUTH, terdapat permasalahan PPDB online di Kota Tangsel.

“Yakni, minimnya sosialisasi cara pendaftaran PPDB online, kekeliruan NIK dengan nama peserta PPDB, server PPDB error, sistem zonasi serta pungli.

“Kami minta PPDB online ini dievaluasi dengan merevisi aturan Agara kedepannya lebih baik,” tutupnya. [mor]

Sumber : <http://www.rmolbanten.com/read/2018/07/23/2005/Kebobrokan-PPDB-Online-Di-Tangsel-2018-Terungkap->

kebijakan pendidikan

Sistem Zonasi Sekolah Timbulkan Ketidakpastian

ester lince napitupulu

20 Juli 2018



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/7/2018) yang menyoroti penerimaan peserta didik baru. Salah satunya soal zonasi yang menimbulkan banyak masalah dan pemahaman yang beragam.

Penerimaan peserta didik baru pada 2018 dengan sistem zonasi masih memicu ketidakpastian di masyarakat karena pemahaman kebijakan ini beragam. Apalagi kebijakan itu belum diikuti dengan pemerataan mutu pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang dua tahun ini diterapkan memicu ketidakpastian pada masyarakat. Acuan zonasi yang dipahami masyarakat dan diterapkan di daerah yang beragam membuat kisruh penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan dasar terus terjadi.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online atau daring yang diharapkan menjadi sistem

penerimaan siswa baru yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel belum terjadi. Hal itu mengakibatkan dugaan kecurangan dalam PPDB mencuat.

Masalah PPDB itu diungkapkan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) bersama 34 jaringan yang tersebar di beberapa daerah. Hasil pantauan PPDB 2018 itu disampaikan Siti Juliantari dari Indonesia Corruption Watch, Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Jupri Nugroho dari Truth Tangerang, Gufron dari Banten Bersih, dan Jumono dari Perkumpulan Wali Murid, Kamis (19/7/2018), di Jakarta.

Sejumlah soal penting dalam PPDB yang dilaporkan masyarakat terkait zonasi yakni implementasinya beragam dan tak sesuai acuan pemerintah pusat. "Pemahaman soal zonasi ini beragam. Ada yang menerapkan zonasi dilihat dari tempat tinggal, ada yang memperhitungkan nilai. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat, yakni siswa baru dan orangtua, jadi korban," kata Siti.

Pemahaman soal zonasi ini beragam. Ada yang menerapkan zonasi dilihat dari tempat tinggal, ada yang memperhitungkan nilai. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat, yakni siswa baru dan orangtua, jadi korban.

Laporan soal surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu mendominasi soal PPDB. Sejak tahun lalu, persoalan ini sudah muncul. Ada pula penerimaan siswa baru tingkat madrasah ibtidaiyah yang menerapkan tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung), serta tak ada kuota afirmatif bagi anak berkebutuhan khusus. Laporan pungutan liar dan jual beli bangku masih ada.

Ubaid menambahkan, masalah zonasi baru dirasakan setelah pengumuman penerimaan siswa baru. Ada sekolah yang kekurangan siswa, ada siswa yang tinggal dekat sekolah tidak diterima, tetapi siswa dari luar zonasi diterima, hingga berbagai ketidakjelasan lain. "Zonasi ini harus dievaluasi secara serius, apakah sudah siap diberlakukan secara nasional? Tahun depan jangan lagi ada kisruh PPDB karena soal zonasi belum matang," ujarnya.

Mutu tidak merata

Ubaid mengingatkan, kebijakan zonasi tanpa disertai pemerataan mutu sekolah memicu pelanggaran dalam PPDB 2018. Karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan dengan indikator mencakup ketersediaan fasilitas penunjang belajar mengajar dan kualitas guru.

Menurut Jupri, PPDB di wilayah Tangerang Raya banyak dikeluhkan masyarakat. Kriteria yang digunakan terutama siswa miskin, jarak, nilai, dan prestasi. "Soal kuota siswa miskin ini jadi celah yang bisa dimainkan. Sementara soal zonasi belum ada pemahaman sama," ujarnya.

Jupri menjelaskan, jual beli bangku dilakukan oknum pejabat di tingkat RT sampai camat. Ada tarif yang dipasang untuk meloloskan calon peserta didik untuk dapat masuk ke sekolah yang diinginkan dengan meminta kuota kepada sekolah.

Data KMPP Tangerang menunjukkan, dari 12 SMA di Kota Tangerang Selatan, 10 sekolah menerima kurang dari kuota penerimaan dalam zonasi yang ditentukan, yakni 70 persen. Untuk kuota penerimaan domisili di luar zonasi, tak ada sekolah yang memenuhi kuota 5 persen. "Kami menerima aduan dari banyak orangtua murid soal PPDB 2018. Mereka mengeluh sistem zonasi dan sistem online yang buruk," kata Jupri.

Sementara Jumono menegaskan, sosialisasi kebijakan zonasi perlu digalakan agar tak ada kebingungan di kalangan orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Ketidaktahuan orangtua murid jadi peluang oknum tertentu memanfaatkan situasi seperti pungli, jual beli bangku, dan kecurangan lain.

"Ini harus menjadi perhatian. Kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Banyak orangtua tidak banyak mendapat informasi terkait PPDB," kata Jumono.

Menurut Siti Juliantari, berdasarkan pemantauan proses PPDB 2018 dari KMPP, mereka akan terus ikut mengawasi dan akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama PPDB 2018.

Evaluasi

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tahun depan Kemdikbud tetap memberlakukan PPDB dengan zonasi. Namun, evaluasi akan dilakukan. "Target saya, tahun depan sudah tidak ada ribut-ribut menjelang PPDB. Karena itu, kepala dinas pendidikan segera dikumpulkan agar mulai sekarang menyiapkan PPDB tahun depan," ujarnya.

Terkait zonasi, Muhadjir mengatakan masih terjadi salah paham. Zonasi bukan selalu berarti yang rumahnya paling dekat dengan sekolah pasti diterima.



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Mendikbud muhadjir Effendy

"Yang dimaksud zonasi, jangan sampai anak yang masuk dalam zonasi tak diterima di sekolah-sekolah yang masih satu zonasi jika daya tampung mencukupi," katanya.

Dari dua tahun pelaksanaan zonasi, pemetaan sudah mulai terlihat. Berdasarkan pemetaan itu, pembenahan sistem zonasi itu dilakukan, termasuk membuat implementasi zonasi fleksibel. (E20)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/20/sistem-zonasi-sekolah-timbulkan-ketidakpastian/>

Guru Harus Bersedia Dipindah

JPPI: Redistribusi Guru Jangan Hanya Wacana

Citra Larasati • 20 Juli 2018 14:54 WIB



Seorang guru mengajarkan siswa Sekolah Dasar, MI/Gino Hadi

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tegas dalam mengimplementasikan kebijakan redistribusi guru. Ia berharap, kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konkret, sehingga pemerataan kualitas dan kebutuhan guru di Indonesia dapat segera terwujud.

“Redistribusi guru jangan hanya wacana. Langkahnya selama ini enggak konkret. Padahal sudah jelas, keberadaan guru honorer di sekolah negeri selama ini adalah tanda sekolah negeri masih ada daerah yang kekurangan guru,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Medcom.idsaat ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 19 Juli 2018.

Langkah-langkah nyata pun harus segera dilakukan, seperti melakukan pemetaan kebutuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitas di seluruh Indonesia. Wilayah mana yang kelebihan

guru, dan mana kekurangan guru harus secara detail dimiliki Kemendikbud.

Data persebaran, kebutuhan guru, persebaran kualitas itu harusnya di-publish kepada masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi memantau di daerahnya masing-masing. “Seperti PPDB 2019 ini, kasus-kasus yang terjadi itu banyaknya hasil laporan masyarakat. Saya tidak yakin Kemendikbud punya data guru yang detail itu, karena dapodik (data pokok pendidikan) saja belum mencerminkan itu,” terang Ubaid.

Setelah ada pemetaan, harus dipikirkan solusinya. Siapa dan berapa guru yang harus dipindah, dan kemana guru tersebut harus dipindah. “Termasuk harus ada tindakan jika memang harus rekrut guru baru,” ujar Ubaid.

Ia juga menanggapi banyak guru yang ogah dipindah ke sekolah dan daerah lain, salah satunya karena alasan kesejahteraan. Ada juga guru yang menolak dipindah dari Jakarta ke Depok, karena akan berpengaruh pada perubahan penghasilannya. Perbedaan penghasilan tersebut salah satunya karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbeda di tiap daerah.

“Kalaupun ada perbedaan angka (tunjangan) guru harus siap dipindah. Karena selain guru adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), saya kira skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ada selama ini sudah sangat bagus. Ya, kecuali kalau gaji guru masih kecil seperti zaman dulu. Guru harus mau dipindah kemanapun beserta konsekuensinya.” tegas Ubaid.

Seperti diberitakan sebelumnya. Kemendikbud mulai menerapkan kebijakan mutasi guru untuk tujuan redistribusi secara rutin dan berkelanjutan, sebagai kelanjutan upaya pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan mutasi guru mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini.

Upaya pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya ditempuh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setelah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan melakukan pemerataan kualitas guru dengan program mutasi guru yang dilakukan secara masif, rutin dan berkelanjutan

Sumber : <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2VLYMb-jppi-redistribusi-guru-jangan-hanya-wacana>

PENERIMAAN SISWA BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 Sarat Masalah

DEONISIA ARLINTA

19 Juli 2018 · 19:25 WIB



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018). Nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang tidak terdeteksi saat pendaftaran menjadi permasalahan yang paling banyak masuk di posko tersebut.

JAKARTA, KOMPAS – Meski bukan kali pertama sistem penerimaan peserta didik baru secara daring diberlakukan, sejumlah permasalahan masih ditemukan pada pendaftaran tahun ini. Setidaknya, dari hasil pemantauan koalisi masyarakat sipil peduli pendidikan ditemukan ada enam permasalahan utama dalam proses penerimaan siswa baru pada 2018.

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq, saat dihubungi Kamis (19/7/2018) di Jakarta, menyampaikan, salah satu catatan yang ditemukan adalah maraknya penggunaan surat keterangan tanda miskin (SKTM) palsu di sejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah.

Kebijakan minimal kuota 20 persen untuk masyarakat miskin justru dimanfaatkan orangtua yang anaknya tidak memiliki nilai cukup ataupun takut bersaing agar bisa masuk ke sekolah pilihannya.

”Surat itu dapat dibuat dengan mudah tanpa ada verifikasi lebih lanjut dari pejabat yang mengeluarkan. Indikasi suap-menyuap pun bisa terjadi saat proses pembuatan SKTM ini,” katanya.

Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah adanya tes baca tulis hitung (calistung) dan psikotes untuk calon peserta didik kelas I sekolah dasar di madrasah ibtidaiyah, Jakarta.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tentang PPDB tertulis, kedua tes tersebut diperbolehkan dalam pendaftaran peserta didik. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 terdapat aturan larangan tes calistung bagi siswa yang akan masuk sekolah dasar.

Tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 juga menuai masalah lain dalam PPDB 2018.

Banyak orangtua dari ABK enggan bersekolah di sekolah selain sekolah luar biasa (SLB) karena tidak ada komitmen dari pihak sekolah. Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah Kementerian Agama lebih ramah terhadap ABK. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi ABK.



Kompas/Wisnu Widiyanto (NUT)

Warga dilayani petugas di Posko Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). Menurut sejumlah petugas, sebagian besar warga meminta perubahan data alamat domisili sesuai kartu keluarga mereka yang baru. Perubahan tersebut untuk dilakukan agar anak bisa mendaftar di sekolah yang dituju.

Kebijakan zonasi yang diterapkan saat ini dinilai sudah baik, namun karena tidak diimbangi dengan pemerataan kualitas sekolah menyebabkan sebagian orangtua masih bersikeras memasukkan anaknya di sekolah favoritnya. Di beberapa daerah, sistem zonasi mensyaratkan nilai calon peserta didik yang baik sehingga ditemukan peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang dekat rumahnya karena nilai standar.

Masalah jaringan server juga masih ditemui di beberapa daerah. Hal ini ditemukan misalnya di

SMAN 1 Balikpapan. Selain itu, masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam sistem juga menghambat pendaftaran siswa didik.

Pungutan liar dan jual beli bangku masih terjadi pada PPB 2018. Pungli ini seperti pungutan yang disebutkan sekolah untuk biaya untuk perbaikan fasilitas, lembar kerja siswa, seragam, dan buku. Padahal dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Pasal 25 disebutkan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemantauan proses PPDB 2018 tersebut, sejumlah rekomendasi diajukan koalisi masyarakat sipil ke pemerintah.

Rekomendasi tersebut antara lain, perlunya sinkronisasi peraturan PPDB yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan Kemenag tentang hal-hal krusial terkait dengan proses PPDB. Misalnya, tidak adanya pungutan saat PPDB di semua jenjang, kuota afirmasi untuk anak tidak mampu dan ABK, serta tidak adanya tes calistung dan psikotes di jenjang SD/MI.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menyamakan kualitas sekolah sebagai syarat pengimpelembtasian sistem zonasi. Hal ini penting agar konsep sekolah favorit yang dinilai unggul dari segi sarana dan prasarana sekolah tidak berlaku lagi.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para orangtua mendampingi anaknya mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online dengan komputer fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 3, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Dalam PPDB tahun ini Jawa Barat menerapkan skor radius jarak rumah dengan sekolah untuk calon siswa SMA dan SMK.

Sistem PPDB daring juga perlu lebih terintegrasi dengan data Kepedudukan dan Catatan Sipil terkait dengan pemutakhiran NIK. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi masalah NIK yang tidak terdeteksi. Selain itu, Pemda harus memastikan bahwa permasalahan server down tidak akan terjadi lagi.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB sangat diperlukan. "Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses PPDB. Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orangtua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi dan berulang," ujar Nailul.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/19/penerimaan-peserta-didik-baru-2018-sarat-masalah/>

Menimbang Sistem Zonasi

Elin Driana Dosen Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta

13 Juli 2018



Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri telah memicu protes dan kekecewaan dari sebagian orangtua dan anak.

Gagalnya peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional (UN) lebih tinggi untuk dapat diterima di sekolah negeri karena tergeser oleh peserta didik dengan nilai UN lebih rendah, namun tinggal lebih dekat dari sekolah atau memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), merupakan salah satu isu yang muncul berdasarkan analisis atas respons warganet melalui Facebook dan pemberitaan media massa yang saya lakukan.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Penyalahgunaan SKTM oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak untuk memanfaatkan kuota minimal 20 persen bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan gangguan-gangguan teknis saat pendaftaran secara daring juga mewarnai pelaksanaan PPDB tahun ini.

Selain itu, analisis Ismail Fahmi, seorang ahli komputasi bahasa dan analisis media, yang memantau percakapan terkait PPDB di Twitter dan media daring menggunakan Drone Emprit, menunjukkan bahwa respons negatif masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB jauh lebih dominan dibandingkan dengan respons positif, sebagaimana ditulis di akun Facebook-nya pada tanggal 12 Juli 2018.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih cenderung lebih mendengarkan respons positif dari masyarakat. Meskipun demikian, terpantau juga dua orang kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo yang paling aktif merespons keluhan dan kekecewaan masyarakat dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB.

Tidak adil?

Banyak yang menilai bahwa sistem zonasi tidak adil karena nilai UN yang tinggi sebagai buah kesungguhan peserta didik dalam belajar seakan-akan sia-sia karena dikalahkan oleh jarak antara rumah dan sekolah ataupun status sosial ekonomi. Sistem zonasi juga dipandang dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar karena nilai yang tinggi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pembatasan jumlah peserta didik dari luar zona yang hanya 5 persen juga dirasa merugikan peserta didik yang ingin mendapatkan layanan pendidikan lebih baik dibandingkan dengan yang

ada di dekat tempat tinggalnya.

Selama ini, pandangan bahwa peserta didik dengan prestasi akademik yang lebih tinggilah yang lebih pantas untuk diterima di sekolah-sekolah negeri mengingat kapasitasnya yang terbatas, apalagi di sekolah favorit, tampaknya telah terpatri di masyarakat. Sekolah-sekolah favorit tersebut dianggap memiliki mutu yang lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah negeri lainnya.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

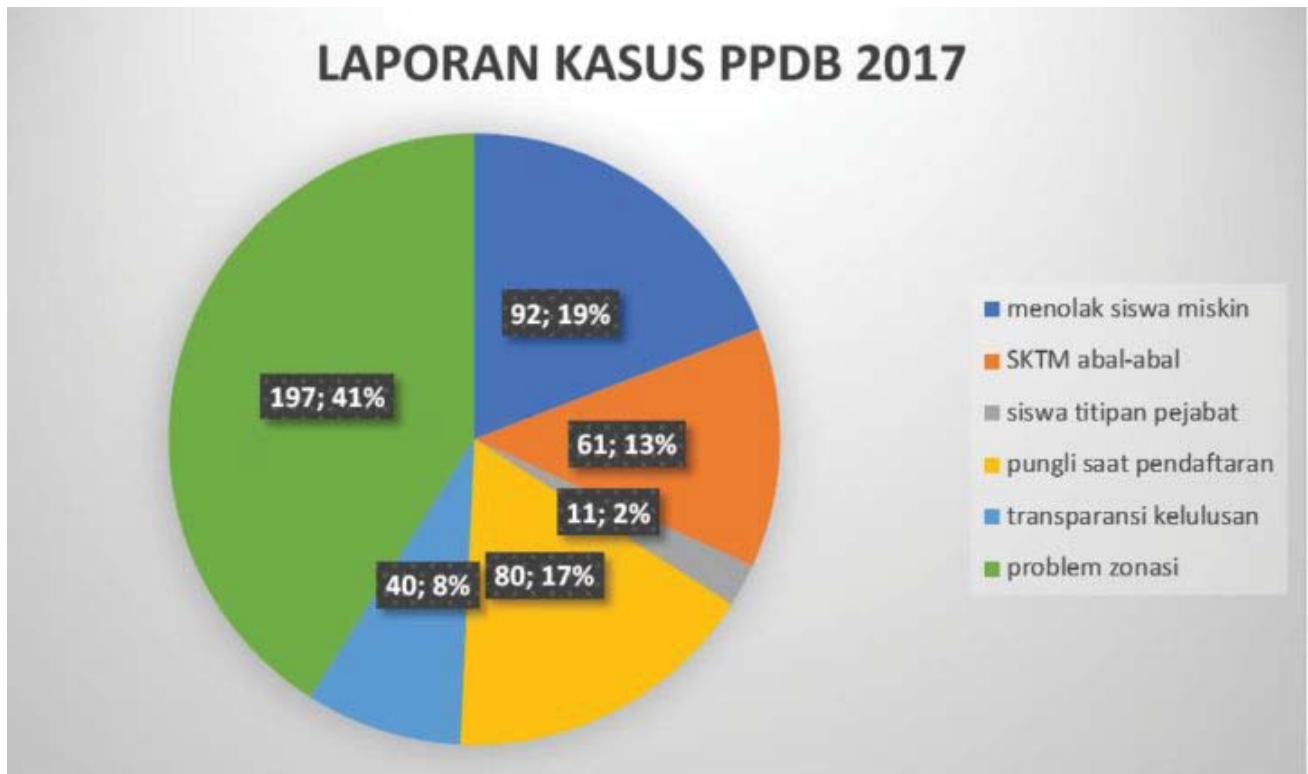
Calon Siswa SMK – Para siswa lulusan SMP/MTs sederajat antri untuk melakukan verifikasi berkas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6). Proses PPDB Tahap I akan berlangsung hingga 17 Juni Besok. Kompas/Wawan H Prabowo (WAK) 15-06-2017

Iklim belajar di sekolah favorit ini pun dinilai lebih baik karena peserta didik yang diterima di sekolah tersebut umumnya memiliki kemampuan akademik dan motivasi belajar yang tinggi. Di samping itu, bersekolah di sekolah-sekolah favorit, terutama di jenjang pendidikan menengah, juga dianggap dapat membuka peluang lebih besar untuk dapat diterima di PTN melalui jalur SNMPTN yang mempertimbangkan nilai rapor, ranking siswa, dan reputasi sekolah.

Meskipun demikian, ada juga warganet yang berpendapat bahwa sistem zonasi sebenarnya positif untuk mendorong pemerataan pendidikan, sehingga ke depannya diharapkan mutu sekolah menjadi lebih setara. Mereka juga menilai bahwa sekolah-sekolah negeri yang selama ini dianggap bermutu oleh masyarakat sebenarnya lebih merupakan cerminan input dibandingkan mutu pembelajaran di sekolah itu sendiri karena selama ini peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah itu adalah mereka yang memang memiliki prestasi akademik yang tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam beragam kesempatan menegaskan bahwa “penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.” Akan tetapi, kata “pemerataan” sendiri tidak muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam

rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.”



sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Tidak terteranya frasa “pemerataan mutu”, tetapi hanya “akses layanan pendidikan” dikhawatirkan dapat mengurangi gaung pesan utama sistem zonasi ini sehingga tidak tertangkap sepenuhnya oleh para kepala daerah, pejabat-pejabat di dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam sosialisasi dan implementasi PPDB. Permendikbud ini tampaknya perlu direvisi lagi untuk lebih menegaskan tujuan sistem zonasi.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Orangtua calon peserta didik melihat pengumuman terkait pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang ditempel di dinding SMA N 78 Jakarta, Kamis (21/6/2018). Pendaftaran pertama untuk jalur lokal secasra daring di DKI Jakarta dimulai pada Senin (25/6/2018).

Di samping itu, Kemendikbud pun perlu segera menjabarkan dan mengimplementasikan “rangkai kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik” yang terkait dengan sistem zonasi ini. Rangkaian kebijakan ini amat esensial karena salah satu keraguan ataupun malah resistensi masyarakat atas sistem zonasi adalah kesenjangan mutu antar sekolah.

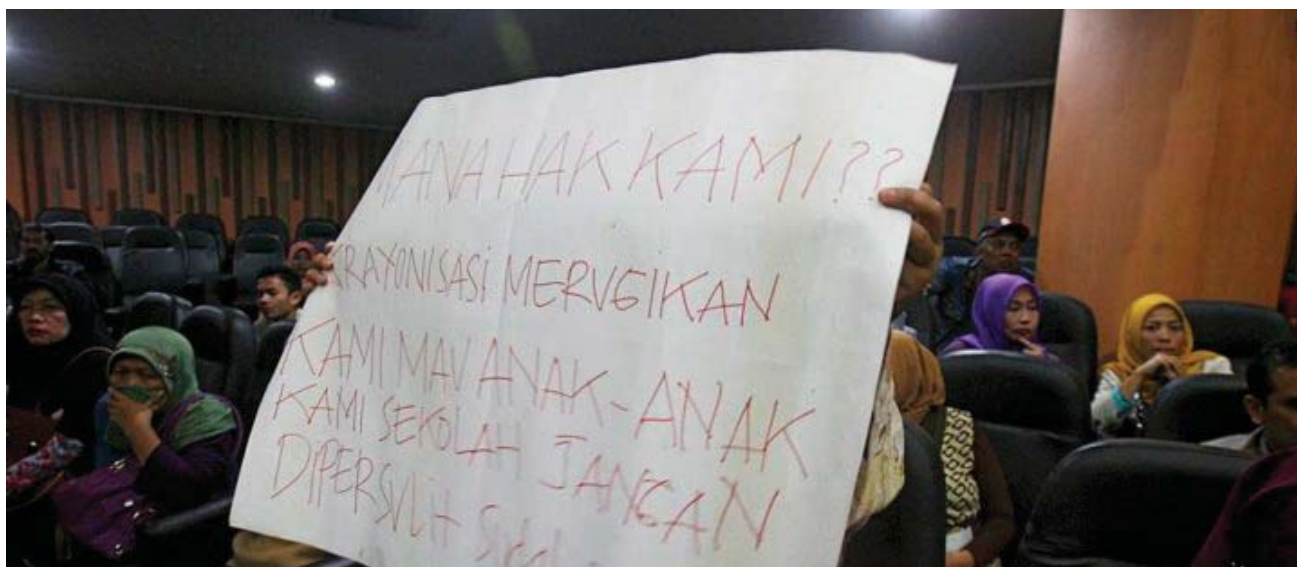
Orangtua tentu menginginkan anaknya mendapatkan hak atas pendidikan bermutu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1) bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Di sisi lain, Pasal 11 Ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Penentuan zona

Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.”

Dalam penentuan zona, tiap-tiap daerah menggunakan kriteria masing-masing. Ada daerah yang menggunakan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah, yang bervariasi antardaerah, dan ada pula yang mendasarkan pada kewilayahan, seperti di Sleman yang membagi dalam empat wilayah, yaitu Sleman barat, Sleman tengah, Sleman utara, dan Sleman timur (antaranews.com, 6/6/2018).

Dalam implementasinya, berbagai masalah terkait penentuan zona ini bermunculan yang disebabkan antara lain oleh tidak meratanya sebaran sekolah di suatu daerah, perbedaan mutu sekolah, perbedaan kepadatan penduduk di sekitar sekolah, dan ketimpangan antara lulusan suatu jenjang pendidikan dan daya tampung sekolah-sekolah negeri di jenjang berikutnya.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

PPDB Kota Bandung Bermasalah – Sejumlah orang tua calon peserta didik bersama-sama mendatangi DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melaporkan Walikota Bandung Ridwan Kamil selaku Pemerintah Kota Bandung atas regulasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru 2015 yang menimbulkan kekisruhan dalam prosesnya. Kontroversi aturan terkait

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi salah satu yang menimbulkan permasalahan tersendatnya PPDB 2015 di Kota Bandung sehingga mengantungkan nasib anak-anak mereka. Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON) 06 Juli 2015

Konsekuensinya, ada sekolah-sekolah negeri di suatu zona yang kekurangan peserta didik dan ada pula yang terpaksa menolak peserta didik karena pendaftar melebihi daya tampung. Di zona yang padat penduduk, ada juga peserta didik yang tak dapat diterima di sekolah negeri manapun meskipun jarak antara rumah dan sekolah kurang dari satu kilometer.

Warganet juga mencatat adanya 'blank spot' dalam sistem zonasi ini, yaitu lokasi rumah yang tidak masuk ke dalam zona manapun sehingga peserta didik tidak dapat mendaftar ke sekolah negeri manapun. Peserta didik dari keluarga yang mampu mungkin memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, tetapi tentunya tidak begitu mudah bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.



Kondisi posko pelayanan PPDB Online, Rabu (4/7/2018).

Beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu telah memberikan bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar SPP dan memenuhi keperluan sekolah lainnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, juga telah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan membiayai warga yang harus bersekolah di sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri, baik untuk SPP maupun perlengkapan sekolah lainnya. Solusi-solusi semacam ini perlu menjadi pemikiran para kepala daerah lainnya bila sistem zonasi ini memang akan tetap dipertahankan.

Untuk mengurangi masalah-masalah terkait penentuan zona, warganet juga mendorong pemerintah untuk membuat pemetaan yang akurat dengan memerhatikan, antara lain sebaran sekolah, daya tampung, jumlah guru, kepadatan penduduk, dan topografi wilayah. Pemetaan ini tentunya perlu didukung data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Zonasi atau prestasi?

Tidak mudah untuk menentukan sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri yang paling tepat untuk Indonesia yang sangat beragam ini dan yang dapat memuaskan semua pemangku kepentingan. Penerimaan peserta didik baru, baik berdasarkan kedekatan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah maupun prestasi akademik dan nonakademik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dengan sistem zonasi, peserta didik dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lebih beragam, baik dari kemampuan akademik maupun latar belakang lainnya. Namun, guru akan menghadapi kelas yang lebih heterogen. Selain itu, peserta didik yang tinggal dekat sekolah yang kurang bermutu tentunya akan dirugikan.



pas/Ester Lince Napitupulu

Mendikbud Muhadjir Effendy menerima hasil pemantauan PPDB dari Wakil Ketua Ombudsman RI di Jakarta, Senin (31/7)

Di sisi lain, bukti-bukti empirik menunjukkan keterkaitan yang erat antara prestasi akademik dan status sosial ekonomi. Bila penerimaan didasarkan pada prestasi akademik, peserta didik yang berasal dari keluarga berada memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah-sekolah yang lebih bermutu. Konsekuensinya, mereka yang kurang dari sisi akademik ditambah lagi berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, akan cenderung terkumpul di sekolah-sekolah yang kurang bermutu.

Penelitian dan evaluasi atas sistem zonasi dalam PPDB amat mendesak dilakukan untuk memperoleh landasan yang kuat atas kebijakan yang dipilih, memperbesar peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, dan mengurangi dampak-dampak negatifnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/opini/2018/07/13/menimbang-sistem-zonasi/>

PPDB DARING

Jalur Zonasi Perlu Dievaluasi

Kurnia Yunita Rahayu

12 Juli 2018 · 08:28 WIB



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru secara daring melalui jalur zonasi diapresiasi karena berupaya menghapuskan penerimaan siswa dengan dasar perolehan nilai ujian. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang justru membuat warga kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah terdekat.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/7/2018), mengatakan, penerimaan melalui jalur zonasi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat itu membutuhkan penegasan pada beberapa bagian. Salah satunya mengenai penentuan domisili calon siswa yang didasarkan pada alamat di kartu keluarga.

Menurut Heru, ketentuan tersebut memunculkan peluang bagi warga dari luar zonasi sekolah untuk memindahkan keanggotaan KK demi mendapatkan sekolah favorit. Hal tersebut berpotensi menghilangkan hak warga setempat.

Heru menambahkan, pemetaan zonasi sekolah juga perlu dicermati. Sebab, jumlah sekolah negeri di beberapa daerah belum merata. Ada daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya memiliki

satu sekolah di daerahnya. Namun, ada pula wilayah berpenduduk jarang yang memiliki banyak sekolah.

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengatakan, salah satunya terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah berpenduduk terpadat di Kabupaten Bogor itu tidak memiliki SMP dan SMA sehingga warga harus mendaftar sekolah yang berada di luar zonasinya. Oleh karena itu, kesempatan mendapatkan sekolah negeri menjadi kecil.

”Sistem zonasi akan bekerja secara optimal ketika jumlah sekolah negeri sudah merata,” kata Retno. Standar seluruh sekolah negeri pun perlu disamakan agar tidak ada pemusatan pendaftaran ke salah satu sekolah.

Meski demikian, Retno mengapresiasi konsep jalur zonasi. Menurut dia, konsep tersebut berupaya menghapuskan sistem penerimaan berbasis nilai. Oleh karena itu, fungsi ujian nasional mampu kembali pada pemetaan kemampuan murid, bukan penentu untuk mendaftar ke sekolah.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Siswa lulusan SMP/MTs sederajat antri untuk melakukan verifikasi berkas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6/2017). Proses PPDB tahap I akan berlangsung hingga 17 Juni 2018.

Selain itu, menurut Heru, ketentuan penerimaan murid dari keluarga ekonomi lemah dalam satu wilayah juga menimbulkan potensi kecurangan. Dalam Pasal 19 Permendikbud No 14/2018 dijelaskan bahwa pemerintah wajib menerima murid berekonomi lemah dalam suatu daerah paling sedikit 20 persen dari kuota penerimaan. Pembuktian status ekonomi tersebut dilakukan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.

Menurut Heru, mekanisme penerbitan SKTM masih lemah. Penerbitannya kerap tidak didasarkan pada kondisi ekonomi faktual warga.

Retno mengatakan, beragam kelemahan tersebut dapat menghilangkan hak anak untuk mendapatkan sekolah negeri. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai PPDB perlu dilakukan lebih intensif dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sumber : <https://kompas.id/baca/metro/2018/07/12/jalur-zonasi-perlu-dievaluasi/>

Ada Kecurangan SKTM, Mendikbud: Nanti Ada Verifikasi

Mutiul Alim | Selasa, 10/07/2018 15:30 WIB



Muhajir Effendy menginstruksikan semua sekolah memverifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang masuk

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy menginstruksikan semua sekolah memverifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang masuk, menyusul maraknya aduan penyalahgunaan SKTM dalam PPDB sistem zonasi tahun ini.

“Saya pastikan semua SKTM yang masuk di sekolah, harus verifikasi oleh sekolah masing-masing. Kemudian dicek di lapangan, kemudian harus ditetapkan, apabila dia memang terbukti bukan dari keluarga tidak mampu maka akan dicabut,” tegas Muhadjir di Kantor Kemendikbud Jakarta, pada Selasa (7/10).

Muhadjir mengakui selama ini terdapat beberapa masalah yang timbul akibat penyalahgunaan SKTM. Seperti adanya keluarga tidak mampu dari luar zona yang ingin masuk di suatu sekolah, lalu ditambah lagi keluarga mampu tapi memaksakan dirinya menjadi keluarga tidak mampu, padahal yang bersangkutan tidak berhak mendapatkannya.

Kendati demikian, Muhadjir belum bisa memastikan jumlah pasti pelanggaran tersebut. Dia hanya mengklaim jumlah pelanggaran itu tidak banyak.

“Ini jumlahnya saya belum tahu persis berapa sebenarnya, tetapi kemungkinan tidak banyak. Hanya memang, ada yang merasa lebih punya hak dibanding yang bersangkutan inilah yang

kemudian kesannya menjadi sangat besar,” jelasnya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tahun ini, JPPI masih menemukan maraknya manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pungutan liar.

Menurut Koordinator Nasional Ubaid Matraji, kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun lalu. Tapi tampaknya pemerintah tidak kunjung merevisi aturan.

“Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Ubaid.

Sumber : <http://www.jurnas.com/artikel/37462/Ada-Kecurangan-SKTM-Mendikbud-Nanti-Ada-Verifikasi/>

PPDB DARING

Migrasi Kartu Keluarga demi Sekolah Negeri

Kurnia Yunita Rahayu

6 Juli 2018



ADITYA DIVERANTA

Yovi Andriani (38), salah satu orang tua murid yang terkendala teknis PPDB di SMPN 1 Jakarta, Selasa (4/7/2018).

Bagi warga Jabodetabek, masuk ke sekolah negeri bukan sekadar persoalan membekali diri dengan nilai ujian yang mumpuni, melainkan memerlukan ragam siasat dan kerja keras.

Salah satunya dilakukan oleh Fadhlan Rizky (15), warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski berdomisili Cibinong, sejak tiga tahun lalu, saat masih duduk di kelas VII sekolah menengah pertama (SMP), Fadhlan menumpang tinggal di rumah kerabatnya di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejak saat itu pula ia tinggal terpisah dengan orangtuanya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara administratif.

Fadhlan dikeluarkan dari keanggotaan kartu keluarga (KK) untuk dimasukkan pada KK kerabatnya yang tinggal di Kecamatan Kramat Jati. Tujuannya satu, yaitu persiapan untuk bisa melanjutkan sekolah di Ibu Kota.

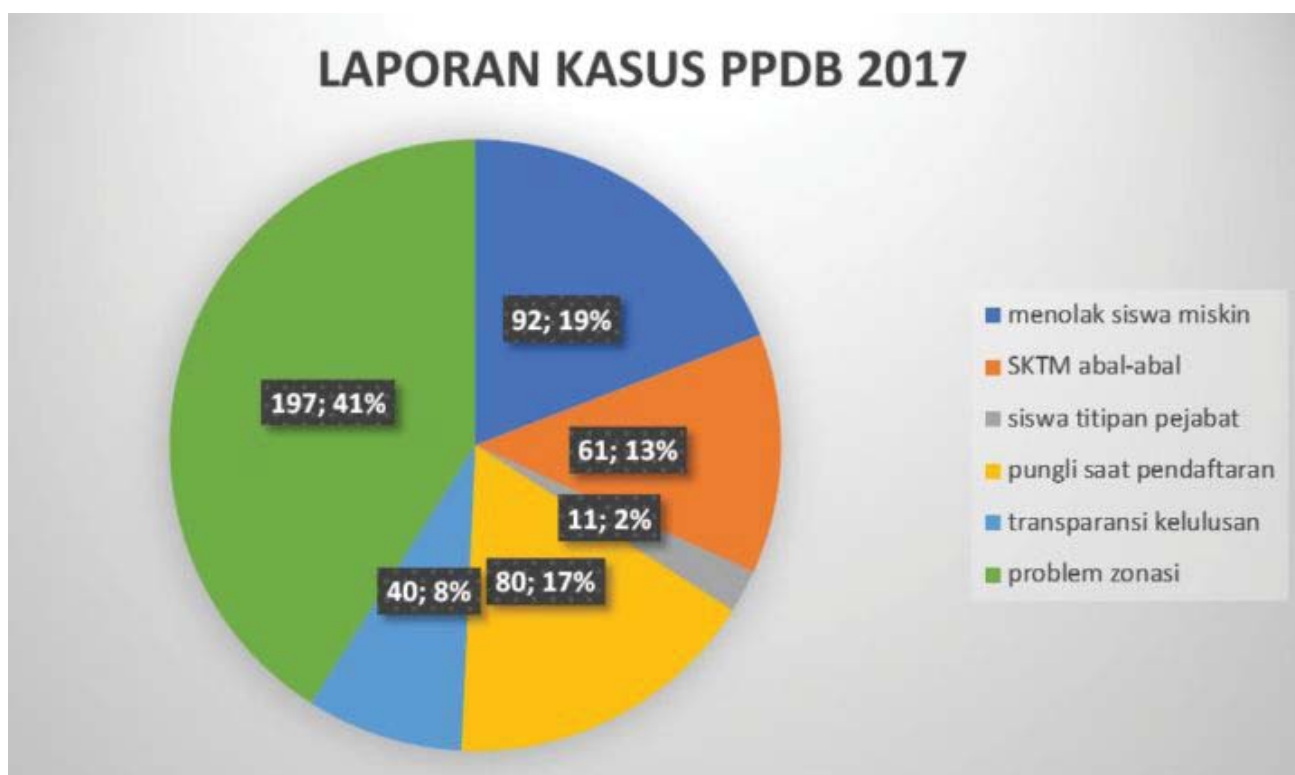
Sejak tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah memberlakukan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring melalui jalur zonasi atau jalur lokal. Penilaian terhadap lulusan sekolah dasar (SD) dan SMP untuk meneruskan ke jenjang sekolah berikutnya ditambahkan sesuai dengan kedekatan domisilinya dengan lokasi sekolah. Semakin dekat dengan sekolah, semakin tinggi nilai tambahan yang diperoleh.

Adapun domisili pendaftar didasarkan pada alamat yang tertera pada KK tempat ia bernaung. Batas waktu penerbitan KK paling lambat enam bulan sebelum PPDB Daring berlangsung.

Porsi penerimaan untuk pendaftar dari jalur zonasi pun paling tinggi ketimbang jalur-jalur lainnya. Jalur lain tersebut di antaranya jalur umum, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.

Oleh karena itu, migrasi KK menjadi pilihan penting bagi Fadhlán. Perolehan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terdiri dari empat mata pelajaran mencapai 32,45. Nilai tersebut belum masuk pada posisi aman untuk bertarung dengan pendaftar-pendaftar lain pada jalur umum.

Upaya tersebut berhasil. Pada PPDB Daring 2018, Fadhlán diterima di SMA Negeri 113, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, melalui jalur zonasi.



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Puti Ayla (16), kakak Fadhlán mengatakan, keberhasilan serupa juga telah ia raih sebelumnya. Ia diterima di SMA Negeri 48, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berkat strategi migrasi KK setahun sebelum tahun pelajaran 2016/2017. Sejak perpindahan keanggotaan KK itu pula, ia pun tinggal di rumah kerabat yang ditumpanginya secara administratif.

”Kami ingin mendapat sekolah di DKI Jakarta, karena seluruh sekolah gratis,” kata Puti di Jakarta, Kamis (5/6/2018). Mereka yang diurus oleh ibu tunggal merasa keberatan jika harus membayar

uang sekolah.

Selain itu, menurut Puti, SMA negeri di Ibu Kota memberikan jaminan lebih besar untuk mengakses perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, prestasi SMA negeri di sana lebih dilirik, lulusannya pun lebih banyak yang diterima di PTN.

Di SMA Negeri 113, tahun ini terdapat 45 lulusan yang diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan. Tak heran, sekolah ini menjadi salah satu yang diburu banyak pendaftar.

Ketua Panitia PPDB Daring SMA N 113 Tahun 2018 Ating mengatakan, pada jalur zonasi, sekolah ini menerima pendaftar yang berdomisili di Kecamatan Cipayung, Kramat Jati, Makassar, dan Ciracas. Daya tampung sekolah adalah 360 murid, sedangkan jumlah pendaftar dari seluruh jalur masuk mencapai 1.700 orang. Adapun yang jumlah murid yang diterima pada jalur zonasi adalah 221 orang, jalur umum sebanyak 134 orang, dan jalur prestasi sebanyak lima orang.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ating menambahkan, ketika pemrosesan data jalur zonasi, sekolah tidak memeriksa status pendaftar di KK merupakan anggota keluarga inti atau bukan. Sekolah hanya memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) mereka. Jika terverifikasi dan sesuai dengan keanggotaan di KK, data dan nilai pendaftar akan diproses. Sekolah akan meminta data domisili asli para pendaftar ketika mereka telah resmi menjadi murid.

"Berdasarkan penelitian sekolah sekitar tiga tahun lalu, proporsi murid yang berdomisili asli di DKI Jakarta dan Kota Bekasi kira-kira 40 persen berbanding 60 persen," kata Ating. Menurut dia, sekolah memang lebih banyak diisi oleh warga dari luar DKI Jakarta.

"Mungkin peraturan tentang KK ini perlu dipertimbangkan kembali. Misalnya, ada persyaratan bahwa calon murid harus berada dalam satu KK dengan orangtua kandungnya," ujar Ating. Ia khawatir, jika tidak ada ketentuan khusus mengenai keanggotaan di dalam KK tersebut, warga

sekitar dari sekolah justru tidak bisa merasakan manfaat jalur zonasi.

Seperti dirasakan oleh Nur Fitriani (24), warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ia sudah gagal mendaftarkan adiknya ke SMP Negeri 9 Jakarta Timur baik dari jalur zonasi maupun jalur afirmasi.

Adik Nur yang memperoleh rata-rata nilai ujian sebesar 57 kalah dari pendaftar-pendaftar lain. Nilai tambahan yang didapatkan berkat domisilinya yang berada dalam satu zona dengan sekolah tersebut tidak mampu membantu. Di SMP Negeri 9, rata-rata nilai tertinggi yang diterima pada jalur lokal adalah 97,57, sedangkan rata-rata nilai terendah yang diterima adalah 89,67.

"Saya berharap masih ada bangku kosong yang bisa diisi adik saya," kata Nur. Sebab, PPDB Daring tahap kedua akan dibuka berdasarkan ketersediaan kursi yang tidak terisi.

Para orangtua mendaftarkan anaknya pada hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah dasar di SD Negeri 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2018). Kegiatan PPDB hari pertama di sekolah tersebut diperuntukkan bagi calon siswa jalur umum yang berasal dari dalam dan luar Jakarta.

Harapan Nur semestinya terwujud lebih awal, karena jalur zonasi bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga di sekitar sekolah untuk sama-sama mendapatkan pendidikan. Namun, perlu ada mekanisme untuk menjamin agar keadilan benar-benar terwujud. Jangan sampai para warga justru beradu siasat, untuk mencari celah melumpuhkan peraturan.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/06/migrasi-kartu-keluarga-demi-sekolah-negeri/>

PPDB SD Diterpa Isu Pungli

Rabu, 04 Jul 2018 09:47 | editor : Aries Wahyudianto



Suasana belajar siswa di salah satu sekolah di Gresik. PPDB untuk SD ditengarai adanya pungutan liar. (Yudhi/Radar Gresik)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) diterpa isu tidak sedap. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai PPDB SD di Gresik ada pungutan liar (pungli).

Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan di salah satu SDN di Gresik dugaan pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. Di daerah lain, ada juga dengan berbagai alasan berbeda, seperti biaya LKS, seragam, buku, dan lain-lain.

Padahal menurut dia, pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku dan lain-lain. Sedangkan jual beli kursi, dilakukan dengan dua model sistem pendaftaran: dalam daring dan luar daring.

“Jika tak terpenuhi melalui online, bisa ditempuh dengan jalur offline, di situlah angka bisa dipasang. Padahal, berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB jelas harus menggunakan salah satu sistem, bukan dua-duanya digunakan,” ungkap dia.

Karena itu dia meminta agar semua oknum yang terlibat dalam pungli dan jual beli kursi ditindak tegas. Dia pun mendorong agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses PPDB.

“Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orang tua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selama proses PPDB sangat diperlukan,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dispendik Gresik Mahin belum bisa dikonfirmasi. Namun, sebelumnya Kepala Seksi Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nur Maslichah memastikan jika dengan sistem online akan sulit terjadi pungli. “Semua mekanisme sesuai dengan juknis yang ada,” jelasnya. (han/jee)

Sumber : <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/07/04/85286/ppdb-sd-diterpa-isu-pungli>

PENERIMAAN SISWA BARU

Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Fokus Perbaikan Pemerintah

DEONISIA ARLINTA/ESTER LINCE NAPITUPULU/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

2 Juli 2018



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Salah satu calon peserta didik melewati papan pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 8 Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018). Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2018/2019 tahap kedua jalur umum DKI Jakarta mulai dibuka hari ini, Selasa hingga Rabu (4/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerataan layanan dan fasilitas di tingkat sekolah harus jadi fokus pemerintah guna mewujudkan kesetaraan pendidikan. Tanpa pemerataan, tujuan sistem zonasi, menghapus “kastanisasi” pendidikan, sulit terwujud.

Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema berpendapat, sistem zonasi sudah tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkecil disparitas akses pendidikan di Indonesia. Namun, pemerintah harus memastikan layanan pendidikan berkualitas sudah setara di semua sekolah negeri, baik di kota besar, pedesaan, maupun daerah pinggiran.

“Konsep kastanisasi sekolah atau sekolah favorit adalah persepsi masyarakat. Pemerintah akan sulit mengintervensi persepsi bila layanan pendidikan berkualitas tidak dipenuhi di semua sekolah negeri,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Di DKI Jakarta, misalnya, masih ditemukan orangtua calon peserta didik memilih sekolah yang dianggapnya favorit meskipun di luar zonasi tempatnya tinggalnya. Azhar Firdaus (45), warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, mendaftarkan anaknya di tahap kedua jalur umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Dengan nilai rata-rata ujian nasional 9,25, ia percaya

anaknya bisa diterima pada jalur umum meski kuota yang ditawarkan jauh lebih kecil dibandingkan jalur lokal.

“Saya pilih SMA negeri dengan kualitas baik yang jauh dari rumah, daripada dekat rumah tetapi kualitasnya kurang. Memilih SMA harus selektif karena berpengaruh pada penerimaan anak saya di perguruan tinggi nanti,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 638 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, disebutkan kuota yang disediakan untuk PPDB tahap pertama jalur lokal minimal 55 persen dari daya tampung, tahap kedua jalur umum (35 persen), jalur prestasi (5 persen), dan jalur afirmasi (5 persen).

Akan tetapi, menurut Doni, pemerintah masih belum fokus dalam upaya menyetarakan layanan pendidikan. Kesetaraan itu mencakup sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, serta kualitas pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan di sekolah. Diharapkan, selain akses pendidikan, tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan juga dapat dirasakan masyarakat.

Ditemui terpisah, Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta Agusman Anwar menyatakan, melalui sistem zonasi, profil siswa yang masuk ke sekolahnya relatif lebih heterogen. Selain tingkat kecerdasan, latar belakang keluarga dan tingkatan ekonomi juga lebih beragam. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak memengaruhi kualitas anak didik di sekolahnya.

“Justru, itu menjadi tugas sekolah untuk bisa memberikan layanan yang baik dan berkualitas dalam proses belajar sehingga siswa bisa memiliki kualitas yang sama-sama unggul saat lulus SMA,” katanya.

Pengaduan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, sejumlah kasus terkait PPDB 2018 sudah dilaporkan ke posko pengaduan JPPI. Salah satunya, kebingungan orang tua dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar.

Jika masalah akses yang sulit atau server down mungkin bisa dilakukan dengan menunggu waktu sela, masalah NIK yang tertolak ini cukup membuat panik orang tua. Pasalnya mereka yang merasa tidak ada masalah dengan zonasi dan kuota, justru terganjal dengan NIK yang tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ini hampir terjadi merata di seluruh daerah.

Selain itu, Ubaid mengatakan, ada juga laporan soal manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kasus ini sudah terjadi pada tahun lalu dan masih menjadi masalah tahun ini.

“SKTM masih diperbolehkan jadi syarat siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, bisa menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” jelas Ubaid.

Ubaid mengatakan, di beberapa daerah terlihat antusiasme masyarakat yang mendaftar dengan mengisi bangku kuota 20 persen bagi anak miskin bermodal SKTM. Di daerah lain, yang melarang SKTM, tapi mengharuskan menggunakan KIP atau PKH, justru sepi peminat. Hal itu terjadi di Kalimantan Timur.

“Di posko pengaduan juga ada laporan soal pungutan liar alias pungli dan jual beli kursi. Pungli

dan jual beli kursi dapat dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman dan masuk sekolah. Bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan saat proses daftar ulang,” kata Ubaid.

Ia mencontohkan, pungli di salah satu SDN di Gresik. Pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. Di daerah lain, ada juga pungli bermotif biaya lembar kerja siswa, seragam, hingga buku. Padahal pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Salah satu orangtua siswa berjalan melewati ruang pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 untuk tahap kedua jalur umum di SMAN 68 Jakarta, Senin (2/7/2018). Pendaftaran jalur umum PPDB DKI Jakarta dibuka hari ini, Senin hingga Rabu (4/7/2018).

Laporan lainnya, ujar Ubaid, soal tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung) dan psikotes di madrasah setingkat SD. Kebijakan ini banyak dikeluhkan oleh orang tua, karena tidak mendorong akses, tapi membebani anak kali pertama bersekolah dengan berbagai tes yang membingungkan.

“Tahun lalu sudah banyak diprotes, tapi tahun ini dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 481 Tahun 2018 tentang PPDB, aturan ini masih dilegalkan,” ujar Ubaid.

Persoalan lainnya yakni tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal, tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat mengakses Sekolah Luar Biasa yang terbatas jumlahnya dan jauh dari rumah tinggal. Keluarga yang memiliki ABK menyayangkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak memberikan kuota afirmasi bagi kelompok difabel. Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah Kemenag lebih ramah terhadap difabel. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi ABK.

Sementara itu, di Bandung, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Barat

Haneda Sri Lastoto mewaspadai adanya pelanggaran penyelenggaraan penerimaan siswa baru. Hal itu dipicu infrastruktur di setiap sekolah yang belum merata.

Haneda menilai, ketimpangan ini membuat praktik malaadministrasi masih dikhawatirkan terjadi. Sosialisasi, tutur Haneda, masih menjadi masalah dalam penerapan sistem ini. Tidak semua masyarakat paham sehingga masih berupaya memasukkan anaknya di sekolah yang diinginkan.

“Terkadang, potensi pelanggaran berasal dari masyarakat itu sendiri. Mereka masih berambisi menyekolahkan anaknya di tempat yang mereka anggap favorit. Jadi, oknum-oknum pasti mencari jalan bagi para orangtua, sehingga mereka mendapatkan keuntungan pribadi,” tuturnya.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Koordinator Pengawasan PPDB Jawa Barat ORI, Noer Adhe Purnama, menuturkan, meskipun sistem zonasi dianggap bisa mengurangi potensi pelanggaran, pihaknya tetap melakukan pengawasan di daerah untuk memastikan penerapan sistem sesuai dengan aturan. Ia berujar, dalam minggu ini ORI akan memantau lima daerah tingkat kota/kabupaten.

Menurut Noer, maladministrasi dikhawatirkan masih terjadi karena fasilitas pendidikan yang belum merata di semua daerah. Tidak hanya infrastruktur, kualitas pendidikan yang tidak merata membuat masyarakat berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di tempat lain.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/07/03/pemerataan-pendidikan-harus-jadi-fokus-perbaikan-pemerintah/>

PPDB Masih Diwarnai Pungli dan Manipulasi SKTM

Senin 02 Jul 2018 16:29 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Sejumlah calon peserta didik bersama orang tuanya mengikuti proses verifikasi berkas administrasi akademik dan non akademik di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (2/7). Hari ini mulai dilakukan verifikasi berkas bagi PPDB sistem Zonasi. Foto: Republika/Bowo Pribadi

SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tahun ini, JPPI masih menemukan maraknya manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pungutan liar.

Menurut Koordinator Nasional Ubaid Matraji, kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun lalu. Tapi tampaknya pemerintah tidak kunjung merevisi aturan.

“Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Ubaid kepada Republika, Senin (2/7).

Dia mengatakan, di beberapa daerah antusiasme pendaftar yang menggunakan SKTM terbilang cukup tinggi yakni mengisi kuota 20 persen bagi anak miskin. Berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain yang melarang SKTM, tapi mengharuskan menggunakan KIP atau PKH, justru sepi peminat, seperti terjadi di daerah Kalimantan Timur.

Sementara itu, terkait temuan pungli dan jual beli kursi, JPPI juga menemukan praktik pungli dan jual beli kursi dapat dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman PPDB. “Ya betul, (praktik pungli dan jual beli kursi) bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan bahkan saat proses daftar ulang,” jelas Ubaid

Dia mengambil contoh, di salah satu SDN di Gresik pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. di daerah lain, ada juga dengan berbagai alasan berbeda, seperti biaya LKS, seragam, buku, dan lain-lain.

Padahal menurut dia, pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku dan lain-lain. Sedangkan jual beli kursi, dilakukan dengan dua model sistem pendaftaran: dalam daring dan luar daring.

“Jika tak terpenuhi melalui online, bisa ditempuh dengan jalur offline, di situlah angka bisa dipasang. Padahal, berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB jelas harus menggunakan salah satu sistem, bukan dua-duanya digunakan,” ungkap dia.

Karena itu dia meminta agar semua oknum yang terlibat dalam pungli dan jual beli kursi ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia pun mendorong agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses PPDB.

“Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orang tua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi dan reproduksi. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selama proses PPDB sangat diperlukan,” tegas dia.

Sumber: <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/07/02/pb8fp5335-ppdb-masih-diwarnai-pungli-dan-manipulasi-sktm>

JPPI Kritisi PPDB tak Berikan Kuota Anak Berkebutuhan Khusus

Senin 02 Jul 2018 18:01 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Sejumlah calon peserta didik bersama orang tuanya mengikuti proses verifikasi berkas administrasi akademik dan non akademik di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (2/7). Hari ini mulai dilakukan verifikasi berkas bagi PPDB sistem Zonasi. Foto: Republika/Bowo Pribadi

Padahal anak berkebutuhan khusus akan sangat terbantu dengan radius yang dekat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritisi Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB yang tidak memberikan kuota afirmasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau kelompok difabel. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus akan sangat terbantu jika bersekolah yang radiusnya dekat dengan tempat tinggal.

“Kendala akses yang masih terjadi hingga hari ini adalah kesempatan sekolah bagi kelompok yang tereksklusi. Karena memang tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus,” jelas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Republika, Senin (2/7).

Dia mengatakan, banyak orang tua dari ABK enggan bersekolah di sekolah selain SLB (Sekolah Luar Biasa), karena tidak ada komitmen dari pihak sekolah. Mereka juga menyesalkan, Permendikbud

No.14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak memberikan kuota afirmasi bagi kelompok difabel.

“Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah kemenag lebih ramah terhadap difabel. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi anak berkebutuhan khusus,” jelas dia.

Di sisi lain, JPPI juga menerima banyaknya keluhan terkait sistem PPDB online, seperti masalah server-down dan NIK yang belum terdaftar dalam sistem. Dia menjelaskan, jika masalah akses yang sulit atau server down mungkin bisa dilakukan dengan menunggu waktu sela, tapi masalah NIK yang tertolak ini cukup membuat panik orang tua.

“Pasalnya mereka merasa tidak ada masalah dengan zonasi dan kuota, justru mereka terganjal dengan NIK yang tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ini hampir terjadi merata di seluruh daerah,” jelas dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad mengakui masih ada keluhan atas sistem zonasi. Tapi dia mengklaim bahwa sistem ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Basis untuk zonasi mencapai 90 persen, prestasi ujian nasional 5 persen, serta pindahan atau dari luar daerah mencapai 5 persen. Dengan sistem ini maka bisa jadi mereka yang memiliki nilai ujian tinggi pun belum tentu bisa langsung memilih sekolah sesuai dengan yang diinginkan.

“Jadi tidak masuk (SMP/SMA) walau nilai UN-nya lebih tinggi, mungkin karena zona-nya jauh dari sekolah tujuan,” ujar Hamid.

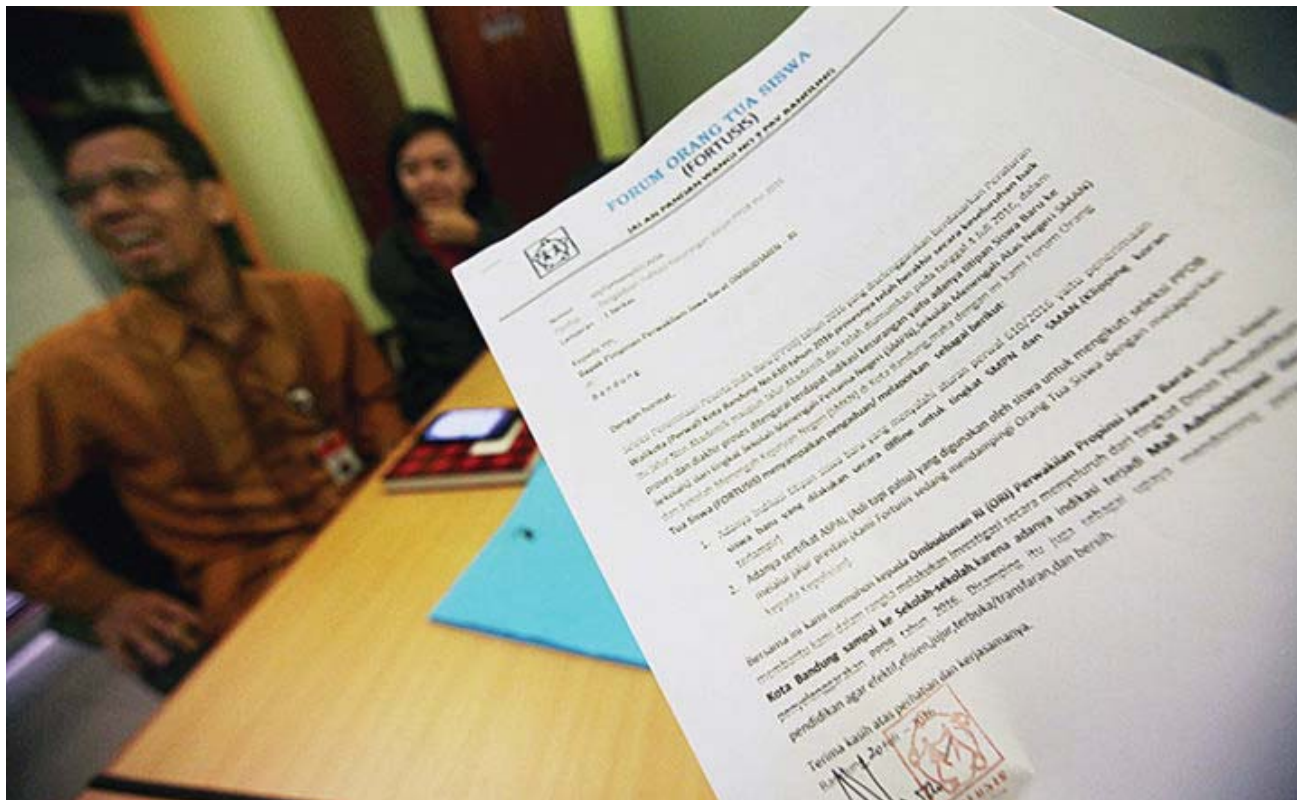
Sumber : <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/07/02/pb8jyu335-jppi-kritisi-ppdb-tak-berikan-kuota-anak-berkebutuhan-khusus>

PENERIMAAN SISWA BARU

Dugaan Pungutan Liar di PPDB Daring Banten

DEONISIA ARLINTA

23 Juni 2018 · 05:00 WIB



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung melaporkan tindak penyelewengan proses penerimaan siswa baru kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/7/2016). Penyelewengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA tersebut adanya siswa titipan yang menyalahi Peraturan Walikota Bandung 610/2016 serta adanya penggunaan sertifikat palsu untuk siswa yang menggunakan jalur prestasi.

JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah oknum memanfaatkan gangguan koneksi penerimaan siswa baru tingkat SMA di Banten dengan melakukan pungutan liar. Modusnya, oknum itu menawarkan bantuan pendaftaran penerimaan siswa baru secara daring dengan meminta imbalan uang.

“Saat datang ke SMAN 5 Kabupaten Tangerang, saya kesulitan mendaftar. Lalu, ada yang menawarkan bantuan pengisian formulir dengan biaya Rp 50.000. Tapi saya tolak,” kata Lasiyah, warga Kabupaten Tangerang, Banten saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, (22/6/2018). PPDB di Banten, dimulai sejak Kamis (21/6/2018).

Lasiyah mengatakan, orang yang menawarkan bantuan itu mengaku sebagai petugas sekolah. Oknum itu mengatakan, sudah berhasil mendaftarkan beberapa siswa dengan imbalan Rp 100.000.

Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 SMAN 5 Kabupaten Tangerang Muhammad Barried menyangkal kejadian itu. "Tidak ada pungutan apapun. Semua gratis. Kalau ada pungutan justru harus dilaporkan. Kemungkinan hal itu dilakukan orang luar yang mengaku sebagai petugas sekolah," katanya.

Hal itu sejalan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Di sana disebutkan pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah bebas dari biaya karena sudah dibebankan pada biaya operasional sekolah.

Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Banten Amal Herawan Budhi menyangkan muncul dugaan pungutan liar dalam proses PPDB di daerahnya. "Tidak ada (pungutan) sama sekali. Jika ditemukan adanya pungutan, orangtua ataupun siswa harap langsung melaporkan," ujarnya.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq menilai, pemerintah pusat maupun daerah harus menegaskan pada sekolah-sekolah untuk mengutamakan transparansi dalam pembiayaan di sekolah. Selain itu, partisipasi publik menjadi penting untuk meminimalisir beberapa kasus yang terjadi selama ini.

"Kami langsung koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait, seperti Ombudsman RI, Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan tim sapu bersih pungutan liar. Untuk sanksi, aturannya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Kepala daerah harus tegas dalam hal ini," kata Nailul.

Terkait gangguan sistem PPDB berbasis daring di Banten, Amal mengatakan masih ditemukan kendala hingga hari kedua. Gangguan itu disebabkan membludaknya jumlah orang yang mendaftar secara daring.

"Puncaknya saat jumlah yang ingin mendaftar mencapai 13 juta permintaan. Secara teknis, peluangnya 5:1. Satu masuk dan lima ditolak," tutur Amal.

Selain itu, Amal berpendapat, kendala sistem daring ini juga dipicu kurang siapnya sumber daya manusia yang tersedia. Saat ini, penanganan sistem PPDB daring masih diserahkan pada pihak ketiga.

"Kami terus memperbaikinya. Kini, sudah delapan zona di Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, yang sudah mendaftar. Jumlahnya mencapai 48.102 orang," kata Amal.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/06/23/dugaan-pungutan-liar-di-ppdb-daring-banten/>

PENERIMAAN SISWA BARU

Gangguan Sistem Daring Menjadi Kendala

DEONISIA ARLINTA

22 Juni 2018



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Orangtua calon peserta didik melihat pengumuman terkait pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang ditempel di dinding SMA Negeri 78 Jakarta. Pendaftaran pertama untuk jalur lokal secara daring di DKI Jakarta dimulai pada Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah permasalahan masih ditemukan pada sistem penerimaan peserta didik baru tingkat SMA tahun ajaran 2018/2019 berbasis internet. Masalah ini terutama pada sistem daring yang terganggu.

Jelita Dinar (14), salah satunya. Calon peserta didik yang ingin mendaftar sekolah ke SMK Negeri 1 Kota Tangerang ini lebih dari lima kali gagal mengisi formulir secara daring. Pada aplikasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Provinsi Banten Tahun 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Banten beberapa kali terjadi gangguan. Saat mengisi data pada lembar formulir daring, Jelita mengatakan, halaman pada web tiba-tiba menjadi putih bertuliskan ‘502 Bad Gateway’.

“Saya sudah coba buka website PPDB Provinsi Banten sejak semalam. Pendaftaran memang baru mulai dibuka pukul 00.00. Saat sudah dibuka, web-nya malah error. Lebih dari lima kali saya coba dan baru sekitar pukul 16.00 tadi berhasil,” ujar Jelita yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Hal serupa juga dialami oleh Nina Maria Gultom (14). Namun, meski sudah dicoba berkali-kali,

hingga pukul 20.00 ia belum juga berhasil mengisi formulir pendaftaran daring secara lengkap. Ia berencana mendaftarkan diri ke SMA N 2 Tangerang, Banten. “Seharusnya kalau lewat online (daring) kan lebih mudah, ini malah jadi ribet,” ucapnya.

Pungutan

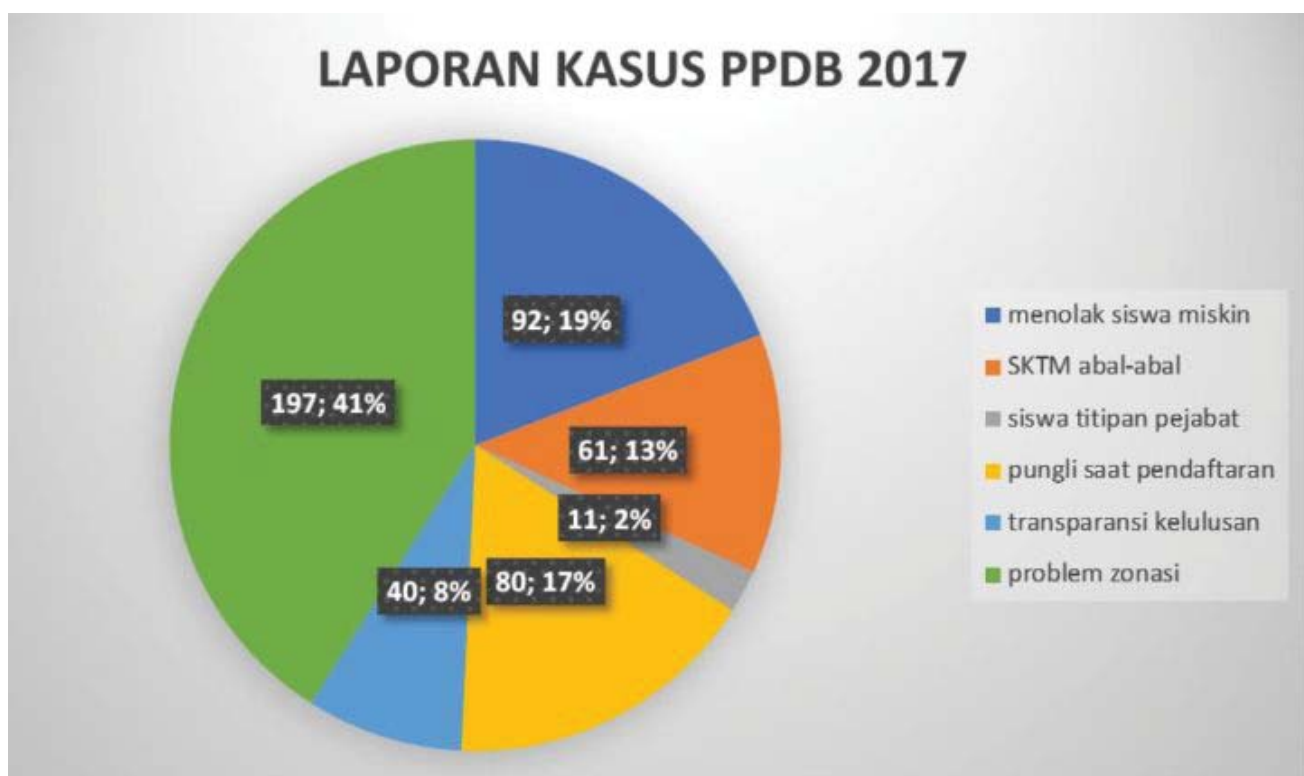
Akibat gangguan pada sistem daring ini, Lasiyah, orangtua salah satu siswa, sampai mendatangi sekolah yang dituju. Ia berharap ketika sampai di sekolah bisa mendaftarkan anaknya secara langsung atau setidaknya mendapatkan penjelasan terkait gangguan tersebut.

Namun, saat Lasiyah tiba ke sekolah tersebut, pihak sekolah justru meminta sejumlah dana untuk membantu proses pendaftaran. Karena curiga, Lasiyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan tetap memilih mencoba mendaftarkan anaknya secara daring.

Pihak sekolah justru meminta sejumlah dana untuk membantu proses pendaftaran secara daring.

“Kata pihak sekolah bayar Rp 50.000 saja, kalau yang lain malah (diminta membayar) sampai Rp 100.000 begitu,” katanya.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, pada 2017 kasus PPDB didominasi oleh masalah zonasi dan pungutan liar, yaitu 41 persen untuk masalah zonasi dan 17 persen untuk pungutan liar saat pendaftaran.



sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq menilai, pemerintah pusat maupun daerah harus menegaskan kepada sekolah-sekolah untuk mengutamakan transparansi dalam pembiayaan di sekolah. Selain itu, partisipasi publik menjadi penting untuk meminimalisir beberapa kasus yang terjadi selama ini.

“Kami JPPI langsung koordinasi dengan lembaga/kementerian terkait, seperti Ombudsman RI, Inspektorat Kemendikbud, Kementerian Agama, dan juga Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). Untuk sanksi, aturannya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Kepala daerah harus tegas dalam hal ini,” kata Nailul.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan, kepala dinas pendidikan setempat memiliki tanggung jawab penuh akan proses PPDB yang berlangsung di daerahnya.

Kepala dinas pendidikan setempat memiliki tanggung jawab penuh akan proses PPDB yang berlangsung di daerahnya.

“Rakor (rapat koordinasi) PPDB sudah dilakukan dengan semua kadisdik (kepala dinas pendidikan) pada pertengahan puasa lalu. Semuanya sudah dijelaskan terkait pelaksanaan dan pengawasannya,” ujarnya.

Persiapan

Sementara, sejumlah SMA di DKI Jakarta saat ini masih dalam persiapan pelaksanaan PPDB tahap pertama untuk jalur lokal yang dimulai pada 25 Juni 2018. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA N 78 Jakarta Erizal menyatakan, persiapan yang dilakukan pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.

“Kami hanya melanjutkan proses tahun lalu, tidak ada yang berbeda. Semoga bisa berjalan lancar dengan sistem online ini,” katanya.

Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Rita Nurmastuti mengatakan, persiapan penerimaan siswa baru mulai dilaksanakan Jumat (22/6). “Kami siapkan perangkat, ruangan, dan simulasi layanan untuk mengantisipasi banyaknya pendaftar yang datang ke sekolah di hari pertama besok Senin ini,” ujarnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/22/gangguan-sistem-daring-menjadi-kendala/>

Buka Data KIP Agar Terpantau

Laraswati Ariadne Anwar/Deonisia Arlinta

18 Juni 2018



Istimewa/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

Murid-murid di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (9/5/2017).

Transparansi data penyaluran Kartu Indonesia Pintar diperlukan agar masyarakat dapat memantau program yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin ini. Apalagi, pengawasan dari pemerintah masih lemah.

JAKARTA, KOMPAS – Transparansi data serta penguatan pemantauan oleh masyarakat dibutuhkan untuk memastikan penyebaran Kartu Indonesia Pintar tepat sasaran dan tidak ditunggangi kepentingan politik praktis. Penyaluran KIP bukan ranah partai politik maupun anggota legislatif.

Legislatif bertanggung jawab sebatas menentukan budgeting (pembiayaan), pengawasan, dan regulasi. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pihak sekolah harus tegas untuk tidak memberikan celah pada parpol dalam penyaluran KIP.

“Jika tidak ada ketegasan, program ini justru bisa dimanfaatkan bagi keuntungan parpol serta menyebabkan bias politik di masyarakat,” kata Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Makassar Nur Sadik, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/6/2018).

Hal ini berkaitan dengan penemuan Indonesian Corruption Watch (ICW), antara lain di Yogyakarta, yang mengungkapkan ada partai politik menyebarkan KIP. Modusnya yang digunakan adalah politisi partai mendatangi sekolah dengan dalih membantu menyebarkan KIP di daerah pemilihan

mereka (Kompas, 8/6/2018). Akibatnya, KIP tidak tepat sasaran karena para penerimanya bukan para siswa dari keluarga miskin sesuai Data Pokok Pendidikan.

Nur menilai, adanya intervensi dari parpol dalam penyaluran KIP disebabkan sistem yang berlaku saat ini masih longgar. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus turut berperan dalam pengawasan penyaluran KIP. "Jadi kalau ditemukan keterlibatan parpol, Bawaslu, dan KPU langsung bertindak," katanya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan bahwa semua KIP hanya boleh disalurkan oleh sekolah. Pengecualian penyebaran oleh sekolah hanya untuk anak-anak usia sekolah yang diasuh di panti-panti sosial.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan bahwa semua KIP hanya boleh disalurkan oleh sekolah.

Transparansi

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid menuturkan, mayoritas keluhan yang diterima dari masyarakat adalah KIP tidak tepat sasaran. Masyarakat mempertanyakan alasan keluarga yang ekonominya tidak tergolong miskin, tetapi menerima KIP.

"Harus ada transparansi data yang digunakan. Misalnya, per kecamatan secara terbuka mengumumkan daftar para penerima KIP," tuturnya. Metode ini menurut Ubaid bisa membantu masyarakat memastikan penyebaran kartu tepat sasaran.

Selain itu, data hendaknya dinamis dan selalu mengikuti perubahan situasi. Apabila sebuah keluarga kondisi ekonominya membaik menjadi tidak miskin, anak-anaknya tidak perlu lagi santunan KIP.

"Pengawasan seperti itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, butuh keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari publik," ujar Ubaid.

Menanggapi temuan ICW, peneliti kebijakan publik dari Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa hal itu menunjukkan belum terintegrasinya lembaga pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dinas pendidikan yang berada di bawah pemerintah daerah belum melakukan tugas pengawasan, pengawalan, dan pengelolaan dengan maksimal karena sekolah bisa diterobos oleh partai politik dalam penyebaran KIP.

"Tampak bahwa kebijakan di sektor pendidikan belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga-lembaga pemerintah di bidang lainnya. Akibatnya, pengawasan lemah," ujarnya.

Menurut Nus Sadik, pengawasan di tingkat daerah juga perlu diperkuat. Koordinasi dan sinergi yang baik harus dilakukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Pusat langsung tegur kalau ada pelanggaran di daerah," ucapnya.

KIP merupakan program pemerintah pusat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah. Siswa yang menerima KIP akan mendapatkan bantuan keuangan secara reguler yang diberikan setiap semester.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/18/buka-data-kip-agar-terpantau/>

Jumat, 08 Juni 2018 16:19 WITA

Kemenristekdikti Data Nomor HP dan Medsos Mahasiswa, Fadli Zon: Grabak Grubuk Tidak Karuan

Editor: Abu Asyraf



Fadli Zon

RAKYATKU.COM - Rencana pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial mahasiswa menuai polemik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon termasuk salah satu yang bingung dengan rencana itu.

Wakil Ketua DPR itu bahkan mengatakan, jika itu dilakukan Kemenristekdikti, maka bisa dikategorikan tindakan konyol. Bagi Fadli Zon, tindakan seperti itu merupakan kemunduran di era demokrasi.

“Jika ada orang yang memberikan stigma seperti itu (radikal) kepada kampus, pasti dia orang bodoh,” kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (8/6/2018).

Bagi Fadli, kampus adalah ruang untuk belajar. Jika stigma terorisme dilayangkan terhadap kampus, artinya pemerintah setuju jika kampus adalah label terorisme.

“Kampus kita ini adalah kampus modern dan tidak ada stigma itu. Mahasiswa radikal juga tidak ada. Kalau berpikir radikal dalam arti berpikir tajam, tidak ada masalah,” katanya menjelaskan.

Fadli berpendapat jika berpikir radikal adalah cara berpikir yang mengakar, bukan radikal dalam arti terorisme. Bagi Fadli, berpikir tajam adalah berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah pengetahuan.

Menurut dia, kekuatan kampus adalah kekuatan pemikiran yang menghasilkan karya-karya dan benteng peradaban. Ia pun menilai salah atas langkah pemerintah mengawasi ponsel mahasiswa, sehingga perlu dikoreksi.

Oleh karena itu, akun pribadi milik mahasiswa tidak perlu diawasi. Baginya hal tersebut telah menciderai demokrasi. Pengawasan tersebut juga dinilai telah melanggar hak privasi para mahasiswa.

“Kalau orang sudah merasakan ketidakadilan, dia akan mencari jalan sendiri untuk mencapai keadilan. Saya rasa perguruan tinggi dan mahasiswa harus menentang hal ini,” tambah Fadli.

Ia menambahkan, radikalisme dan terorisme jangan dijadikan proyek oleh segelintir pihak. Dirinya menekankan, pemerintah harus memberikan keamanan, keselamatan, dan keyakinan pada masyarakat. “Bukan grabak grubuk tidak karuan,” tegas Fadli.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor HP dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

“Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa,” ungkap Nasir di Hotel Fairmont Jakarta seperti dikutip dari Republika, Senin (4/6/2018).

Dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal.

“Kalau mengganggu keamanan. Apapun bentuk (pengawasan) nya, harus dilakukan,” tegas Nasir.

Nasir tidak menutup kemungkinan, saat ini masih banyak kampus yang telah terpapar paham radikal namun belum terdeteksi. Mengingat, menurut dia, paham radikal mulai tumbuh di ranah kampus sejak tahun 1983 ketika dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Kendati begitu, Nasir memastikan saat ini pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama seperti halnya NKK/BKK untuk menangkal radikalisme di kampus. Karena jika dihidupkan kembali, maka kampus berpotensi menjadi wahana politik lagi.

“Dan itu bahaya. Jadi, nanti kami akan mendesain kurikulum agar kampus harus bisa memahami

keamanan di Indonesia. Supaya kita mendapat kepercayaan dari dunia. Kalau kampus tidak aman bagaimana orang asing mau masuk,” ungkap dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdulllah Ubaid Matraji menilai niat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) mencatat nomor ponsel dan media sosial (medsos) mahasiswa baru kurang tepat.

Menurut Ubaid, ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang atau mahasiswa terpapar paham radikal. Maka itu, perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor dan siapa yang berperan dalam menanamkan radikalisme di kampus.

“Apakah memang gara-gara HP dan medsos semata? Menurut saya kok tidak,” kata Ubaid seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis (7/6/2018).

Menurut dia, upaya mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal bisa dilakukan tanpa harus mengawasi wilayah privasi mahasiswa. Misalnya melalui mekanisme pemberian sanksi dan pembinaan.

Sumber : <http://news.rakyatku.com/read/104760/2018/06/08/kemenristekdikti-data-nomor-hp-dan-medsos-mahasiswa-fadli-zon-grabak-grubuk-tidak-karuan>

Keinginan Kemenristek Awasi Ponsel dan Medsos Mahasiswa Tak Tepat

Rakhmatulloh Kamis, 7 Juni 2018 - 20:26 WIB views: 9.097



Rencana Kemenristek-Dikti awasi ponsel dan mahasiswa baru untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dikritisi. Keinginan tersebut dinilai tidak tepat karena sudah memasuki ruang privasi mahasiswa. Foto/Okezone

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji menilai niat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) mencatat nomor ponsel dan media sosial (medsos) mahasiswa baru kurang tepat.

Menurut Ubaid, ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang atau mahasiswa terpapar paham radikal. Maka itu, perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor dan siapa yang berperan dalam menanamkan radikalisme di kampus.

“Apakah memang gara-gara HP dan medsos semata? Menurut saya kok tidak,” kata Ubaid kepada SINDOnews, Kamis 7 Juni 2018.

Menurut dia, upaya mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal bisa dilakukan tanpa harus mengawasi wilayah privasi mahasiswa. Misalnya melalui mekanisme pemberian sanksi dan pembinaan.

Sebelumnya, Menristek Dikti M Nasir berencana untuk melakukan upaya pencatatan nomor telepon seluler dan media sosial semua mahasiswa baru saat proses penerimaan. Hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah mengawasi penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus.

Dia menjelaskan, pengawasan akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/1312486/14/keinginan-kemenristek-awasi-ponsel-dan-medsos-mahasiswa-tak-tepat-1528377976>

PENERIMAAN SISWA

Pungutan Mencurigakan di Lembaga Pendidikan

J Galuh Bimantara

26 Mei 2018 · 09:00 WIB



Kompas/Abdullah Fikri Ashri

Peserta menyaksikan data terkait pungutan liar di dunia pendidikan pada acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS – Orangtua dari anak yang dinyatakan lolos masuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 21 Jakarta curiga pada pungutan Rp 2.350.000 yang dibayarkan ke koperasi madrasah saat mendaftar ulang karena tujuan pungutan tidak jelas.

Hal itu menambah panjang daftar dugaan pungutan liar di lembaga pendidikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pun didesak memperketat pengawasan penerimaan siswa baru di madrasah.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta relatif sudah menurun. Namun, di madrasah, lembaga pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama, pungutan liar belum terkontrol.

”Itu karena Itjen (Inspektorat Jenderal) Kemenag tidak tegas. Madrasah-madrasah itu tidak terpantau,” ucapnya dari Banda Aceh, saat dihubungi pada Jumat (25/5/2018).



KOMPAS/LASTI KURNIA

Paparan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang Kinerja Penanganan Kasus Korupsi Semester I-2016 diselenggarakan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (28/8/2016). Hadir sebagai pembicara Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri (kiri), peneliti Divisi Investigasi ICW Lais Abid (tengah), dan peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah. Menurut ICW, penindakan kasus korupsi pada semester I-2016 mengalami penurunan pada sisi jumlah kasus dan kerugian negara karena kinerja penindakan ditentukan oleh anggaran, penyidik, tensi politik, dan komitmen pemimpin antaraparat penegak hukum.

Pungutan mencurigakan baru-baru ini ditemukan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) MTsN 21, di Duren Sawit, Jakarta Timur. Daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan lolos tes PPDB madrasah setingkat sekolah menengah pertama itu berlangsung pada Senin-Rabu, 21-23 Mei. Orangtua siswa yang datang mendaftar ulang diminta membayar Rp 2.350.000 sebelum menyerahkan berkas.

Nisya, ibu seorang siswa berinisial AHM, baru tahu ada pungutan sebesar itu ketika datang mendaftarkan ulang anaknya pada Senin (21/5/2018). Tidak ada pengumuman sama sekali sebelumnya, bahkan termasuk pada kertas yang ditempel di depan ruang daftar ulang di MTsN 21. Dari laman <https://www.mtsn21jkt.sch.id/>, informasi bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB hanyalah jenis-jenis berkas yang wajib dibawa saat daftar ulang. Tidak ada keterangan biaya.

Kejanggalan lainnya, petugas daftar ulang PPDB tidak memberikan kuitansi pembayaran kepada Nisya setelah menyerahkan jumlah uang yang diminta. "Satu-satunya yang dikasih panitia adalah form pemesanan seragam lewat koperasi," ujarnya.

Kompas pun mencoba menelusuri informasi tersebut ke MTsN 21 Jakarta pada Rabu atau hari terakhir daftar ulang. Kompas menanyakan ruang untuk daftar ulang peserta yang lolos seleksi PPDB. Sampai di salah satu ruang daftar ulang, Kompas diminta masuk terlebih dulu ke ruang sebelah, yaitu ruang bagian koperasi.

Kompas lantas diterima seorang petugas laki-laki yang menjelaskan, di ruang ini, peserta menyerahkan uang seragam terlebih dulu, baru ke ruang pertama yang didatangi Kompas untuk menyerahkan berkas.”Rp 2.350.000, itu untuk seragam, untuk psikotes juga di situ,” ucap petugas tersebut.



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga membubuhkan tanda tangan untuk berikrar dalam memberantas pungutan liar (pungli) dalam acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (18/12/2016). Sosialisasi itu untuk mendorong pemerintah dan warga agar memberantas pungli yang selama ini merajalela di negeri ini.

Uang Rp 2,35 juta tersebut tergolong terlampau besar jika hanya untuk membayar seragam dan psikotes. Penelusuran Kompas di satu toko busana di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga kemeja putih lengan panjang Rp 63.000, celana panjang biru Rp 71.500, kemeja pramuka lengan panjang Rp 74.000, dan celana panjang pramuka Rp 69.500. Jika ditotal, biayanya Rp 278.000. Adapun biaya psikotes dari pencarian di dunia maya berkisar Rp 100.000-Rp 500.000 per siswa.

Kepala Sekolah MTsN 21 Mahmudah, di Jakarta, Jumat, membantah adanya pungutan liar terhadap siswa baru tahun pelajaran 2018/2019.”Tidak benar ada pungutan liar di sekolah kami,” ujarnya.

Meski demikian, Mahmudah membenarkan, sekolah mengoordinasikan pembelian seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Namun, dia enggan membenarkan bahwa jumlah uang yang ditarik sebesar Rp 2.350.000 atau bukan. Dia tidak berkenan pula merinci penggunaannya.

Menurut Mahmudah, pembelian seragam lewat koperasi sekolah tidak diwajibkan. Orang tua siswa boleh membeli pakaian di luar sekolah. Namun, seragam yang digunakan siswa identik dengan identitas sekolah.

Pembelian seragam lewat koperasi sekolah tidak diwajibkan. Orang tua siswa boleh membeli pakaian di luar sekolah.

Murid kelas VIII MTsN 21 mengatakan, mereka menggunakan pakaian berbeda dari Senin hingga Jumat. Pada Senin, siswa mengenakan atasan dan bawahan putih dilengkapi rompi khas sekolah. Selasa, seragam yang dikenakan berupa atasan putih dan bawahan biru dengan sebuah rompi.

Hari Rabu, siswa akan mengenakan pakaian pramuka, sedangkan pada Kamis, seragam yang dikenakan batik sekolah dengan bawahan putih. Sementara itu, pada Jumat, siswa mengenakan setelan pakaian muslim hijau toska.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga melintasi spanduk sosialisasi pungli sebagai tindakan melanggar hukum.

Pada 2017, murid wajib membayar pakaian seragam seharga Rp 1,7 juta. Dari sejumlah uang tersebut, siswa mendapatkan antara lain rompi, satu set pakaian pramuka, satu set pakaian muslim, dan satu set pakaian olahraga. Atribut lain yang didapatkan antara lain emblem lambang sekolah, topi, dasi, dan ikat pinggang. Adapun atasan putih, bawahan putih, serta bawahan biru harus mereka beli secara mandiri.

Selain membayar uang seragam, murid juga membayar Rp 100.000 untuk mengikuti psikotes. Psikotes diadakan secara massal di sekolah.

Mahmudah mengatakan, menurut rencana, psikotes serupa akan dilaksanakan tahun ini. Tes tersebut dibutuhkan untuk memetakan minat dan bakat siswa serta menentukan pola ajar terhadap mereka. Keberagaman kecenderungan siswa dalam belajar mengharuskan guru mengetahuinya sejak dini agar pembelajaran berlangsung optimal.

”Sekolah bermaksud mengoordinasikan penyelenggaraan psikotes agar lebih mudah dan murah,” ujarnya.

Akan tetapi, menyusul keberatan dari salah satu orangtua siswa, penyelenggaraan psikotes akan dievaluasi kembali. Menurut Mahmudah, siswa diperbolehkan mengikuti psikotes di mana saja dan sekolah akan menerima hasilnya.

Tidak prosedural

Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Abdullah Faqih menyatakan, pungutan pada masa daftar ulang peserta yang lolos PPDB tersebut tidak sesuai prosedur.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Siswa lulusan SMP/MTs sederajat antri untuk melakukan verifikasi berkas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut Faqih, pembelian seragam mestinya masuk ke pengeluaran personal tiap orangtua siswa dan tidak ada pemaksaan. Urusan pembelian seragam seharusnya dibahas setelah daftar ulang dengan disertai kesepakatan dari orangtua dan transparansi biaya dari madrasah.

”Untuk psikotes, sebenarnya bisa dimasukkan dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) agar ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ucapnya.

Untuk pelaksanaan PPDB, lanjut Faqih, madrasah tidak boleh menarik pungutan dari orangtua siswa, termasuk untuk kebutuhan honor panitia. Sebab, biaya PPDB sepenuhnya ditanggung negara lewat APBN.

Meski demikian, madrasah memang boleh menarik dana masyarakat karena tidak semua anggaran peningkatan mutu madrasah bisa ditanggung APBN. Namun, Faqih mengingatkan, caranya tidak bisa dengan ”tembak langsung” ke orangtua saat daftar ulang.

Untuk pelaksanaan PPDB, madrasah tidak boleh menarik pungutan dari orangtua siswa, termasuk untuk kebutuhan honor panitia. Sebab, biaya PPDB sepenuhnya ditanggung negara lewat APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016, dana dari masyarakat harus dikelola oleh komite madrasah, bukan kepala madrasah. Pada sisi lain, besar dana yang ditarik harus sesuai dengan jumlah dana yang tidak ditanggung APBN.

Faqih mengatakan, jika ingin menarik dana dari orangtua murid, madrasah harus menjelaskan dulu

dalam rapat komite bersama orangtua tentang besar anggaran yang diterima dan kekurangan dana untuk menjalankan program-program. Program yang butuh dana tambahan tersebut pun harus disepakati dulu dengan orangtua, apakah program dibutuhkan atau tidak.

Ajakan melapor

Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari 400 aduan yang diterima sesuai PPDB 2017 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sebanyak 17 persen terkait pungutan liar.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, data aduan untuk PPDB 2018 masih dalam pengumpulan mengingat PPDB tahun ini belum berjalan serentak.



KOMPAS/LASTI KURNIA

Layar berisi informasi pelaporan pungutan liar (pungli) yang dapat digunakan masyarakat ditampilkan saat jumpa pers Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai penerbitan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar, di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (18/10/2016). Surat edaran tersebut yang diterbitkan sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan pungli di lingkungan instansi pemerintah. Masyarakat yang menemukan kasus pungli diharapkan segera melapor ke portal lapor.go.id, SMS ke 1708, atau Twitter @LAPOR1708.

Nailul mendorong partisipasi publik untuk memantau langsung PPDB. Pelaporan bisa melalui laman www.laporpendidikan.com. "Masyarakat kami minta berani melapor, untuk meminimalkan kasus-kasus seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya. (KYR)

Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2018/05/26/pungutan-mencurigakan-di-lembaga-pendidikan/?asaldaftarakun=baca_artikel

Problematika Pendidikan Indonesia

Brilio stories 18 Mei 2018



Ilustrasi Media.

Sungguh miris membaca hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI/New Indonesia) tahun lalu mengenai Right to Education Index (RTEI mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di 14 negara, termasuk Indonesia.

Dari 14 negara yang disurvei (Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chili) dipilih secara acak, kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ethiopia dan Filipina!

Berdasarkan penelitian bertema “Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation” yang menggunakan lima indikator, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%. Kelima indikator itu yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability.

Dari lima indikator itu, ada dua hal yang membuat skor Indonesia lemah yakni kualitas guru (availability) dan sekolah yang belum ramah anak (acceptability). Jelas kondisi ini menjadi tamparan bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa masih butuh kerja keras untuk terwujud. Bukan rahasia jika warga negara yang cerdas akan membangun negara yang kuat bertarung di kancah persaingan global. Pada titik inilah peran pendidikan penting artinya. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan pendidikan di Indonesia.

“Soal tata kelola guru bermasalah dari sisi kuantitas dan kualitas. Belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional mengenai kualitas guru di Indonesia,” ujar Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI ketika ditemui di kantornya baru-baru ini.

Memang beberapa waktu lalu sempat ada program Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun program itu dipertanyakan banyak kalangan. Metode itu dinilai belum cukup memotret kualitas guru secara nasional. Sedangkan program sertifikasi yang selama ini dilakukan lebih ditujukan pada insentif kepada guru agar mendapat tunjangan yang lebih layak.

Hingga saat ini, sudah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan. Dari jumlah itu, 80% dialokasikan untuk tunjangan guru. Mestinya ketika

tingkat kesejahteraan guru sudah meningkat, harus dibarengi dengan peningkatan mutu guru. Tapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Hingga kini kualitas guru masih dipertanyakan.



**Right to Education Index 2017:
Advocacy strategies in Honduras, Indonesia,
Palestine, Tanzania, and Zimbabwe
March 2018**

RIGHT TO
EDUCATION
INDEX

Sumber Foto: <https://www.rtei.org/en/blog/rtei-2017-report-launch/>

Tapi, benarkah kualitas guru adalah problem utama pendidikan di Indonesia? Pernyataan Ubaid dibantah Retno Ambarwati, guru SMP Negeri 47 Jakarta Pusat. Menurut pengajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) itu, secara umum kualitas guru saat ini sudah baik. Retno tidak memungkiri masih ada guru yang kurang memenuhi standar profesionalisme. Tapi tidak bisa digeneralisir semua guru kualitasnya minim.

Jadi, jika ukuran kualitas guru hanya disandarkan pada masalah materi akademik yang disampaikan kepada peserta didik (murid), maka hal itu harus dilihat secara holistik. Tidak bisa setengah-setengah. Menurut Retno, selain memberikan materi pelajaran, guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik, seperti membantu dan menangani murid yang memiliki masalah di luar jam sekolah.

Lain lagi pendapat Supriyanto, guru Matematika SMP Negeri 47 Jakarta Pusat, dalam melihat kualitas pendidikan ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan yakni subjek (guru, sekolah, manajerial sekolah), objek (peserta didik, keluarga, dan lingkungan), dan kebijakan (kurikulum, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan).

Kalau ditinjau dari sisi kualitas guru, ketika tiga faktor itu belum terpenuhi akan sangat berpengaruh pada kualitas guru.

“Memang masih ada faktor yang memengaruhi mutu guru. Masih banyak guru yang melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan paradigma lama dengan pola text book. Buku itu yang ditransfer ke anak. Sekarang abad 21 harus lebih global lagi,” kata Supriyanto.

Saat ini setidaknya guru harus memerhatikan faktor 4C (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation). Faktor inilah yang belum banyak dikuasai guru apalagi di daerah terpencil. Karena itu pendidikan dan pelatihan pendidikan guru harus terus ditingkatkan. Tapi menurutnya secara umum standar guru sudah cukup baik.



Ilustrasi media

Selain guru, sebenarnya peran anak juga menjadi sorotan penting untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, banyak anak yang merasa tidak cocok terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Pelarian mereka adalah jalur pendidikan alternatif.

Sebut saja sekolah alternatif Erudio School of Art (ESoA) yang didirikan oleh Monika Irayati. ESoA sendiri berfokus dengan sistem pembelajaran yang menggunakan seni visual dan desain sebagai perantara. Monika beranggapan banyak anak yang memiliki keinginan tidak sejalan dengan tujuan sekolah pada umumnya, yaitu belajar untuk mendapat nilai dan naik kelas yang menurutnya adalah kepentingan jangka pendek.

Ditanya mengenai tanggapan terhadap riset JPPI bahwa pendidikan Indonesia lebih rendah dari negara ketiga (Ethiopia), Monika memiliki pendapat sendiri. "Kalau kita terus berduka, bersedih, nyalahin sana-sini, untuk apa? Kalau saya orangnya practical. Lebih baik kita melakukan sesuatu dan menjadi bagian untuk perkembangan pendidikan di Indonesia daripada kita komplain terus," tuturnya.

Dari sisi guru, pendidikan alternatif memang berbeda dalam menilai kemampuan seorang guru, tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Menurut Monika, yang terpenting untuk menjadi guru adalah panggilan hati mereka yang memang mau berbagi ilmu kepada anak-anak, bukan karena terpaksa, yang tentunya akan meningkatkan kualitas guru.

“Di dalam jaringan pendidikan alternatif, cara kami melihat guru bisa jadi berbeda dengan pemerintah. Untuk kami, hal terpenting pada saat merekrut bukanlah berdasarkan sertifikat ataupun ijazah, tetapi lebih kepada karakternya. Apakah memang dia punya keinginan dan hasrat untuk berbagi, atau dia memiliki pengetahuan yang pas dengan cara kami dan sebagainya,” ungkapnyanya.

Menurut dia, jangan sampai sertifikasi atau bentuk apapun menghalangi orang yang memang sebenarnya terpanggil untuk menjadi guru, kemudian terkendala. Padahal belum tentu individu yang punya sertifikat terpanggil untuk mengajar dan memang menjiwai profesinya tersebut.

Selain karena adanya faktor guru, sekolah yang ramah anak pun perlu menjadi sorotan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Terbukti, masih banyaknya kekerasan hingga bullying yang terjadi di sekolah.

Untuk meminimalisir kejadian tersebut, harus ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, seperti yang sudah diterapkan di beberapa sekolah

Tugas kami itu bukan hanya memberikan akademi, tapi di luar akademis pun lebih dominan. Terkadang banyak siswa yang whatsapp saya di luar jam sekolah untuk menceritakan masalah mereka di rumah ataupun antara teman-temannya. Dengan banyaknya masalah itu, otomatis kami memberikan materi akademis itu tidak mudah”, ungkap guru SMPN 47, Retno Ambarwati.

Di sekolah alternatif seperti ESoA, pendekatan yang dilakukan terhadap anak dengan membantu mereka mencari tahu siapa dirinya. Kunci utamanya anak dibantu untuk mencari tahu, dia apa dan siapa. “Kemudian, diharapkan nantinya bisa ikut serta untuk berkontribusi di lingkungannya”, ujar Monika.

Karena setiap murid berbeda dari beragam sudut pandang seperti kemampuan menyerap ilmu atau menyelesaikan masalah, maka sudah menjadi tugas guru untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan muridnya. Inilah yang dilakukan ESoA.



Ilustrasi media

Artinya, people power menjadi penting, baik melalui pendidikan umum ataupun alternatif. Karena itu pendidikan harus dikelola dengan baik bukan hanya sekolah tapi juga semua pihak,

masyarakat, pemerintah, dan sekolah dengan tetap mengacu pada tujuan dan arah pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memang mengatasi problematika pendidikan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor-faktor yang harus diperbaiki dan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Perlunya kesadaran masyarakat untuk berbagi juga bisa menjadi salah satu faktor untuk mendorong pendidikan Indonesia agar lebih baik. Sudah banyak lembaga yang memberikan kemudahan untuk membantu masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut serta berperan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia Mengajar, yang memberikan wadah kepada generasi millennial untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah yang berada di pelosok daerah. Kamu bisa mendaftarkan diri sebagai relawan di sini

Selain itu, kamu juga bisa ikut serta di Akademi Berbagi, sebuah gerakan sosial nirlaba yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan langsung sehingga para peserta bisa meningkatkan kompetensi di bidang yang telah dipilihnya. Kamu juga bisa ikut sebagai relawannya.

Sumber : <https://www.brilio.net/stories/pendidikan/>

Lulusan SMK banyak menganggur karena kualitasnya tak layak

Muhammad Nur Rochmi 11:18 WIB - Jumat, 27 April 2018

Seorang siswa SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/4/2018) membuat roti saat ujian kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian. Banyak lulusan SMK yang menganggur karena kualitasnya tak layak dengan kebutuhan dunia kerja.



Seorang siswa SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/4/2018) membuat roti saat ujian kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian. Banyak lulusan SMK yang menganggur karena kualitasnya tak layak dengan kebutuhan dunia kerja. | Aditya Pradana Putra /Antara Foto

Niat pemerintah membekali tenaga kerja terampil lewat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melahirkan masalah lain: ledakan pertumbuhan jumlah lulusan SMK.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy setidaknya kini ada 13.900 SMK dikelola swasta dan 3.400 yang dikelola negeri. Namun sayangnya tidak diikuti dengan pertumbuhan kualitas.

Muhadjir menceritakan, ada SMK yang jumlah siswanya hanya 50 anak dalam satu sekolah. Artinya rata-rata hanya ada 10 siswa setiap kelas.

“Kelihatan ideal, tapi malah ‘terlalu’ ideal karena hanya membangun, tidak disertai dengan kualitas yang baik,” ujar Muhadjir, Kamis (26/4/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebab kualitasnya tak sesuai ini, banyak lulusan SMK banyak yang menganggur karena tidak

layak diserap lapangan kerja.

Salah satu contoh adalah lulusan SMK di Jakarta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, 30 persen lulusan SMK ini menganggur. Sebabnya, mereka tak mampu bersaing di dunia kerja.

Secara nasional, bahkan pengangguran di Indonesia banyak disumbang oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di SMK.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, jumlah pengangguran pada Agustus 2017 jika dilihat dari pendidikan, lebih banyak dari lulusan SMK dibanding lulusan pendidikan lainnya.

“Untuk SMK paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain. Yaitu sebesar 11,41 persen,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017) seperti dikutip dari *financedetik*. Pengangguran dari lulusan SD justru paling kecil, hanya 2,62 persen.

Menurut data statistik Kemendikbud, pada 2017 jumlah lulusan SMK mencapai 1.285.178 orang. Tapi tak ada data berapa yang diserap oleh lapangan kerja dan berapa yang menganggur.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, belum ada perhatian serius terhadap pendidikan selama 12 tahun terakhir. Mereka berdialog dengan berbagai stakeholder.

“Secara umum ada semacam miss match antara demand side dan supply,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI seperti dikutip dari CNN Indonesia, Februari lalu.

Ubaid menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha.

Pembangunan sekolah gencar di berbagai wilayah tapi tidak diikuti tata kelola yang baik termasuk laboratorium yang tidak up to date.

Misalnya bengkel untuk siswa jurusan otomotif. “Servis bengkel motor masih utak atik karburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai,” tambahnya.

Muhadjir menjelaskan, kementeriannya tengah ‘merestorasi’ sektor pendidikan. Antara lain dengan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Kemendikbud memberikan bantuan program revitalisasi SMK kepada 219 SMK guna meningkatkan kualitas pendidikan di SMK.

Selain bantuan, juga akan diikuti dengan program ‘link and match’ bekerja sama dengan dunia industri. Sudah ada 219 SMK yang telah memiliki standar perusahaan, sehingga lulusannya dapat langsung diterima bekerja.

Sumber : <https://beritagar.id/artikel/berita/lulusan-smk-banyak-menganggur-karena-kualitasnya-tak-layak>

Anda Mengalami Kecurangan Saat Penerimaan Peserta Didik Baru Laporkan Kesini

Selasa, 17 April 2018, 16:15



MaTA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan membuka Pos Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pos pemantauan ini tersebar di 33 provinsi kabupaten/kota di Indonesia dengan tujuan mengawal proses penerimaan peserta didik baru agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Pos pemantauan juga dapat menjadi sumber informasi bagi orang tua murid mengenai proses penerimaan peserta didik baru.

ini dibuka mulai 16 April hingga 30 September 2018 mendatang dan bagi masyarakat yang ingin melapor atau bertanya, dapat dilakukan melalui telepon di nomor 082360006117 atas nama Sari Yulis atau datang langsung ke pos pemantauan dikantor MaTA yang beralamat di Jalan Kebon Raja Nomor 27, Gampong le Masen Kayee Ading, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh atau bisa mengakses website www.laporpendidikan.com.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi mengatakan, selain membuka posko pengaduan, MaTA juga berharap masyarakat luas dapat terlibat dalam proses pemantauan penerimaan peserta didik baru, terutama orang tua siswa yang akan mendaftarkan anak-anaknya pada sekolah negeri tertentu. Disisi lain, MaTA juga berharap agar Ombudsman RI perwakilan Aceh juga menaruh perhatian dalam proses ini.

“Menurut MaTA, ini juga termasuk dalam pelayanan public yang perlu mendapat perhatian khusus dari Ombudsman,” ujarnya Selasa (17/4/2018).

Dari hasil penelusuran MaTA, dunia pendidikan di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru

2018/2019 yang ditandai dengan tahapan penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang bagi siswa/siswi yang naik kelas. Peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru tercantum dalam PP nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Kemudian secara lebih rinci Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud nomor 17/2017 tentang penerimaan peserta didik mulai taman kanak – kanak hingga sekolah menengah atas,” katanya.

Aturan-aturan tersebut, lanjut Baihaqi, berlaku bagi sekolah negeri dibawah Kemendikbud, sedangkan dibawah Kementerian Agama diatur melalui SK Dirjen Pendidikan Islam No. 481/2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang berlaku untuk seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama (Min/ MTSn/MAn/MAKn).

“Hasil analisis MaTA, PP 17/2010 dan Permendikbud 17/2017 dapat dikatakan cukup progresif. Dalam aturan tersebut, tidak ada jalur umum karena prinsipnya seluruh anak-anak terdekat dari sekolah bisa mengakses Pendidikan berdasarkan dari jarak tempuh dan waktu. Sedangkan SK Dirjen Pendidikan Islam No 481/2018 cenderung berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan PP 17/2010,” jelasnya.

Misalnya, dalam hal penerimaan peserta didik kelas 7, dalam PP 17/2010 penerimaan siswa berdasarkan nilai ujian akhir berstandar nasional sedangkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam 481/2018 seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian keluar dan dapat didasarkan pada hasil test potensi belajar/ tes akademik sejenisnya. Selain kedua aturan tersebut, seringkali peraturan terkait PPDB yang dikeluarkan Walikota/Bupati maupun Gubernur seolah tidak mengacu pada PP 17/2010 maupun Permendikbus 17/2017.

“Melihat hasil pemantau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada proses PPDB tahun 2017 silam, setidaknya ditemukan tiga permasalahan besar, yaitu, pertama, proses PPDB yang berpotensi dengan korupsi, misalnya jual beli bangku. Kedua, terkait sistem zonasi yang membingungkan dan meribetkan orangtua murid. Ketiga terkait transparansi proses penerimaan peserta didik baru,” ungkapny.

Proses penerimaan peserta didik baru kerap menjadi “mimpi buruk” bagi orang tua sebab seringkali mereka dibebankan dengan berbagai macam pungutan, mulai dari uang formulir, seragam hingga uang masuk sekolah yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal jika mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar seharusnya sekolah, khususnya SD dan SMP, tidak membebani orang tua dengan berbagai pungutan yang mengatasnamakan sumbangan. Selain itu, sekolah juga sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan dalam proses PPDB.

“Hal yang juga tak kalah membebani orang tua murid adanya kewajiban daftar ulang yang disertai dengan pembebanan biaya daftar ulang. Pihak sekolah seharusnya tidak perlu memberlakukan biaya daftar ulang pada siswa, cukup dengan pemenuhan syarat administrasi saja,” katanya lagi.

Berbagai permasalahan itu jelas akan menghambat pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan. Warga negara dirugikan karena hak atas pendidikan tidak terpenuhi meski dijamin oleh konstitusi.

“Sementara negara juga dirugikan karena kewajibannya guna memenuhi hak pendidikan warga negara “dibajak” oleh sekelompok orang untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya,” tambahnya.

Sumber : <https://www.acehportal.com/2018/04/17/anda-mengalami-kecurangan-saat-penerimaan-peserta-didik-baru-laporkan-kesini/>

Masih Ada Persoalan dalam Penyaluran KIP



Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastha kepada masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). (Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw)

Maria Fatima Bona / Markus Junianto Sihaloho / AO Rabu, 18 April 2018 | 23:43 WIB

Jakarta - Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program prioritas pemerintahan Jokowi-JK masih ditemukan masalah. Salah satu persoalan adalah kurangnya keterlibatan publik, terutama untuk mengawasinya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan, dalam penyaluran KIP, pemerintah terkesan bergerak sendiri tanpa ada keterlibatan publik.

“Masyarakat harus aktif mengawasi. Pemerintah harus menyediakan akses bagi publik untuk ikut mengontrolnya,” kata Ubaid, Selasa(17/4).

Ia juga mengatakan, pencairan dan distribusi KIP harus merata dan tepat waktu. Palsnya, berdasarkan temuan JPPI selama kurun Juli 2017- Februari 2018, terdapat sejumlah laporan pengaduan masalah KIP. Dari 112 total pengaduan, 32 di antaranya terkait dengan pendistribusian yang tidak merata di daerah terluas, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah marginal. Selain itu, 30 pengaduan karena distribusi KIP tidak tepat sasaran, 27 laporan penerima KIP sulit mencairkan dan, 10 laporan adanya keterlambatan, 8 pengaduan terkait data real time, dan tidak ada keterlibatan publik 5 laporan.

Secara terpisah, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI) Mohammad Abduzen mengatakan, Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai lebih pada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Jika tujuan utama KIP ini berjalan secara baik, dapat berimplikasi pada pengurangan angka putus sekolah sehingga ada peningkatan APK (angka partisipasi kasar),” jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui, PIP dan alokasi anggaran APBN 20% untuk pendidikan, belum efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, masih terjadi tumpah tindih anggaran pendidikan. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya penataan kembali lembaga-lembaga pendidikan di bawah kementerian atau lembaga yang menggunakan anggaran pendidikan.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab berpendapat, PIP bisa menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan siswa putus sekolah. Namun, dalam praktiknya harapan itu belum sepenuhnya terwujud.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, alokasi dana untuk harus benar-benar diawasi pemanfaatannya, jangan sampai untuk menambah belanja keluarga. Kedua, besaran dana PIP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, karena anggaran yang diperlukan untuk mereka relatif lebih besar.

“Perlu dipercepat pendirian sekolah inklusif sehingga anak bisa belajar di sekolah yang lebih dekat,” kata mantan rektor UNY ini.

Dia juga menyebutkan, anak putus sekolah tidak semata-mata diartikan berhenti dari partisipasi belajar, tetapi juga karena ketidakmampuannya mengikuti proses pembelajaran akibat layanan tidak bisa menjangkau anak tersebut. Untuk itu, PIP harus diperluas orientasinya untuk program-program remedial yang membuat anak bisa menikmati proses pembelajaran. “Dengan begitu akan terhindar putus sekolah,” ujarnya.

Rochmat juga mengatakan, PIP juga perlu memberi perhatian khusus kepada mereka yang berpotensi putus sekolah. Hal yang dilakukan antara lain mengalokasikan dana lebih besar untuk memberi bekal keterampilan tertentu sesuai dengan potensi dan kondisi siswa bersangkutan.

Sedangkan, penggiat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin mengatakan, PIP dirancang untuk mengatasi kesulitan keluarga miskin dalam mendidik anak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Jokowi-JK mengatasi kesenjangan sosial.

Menurut Totok, PIP dapat menekan angka putus sekolah, tetapi sejauh ini masih kurang berhasil meningkatkan angka partisipasi belajar siswa. Sebab, mendorong anak-anak yang sudah telanjur putus sekolah untuk kembali ke sekolah tidak mudah.

“Sejauh ini Kemdikbud bersama pemda di seluruh Indonesia bekerja keras agar anak-anak di luar sekolah mau kembali ke sekolah. Banyak anak seperti ini yang tidak mau ke sekolah karena usianya sudah lewat, dan telanjur menikmati bekerja dalam usia sekolah,” papar Totok.

Sedangkan, Staf Ahli Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tambah menilai, PIP adalah program pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Maka, dengan adanya BOS, orangtua sudah tidak membayar uang sekolah. “PIP ini agar anak-anak mendapat subsidi untuk belanja keperluan sekolah. Dari manfaat keduanya, maka tidak ada alasan anak putus sekolah oleh karena biaya,” ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan, berdasarkan data BPS partisipasi anak sekolah meningkat dan anak

putus sekolah cenderung turun. “Saat ini, anak putus sekolah lebih banyak terdapat di daerah terpencil, di mana akses dan fasilitas sangat terbatas, khususnya untuk sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA atau sederajat,” terangnya.

Peran Kementerian

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan, melalui PIP, pemerintah menggenjot wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19/2016, ada tiga tujuan PIP, yakni meningkatkan akses bagi anak usia 6-12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out), dan menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah.

Menurutnya, tujuan itu terlihat belum tercapai. Sebab, tujuan itu sebenarnya adalah proyek besar yang harus melibatkan banyak pihak di aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis tersebut juga didasarkan pada data dari Kemdikbud, evaluasi tentang pelaksanaan PIP di berbagai dapil DPR, hingga masukan dari pihak lain dan masyarakat luas. “Belum tercapai,” tandasnya.

Dia melihat, PIP salah satu strategi utama demi memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA pada 2017 masih sekitar 60. Artinya, masih ada anak-anak usia SLTA yang tidak melanjutkan sekolah. Bonus demografi pada 2030 bisa jadi bahaya bila APM tak diperbaiki. “APM memang menjadi salah satu tujuan agenda bersama Kemdikbud dan Komisi X,” katanya.

Terkait langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan APM, Irine berpendapat, berbagai kementerian harus mengambil langkah. Bila Kemdikbud sudah bekerja melalui PIP, maka Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan kementerian lain wajib mendukung terhadap keluarga yang kurang mampu. Pemerintah daerah juga membuat berbagai program.

“Karena pendidikan terkait erat dengan kesejahteraan keluarga dan faktor-faktor ekonomi lainnya, juga sosial budaya,” katanya.

Lebih jauh, ketika ditanya tanggapannya soal anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang belum mampu memperbaiki mutu pendidikan, Irine mengatakan memang harus ada yang berubah. Dia mendukung ide jika 20% dana pendidikan dikelola utuh oleh Kemdikbud dan Kemristekdikti.

Sementara di APBN 2018, telah ada alokasi dana pendidikan 20% sejumlah Rp 444,131 triliun. Dari angka ini, yang mendapat alokasi terbesar adalah Kementerian Agama sebesar Rp 52,7 triliun, diikuti Kemristekdikti sebesar Rp 40,4 triliun, dan Kemdikbud sebesar Rp 40,1 triliun.

Menurutnya, Kemdikbud sebagai aktor utama pendidikan perlu memegang peran utama. Karena basis data yang paling luas juga dari kementerian itu. “Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan akan terjadi dalam fokus dan standar yang sama. Ini lebih susah jika terbagi di beberapa kementerian dan lembaga,” tandas Irine.

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/488872-masih-ada-persoalan-dalam-penyaluran-kip.html>

65.119 Sekolah Diklaim Siap UNBK

Sabtu, 31 Maret 2018 06:49 WIB



Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (ANTARA | ASEP FATHULRAHMAN)

Pelaksanaan ujian disebut hanya menggunakan jaringan lokal.

JAKARTA (HN) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digelar secara bertahap pada April ini. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengklaim, 65.119 sekolah siap melaksanakan UNBK.

“Dinas pendidikan setiap daerah lebih dulu memverifikasi kesiapan sekolah menerapkan UNBK,” kata Kepala BSNP Bambang Suryadi, Jumat (30/3).

Pernyataan Bambang sekaligus menanggapi potensi sekolah di daerah mengalami kendala jaringan terkait pelaksanaan UNBK. Dia menjelaskan, dinas pendidikan di daerah tidak memaksa sekolah untuk menggelar UNBK. Sekolah yang dinilai tak layak menggelar UNBK maka bisa menggelar ujian nonkomputer atau Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

“Sekolah yang akan menjalani UNKP sebanyak 30.061,” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, sekolah yang sudah ditetapkan menerapkan UNBK tidak bisa beralih ke UNKP. Dia berujar, pelaksanaan ujian hanya menggunakan jaringan lokal.

Totok mengakui, sekolah yang tidak memiliki jaringan internet tidak dipaksa melakukan UNBK. Mereka dibolehkan menggunakan UNKP.

Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Kemendikbud Abduh mengakui, UNBK merupakan pilihan untuk setiap sekolah. Sekolah boleh memakai sistem resource sharing atau melaksanakan UNKP apabila fasilitas pendukung UNBK tak memadai

Abduh menjelaskan, koneksi internet saat UNBK hanya digunakan saat sinkronisasi dan merilis token dari pusat ke sekolah. Pelaksanaan ujiannya berlangsung offline. Menurut Abduh, sinkronisasi adalah proses pengunduhan soal ujian dari pusat. Proses ini dilakukan dua hari sebelum ujian setiap jenjang dimulai.

Abduh menambahkan, pemerintah berupaya meminimalisasi kecurangan saat UNBK.

“Soal bisa dibuka setelah siswa memasukkan username, password, dan token. Semuanya baru dibuka pada hari pelaksanaan,” katanya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq mendesak pemerintah menyiapkan formulasi tepat mencegah kecurangan.

“Kecurangan dalam UNBK akan berdampak pada paradigma ketidakjujuran siswa saat melaksanakan ujian,” katanya

Reportase : Alvin Tamba

Editor : Aria Triyudha

Sumber : <http://www.harnas.co/2018/03/30/65119-sekolah-diklaim-siap-unbk>

Ketimbang Beri Kredit Pendidikan, Lebih Baik Efektifkan APBN dan Zakat



Ilustrasi Perguruan Tinggi (Foto: Istimewa)

Pemerintah serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu. Kerja sama dengan perbankan harus ada kesepakatan dan hitungan yang realistis terhadap besaran bunga.

Maria Fatima Bona / AO Selasa, 20 Maret 2018 | 17:12 WIB

Jakarta - Pendidikan merupakan eskalator bagi warga negara untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan, tetapi juga mengelola dana tersebut agar tepat sasaran. Wacana pemberian kredit pendidikan (student loan), seperti yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi alternatif pembiayaan.

Namun, pemerintah disarankan untuk mengefektifkan pengelolaan dana pendidikan dari APBN 2018 sebesar Rp 444,131 triliun (20%) dan menggenjot potensi dana zakat nasional yang bisa mencapai Rp 217 triliun untuk dana pendidikan. Peran swasta melalui beasiswa pendidikan juga perlu ditingkatkan agar lebih banyak lagi warga negara yang berpendidikan tinggi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, usulan penerapan student loan atau kredit mahasiswa itu kurang tepat diterapkan di Indonesia. Pola seperti itu akan membuat pendidikan lebih mengarah kepada komersialisasi dan industrialisasi.

“Peserta didik, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu, akan terbebani. Setelah lulus mereka akan kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman pendidikan tersebut, sehingga tidak ada kepastian untuk pengembalian dana,” kata Ubaid kepada di Jakarta, Selasa (20/3).

Ubaid juga menegaskan, pinjaman dana ini tidak sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal itu menegaskan, pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya, negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi mahasiswa, bukan menjerat mereka dengan utang dana pendidikan.

“Student loan ini akan menjerat leher mahasiswa dengan tanggungan utang setelah mereka lulus. Anak dari orang tua yang tidak mampu juga tidak memiliki kepastian untuk mengembalikan dana yang dikredit setelah mereka lulus,” katanya.

Menurutnya, upaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan bukan dengan pinjaman pendidikan. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap alokasi dana 20% pendidikan di APBN. Alokasi dana tersebut belum menunjukkan dampak signifikan, karena mutu pendidikan Indonesia masih rendah, termasuk akses pendidikan yang masih minim.

Pekan lalu, Presiden Jokowi mengusulkan ada pola pinjaman dana untuk calon mahasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan. Presiden mencontohkan program student loan di Amerika Serikat (AS). Di negara itu, kredit pendidikan itu mencapai US\$ 1,3 triliun per 2016. Pinjaman bagi mahasiswa itu berada di peringkat kedua setelah kredit pemilikan rumah (KPR).

Tidak Fokus

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saefuddin mengatakan, pemanfaatan dana pendidikan 20% dari APBN tidak fokus pada pendidikan, melainkan disalurkan ke berbagai sektor lainnya. Hal itu yang membuat dana tersebut tidak hanya disalurkan ke Kemdikbud dan Kemristekdikti, tetapi juga ke Kementerian Agama dan kementerian/lembaga lainnya.

“Bila hanya fokus ke kementerian terkait (Kemdikbud dan Kemristekdikti), saya pikir dana pendidikan 20% APBN itu lebih dari cukup. Dana sebesar itu juga bisa memenuhi gaji guru dan dosen. Bila kebutuhan primer dan sekunder mereka sudah terpenuhi, saya yakin dosen dan guru bisa fokus di akademik,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar anggaran pendidikan di Kementerian Agama, juga kementerian/lembaga lainnya, diserahkan ke Kemdikbud atau Kemristekdikti. Sehingga, apabila ada ketidakberesan, dua kementerian itu yang bertanggung jawab.

Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menambahkan, usulan student loan ini menunjukkan pemerintah positif memiliki perhatian terhadap pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan dana bantuan keuangan. Pasalnya, 20% dana pendidikan di APBN sejak awal dirancang untuk operasional, bukan untuk pengembangan pendidikan.

Menurut dia, kredit pendidikan itu sebaiknya menjadi alternatif terakhir. Skema pinjaman ini pernah dijalankan oleh Bank BNI dengan memberi Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dan hingga kini banyak yang tidak bisa melunasi. Bahkan, ijazah sebagai jaminan masih banyak yang tersimpan di kampus. Dia justru mendorong pemanfaatan dana zakat dan mendorong peran serta dunia usaha untuk berkolaborasi dalam memberikan beasiswa.

Pernah Gagal

Mantan Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menerapkan kredit mahasiswa itu. Apalagi, sistem kredit mahasiswa tersebut pernah dijalankan oleh BNI dan gagal. Kegagalan program ini karena banyak lulusan yang belum membayar. Ketika itu, data terkait dunia pendidikan juga masih sangat lemah. Belum ada single identity number seperti saat ini, sehingga perguruan tinggi dan perbankan sulit melacak keberadaan dan tempat kerja lulusan tersebut.

“Dulu itu urusan data masih lemah. Berbeda dengan sekarang, yang sudah ada KTP elektronik. Data sekarang sudah bisa terintegrasi, sehingga bisa memantau keberadaan mahasiswa tersebut setelah lulus dan bekerja. Jadi, bila mau ada kebijakan kredit mahasiswa, selama data terintegrasi, tentu akan mudah dan positif untuk perbankan,” tuturnya.

Nuh menyarankan, pemerintah memperhatikan peluang pelamar kredit mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, program studi (prodi) dan akreditasi perguruan tinggi harus diperhatikan. Pasalnya, apabila mahasiswa tersebut sulit mendapat pekerjaan, karena jurusan dan perguruan tinggi bermutu jelek, maka akan berpotensi terjadi kredit macet.

Lalu, kerja sama dengan perbankan harus ada kesepakatan dan hitungan yang realistis terhadap besaran bunga yang akan diberikan. Dengan demikian, kredit itu tidak membebani mahasiswa. Terakhir, program student loan itu diuji coba terlebih dulu di beberapa daerah dan perguruan tinggi (PT).

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, usulan student loan itu sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan APK perguruan tinggi, yang saat ini masih 37% dan solusi mengatasi mahasiswa putus kuliah.

Nasir menuturkan, program itu mengingatkannya kembali pada KMI beberapa tahun lalu. Menteri Nasir adalah salah satu mahasiswa penerima dana KMI sebesar Rp 1,5 juta untuk menyelesaikan tugas akhir. Saat itu, ujarnya, banyak mahasiswa yang tidak melunasi pinjaman mereka.

Meski demikian, Nasir mengatakan, usulan Presiden Jokowi itu positif dan patut diapresiasi, karena bisa memberi peluang baru untuk meningkatkan APK pendidikan. Hanya saja, kata dia, hingga saat ini belum ada pembahasan khusus terkait wacana student loan itu.

Pemerhati pendidikan, Indra Charismiaji mengatakan, jika ingin diterapkan, student loan itu harus disinergikan dengan cetak biru kebutuhan tenaga kerja pada Revolusi Industri 4.0. Artinya, tidak semua program studi berhak mengajukan pinjaman, melainkan hanya jurusan-jurusan yang sesuai dengan kemajuan industri.

“Saran saya, student loan ini jangan dibuka untuk semua jurusan. Misalnya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang setiap tahun meluluskan lebih dari 20.000 tenaga pendidik, namun tidak semua terserap lapangan kerja. Ini bisa menjadi beban,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama antara dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi. Sehingga, perguruan tinggi menjalankan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Lulusan perguruan tinggi langsung terserap dan dapat segera membayar kredit tersebut.

Sumber: Suara Pembaruan <http://www.beritasatu.com/satu/484142-ketimbang-beri-kredit-pendidikan-lebih-baik-efektifkan-apbn-dan-zakat.html>

Akses Pendidikan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perlu Pengawasan

14 Maret 2018 · 04:00 WIB



KOMPAS/AHMAD ARIF

Kondisi Kampung Waegrahe, Desa Waereman, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Maluku. Akses menuju kampung ini sangat terbatas, menyebabkan minimnya pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS – Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar masih menuai beberapa permasalahan di lapangan, seperti pendistribusian dan pencairan. Perlu ada sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan, agar tujuan program untuk pengentasan angka putus sekolah tersebut dapat terwujud.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari Juli 2017 hingga Februari 2018, setidaknya terdapat 112 aduan terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Aduan tersebut meliputi, tidak ada keterlibatan publik dalam memonitor data KIP (5 aduan), tidak ada data aktual KIP (8 aduan), keterlambatan pencairan KIP (10 aduan), kesulitan pencairan KIP (27 aduan), KIP tidak tepat sasaran (30 aduan), dan distribusi KIP tidak merata (32 aduan).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Selasa (13/3), mengatakan, permasalahan-permasalahan di lapangan menunjukkan optimalisasi program KIP belum berjalan optimal.

“Di lapangan ternyata masih ada keluhan-keluhan yang perlu segera diselesaikan. Beberapa siswa masih belum mendapat akses pendidikan. Harus ada data yang akurat soal pendataan KIP,” ujar Ubaid.

Pendistribusian KIP belum bisa menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain itu, KIP juga belum bisa diakses oleh anak-anak yang tereksklusi. Di beberapa kasus juga dialami soal keterlambatan pencairan.

“Misal daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di beberapa daerah akses sekolah jauh, juga terjadi di Solok Selatan, medannya pegunungan. Kalau pun ada yang dapat akses, tetapi ke banknya susah,” ujar Ubaid.

Berdasarkan data Kemdikbud per 11 Maret 2018, KIP sudah tersalurkan kepada sebanyak 18.248.287 anak usia 6-21 tahun. Penerima mencakup anak dari keluarga tidak mampu yang ada di sekolah dan anak yang tidak sekolah.



NIKOLAUS HARBOWO

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/3).

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman, menuturkan, pencairan dana KIP sudah mencapai 74 persen atau 13.424.149 anak.

Pencairan dana sebesar 26 persen belum terealisasi karena beberapa hal, seperti siswa kesulitan mengaktifasi rekening karena terkendala akses ke bank, dan siswa sengaja tidak mengaktifasi rekening agar uang terkumpul.

“Kalau di usia 21 tahun ke atas uang itu belum diambil juga, uang itu mau tidak mau harus kembali ke negara,” ujar Alpha.

Karena itu, lanjut Alpha, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan

untuk secara aktif memberi tahu kepada siswa dan orangtua agar segera mencairkan KIP. Uang tersebut akan membantu mengentaskan masyarakat miskin, membuka akses pendidikan, dan memastikan anak-anak miskin tidak putus sekolah.

Terkait keluhan kesulitan pencairan dana, Alpha mengatakan sudah memberi kemudahan kepada siswa yang tinggal di daerah 3T untuk mencairkan dana KIP secara kolektif oleh pihak sekolah. Untuk aktivasi rekening, syarat yang diperlukan cukup fotokopi rapot dan surat keterangan dari kepala sekolah.

“Kami mendorong perbankan untuk ikut memudahkan. Sebagaimana pesan mendikbud agar pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan di daerah aktif mendorong percepatan pencairan,” ujarnya.

Alpha menuturkan, Kemdikbud melalui Data Pokok Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dapodikdasmen) akan terus berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kementerian Sosial terkait sinkronisasi data penerima KIP. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan sasaran. (DD18)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/03/14/pelaksanaan-program-indonesia-pintar-perlu-pengawasan/>

Ini 6 Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut Rektor UAD

Senin, 12 Maret 2018 13:09



Rektor UAD Dr. Kasiyarno M.Hum dalam Kuliah Umum Rembuk Guru Desa di Kampus 4 UAD Yogyakarta, Senin(12/3/2018).

Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM - Pada Kuliah Umum Rembuk Guru Muda, Senin (12/03/2018), Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dr. Kasiyarno M.Hum menyebut ada 6 masalah pendidikan di Indonesia.

Data ini berdasarkan hasil penelitian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

“Salah satu masalah utamanya adalah kekerasan di sekolah, baik secara fisik atau pun mental,” papar Kasiyarno kepada peserta, termasuk tribunjogja.com.

Selain kekerasan di sekolah, 5 masalah lainnya adalah program pendidikan 12 tahun yang belum berjalan maksimal, angka putus sekolah masih tinggi, lemahnya pengakuan negara terhadap pendidikan informal dan alternatif, biaya pendidikan yang tinggi, serta tidak imbangnya kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil.

Terkait dengan kasus kekerasan di sekolah, Kasiyarno menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang tertinggi dalam hal tersebut.

“Kekerasan sekolah di Indonesia masuk tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,” ungkap Kasiyarno

Selain 6 masalah tersebut, Kasiyarno juga menyoroti kemampuan dan kompetensi guru yang dianggapnya masih rendah. Klaim ini didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015.

“Kemampuan guru-guru kita masih di bawah rata-rata. Idealnya kompetensi seorang guru bisa mencapai 60%,” ujar Kasiyarno.

Baca: Anggaran Pendidikan Sebesar 400 Trilyun Rupiah Belum Terserap Sepenuhnya

Rektor UAD Kasiyarno menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Rembuk Guru Muda di Kampus 4 UAD, Banguntapan, Bantul.

Selain beliau, hadir pula Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi Ph.D.

Kehadiran Didik untuk menggantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy yang berhalangan hadir. (tribunjogja)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Ini 6 Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut Rektor UAD,

<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/12/ini-6-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-rektor-uad>.

Penulis: Alexander Aprita Editor: has

Rektor UIN: Larangan bercadar untuk cegah radikalisme, fundamentalisme

6 Maret 2018



Universitas Islam Negeri (UIN) sebelumnya dikenal dengan mahasiswa pendukung Islam progresif./BBC indonesia

Empat puluh dua mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga, Yogyakarta pemakai cadar telah dikumpulkan, diminta mencabut cadar dengan kemungkinan dikeluarkan. Rektor Yudian Wahyudi mengatakan para mahasiswi akan diberikan sesi penyuluhan sampai sembilan kali.

“Kita mengumpulkan mahasiswa itu. Jumlahnya sudah ketahuan. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan jurusan asal dan sebagainya. Saya juga sudah, tadi setelah rapat untuk membuat tim konseling.

“Konseling ini nanti terdiri dari dosen yang dari berbagai disiplin keilmuan ... Sampai sembilan kali kalau mereka masih bertahan pada pendiriannya, ya sudah kami minta mereka tidak kampus,” kata Yudian Wahyudi kepada Nuraki Aziz untuk BBC Indonesia.

Langkah yang diambil UIN ini didukung Abdullah Ubaid, kordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) karena itu memang urusan dalam kampus itu sendiri.

“Kalau memang kebijakan internal kampusnya begitu, ya tidak ada salahnya juga. Karena identitas mahasiswa atau identitas negara itu harus jelas. Kalau misalnya hanya yang terlihat matanya saja itu kan tidak jelas.

“Dalam Indonesia malah menjadi aneh. Kalau ada perempuan yang memakai cadar itu malah justru menjadi perhatian publik. Yang harusnya perempuan itu, kalau dalam Islam tidak menjadi

perhatian publik supaya tidak menjadi sumber fitnah,” kata Ubaid dari LSM yang memantau berbagai masalah pendidikan.



Aksi protes menentang Perppu Ormas pelarangan HTI/Reuters

Radikal?

Sebelumnya, terdapat sekitar satu hingga dua mahasiswi yang bercadar di UIN yang dikenal beraliran Islam progresif. Peningkatan jumlahnya menjadi puluhan menunjukkan gejala peningkatan radikalisme.

“Kami melihat gejala itu, kami ingin menyelamatkan mereka, karena mereka ini, jangan sampai ya, tersesat administrasi pendidikan, jadi politik administrasi pendidikan.

“Mungkin soal aqidah nggak ada masalah. Tetapi kalau mereka melakukan ini, kan sudah banyak kasus di tempat-tempat lain, orang-orang yang didoktrin seperti itu akibatnya hanya akan menjadi korban dari gerakan-gerakan radikal itu,” kata Rektor UIN, Yudian Wahyudi.

Beberapa waktu lalu, sejumlah pihak sempat mengibarkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok terlarang yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kampus UIN. Salah satu mantan dosen tidak tetap UIN diduga terlibat Muslim Cyber Army. Mantan dosen bahasa Inggris yang telah ditangkap ini menyebarkan berita bohong tentang mualif yang dibunuh orang.

Tetapi pengamat Islam dan politik, Prof Dr Noorhaidi Hasan mengatakan, berdasarkan penelitian yang didukung UNDP di SMA dan universitas pada 16 provinsi terkait bahan bacaan Islam, kebanyakan mahasiswa tidak menyukai literatur jihad.

“Mahasiswa itu sudah tidak menyukai lagi bacaan-bacaan yang mempropagandakan ide jihadisme. Yang mempropagandakan ideologi Hizbut Tahrir juga semakin lemah. Yang agak besar itu Salafi, tetapi juga masih sedikit. Yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin agak lumayan banyak.

“Tetapi yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa dan mempengaruhi aspirasi mereka itu sebenarnya Islamisme populer. Masih ada cita-cita tentang keagungan Islam dan khususnya penerapan Islam secara menyeluruh, tapi mereka bisa mengkompromikan kecenderungan ini dengan modernitas dan globalisasi,” kata Noorhaidi yang juga direktur sekolah pasca sarjana UIN.

Universitas dengan sekitar 20.000 mahasiswa ini sebelumnya dikenal paling progresif, misalnya jika dibandingkan dengan sebagian mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan kegiatan Islam konservatif, Institut Pertanian Bogor terkait HTI dan Institut Teknologi Bandung dengan Ikhwanul Muslimin.

Dari 42 mahasiswi UIN yang bercadar ini belajar di semua fakultas, yaitu ekonomi, pendidikan, syariah dan hukum, dakwah, sains dan teknologi.



Hak atas foto ROBERTUS PUDYANTO/GETTY IMAGES Image caption Apakah diperlukan hukum yang lebih ketat dalam mengatasi radikalisme?

Hukum lebih ketat?

Rektor UIN Kalijaga Yudian Wahyudi mengatakan sejumlah langkah administratif dilakukan untuk memberikan keamanan kepada berbagai pihak.

“Kami berusaha untuk memberikan keamanan, bukan hanya bagi kampus serta umum, tetapi juga bagi para mahasiswi yang pada umumnya mereka itu bercadar karena mereka belum paham, karena mereka seringkali hanya dikampanye, didoktrin orang lain, sehingga nanti mereka ini terpisah dari masyarakat. Juga dalam kenyamanan administrasi. Kalau seseorang bercadar, kita kan tidak bisa memastikan apakah benar dia si A misalnya,” Yudian Wahyudi menjelaskan.

Jadi apakah diperlukan hukum nasional yang lebih rinci dalam menangani gejala peningkatan radikalisme di Indonesia, mengingat pemakaian cadar sebenarnya tidak melanggar hukum Indonesia tetapi terjadi peningkatan gejala radikalisme, fundamentalisme yang bertentangan

dengan nilai akademik dan NKRI?

“Tidak perlu pemerintah melakukan peraturan yang mewajibkan seperti yang dilakukan UIN. Dikembalikan kepada norma dan nilai-nilai yang berkembang di lembaga pendidikan itu sendiri,” kata Abdullah Ubaid.

“Kalau di sekolah tinggi agama Islam, norma-norma yang dikembangkan semacam itu, ya itu kan merupakan konsensus bersama. Berikanlah otoritas kepada institusi pendidikan untuk bagaimana mereka meng create etika atau nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam dunia akademik,” tambah Ubaid dari JPPI.

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43288075>

BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017

Elise Dwi Ratnasari, CNN Indonesia | Senin, 26/02/2018 10:53 WIB



BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) ungkap pada 2017 justru penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia berasal dari lulusan SMK yakni sebanyak 11,41 persen. (Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah gencar mendorong anak Indonesia untuk menuntaskan pendidikan 12 tahun hingga jenjang sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK digadang-gadang bakal jadi pencetak tenaga kerja yang siap terjun ke lapangan.

Akan tetapi, justru temuan berbeda dipaparkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Belum ada perhatian serius terhadap pendidikan 12 tahun. Ditambah lagi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 justru penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia berasal dari lulusan SMK yakni sebanyak 11,41 persen.

“Lulusan SMK yang digadang-gadang langsung bekerja, malah nganggur. Kami pun berdialog dengan berbagai stakeholder, secara umum ada semacam miss match antara demand side dan supply,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI dalam sebuah forum di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut lagi Ubaid menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Selain itu, lanjutnya, ada kesan akses lebih diutamakan. Pembangunan sekolah gencar di berbagai wilayah tapi tidak diikuti tata kelola yang baik termasuk laboratorium yang tidak up to date. Ubaid memberikan contoh bengkel untuk siswa jurusan otomotif.

“Servis bengkel motor masih utak atik kaburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai,” tambahnya.

Sementara itu, Abdul Waidl, Koordinator Konsorsium Ketenagakerjaan memperingatkan bahwa ke depan, segala sesuatu akan berjalan otomatis nyaris tanpa bantuan tenaga manusia. Ia mengambil contoh ritel milik Jack Ma yang hanya memiliki sedikit pegawai sebab banyak hal digantikan oleh mesin berteknologi canggih. Belum lagi industri manufaktur yang memang menggunakan banyak mesin. Kemudian, apakah tenaga manusia benar-benar tak lagi dibutuhkan?

“Nanti muncul pekerjaan baru, tapi perlu keahlian. The World Economic Forum pada 2016 sempat mencetuskan bahwa nanti 65 persen anak-anak SD kita di masa depan tak akan merasakan pekerjaan yang kita rasakan sekarang,” kata Abdul dalam kesempatan serupa.

Kenyataan pahit ini memang mau tidak mau dihadapi para calon pekerja. Ia menyoroti bukan lagi soal ketimpangan demand dan supply. Namun soal input. Pertama, input siswa SMK. SMK selama ini memiliki passing grade lebih rendah daripada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Abdul pun memberikan contoh perbandingan passing grade antara SMK dan SMA dari hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2016. Di Jakarta, passing grade untuk SMA sebesar 79,11 sedangkan SMK 66,17. Kota lain misalnya Semarang, untuk SMA sebesar 58,63 sedangkan SMK hanya 24,50. Passing grade rendah tak menuntut calon siswa untuk memiliki NEM atau nilai tinggi.

Kedua, input guru. Kini, jumlah SMK di seluruh Indonesia sekitar 13.710 sekolah, tetapi guru produktif hanya 22 persen. Guru produktif ialah guru yang mengajar mata pelajaran jurusan. Sedangkan 78 persen terkait mata pelajaran lain seperti agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan.

Tak hanya jumlah, persoalan guru ini juga terkait kompetensi. Mungkin guru tersebut memang mampu mata pelajaran produktif tetapi kadang latar belakang pendidikan tak sesuai. Kemungkinan lainnya, latar belakang mendukung, tapi sang guru tak pernah terjun ke lapangan, padahal sekolah kejuruan menuntut anak untuk terlibat aktif bukan duduk, mendengarkan dan menulis.

“Input kita kelas dua, guru-guru enggak memenuhi syarat, apa yang kita harapkan?” keluhnya.

Revitalisasi SMK

Meski presentasi angka pengangguran dari lulusan SMK memang yang terbesar, tetapi Saryadi Guyatno, Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri, Kemendikbud mengajak publik untuk beranjak ke angka faktual. Menurutnya, bila dikonversikan ke jumlah riil, pengangguran terbuka dari lulusan SMA justru jumlahnya lebih besar.

Kondisi sekarang, pengangguran terbuka mencapai 7,04 juta orang. Lulusan SMK menduduki presentase 11,41 persen atau sebanyak 1,6 juta. Sedangkan lulusan SMA yang memiliki presentase 8,29 persen bila dikonversikan ke angka riil menjadi 1,9 juta orang.

“Penghitungan presentase ini bedasarkan jumlah lulusan. Yang masuk SMK tidak sebanyak SMA sehingga presentasenya lebih tinggi. Dari angka riil ini, kita melihat bahwa lulusan SMK itu enggak kalah dari SMA,” ujarnya.

Saryadi tidak menampik paparan persoalan-persoalan yang dihadapi SMK kini. SMK perlu revitalisasi, tapi tak bisa sekaligus. Kemendikbud menjalankan revitalisasi secara bertahap mulai dari 219 SMK yang menjadi sasaran program. Program revitalisasi meliputi empat hal yakni, satuan sistem pembelajaran, satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan tenaga

kependidikan.

“Sasarannya untuk mewujudkan keselarasan dunia pendidikan dengan dunia industri,” kata Saryadi.

Ia pun menjelaskan, implementasi revitalisasi ini bisa terwujud misalnya dengan adanya kurikulum yang fleksibel. Fleksibel artinya bisa mengakomodasi perkembangan dunia industri. Harapannya sekolah dapat melakukan kerjasama dengan industri atau mengadakan pelatihan untuk guru. Kerjasama ini memungkinkan untuk diadakannya sertifikasi sehingga siswa yang lulus dapat langsung mengisi slot di perusahaan.

Bakrun, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kesempatan serupa menambahkan bahwa kepala sekolah juga termasuk sasaran revitalisasi. Kepala sekolah SMK diharapkan merupakan orang yang memiliki kegiatan wirausaha atau berjiwa wirausaha. Hal ini untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan para siswa SMK.

“Revitalisasi tuntas sampai 2025. Kami inginnya kalau bisa 2019, tapi kan tidak mungkin,” katanya pada CNNIndonesia.com.

Ia pun berkata bahwa selama ini pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan berbagai usaha, tapi kurang terdengar gaungnya. Ada begitu banyak persoalan tapi seringkali Kemendikbud yang jadi sasaran protes publik.

Perlu komitmen

Sebagai pengamat sekaligus praktisi pendidikan, Jimmy Phaet berpendapat bahwa selain peningkatan jumlah dan kualitas, pengajar juga perlu tahu budaya kelas bawah. Pengajar yang mengenal karakter dan budaya siswanya, diharapkan bakal membuat siswa betah belajar di sekolah.

“Berapa presentase anak SMK dan SMA? Asumsi saya SMK lebih banyak. Hasrat belajar tak begitu jalan karena pengajar kurang memahami budaya anak-anaknya,” jelas Jimmy.

Selain pemahaman budaya siswa, sekolah pun perlu menumbuhkan budaya produktivitas. Namun, Jimmy tak melihat hal ini dijalankan sekolah padahal nanti begitu lulus siswa akan langsung terjun ke dunia kerja, dunia yang berbeda dengan dunia sekolah.

Jimmy pun memberikan catatan terkait ujian di SMK. Model ujian antara SMK dengan SMA harus dibedakan. SMK melihat kompetensi kemampuan sesuai dengan jurusan dengan banyak praktek lapangan, bukan mengerjakan soal di belakang meja.

“Anak-anak SMK ini kebanyakan jurusan mesin sastra. Mereka enggak pernah ketemu mesin, ketemunya di buku-buku, padahal mesin yang di pabrik beda dengan yang di buku. Mana bisa mereka kerja seperti yang kita harapkan, kebiasaan menghafal. Ini sama saja seperti menyamakan model penilaian universitas dan akademi,” tuturnya.

Meski Kemendikbud mengklaim telah melakukan berbagai hal, Jimmy menekankan bahwa perlu ada komitmen demi mengusahakan perbaikan pendidikan tingkat SMK.

“Saya sampai bosan mendengar bahwa kurang publikasi. Ayolah, ini perlu komitmen bersama,” tutupnya. (rah/rah)

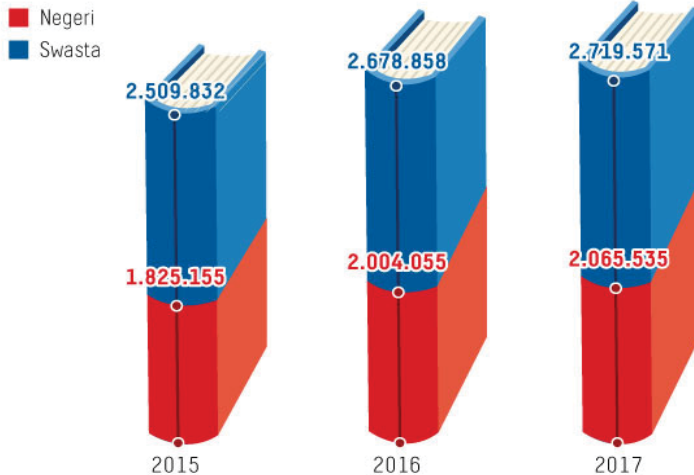
Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180223141505-282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-sepanjang-2017>

Pendidikan Kejuruan Belum Diurus Optimal

23 Februari 2018

Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK

Jumlah Siswa SMK



Jumlah Berdasarkan Bidang Keahlian



Sumber: Data Statistik SMK 2017/2018 PDSP, Dapodik 30 November 2017, Dapodik data cut off 22 Juli 2017

INFOGRAFIK: KARINA

JAKARTA, KOMPAS – Jumlah siswa sekolah menengah kejuruan terus bertambah tiap tahun dan lebih banyak dari siswa sekolah menengah atas. Namun, di tengah tingginya minat siswa memilih SMK, lulusan yang seharusnya siap bekerja malah menjadi bagian dari penganggur terdidik.

Karena itu, komitmen pada revitalisasi SMK yang dicanangkan pemerintah harus dijadikan momentum untuk membuat pendidikan vokasi, khususnya di SMK, mampu menjawab kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil di tingkat menengah yang berkualitas.

Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Bakrun dalam diskusi publik bertajuk "SMK Cetak Pengangguran, Apa yang Salah?" yang digelar Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta, Kamis (22/2), mengatakan, jumlah siswa SMK saat ini lebih banyak dari siswa SMA. Selisihnya 80.000-100.000 orang. Namun, kualitas SMK beragam. Ada yang minim peralatan sehingga siswanya pun minim. Bahkan, ada sekitar 7.000

SMK yang dari sekitar 13.710 yang punya siswa di bawah 200 orang.

Menurut Bakrun, revitalisasi SMK dilakukan dengan memperkuat SMK untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1). Saat ini terdapat 570 SMK dan akan ditingkatkan hingga 10 persen atau sekitar 1.300 SMK. Lalu, satu SMK ini menjadi induk minimal 10 SMK di sekitarnya sehingga mutu SMK terangkat.

"Penyesuaian kurikulum dilakukan. Muatan praktik sudah diubah jadi 60 persen dan teori 40 persen, termasuk pula fleksibilitas kurikulum. Namun, keterhubungan dengan industri terkendala karena belum semua punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia," kata Bakrun.

Penganggur

Kepala Subdirektorat Penyalarsan Kejuruan dan Kerja Sama Industri, Direktorat Pembinaan SMK Saryadi Guyatno mengatakan, data penganggur lulusan SMK pada November 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencapai sekitar 11,4 persen dari sekitar 7 juta penganggur. Hal ini tengah dicari solusinya. Namun, perlu dicermati juga tantangan keberkerjaan SMK tergantung pula pada kesempatan kerja.

Menurut Saryadi, dengan pertumbuhan ekonomi 5,07 persen pada 2017, lapangan kerja masih terbatas. Sementara ada lulusan SMA dan perguruan tinggi yang juga menjadi saingan. Secara geografis, sebaran pekerjaan banyak di Pulau Jawa. Ada pula masalah kompetensi yang belum memadai dan akses informasi kesempatan kerja yang terbatas.

”Ada juga masalah usia. Sekitar 40 persen lulusan SMK yang lulus dalam tahun itu belum 18 tahun sehingga perusahaan tidak berani merekrut sebagai pekerja,” ujar Saryadi.

Koordinator Konsorsium Ketenagakerjaan Abdul Waidl mengatakan, SMK memang mulai diminati. Namun, standar nilai siswa yang masuk ke SMK lebih rendah dari yang masuk ke SMA. Pengembangan vokasi belum didukung keberpihakan anggaran. Pada 2017, untuk penguatan vokasi di Kemdikbud, Kemristek dan Dikti, serta Kementerian Ketenagakerjaan baru sekitar 0,021 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan negara-negara maju yang lebih dari 1 persen.

Anggota Komisi X DPR, Ridwan Hisyam, mengatakan, komitmen merevitalisasi SMK sudah bagus. Tinggal implementasinya harus dilakukan serius. Kebutuhan guru produktif yang menjadi bagian penting untuk memperkuat praktik di SMK harus segera diatasi. Jumlah guru produktif hanya 22 persen.

Pengamat pendidikan Jimmy Phaet mengatakan, dalam pengembangan SMK, pemerintah belum dapat menjawab kebutuhan guru yang mampu menghadirkan budaya mutu dan kerja. Akibatnya, pendidikan di SMK pun belum mampu mewujudkan budaya kerja dalam diri siswa.

(ELN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/02/23/pendidikan-kejuruan-belum-diurus-optimal/>

PENDAFTARAN SISWA BARU

Pungutan Liar Masih Terjadi

DD18 14 Februari 2018 · 03:22 WIB



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengisian PPDB Online – Para orangtua mendampingi anaknya mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online dengan komputer fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 3, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Dalam PPDB tahun ini Jawa Barat menerapkan skor radius jarak rumah dengan sekolah untuk calon siswa SMA dan SMK. Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON) 08-06-2017

JAKARTA, KOMPAS – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis internet masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya pungutan liar. Pemerintah daerah dan pihak sekolah pun diminta untuk konsekuen dalam Pelaksanaan PPDB, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, agar tidak ada jalur lain di luar jalur yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari 400 aduan yang diterima usai pelaksanaan PPDB 2017 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ditemukan sebesar 17 persen terkait pungutan liar. Selain itu, aduan meliputi masalah jalur zonasi, penolakan siswa miskin, surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu, dan titipan pejabat.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, data sebesar 17 persen itu menunjukkan pungutan-pungutan liar masih terjadi di lembaga pendidikan meskipun sistem PPDB sudah berbasis dalam jaringan (online). Dalam laporan, orang tua murid dipungut biaya oleh pihak komite sekolah dalam proses daftar ulang dan dimintai uang untuk pembelian peralatan sekolah, seperti seragam dan alat tulis. Namun demikian, ketika kasus itu ditelusuri,

kata Nailul, baik pihak sekolah maupun panitia PPDB malah mengaku tidak tahu urusan pungutan itu.

“Ironis sekali, panitia PPDB tidak tahu, kepala sekolah juga tidak tahu. Ini jadi tanda tanya besar, berarti tidak ada transparansi antara pihak sekolah dan komite sekolah. Harapan transparansi dengan adanya sistem PPDB online pun tidak terjadi,” ujar Nailul dalam diskusi bersama perkumpulan wali murid di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Ketua Perkumpulan Wali Murid, Heru Narsono, menuturkan, sistem PPDB online masih diliputi suasana kapitalis. Ia menyebut, pada penerimaan tahun lalu, praktik penambahan siswa di luar sistem PPDB masih terjadi. Alhasil, jumlah siswa melebihi kapasitas.

Padahal, sesuai Permendikbud Nomor 17/2017, jenjang pendidikan SD maksimal adalah 24 siswa, SMP sebanyak 33 siswa, SMA sebanyak 36 siswa, dan SMK sebanyak 24 siswa.

“Kalau aturan itu dipatuhi betul, pihak sekolah tidak bisa seenaknya memasukkan anak di luar sistem PPDB online,” ujar Heru.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, seharusnya kehadiran sistem PPDB online bisa meminimalisir adanya jalur lain, seperti pungutan liar. Namun, apabila pungutan liar itu benar terjadi di lapangan, maka orang tua murid berhak langsung melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

“Kalau bukti penyimpangan masalah uang itu benar ada, bisa langsung dilaporkan. Kalau bukti lengkap, pasti akan langsung ditindaklanjuti,” ucap Hamid.

Oleh karena itu, menurut Hamid, semua kembali lagi kepada pemerintah daerah dan sekolah masing-masing dalam upaya pencegahan terjadinya pungutan liar. Ia berharap Permendikbud No 17/2017 dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Kalau sudah menggunakan sistem PPDB online, ya mutlak jangan menggunakan sistem lain. Laksanakan itu secara konsekuen,” ujarnya.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema, mengatakan, pemerintah telah mengatur keberadaan komite sekolah dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam aturan tersebut, kata Doni, setiap kegiatan komite sekolah harus di bawah sepengetahuan kepala sekolah. Komite sekolah juga seharusnya tidak boleh ikut mengintervensi dalam proses seleksi penerimaan siswa baru.

“Jadi kalau ada komite sekolah buat kebijakan tanpa sepengetahuan kepala sekolah itu adalah pungutan liar yang seharusnya langsung dilaporkan ke saber pungli atau kemendikbud,” ujar Doni.

Untuk mengantisipasi hal itu, kata Doni, sistem PPDB harus lebih transparan untuk masyarakat. Masyarakat harus bisa ikut memantau proses penerimaan siswa baru.

“Sekarang masyarakat tidak bisa memantau karena server ditutup lalu muncul permainan dalam. Saat itulah ada anak tidak lolos tetapi tiba-tiba ada siswa masuk. Jadi, masyarakat harus punya akses ikut mengontrol atau mengawasi supaya PPDB berjalan objektif dan adil,” tutur Doni.

Koordinator tim pendidikan Ombudsman Ahmad Sobirin mengatakan, berdasarkan evaluasi PPDB online tahun kemarin, pungutan liar di luar sistem PPDB tidak banyak muncul dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait hal itu, pihaknya sedang berkoordinasi dengan JPPI dalam menindaklanjuti

laporan permasalahan pungutan liar tersebut.

“Di balik layar ada. Kami akan ada investigasi tertutup dengan pihak sekolah-sekolah yang terlibat. Sejauh ini sigarnya baru dugaan,” ujar Sobirin.

Sobirin menambahkan, apabila dugaan itu kelak terbukti, pihaknya akan langsung memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian, pihak sekolah akan diminta untuk memberhentikan praktik tersebut dan mengembalikan uang yang pernah dipungut kepada wali murid.

“Pungutan itu harus jelas dipergunakan dalam koridor dalam pelaksanaan pendidikan dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada ya harus dihentikan,” kata Sobirin.

Karena masih ditemukannya praktik pungutan liar di luar sistem PPDB online, Sobirin menuturkan, pihaknya telah merekomendasikan beberapa hal perbaikan kepada Kemendikbud terkait sistem pelaksanaan sistem PPDB online selanjutnya. Rekomendasi tersebut di antaranya menindak tegas terhadap praktik jual beli kursi dan pungutan liar yang tidak resmi, serta mencegah perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu karena jabatan atau profesinya.

“PPDB itu dari segi sistem didesain untuk tidak bisa direayasa. Tetapi, pihak sekolah juga harus punya upaya pencegahan untuk tidak ada pungutan liar di luar sistem yang sudah baik itu. Kalau tidak ada upaya pencegahan, pasti bolong-bolong itu akan terus ada,” kata Sobirin.

(DD18)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/14/pungutan-liar-masih-terjadi/>

Pemerintah Dinilai Kurang Serius Tangani PAUD



Ilustrasi PAUD (Foto: Istimewa)

Maria Fatima Bona / FER Selasa, 13 Februari 2018 | 15:15 WIB

Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah kurang serius dalam mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Peralpnya, dalam jenjang pra-sekolah dasar (SD) ini penguatan yang harus diutamakan adalah pendidikan karakter yang didukung oleh kualitas guru.

“Tapi apa yang terjadi? Kualitas guru-gurunya lagi-lagi dipertanyakan. PAUD didirikan tapi tidak dipikirkan bagaimana anak-anak itu dapat dididik dengan baik,” kata Ubaid di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Ubaid, pihaknya juga mempertanyakan alokasi dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD (DAK BOP) sebesar Rp 4,1 Triliun. Peralpnya, dana tersebut tidak diimbangi dengan kualitas guru. “Padahal, mutu guru merupakan hal penting yang harus lebih didahulukan daripada yang lain,” jelasnya.

Terkait transparansi dan ketepatan penggunaan dana, Ubaid mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima JPPI, pada tahun-tahun sebelumnya dana tersebut dimainkan oleh beberapa oknum. “Misalnya dana disunat. Jadi, yang diterima pihak pengelola PAUD tidak utuh,” tambahnya.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, terutama yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di luar sekolah.



Ilustrasi PAUD

Sumber: Suara Pembaruan <http://www.beritasatu.com/satu/478303-pemerintah-dinilai-kurang-serius-tangani-paud.html>

Program Indonesia Pintar

Pemanfaatan Dana Dipastikan untuk Pendidikan

8 Januari 2018



Kompas/Tatang Mulyana Sinaga

Siswa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan perahu sebagai transportasi ke sekolah, seperti terlihat, Selasa (5/12/2017). Perahu itu menjemput dan mengantarkan siswa ke sejumlah pulau yang berada di kawasan perbatasan Indonesia itu.

JAKARTA, KOMPAS – Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar untuk memastikan penerima menikmati layanan pendidikan bakal dievaluasi. Pemanfaatan dana yang diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar harus betul-betul untuk keperluan sekolah.

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman, di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan, untuk memastikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) betul-betul digunakan untuk keperluan sekolah, pada ATM KIP (Kartu Indonesia Pintar) direncanakan ada sistem wallet.

Dengan demikian, sebagian uang yang diterima peserta didik penerima dana PIP hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah di koperasi sekolah. Uji coba sistem ini sudah dilakukan di Yogyakarta.

Selain itu, kata Alpha, akan dilihat dan dipastikan bahwa PIP betul-betul berhasil menahan siswa dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah. Adapun anak tidak sekolah harus bisa ke sekolah formal ataupun nonformal.

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(JPPI)

"PIP juga akan dilihat dampaknya pada peningkatan angka partisipasi kasar ataupun murni serta mutu pendidikan," kata Alpha.

Pada tahun 2017, KIP ditargetkan untuk 17,9 juta anak usia 6-21 tahun. Penerima mencakup anak dari keluarga tidak mampu yang ada di sekolah dan anak yang tidak sekolah.

"Mendorong anak tidak sekolah yang umumnya usia SMA untuk kembali ke sekolah formal tidak mudah. Umumnya (mereka) merasa malu. Kita dorong supaya mereka bisa ikut pendidikan nonformal, seperti pendidikan kesetaraan atau pelatihan/kursus," ujar Alpha.

PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan nonformal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Adapun besaran dananya, peserta didik penerima dana PIP untuk tingkat SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450.000 per tahun, tingkat SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750.000 per tahun, dan tingkat SMA/SMK/ MA/Paket C mendapatkan Rp 1 juta per tahun.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, dana yang diberikan dalam bentuk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar. Hal ini untuk mengedukasi sejak dini agar siswa melek finansial.

Pendidikan luar sekolah

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Nailul Faruq, mengatakan, untuk mendorong anak tidak sekolah mendapat pendidikan hingga setara SMA/SMK jangan hanya mengandalkan sekolah formal. Pendidikan di luar sekolah

harus disediakan sebagai alternatif.

"Namun, pendidikan di luar sekolah belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan adanya PIP, pendidikan nonformal yang baik dan berkualitas harus disediakan," kata Nailul. (eln)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/01/08/pemanfaatan-dana-dipastikan-untuk-pendidikan/>